BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

A. Luas dan Batas Wilayah

Kabupaten Tegal dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup Propinsi Djawa Tengah. Pada Tahun 1986 terjadi pemecahan dan perubahan batas antara wilayah Kabupaten Tegal dan Kota Tegal berdasar pada Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal. Luas wilayah Kabupaten Tegal adalah 983,9 Km². secara administratif wilayah Kabupaten Tegal terbagi menjadi 18 kecamatan yang terdiri dari 281 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Luas (Km²)
1	Adiwerna	21	27,0
2	Balapulang	20	86,2
3	Bojong	17	67,7
4	Bumijawa	18	109,2
5	Dukuhturi	18	17,1
6	Dukuhwaru	10	26,3
7	Jatinegara	17	109,5
8	Kedungbanteng	10	82,7
9	Kramat	20	43,9
10	Lebaksiu	15	47,0
11	Margasari	13	100,8
12	Pagerbarang	13	45,8
13	Pangkah	23	37,6
14	Slawi	10	13,8
15	Suradadi	11	58,8
16	Talang	19	18,9
17	Tarub	20	28,0
18	Warureja	12	63,6
	Jumlah	287	983,9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Kecamatan yang mempunyai wilayah yang terluas adalah Kecamatan Bumijawa (109,2 $\rm Km^2$), sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Slawi (13,8 $\rm Km^2$). Kabupaten Tegal berbatasan dengan :

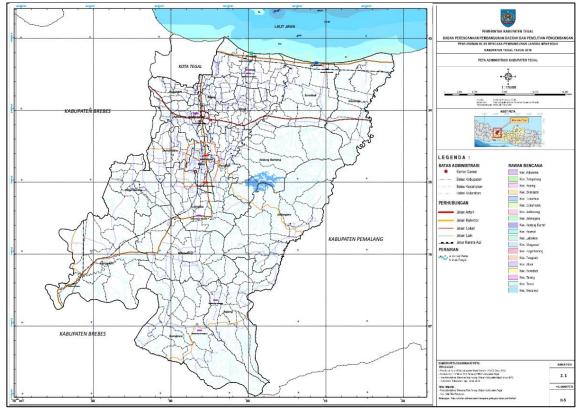
Sebelah utara : Kota Tegal dan Laut JawaSebelah timur : Kabupaten Pemalang

• Sebelah selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas

Sebelah barat : Kabupaten Brebes

B. Letak dan Lokasi Geografis

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan Ibukota Slawi dan terletak di : 108° 57'6" s/d 109° 21'30" BT dan antara 6° 50'41" s/d 7° 15'30" LS.



Gambar 2. 1. Peta Konstelasi Kabupaten Tegal dengan Wilayah Sekitarnya

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Kabupaten Tegal merupakan salah satu kabupaten di wilayah administratif Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota kabupaten berada di Kota Slawi, lokasi strategis pengembangan pembangunan poros Jakarta – Semarang dan poros ke selatan Purwokerto / Cilacap. Wilayah Kabupaten Tegal meliputi pesisir utara bagian barat dan sebagian wilayah berbatasan dengan laut jawa (pantura). Kabupaten Tegal mempunyai letak yang sangat strategis di mana dilintasi oleh beberapa Jalur utama, sebagai berikut:

- Jalan Tol Pejagan Pemalang
- Jalan Arteri Pantura Semarang Tegal Cirebon di sebelah utrara
- Jalan Arteri Primer Tegal Cilacap
- Jalan Arteri Sekunder Ketanggungan Prupuk
- Jalur Kereta Api Jakarta Semarang Surabaya
- Jalur Kereta Api Jakarta Cirebon Yogyakarta
- Jalur Kereta Api Tegal Slawi Purwokerto Yogyakarta Solo

C. Topografi

Kabupaten Tegal secara Topografis terdiri dari 3 (tiga) kategori daerah, yaitu:

Daerah Pantai : Meliputi Kecamatan Kramat, Suradadi dan

Warureja.

Daerah Dataran : Meliputi Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Talang,
 Rendah : Tarub, Pagerbarang, Dukuhwaru, Slawi, Lebaksiu

sebagian wilayah Suradadi, Warureja,

Kedungbanteng dan Pangkah.

Daerah Dataran : Meliputi Kecamatan Jatinegara, Margasari,
 Tinggi Balapulang, Bumijawa, Bojong dan sebagian

Pangkah, Kedungbanteng.

Gambar 2. 2. Peta Topografi Kabupaten Tegal



Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

Berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan air laut, Kabupaten Tegal untuk ketinggian permukaan laut di bagi menjadi 4 (empat) yaitu :

Wilayah Kramat sekitarnya
 Wilayah Slawi sekitarnya
 Wilayah Lebaksiu sekitarnya
 Wilayah Bumijawa sekitarnya
 11 Meter
 42 Meter
 135 Meter
 949 Meter

D. Jenis Tanah dan Geologi

1) Jenis Tanah

Kondisi Berdasarkan analisis data GIS oleh BPDAS Pemali Jratun di Kabupaten Tegal terdapat lima jenis tanah utama yaitu tanah Aluvial, Grumosol, Latosol, Litosol, Podzolik, dan Regosol, serta asosiasinya. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tegal antara lain adalah Alluvial (34,93%), Regosol (24 %), Latosol (23,69 %), Grumosol (9,42 %), Andosol (4,29 %) dan jenis lain-lain (3,67 %). Tanah Aluvial merupakan jenis terluas yang ada di Kabupaten Tegal yaitu seluas 30.698 hektar yang merupakan tanah potensial untuk pengembangan produk pertanian seperti padi, palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Lava
Tangan Kipas
Brading
Meander
Aluvial
Dataran Vulkan
Kaki Kipas
Kepala Kipas
Ke

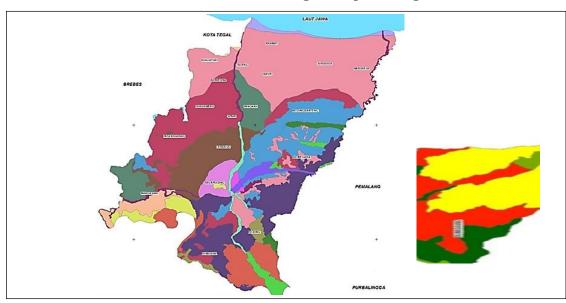
Gambar 2. 3. Peta Jenis Tanah Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

2) Geologi

Kabupaten Tegal berada di kawasan pantai utara Pulau Jawa. Kabupaten Tegal memiliki garis pantai sepanjang 30 km, dengan luas daratan seluas 87.878 Ha, wilayah daratan Kabupaten Tegal memiliki kemiringan dan bentang alam yang bervariasi. Diantaranya berupa wilayah hutan, persawahan, dan ladang yang cukup luas. Begitu pula dari segi topografi, Kabupaten Tegal memiliki tiga kategori daerah yakni daerah pantai di wilayah utara, menerus ke selatan merupakan daerah dataran rendah, hingga daerah dataran tinggi di wilayah kaki Gunung Slamet.

Dilihat dari kondisi geologis yang lain, Kabupaten Tegal memiliki berbagai jenis klasifikasi geologis dimulai dari klasifikasi lava, tangan kipas, braiding, meander, aluvial, dataran struktural, dataran vulkan, kaki kipas, kepala kipas, kipas gabungan, lungur volkan, pegunungan paralel, pegunungan volkan, perbukitan paralel, perbukitan struktural, perbukitan volkan, pesisir pantai, serta teras sungai.



Gambar 2. 4 Peta Geologi Kabupaten Tegal

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

E. Hidrologi

Kabupaten Tegal secara kewilayahan dikelilingi dan dibelah oleh 2 Sungai Besar yaitu Sungai Gung dan Kumisik. Selain itu Kabupaten Tegal juga mempunyai Waduk Cacaban yang mempunyai fungsi water storage di wilayah bagian timur. Secara detail keberadaan dan pembagian DAS dan Sub DAS di wilayah Kabupaten Tegal ditunjukkan dalam tabel.

Tabel 2. 2 Daerah Aliran Sungai (DAS)

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Kecamatan
1	Cacaban	14.599	Jatinegara, Kedungbanteng, Lebaksiu, Pangkah, talang, Tarub
2	Cenang	3.608	Suradadi
3	Gangsa	11.291	Adiwerna, Dukuhturi, Dukuhwaru, Lebaksiu, Slawi, Talang
4	Gung	17.229	Adiwerna, Balapulang, Bojong, Bumijawa, Dukuhturi,
			Jatinegara, Lebaksiu, Pangkah, Slawi, Talang
5	Rambut	13.078	Bojong, Jatinegara, Kedungbanteng, Warureja
6	Semedo	3.064	Suradadi, Warureja
7	Pah	7.909	Kedungbanteng, Kramat, Suradadi, Tarub
8	Pemali	11.079	Balapulang, Bumijawa, Margasari, Pagerbarang
9	Kumisik	12.788	Balapulang, Bumijawa
10	Glagah	2.959	Bumijawa
	Jumlah	97.604	

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

F. Klimatologi

Kabupaten Tegal beriklim tropis, dengan rata-rata curah hujan sepanjang tahun sebesar 140,00 mm. Banyaknya curah hujan bergantung pada kelembaban udara yang tinggi, tetapi tekanan udara rendah dengan kecepatan angin, suhu udara dan lama penyinaran matahari serta penguapan sedang-sedang saja. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebanyak 345 mm dengan Kelembaban 82 %, Tekanan udara 1.008,4 hPa, Kecepatan angin 4 Knots, Suhu udara rata-rata 26,9°C dan Lama penyinaran Matahari 113,4 jam serta Penguapan air sebesar 131,2 mm. Gambaran tentang sebaran wilayah berdasarkan curah hujan dapat dilihat dalam peta sebagai beriut:

Curah Hujan

| 2001 - 2005 mm/th
| 2501 - 3000 mm/th
| 3001 - 3500 mm/th
| Danau
| Sungai

Gambar 2. 5 Peta Sebaran Wilayah Berdasarkan Curah Hujan

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

G. Penggunaan Lahan

Variasi penggunaan lahan di Kabupaten Tegal merupakan salah satu potensi sumber daya lahan. Berdasarkan interpretasi Citra Satelit Resolusi Tinggi Liputan Tahun 2016, Kondisi Penggunaan Lahan di Kabupaten Tegal didominasi oleh pengunaan lahan sawah basah sekitar 41,22 % dari luas wilayah Tegal ini berarti bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor dominan di Kabupaten Tegal, disusul kawasan hutan sekitar 23,61%.

Untuk lahan kering seluas 13.154 Ha komposisinya adalah tegalan, hutan rakyat dan hortikultura. Berdasarkan kondisi eksisting Bangunan permukiman seluas 10.529 Ha dan lahan pekarangan seluas 3.564 Ha di Kabupaten, apabila disandingkan dengan data jumlah penduduk Tahun 2020 sebanyak 1.596.996, dengan demikian secara kepadatan penduduk netto terkategori kepadatan tinggi 1.817 jiwa/km². Kondisi ini membutuhkan lahan yang cukup untuk mengantisipasi pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 3 Penggunaan Lah	an
---------------------------	----

Tataguna	Luas (Ha)
Galian Batu Bata	163
Hortikultura	1.073
Hutan Rakyat	7.247
Industri	334
Kawasan Hutan	23.313
Lahan Kering	4.835
Pantai	65
Pekarangan	3.564
Perikanan	491
Permukiman	10.529
Pertambangan	217
Peternakan	64
Sarana Prasana	3.032
Sawah	40.704
Tubuh Air	3.125
Jumlah	98.756



Sumber: Interpretasi Citra Resolusi Tinggi Tahun 2016

H. Sumber Daya Hutan

1) Status dan Fungsi Kawasan Hutan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 359/Menhut-II/2004 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Luas kawasan Hutan di Kabupaten Tegal adalah 23.313 Ha atau setara dengan 27 % dari wilayah Kabupaten Tegal.

Kabupaten Brakes

Kabupaten Pares

Cagar Alam
Hutan Produksi
Hutan Produksi Hutan Produksi Hutan Produksi Hutan Lindung
Wilayah Kabupaten Tegal

Gambar 2. 6 Peta Sebaran Kawasan Hutan

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 - 2032

Tabel 2. 4 Status dan Fungsi Hutan

No	Status dan Fungsi hutan	Luas (Ha)	%
1	Areal Penggunaan Lain	74.686,25	73,01
2	Hutan Lindung	2.961,41	3,37
3	Hutan Poduksi Tebatas	6.672,40	7,58
4	Hutan Produksi	14.097,34	16,03
5	Cagar Alam	8,60	0,01
	Jumlah	98.426,00	100,00

2) Pengelolaan Hutan

Perum Perhutani Unit I yaitu KPH Pemalang, KPH Balapulang, dan KPH Pekalongan Barat yang sebagian besar kawasannya berada di kawasan Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Bentuk pemanfaatan kawasan hutan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK – HT) dengan komoditas tanamanya jati dan pinus. Selain itu Kabupaten Tegal juga memiliki kawasan Cagar Alam Guci yang saat ini telah berubah statusnya menjadi Taman Wisata Alam (TWA) dan merupakan salah satu objek wisata.

Tabel 2. 5 Pengelolaan Hutan

		Luas Berdasarkan Fungsi (Ha)								
No	КРН	HL	НРТ	HP	CA/TW A/SM	Jumlah				
1	KPH BALAPULANG									
	BH Linggapada	-	399,4	2.732,5	-	3.131,9				
	BH Margasari	-	-	3.737,6		3.737,6				
2	KPH PEMALANG									
	BH Jatinegara	-	2.649,9	5.844,4	6,6	8.500,9				
3	KPH PEKALONGAN E	BARAT								
	BH Bumijawa	2.961,4	3.623,1	1.782,9	2,0	8.369,4				
	Jumlah	2.961,4	6.672,4	14.097,3	8,6	23.739,8				

Sumber: RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032

I. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi Pengembangan wilayah di Kabupaten Tegal mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032, dengan mensinkronkan arah kebijakan pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

a) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi (kegiatan usaha) maupun pemenuhan kebutuhan permukiman. Oleh karena itu, dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal, penetapan kawasan ini dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan potensi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya. Kawasan budidaya yang dikelola pemanfaatan ruangnya terdiri dari: kawasan peruntukan hutan produksi; kawasan peruntukan pertanian; kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; kawasan peruntukan industri; kawasan peruntukan pariwisata; kawasan peruntukan permukiman; kawasan peruntukan lainnya.

1) Kawasan peruntukan hutan produksi.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi hutan produksi terbatas dimana eksploitasinya hanya dapat dengan sistem tebang pilih dan penanaman kembali ataupun hutan rakyat, maksudnya tanah rakyat yang ditanami dengan tanaman seperti halnya tanaman kehutanan namun sudah biasa ditanam rakyat dalam upaya konservasi tanah dan air.

Hutan produksi terbatas terdapat di Kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, dan Kedungbanteng seluas 6.672,4 ha. Hutan produksi tetap terdapat di kecamatan Bumijawa, Bojong, Margasari, Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Kedungbanteng, dan Pangkah seluas 14.097,34 ha.

2) Kawasan peruntukan pertanian.

Kawasan ini adalah kawasan yang dapat diperuntukkan bagi usaha pertanian meliputi: kawasan budidaya tanaman pangan, kawasan budidaya hortikultura, kawasan budidaya perkebunan, kawasan budidaya peternakan, Kawasan budidaya tanaman pangan meliputi: kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering (tanah ladang). Lokasi Kawasan pertanian lahan basah seluas kurang lebih 39.045 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten. Sawah: Kecamatan Warurejo, Lebaksiu, Pagerbarang, Balapulang, Margasari, Dukuhturi, dan Dukuhwaru. Padi Ladang: Kecamatan Kedungbanteng, Bumijawa, Margasari, dan Bojong. Palawija: Kecamatan Suradadi, Kedungbanteng, Pangkah, Lebaksiu, Warurejo, dan Margasari.

3) Kawasan peruntukan perikanan.

Kawasan perikanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi usaha pengembangan perikanan. Berdasarkan tempat pembudidayaan, dibedakan: perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Kawasan Perkembangan Perairan Umum, yaitu perikanan yang diusahakan di waduk, sungai, bendung, rawa dan sebagainya. Kawasan Pengembangan Budidaya Perikanan Kolam Air Tawar, dilaksanakan pada daerah RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 | BAB II - 8

yang mempunyai sumber air tawar dan benih yang mudah didapat. Budidaya ini dapat dilaksanakan pada daerah pegunungan dan dataran rendah. Tujuan Usaha ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kawasan perairan darat agar dapat meningkatkan perekonomian wilayah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wilayah kawasan perikanan berupa kawasan tambak dan kolam seluas 321 Ha yang tersebar di Kecamatan Kedungbanteng, Pangkah, Kramat, Suradadi, Bumijawa, Lebaksiu dan Warureja. Rencana pengembangan perikanan tangkap dilakukan dengan daerah tangkapan antara 0-4 mil dari sepanjang pantai di Daerah di Kecamatan Kramat, Kecamatan Suradadi, Kecamatan Warureja.

4) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi perkembangan, baik wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan. Pengembangan kawasan pertambangan di Kabupaten Tegal masih membutuhkan beberapa tahapan sebelum sampai pada tahapan eksploitasi. Hal tersebut karena masih belum diketahui mengenai kondisi volume kandungan bahan tambang yang ada. Meskipun sudah terindikasikan luasan hamparan tambang yang merata di wilayah kabupaten Tegal. Sedangkan sampai saat sekarang penguasaan dan pengusahaan bahan galian tambang yang ada masih ditangani oleh masyarakat umum awam dengan sistem pengelolaan informal. Lokasi yang sesuai dengan yang ditetapkan Departemen Pertambangan di mana mempunyai potensi bahan tambang yang bernilai tinggi; meliputi Kecamatan Balapulang, Bojong, Bumijawa, Lebaksiu, Slawi. Pertambangan pasir dan batu gamping di Kecamatan Margasari.

5) Kawasan peruntukan industri.

Kawasan peruntukan industri meliputi: industri besar; industri menengah; dan industri kecil dan mikro. Industri besar meliputi: kawasan Industri Margasari di Kecamatan Margasari; kawasan Industri Pantura meliputi: Kecamatan Kramat; Kecamatan Suradadi; dan Kecamatan Warureja.

Sentra kawasan industri berlokasi di Kecamatan Kramat dan Kecamatan Adiwerna, Kecamatan Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, dan Warureja. Kawasan industri ini perlu diperhatikan pengolahan limbah industrinya. Khusus untuk kawasan industri di Kecamatan Kramat (yaitu industri perkayuan dan perikanan), agar diperhatikan kelestarian lingkungan pantai. Luas kawasan peruntukan industri 1.770 hektar.

6) Kawasan peruntukan pariwisata.

Kawasan pariwisata alam meliputi: Pantai Purwahamba Indah di Kecamatan Suradadi. Pada lokasi dilengkapi hotel, restoran & taman rekreasi. Pemandian air panas Guci di Kecamatan Bojong dan Bumijawa merupakan wisata alam di lereng Gunung Slamet dengan hawa yang sejuk dan panorama indah serta adanya sumber air panas alami. Keberadaannya dilengkapi dengan adanya hotel, restoran dan taman wisata; Telaga Putri di Kecamatan Bumijawa; Gua Lawa di Kecamatan Balapulang; Gua Santri di Kecamatan Balapulang; dan Telaga air Cenggini di Kecamatan Balapulang. Sedangkan Kawasan pariwisata budaya meliputi: Makam Amangkurat dan Makam Suroponolawen di Kecamatan Adiwerna; Makam Semedo di Kecamatan Kedungbanteng; dan Makam Syeh Maulana Magribi di Gunung Tanjung di Kecamatan Lebaksiu.

7) Kawasan peruntukan permukiman.

Kawasan peruntukan permukiman adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan, meliputi Kawasan permukiman perdesaan dan kawasan permukiman perkotaan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas sekitar 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten, sedangkan Kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 7.275 hektar tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.

8) Kawasan peruntukan lainnya.

Kawasan peruntukan lainnya berupa kawasan kawasan pertahanan dan keamanan negara yang yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk kepentingan nasional. Kawasan pertahanan dan keamanan negara meliputi

- a. Komando Distrik Militer (Kodim) 0712/ Tegal di Kecamatan Dukuhturi;
- b. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh kecamatan;
- c. Brigade Infanteri (Brigif) 4/ Dewa Ratna di Kecamatan Slawi;
- d. Batalyon Infanteri (Yonif) 407/ Padma Kusuma di Kecamatan Adiwerna;
- e. Kompi A Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur) 4/ Tanpa Kawandya di Kecamatan Slawi; dan
- f. Satuan Radar (Satradar) di Desa Kedungkelor Kecamatan Warureja.

b) Kawasan Lindung

Kawasan Lindung yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tegal terdiri dari Hutan Lindung, Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya, Kawasan Rawan Bencana, Kawasan lindung geologi, Kawasan Lindung Lainnya.

1) Hutan Lindung.

Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun kawasan bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah. Kawasan lindung dikelola oleh negara sangat penting dalam menjaga kualitas air sungai, ketersediaan air sungai, serta pelestarian berbagai flora dan fauna sepanjang Daerah Aliran Sungai termasuk peningkatan produktivitas lahan, terletak di Kecamatan Bumijawa, Kecamatan Bojong, Kecamatan Balapulang, Kecamatan Margasari seluas 2.961,41 ha.

- 2) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya.
- Kawasan yang memberi perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air. Kawasan resapan air adalah daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuiver) yang berguna sebagai penyedia sumber air.
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 549 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 1.766 hektar;
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 319 hektar;
- Kecamatan Lebaksiu dengan luas kurang lebih 806 hektar
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 517 hektar.

3) Kawasan Perlindungan Setempat.

Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai. dengan luas kurang lebih 33.593 hektar tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten. Tujuannya adalah melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai. Lokasi Sempadan Sungai Besar yaitu: Sungai Rambut, Sungai Cenang, Sungai Jimat, Sungai Cacaban, Sungai Gung, Sungai Ketiwon, Sungai Gangsa, Sungai Pemali, Sungai-Sungai Besar lainnya.

Kawasan sempadan pantai adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai dengan luas kurang lebih 226 hektar. Tujuan melindungi pantai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu ekosistem. Pada wilayah Kabupaten Tegal, kawasan yang dimaksud adalah kawasan sekitar Pantai Maribaya (Kecamatan Kramat), Desa Kedungkelor (Kecamatan Warureja), Desa Demangharjo, Suradadi, Purwahamba dan Bojongsana (Kecamatan Suradadi).

Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air dengan luas kurang lebih 265 hektar. Tujuannya adalah untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.

Kawasan sekitar danau/waduk adalah kawasan tertentu, di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terletak di Waduk Cacaban. Tujuannya adalah melindungi waduk/danau dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi danau/waduk. Lokasi berada di sekitar kawasan Waduk Cacaban terutama terdapat di Kecamatan Kedungbanteng dan Jatinegara.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah luasan memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau sebagai kawasan yang mempunyai fungsi lindung atau konservasi adalah sesuai dengan RUTRK untuk masing-masing ibukota kecamatan yang bersangkutan. Dimana proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan di wilayah Daerah adalah paling sedikit 30 % dari luas kawasan perkotaan, yang diisi oleh tanaman baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja di tanam.

Pembagian Ruang Terbuka Hijau (RTH) ini terdiri dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik paling sedikit 20 % dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat 10 %. Distribusi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang wilayah tersebar di seluruh ibukota kecamatan dengan luas kurang lebih 5.714 (lima ribu tujuh ratus empat belas) hektar atau 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kawasan perkotaan

- 4) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya.
- Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Suaka alam untuk melestarikan lingkungan dan melindungi keanekaragaman biota serta ekosistem. Gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pola umumnya. Kawasan suaka alam di Kabupaten Tegal terdiri dari:
- Cagar alam; Kawasan cagar alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan. Lokasi berada di Kecamatan Bumijawa (Cagar Alam Guci) seluas + 2 ha; dan dan Kecamatan Jatinegara (Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara) seluas + 6,6 ha.
- Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya; Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya adalah adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada. Lokasi Berupa Kawasan Konservasi Perairan Karang Jeruk Kecamatan Kramat dengan luas +10,635 ha.
- Pantai berhutan bakau, Kawasan pantai berhutan bakau adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan. Tujuannya Memberikan perlindungan terhadap pantai dan lautan dengan tujuan untuk melestarikan hutan bakau sebagai pembentuk ekosistem hutan bakau dan tempat berkembang biaknya berbagai biota laut, pelindung pantai dari pengikisan air laut serta penunjang usaha budidaya lainnya. Selama itu juga dapat melindungi kawasan daratan disekitarnya dan bahaya rob dan pengikisan pantai. Pantai berhutan bakau berlokasi di Kecamatan Warureja.
- Cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan diperuntukan bagi kegiatan yang bertujuan untuk melindungi atau melestarikan budaya dan kegiatan pengembangan ilmu pengatahuan. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan adalah kawasan yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dapat berupa peninggalan bersejarah yang berguna bagi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan.
- 5) Kawasan Lindung Lainnya.

Kawasan lindung lainnya berupa Kawasan lindung dilihat fisiografis seperti hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat adalah kawasan yang sepenuhnya diperuntukan bagi konservasi hidrologi, yaitu mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi serta memelihara keawetan kesuburan tanah. dengan luas kurang lebih 1.389 hektar meliputi:

- Kecamatan Bumijawa dengan luas kurang lebih 852 hektar;
- Kecamatan Bojong dengan luas kurang lebih 53 hektar;
- Kecamatan Balapulang dengan luas kurang lebih 91 hektar;
- Kecamatan Jatinegara dengan luas kurang lebih 113 hektar;
- Kecamatan Pangkah dengan luas kurang lebih 229 hektar; dan
- Kecamatan Kedungbanteng dengan luas kurang lebih 249 hektar.

Pelestarian kawasan lindung di luar kawasan hutan berperan dalam memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir. Upaya pengelolaan kawasan sama dengan upaya pengelolaan kawasan hutan lindung. Tujuannya Memberikan ruangan yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah resapan air tanah dan penanggulangan banjir.

J. Kondisi Demografi

a) Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi. Dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.



Gambar 2. 7. Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang **artinya** terdapat **103** laki-laki untuk setiap **100** perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020.

		1	ı	1
Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Margasari	55.147	54.261	109.408	101,6
Bumijawa	49.775	46.911	96.686	106,1
Bojong	37.277	36.116	73.393	103,2
Balapulang	46.750	45.940	92.690	101,8
Pagerbarang	31.269	30.901	62.170	101,2
Lebaksiu	46.750	47.075	93.825	99,3
Jatinegara	30.715	29.295	60.010	104,8
Kedungbanteng	22.714	22.082	44.796	102,9

Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Beradasarkan Sex Rasio

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Total	Sex Ratio
Pangkah	57.995	56.211	114.166	103,1
Slawi	39.571	39.312	78.883	100,7
Dukuhwaru	34.527	33.822	68.349	102,1
Adiwerna	66.422	63.802	130.224	104,1
Dukuhturi	51.104	48.784	99.888	104,8
Talang	54.774	52.374	107.148	104,6
Tarub	43.477	42.455	85.932	102,4
Kramat	59.891	58.916	118.807	101,7
Suradadi	47.460	45.741	93.201	103,8
Warureja	34.306	33.114	67.420	103,6
Tahun 2020	809.884	787.112	1.596.996	102,9
Tahun 2019	715.887	724.811	1.440.698	98,77
Tahun 2018	714.305	722.920	1.437.225	98,81
Tahun 2017	712.511	721.004	1.433.515	99,00
Tahun 2016	710.513	718.873	1.429.386	98,84

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

b) Kepadatan dan Persebaran Penduduk

Persebaran kepadatan penduduk bruto cenderung terpusat di utara dan barat Kabupaten Tegal. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Talang dengan kepadatan sebesar 5.570 jiwa/km2, diikuti oleh Kecamatan Slawi dan Dukuhwaru. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Kedungbanteng sebesar 462 jiwa/km2 karena luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun. Adanya perbedaan kepadatan tiap kecamatan tentu berpengaruh terhadap pembangunan wilayah seperti infrastruktur tiap kecamatan.

Peta Kepa atan Bruto

Gregoria Andre (1956 - 1939 - Andre)

John Str. - 1944 (Andre)

Gregoria Registros - 4800 andre)

Gregoria Registros - 4800 andre)

Gregoria Registros - 4800 andre)

Dentaria

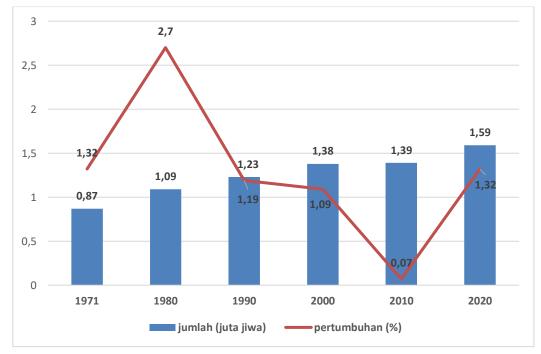
Gambar 2. 8. Peta Sebaran Kepadatan Penduduk

Sumber: Selayang Pandang Kabupaten Tegal, 2021

Dengan perbedaan tersebut akan menimbulkan perbedaan tingkat pelayanan di setiap kecamatan. Oleh karena itu untuk kecamatan dengan kepadatan terendah perlu diperhatikan lagi agar tidak ada kesenjangan dalam pembangunan nantinya. Untuk melihat kepadatan penduduk secara riil terkategori kepadatan tinggi 139 jiwa/Ha (13.580 jiwa/Km²).

c) Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berupa peningkatan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk positif) atau juga penurunan jumlah penduduk (nilai laju pertumbuhan penduduk negatif). Laju pertumbuhan penduduk akan berpengaruh pada proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Tegal beberapa tahun yang akan datang. Selain itu, pertumbuhan penduduk juga memengaruhi berbagai potensi dan masalah yang ada di Kabupaten Tegal baik berupa ketersediaan lapangan pekerjaan dan sumber daya tenaga kerja, sarana dan prasarana, kepadatan penduduk, dan lain-lain. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal dari tahun 1971-2020.



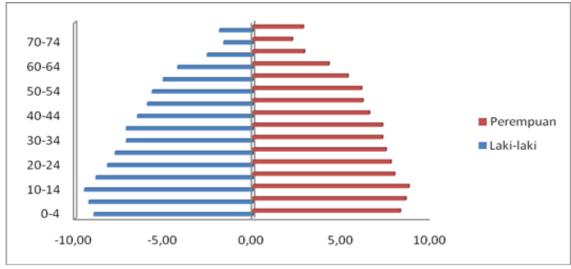
Gambar 2. 9 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 1971-2020

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal cenderung linear dan meningkat dari tahun ke . Meskipun jumlah penduduk Kabupaten Tegal selalu meningkat dari tahun ke tahun, namun berdasarkan grafik tersebut dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Tegal cenderung menurun, tetapi berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2020 pertumbuhan penduduk Kabupaten Tegal naik hingga 10,85% dari data tahun 2019.

d) Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Total jumlah penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 adalah 1.596.996 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 809.884 jiwa dan perempuan 787.112 jiwa. *Sex ratio* Kabupaten Tegal adalah 102,89 yang **artinya** terdapat **103** laki-laki untuk setiap 100 perempuan di Kabupaten Tegal pada 2020. Rincian jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan jenis kelamin tahun 2015-2019 tersebut dapat dilihat pada Tabel.



Gambar 2. 10 Piramida Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan gambar piramida penduduk Kabupaten Tegal diketahui bahwa komposisi penduduk didominasi oleh usia produktif usia 15-59 tahun. Piramida tersebut merupakan piramida penduduk muda (*expansive*) yang menggambarkan tingkat kelahirannya tinggi sementara tingkat kematiannya rendah sehingga banyaknya usia produktif pada tahun tersebut, yang berarti Kabupaten Tegal mengalami *bonus demografi*. Namun pada penduduk usia 10-29 mengalami penurunan, dimana penurunan tersebut mengindikasikan bahwa adanya migrasi keluar Kabupaten Tegal. Jumlah kelahiran (fertilitas) di tahun tertentu akan berpengaruh pada demografi Kabupaten Tegal, sehingga penduduk usia produktif di Kabupaten Tegal semakin banyak. Akan tetapi pertambahan usia produktif harus diiringi dengan peningkatan kualitas SDM agar seimbang. Namun Angka kematian kasar di Kabupaten Tegal rata-rata dibawah angka 1 berarti kematian yang terjadi masih terbilang sedikit. Hal tersebut terlihat sangat jelas pada piramida penduduk Kabupaten Tegal.

Piramida penduduk Kabupaten Tegal adalah bentuk piramida yang termasuk ke dalam piramida ekspansif atau piramida penduduk muda. Piramida ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Bentuk piramida secara keseluruhan yang menyerupai kerucut;
- 2) Jumlah penduduk usia muda relatif banyak dan penduduk usia tua jauh lebih sedikit:
- 3) Menunjukkan angka kelahiran yang lebih tinggi dibandingkan angka kematian (khususnya untuk penduduk berusia 0-4 tahun dan penduduk usia tua);
- 4) Piramida penduduk jenis ini umumnya merupakan piramida penduduk di daerah-daerah berkembang.

Piramida penduduk tersebut dengan jelas menggambarkan proporsi jumlah penduduk usia muda dan usia produktif di Kabupaten Tegal jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tua. Proporsi penduduk ini juga memengaruhi angka rasio ketergantungan yang ada di Kabupaten Tegal, dimana penduduk usia tua yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif sangat sedikit, tetapi penduduk usia produktif harus menanggung penduduk usia muda yang cukup banyak.

e) Penduduk Menurut Kelompok Umur

Secara umum, wilayah yang kepadatan penduduknya relatif lebih tinggi berada pada kawasan perkotaan, terutama kawasan yang mengikuti jalurregional, kawasan kota Slawi, dan kawasan perbatasan dengan Kota Tegal. Hal ini terjadi karena kawasan-kawasan tersebut merupakan pusat aktivitasekonomi (yang otomatis juga memiliki kualitas layanan sarana dan prasaranayang relatif baik) sehingga menarik orang untuk datang dan tinggal. Jika dilihat dari komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka jumlahpenduduk kelompok umur produktif (15-64 tahun) mencapai 1.113.809 orang, jumlah non produktif, yaitu penduduk kelompok umur muda (0-14 tahun)dan penduduk kelompok umur tua (65 tahun keatas) mencapai 438.430.

Darihal tersebut di atas, dapat diketahui angka beban ketergantungan (dependency ratio) mencapai 39,36 artinya dalam setiap 100 penduduk terdapat 40 penduduk tidak produktif, sebagaimana tersaji pada tabel.

2018 2019 2020 Usia 2016 2017 0 - 4127.359 125.515 123.783 122.171 135.079 5 – 9 130.038 129.132 128.043 126.880 129.254 10 - 14 131.447 130.677 132.020 131.111 130.294 15 - 19122.982 121.999 120.599 119.260 124.067 20 - 24 112.441 114.588 115.193 135.207 113.627 25 - 29107.145 108.147 109.527 111.032 133.429 30 - 34 106.826 105.112 103.541 102.491 134.429 35 – 39 105.616 104.683 103.564 102.348 130.961 40 - 44 93.783 93.757 93.559 93.835 123.640 45 - 49 87.240 87.274 87.140 86.919 108.486 50 - 5482.826 84.609 85.240 90.117 83.794 55 - 5970.870 72.930 74.713 76.313 73.350 60 - 64 55.728 58.461 61.180 63.717 60.123 94.460 65 + 97.611 101.070 104.898 43.803 1.429.386 1.433.515 1.437.225 1.440.698 1.596.996 Jumlah

Tabel 2. 8 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Sumber : Kabupaten Tegal Dalam Angka, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan secara rerata selalu di atas 5%, tetapi pada tahun 2020 mengalami kontraksi. menjadi -1,46. Pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal.

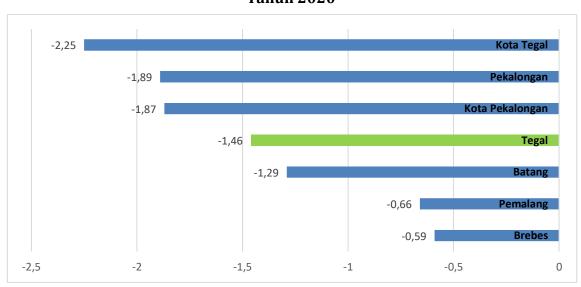
5,92
5,27_{5,02}
5,38_{5,27_{5,07}}
5,51_{5,32_{5,17}}
5,58_{5,41_{5,02}}

2016
2017
2018
2019
2020
-1,46
-2,07
-2,65

Gambar 2. 11. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data Tahun 2020, Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Tegal sebesar -1,46% menduduki peringkat keenam dari 4 (empat) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah di Kota Tegal (-2,25%) sedangkan Pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (-0,59%).



Gambar 2. 12. Pertumbuhan Ekonomi se-Eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Sepuluh kategori lapangan usaha mengalami kontraksi dan hanya tujuh kategori yang mengalami pertumbuhan positif. Transportasi dan Pergudangan merupakan lapangan usaha yang mengalami kontraksi terdalam yaitu sebesar -29,97 persen. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), Study From Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha, utamanya Transportasi dan Pergudangan

yang bergantung pada mobilitas masyarakat. Lapangan usaha lain yang juga mengalami kontraksi cukup dalam meliputi Jasa Lainnya yang menurun sebesar -5,02 persen serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang terkontraksi sebesar -5,45 persen. Sementara lapangan usaha yang mampu mencatatkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2020 adalah Informasi dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 14,96 persen seiring meningkatnya kebutuhan pembelajaran *online* serta penyelesaian pekerjaan dan pertemuan secara virtual.

Tabel 2. 9 Laju Pertumbuhan Riil PDRB Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2016-2020

	Lapangan Usaha/Industry	2016	2017	2018	2019	2020
Α	Pertanian, Kehutanan, dan	3,06	1.35	1.44	-0,69	2,18
	Perikanan					
В	Pertambangan dan Penggalian	6,75	6.50	5.19	3,55	2,05
С	Industri Pengolahan	7,27	6.95	6.66	6,44	-0,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,65	5.65	4.78	5,74	0,77
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan	2.35	4.09	4.30	5,74	2,40
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang					
F	Konstruksi	5.35	7.22	5.85	3,40	-3,02
G	Perdagangan Besar dan	5.19	3.80	4.43	5,21	-4,20
	Eceran; Reparasi Mobil dan					
	Sepeda Motor					
Н	Transportasi dan Pergudangan	6.85	6.09	6.50	6,81	-29,97
I	Penyediaan Akomodasi dan	6.10	6.33	6.74	7,13	-5,45
	Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	7.60	7.50	9.51	8,68	14,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/	6.86	5.09	4.24	10,70	2,32
L	Real Estat	7.83	4.50	4.07	3,90	-0,73
M	Jasa Perusahaan	8.43	6.50	6.14	4,99	-5,33
N	Administrasi Pemerintahan,	2.96	3.25	3.46	8,44	-0,91
	Pertahanan dan Jaminan Sosial					
	Wajib					
0	Jasa Pendidikan	7.08	6.57	8.40	3,61	-0,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan	6.93	6.10	8.78	6,02	3,02
	Sosial					
Q	Jasa lainnya	4.37	5.43	7.70	6,74	-5,02
	ık Domestik Regional Bruto/	5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46
Gross	Regional Domestic Product					

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

B. PDRB

PDRB Kabupaten Tegal tahun 2020 berdasarkan harga berlaku mencapai Rp.35.319,84 miliar dan PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2020 mencapai Rp.24.502,62 miliar. Struktur ekonomi Kabupaten Tegal didominasi oleh tiga sektor utama yaitu: sektor pertanian, sektor industri dan sektor perdagangan. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor riil yang sangat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Tegal, dan bisa dilihat pengaruhnya pada penggunaan lahan serta penduduk berdasar mata pencaharian.

Sektor industri pengolahan berkembang dengan adanya klaster logam di Kecamatan Talang dan Adiwerna utamanya meliputi komponen kapal, komponen alat mesin pertanian, komponen otomotif, komponen alat berat, dan peralatan rumah tangga. Produk IKM Kabupaten Tegal telah banyak dipakai di banyak daerah di Indonesia, bahkan di beberapa negara tetangga. Industri pengolahan makanan juga berkembang dengan baik di Kabupaten Tegal utamanya minuman dan makanan kecil khas Kabupaten Tegal diantaranya adalah teh, tahu aci, pilus, anthor, olos, dan kacang bogares. Kuliner lain selain makanan kecil adalah sate kambing muda yang terkenal gurih dan lezat dan teh poci yang tidak dapat dipisahkan dari kedua kuliner khas Tegal di atas dan sangat mendukung perkembangan industri berbasis makanan ini. Industri konfeksi juga menyumbang kontribusi yang cukup besarutamanya industri batik tegalan sebagai identitas budaya khas Kabupaten Tegal. Upaya yang telah dilakukan diantaranya adalah peningkatan kualitas batik, introduksi pewarna alami, pelatihan manajemen, promosi melalui pameran, dan kebijakan untuk mengenakan batik tegalan sebagai pakaian resmi daerah yang dikenakan setiap hari Kamis.

Secara umum, industri pengolahan merupakan kontributor yang signifikan karena selain sumbangsihnya yang besar pada perekonomian Kabupaten Tegal, sifat industrinya adalah padat karya sehingga dapat memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat. Selain itu, kontribusinya relatif stabil –hampir mencapai 30% dari total perekonomian wilayah - serta tren pertumbuhannya juga cenderung meningkat selama lima tahun terakhir. Sebagai sektor ekonomi yang memiliki potensi bagus serta *backward* dan *forward linkage* yang kuat, sudah seharusnya sektor industri pengolahan dijadikan prioritas pembangunan. Perkembangan yang terjadi pada sektor ini akan menarik sektor ekstraktif untuk maju dan mendorong sektor tersier untuk berkembang.

Kontribusi sektor perdagangan juga sangat signifikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *outlet* penjualan di sepanjang jalur regional yang ada. Berkembangnya sektor ini dilatarbelakangi dengan berkembangnya sektor lain, mengingat perkembangan perdagangan merupakan muara dari sistem produksi. Kawasan pusat ekonomi di Kabupaten Tegal adalah Kecamatan Adiwerna dan Slawi. Pusat-pusat perdagangan muncul dengan pesat serta membentuk satu koridor ekonomi yang utuh. Hampir semua titik penjualan hasil produksi di Kabupaten Tegal berada di area Adiwerna dan Slawi.

Sektor perdagangan juga mengalami tren yang menaik dari tahun ke tahun, serta kontribusinya juga mengalami peningkatan. Selain karena lokasi Kabupaten Tegal yang relatif baik, perkembangan sektor ini dipengaruhi perkembangan kawasan perkotaan kecamatan, dan tumbuhnya sektor industri pengolahan. Peningkatan aktifitas sektor perdagangan dan industri memberi pengaruh terhadap ketahanan perekonomian daerah. Perkembangan kawasan perkotaan di kecamatan juga memiliki pengaruh yang signifikan dimana perkembangan fisik dan ekonomi tidak lagi terpusat pada kawasan Slawi-Adiwerna, tetapi juga pada kawasan perkotaan kecamatan, yang berfungsi sebagai pusat pelayanan lokal untuk kawasan sekitarnya. Selain itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan yang bagus akan secara langsung mendorong perkembangan sektor perdagangan. Setiap barang yang diproduksi pasti akan dijual, dan setiap penjualan akan meningkatkan pertumbuhan sektor perdagangan.

Sementara, kontribusi sektor pertanian juga relatif besar meskipun tidak terlalu signifikan. Meskipun demikian, sektor ini tetap harus menjadi perhatian karena merupakan sektor yang sangat strategis. Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Tegal sangat bergantung pada performa sektor pertanian. Selain itu, jumlah masyarakat yang bekerja pada sektor ini sangat besar dan merupakan kontributor terbesar pada jenis pekerjaan yang ditekuni masyarakat Kabupaten Tegal. Sayangnya, perkembangan sektor pertanian cenderung mengalami penurunan. Hal ini karena fokus usaha di sektor ini masih berkutat pada cara ekstraktif. Cara ini sangat bergantung pada kondisi alam, di mana ketika hasil yang didapat berkualitas bagus maka sektor pertanian akan tumbuh. Sebaliknya, jika hasil yang didapat berkualitas kurang baik, maka sektor pertanian akan cenderung turun.

Di samping itu, luas lahan pertanian yang semakin berkurang (termasuk infrastruktur pendukungnya) juga ikut mendorong turunnya kontribusi sektor pertanian. Kedua hal tersebut menjadikan sektor pertanian hanya menghasilkan nilai tambah yang kecil dalam perekonomian. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya industri pengolahan di Kabupaten Tegal yang berbasis pada produk pertanian yang dihasilkan dari daerah sendiri. Industri pengolahan makanan yang memiliki kontribusi besar yaitu industri teh, mengambil bahan baku bukan dari Kabupaten Tegal. Industri pengolahan makanan kecil juga kebanyakan berbahan dasar terigu yang merupakan bahan impor. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Tegal perlu mendorong industrialisasi pertanian yang berbasis produk pertanian di Kabupaten Tegal. Jika hal ini dapat dilakukan dengan baik, maka sektor industri akan berkembang, dan sektor perdagangan juga akan ikut terdorong.

Tabel 2. 10 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016-2020 atas Dasar Harga Berlaku (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017	2017		2018			2020	
NU	Sektor	Nilai	%								
Α	Pertanian, Kehutanan, dan	4.097,19	14,62	4.191,18	13,79	4.435,64	13,29	4.495,44	12,76	4.675,15	13,24
	Perikanan										
В	Pertambangan dan Penggalian	1.253,01	4,47	1.365,81	4,50	1.451,67	4,54	1.521,87	4,32	1.561,87	4,42
С	Industri Pengolahan	9.604,95	34,27	10.504,77	34,91	11.241,13	35,35	12.189,63	34,60	12.454,64	35,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	17,34	0,06	19,38	0,06	21,02	0,06	22,36	0,06	22,24	0,06
E	Pengadaan Air, Pengelolaan	10,24	0,37	10,79	0,36	11,32	0,03	11,78	0,03	12,25	0,03
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang										
F	Konstruksi	2.071,86	7,56	2.272,53	7,48	2.524,33	7,60	2.740,43	7,78	2.677,42	7,58
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	4.276,01	15,26	4.573,69	15,12	4.966,94	14,94	5.449,56	15,47	5.274,29	14,93
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor										
Н	Transportasi dan Pergudangan	735,05	2,62	820,72	2,70	901,58	2,72	993,90	2,82	718,03	2,03
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.194,15	4,27	1.288,91	4,28	1.426,15	4,24	1.567,01	4,45	1.496,20	4,24
J	Informasi dan Komunikasi	708,87	2,53	811,45	2,60	935,79	2,61	1.046,92	2,97	1.204,87	3,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	643,37	2,30	700,35	2,29	752,38	2,27	793,39	2,25	817,74	2,32
L	Real Estat	452,38	1,61	485,88	1,60	530,85	1,62	562,97	1,60	560,24	1,59
M	Jasa Perusahaan	114,79	0,41	126,29	0,42	137,50	0,43	153,32	0,44	147,50	0,42
N	Administrasi Pemerintahan,	618,45	2,21	659,25	2,19	695,06	2,10	731,14	2,08	732,71	2,07
	Pertahanan dan Jaminan Sosial										
	Wajib										
0	Jasa Pendidikan	1.424,10	5,08	1.565,27	5,18	1.736,45	5,34	1.888,35	5,36	1.915,90	5,42
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	215,36	0,77	236,31	0,77	259,42	0,78	282,37	0,80	297,55	0,84
Q	Jasa lainnya	586,51	2,09	645,95	2,07	712,60	2,07	781,25	2,22	751,23	2,13
	Total	28.025,64	100	30.278,51	100	32.769,83	100	35.231,69	100	35.318,84	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

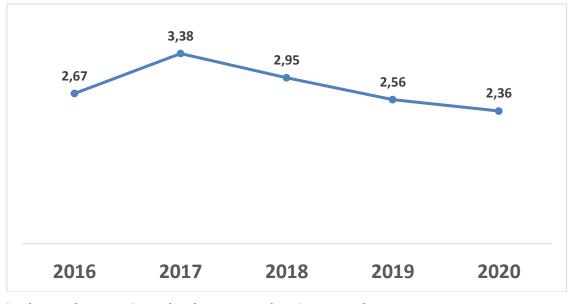
Tabel 2. 11 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016- 2020 atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2016		2017	2017		2018			2020	
NO		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
Α	Pertanian, Kehutanan, dan	2.919,35		2.958,75		3.032,39		3.011,43		3.077,10	12,56
	Perikanan		13,78		13,25		12,87		12,11		
В	Pertambangan dan Penggalian	848,47	4,01	903,63	4,05	950,49	4,04	1004,34	4,04	1.004,34	4,10
С	Industri Pengolahan	6.782,53	32,02	7.221,20	32,35	7.502,88	31,86	7.985,86	32,11	7.949,32	32,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	15,68	0,07	16,56	0,07	17,35	0,07	18,35	0,07	18,49	0,08
Е	Pengadaan Air, Pengelolaan	9,51		9,90		10,33		10,68		10,94	0,04
	Sampah, Limbah dan Daur Ulang		0,04		0,04		0,04		0,04		
2	Konstruksi	1.648,47		1.767,54		1.882,51		1.980,60		1.920,79	7,84
F			7,78		7,92		7,99		7,96		
G	Perdagangan Besar dan Eceran;	3.648,22	4 = 00	3.796,30	45.04	4.033,06	4 = 40	4.307,73	4=00	4.126,59	16,84
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor		17,22		17,01		17,12		17,32		
Н	Transportasi dan Pergudangan	640,96	3,03	680,00	3,05	724,91	3,08	776,58	3,12	543,84	2,22
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan	962,87	4,55	1.023,82	4,59	1.117,85	4,75	1.214,94	4,89	1.148,76	4,69
J	Informasi dan Komunikasi	745,34	3,52	821,24	3,68	947,42	4,02	1.048,77	4,22	1.205,67	4,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,38	2,23	491,85	2,20	509,33	2,16	529,18	2,13	541,46	2,21
L	Real Estat	393,99	1,86	411,72	1,84	438,50	1,86	460,39	1,85	457,04	1,87
M	Jasa Perusahaan	91,05	0,43	96,97	0,43	102,92	0,44	111,61	0,45	105,66	0,43
N	Administrasi Pemerintahan,	450,07	2,12	459,70	2,06	475,79	2,02	492,99	1,98	488,49	1,99
	Pertahanan dan Jaminan Sosial				•						
	Wajib										
0	JasaPendidikan	911,28	4,30	964,63	4,32	1.044,73	4,44	1.107,66	4,45	1.102,98	4,50
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	166,75	0,79	180,42	0,81	195,46	0,83	208,64	0,84	214,95	0,88
Q	Jasa lainnya	477,00	2,25	517,89	2,32	566,63	2,41	617,14	2,48	586,18	2,38
	Total	21.182,92	100	22.322,10	100	23.552,55	100	24.866,73	100	24.502,62	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

C. Laju Inflasi

Selama tahun 2020 laju inflasi yang terjadi di Kota Slawi secara umum mengikuti hasil penghitungan angka Inflasi sister city yaitu Kota Tegal sebagai salah Kota yang ikut dalam penghitungan Standar Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi Kota Tegal Tahun 2020 adalah sebesar 2,36 persen. Kenaikan indeks ini lebih didorong oleh kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan yang mengalami inflasi sebesar 5,56 persen dan memberikan andil inflasi sebesar 0,93 persen. Berikutnya kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang mengalami inflasi sebesar 3,25 persen dan memberikan andil inflasi 0,73 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar; yang pada tahun 2018 memberikan andil inflasi terbesar, selama tahun kalender 2019 mengalami inflasi sebesar 0,86 persen dan memberikan andil inflasi yang cukup besar, yakni 0,26 persen. Kelompok yang lain, yakni kelompok sandang memberikan andil inflasi sebesara 0,21 persen; kelompok Transport, Komunikasi, dan Jasa Keuangan 0,14 persen; kelompok Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga 0,13 persen; dan terakhir kelompok kesehatan 0,12 persen.



Gambar 2. 13. Perkembangan Inflasi

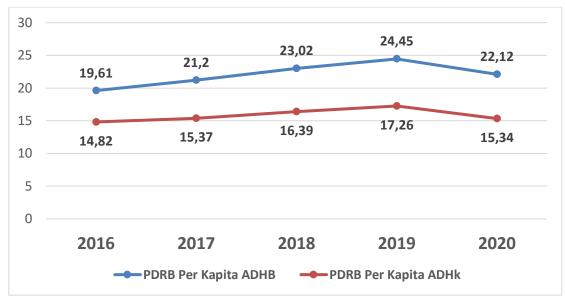
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal; BPS Kota Tegal, 2021

Kenaikan indeks pada kelompok Bahan Makanan dikarenakan kenaikan indeks pada sub kelompok Bumbu-Bumbuan yang mengalami inflasi sebesar 42,88 persen; sub kelompok Sayur-sayuran sebesar 13,21 persen; dan sub kelompok Buah-buahan sebesar 7,84 persen. Sedangkan sub kelompok lainnya mengalami inflasi dibawah 5 persen, bahkan sub kelompok daging dan hasil-hasilnya mengalami deflasi sebesar 0,18 persen; yang utamanya disebabkan penurunan harga daging ayam ras. Secara keseluruhan, sub kelompok yang mengalami penurunan indeks cukup besar yakni sub kelompok Bahan Bakar, Penerangan dan Air; yang turun sebesar 0,34 persen; dimana hal tersebut utamanya dikarenakan penurunan harga bensin dan tarip listrik.

D. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya PDRB tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Tegal atas dasar harga berlaku sejak tahun 2016 hingga 2019 mengalami kenaikan. Pandemi covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi kondisi perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten Tegal, sehingga PBRB per kapita Tahun 2020 turun. Pada tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 24,45 juta rupiah. Segala bentuk kebijakan pemerintah untuk mengurangi penyebaran covid-19 selama tahun 2020 mulai dari Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM), Work From Home (bekerja dari rumah), StudyFrom Home (sekolah dari rumah), pelarangan mudik, dan pembatasan transportasi selama perayaan hari besar menekan kinerja seluruh lapangan usaha,utamanya Transportasi dan Pergudangan yang bergantung pada mobilitas masyarakat.



Gambar 2. 14. PDRB per kapita ADHB dan ADHK Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

E. Indeks Gini

Ukuran untuk melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini Kabupaten Tegal menunjukan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Data terakhir yang tersedia adalah Indeks Gini Kabupaten Tegal tahun 2014 - 2018 sebagaimana tersaji dalam gambar grafik indeks gini.

0.41 0,41 0,4 0,391 0.384 0,357 0,388 0,382 0.357 0,365 0,33 0,33 0,324 0,311 0,293 2014 2015 2016 2017 2018 Kab. Tegal Prov. Jateng

→Nasional

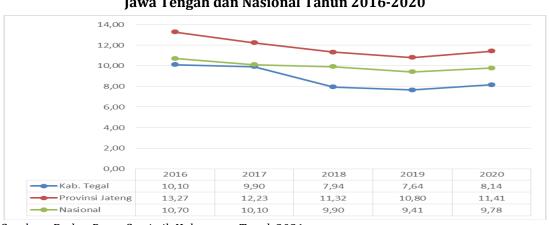
Gambar 2. 15. Gini Ratio Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan kriteria menentukan apakah pola pengeluaran masyarakat ada pada ketimpangan taraf rendah, sedang atau tinggi, maka ditentukan bila G < 0,35 ketimpangan taraf rendah; bila G antara 0,35 - 0,5 ketimpangan taraf sedang; dan bila G > 0,5 ketimpangan taraf tinggi. Untuk Kabupaten Tegal dibawah 0,35 sehingga dikatakan ketimpangan taraf rendah, dan dibandingkan Gini Provinsi Jawa Tengah maupun Gini Nasional maka Gini Kabupaten Tegal masih di bawah Provinsi Jawa Tengah mauapun Nasional. Namun ketimpangan rendah belum bisa menampakan kondisi lebih baik, karena akan menjadi permasalahan berikutnya bila homogen kondisi sama-sama miskin atau kondisi sama-sama kaya belum bisa ditentukan.

Penduduk Miskin F.

Pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tegal mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin mengalami kenaikan menjadi 117.500 jiwa (bertambah 7.560 jiwa) atau 8,21% dari total jumlah penduduk, jumlah ini naik sebesar 0,57% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2019 mencapai 109.940 jiwa atau 7,64%. Penduduk miskin di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2016-2020 lebih rendah dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 16. Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Berikut ini adalah gambaran secara lengkap mengenai angka kemiskinan yang merupakan presentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk selama kurun waktu tahun 2016-2020. Jumlah penduduk yang menjadi pembanding adalah jumlah penduduk hasil proyeksi yang dirilis BPS, bukan jumlah penduduk berdasarkan hasil sensus tahun 2020. Untuk selengkapanya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12 Penduduk Miskin Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Penduduk Miskin	144.220	141.800	114.060	109.940	117.500
2.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.671	1.435.147
3.	Persentase (%)	10,10	9,90	7,94	7,64	8,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indikator kemiskinan dihitung dari survei 20% populasi di bawah Garis Kemiskinan Sementara (GKS) tahun sebelumnya. Dari GKS ditetapkan nilai pengeluaran dari 52 komoditi Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan pengeluaran Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Namun demikian, pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kabupaten Tegal meningkat dari sebelumnya 7,64% pada tahun 2019 menjadi 8,14% pada tahun 2020. Hal ini disebabkan kondisi pandemi covid-19 yang mulai dirasakan dampaknya sejak awal tahun 2020 oleh masyarakat Indonesia. Data kemiskinan per Maret 2020 (dirilis November 2020) telah menunjukkan tren peningkatan tingkat kemiskinan di semua level. Meskipun Pandemi covid-19 di Indonesia bermula sejak Maret 2020, namun kontraksi komoditas makanan dan non makanan sudah terjadi dalam bentuk:

- a. Kontraksi permintaan-penawaran, produksi lemah, ekpor-impor terhambat;
- b. *panic buying*,
- c. menahan spending (pengeluaran);
- d. mengatur *saving* (tabungan/investasi);
- e. pembatasan kegiatan masyarakat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif, kondisi kemiskinan Kabupaten Tegal perlu dilihat dari perspektif regional. Kondisi makro regional yang relatif senada mengindikasikan efektivitas penangangan program kemiskinan satu wilayah cenderung tepat apabila berada pada posisi yang relatif sama dengan kab/kota sekitarnya.

Capaian kinerja kemiskinan Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 merupakan yang terbaik jika disandingkan dengan 4 (empat) Kabupaten di eks karesidenan Pekalongan. Penduduk miskin Kabupaten Tegal lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kota Pekalongan dan Kota Tegal, sebagaimana gambar berikut ini.

Kota Pekalongan

7,17

Kota Tegal

7,8

Tegal

8,14

Batang

9,13

Pekalongan

10,19

Pemalang

16,02

Brebes

Gambar 2. 17. Perbandingan Kemiskinan di eks Karesidenan Pekalongan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Persentase Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 8,14% menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Kemiskinan paling rendah adalah di Kota Pekalongan (7,17%) sedangkan Kabupaten yang kemiskinannya paling tinggi adalah Kabupaten Brebes (17,03%).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Pada tahun 2017 adalah 1,27, tahun 2018 naik menjadi 1,41 selanjutnya pada tahun 2019 mengalami penurunan hingga mencapai 0,64 namun meningkat lagi menjadi 1,08 pada tahun 2020. Dari angka Indeks Kedalaman Kemiskinan dapat diinterprestasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kabupaten Tegal cenderung makin menjauhi garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar. Ada penurunan kesejahteraan pada masyarakat dengan kategori miskin di Kabupaten Tegal.



Gambar 2. 18. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*), merupakan Indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik Tahun 2016). Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 2016 2017 2018 2019 2020 0,21 0,27 0,44 0,09 0,19 Kab. Tegal Provinsi 0,63 0,57 0,45 0,30 0,34 Nasional 0,44 0,46 0,41 0,36 0,38

Gambar 2. 19. Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaen Tegal dari tahun 2016 – 2020 angkanya cukup fluktuatif. Selama satu tahun terakhir cenderung naik. Dari angka Indeks Keparahan Kemiskinan dapat diinterprestasikan bahwa ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin tinggi. Penduduk miskin Kabupaen Tegal semakin homogen kasus/ karakter/keadaannya. Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsisdi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

Penduduk miskin Kabupaten Tegal semakin heterogen kasus/karaker/keadaannya. Dari hasil Basis Data Terpadu Tahun 2019 dapat diketahui jumlah 40% penduduk dengan kesejahteraan terendah, yaitu Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal sejumlah 184.070 Rumah tangga. Untuk jumlah rumah tangga miskin Kecamatan yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebanyak 15.396 Rumah tangga, sedangkan terkecil adalah Kecamatan Slawi dengan jumlah rumah tangga miskin sebanyak 6.756 Rumah Tangga. Sebaran data untuk 18 (delapan belas) Kecamatan dapat dicermati pada gambar berikut ini.

Gambar 2. 20. Jumlah Rumah Tangga Miskin Per Kecamatan

Total 185.957



Sumber: DTKS, 2021

Untuk jumlah individu miskin Kabupaten Tegal hasil Penetapan Bulan Oktober 2020 Rekap DTKS SK No.146/HUK/2020 adalah sejumlah 701.931 individu untuk jumlah yang terbesar adalah di Kecamatan Balapulang yaitu sebesar 57.354 individu yang kedua yaitu kecamatan Bumijawa sebanyak 54.581 individu dan urutan yang ke tiga adalah kecamatan Pangkah sebanyak 49.271 individu sedangkan jumlah individu miskin yang paling sedikit adalah kecamatan Pagerbarang yaitu sejumlah 22.685 individu. Sebaran data jumlah individu miskin di seluruh Kecamatan berdasarkan Basis Data Terpadu Tahun 2020 sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2. 21. Jumlah individu Miskin Per Kecamatan

Total 701.931 70000 57.35454.581 49.27147.46847.718 44.05244.93444.669 41.475 60000 50000 5 36.250₃4502₃₂₁₆₂₃₂.118₃₂.010₂₈.223₂₇.029₂₅.430₂₂.685 40000 30000 20000 10000 KEDING BRITING 0 PACIFIBARANC DUKUHTURI JATINEGARA BUNIAWA MARCASARI ADINERNA SURADADI WARUREJA DUKUHWARU PANEKAH BOIONG LEBAKSIU TARUB KRAMAT Jumlah

Sumber: DTKS, 2021

Kecamatan-kecamatan dengan karakteristik perbatasan dan agraris seperti Balapulang, Bumijawa, Pangkah dan Margasari merupakan kecamatan-kecamatan dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Kabupaten Tegal. Aksesibilitas terhadap potensi dan sumber ekonomi perlu diperluas untuk menjamin setiap penduduk miskin memiliki pendapatan yang cukup dan beban pengeluaran strategis dapat disubsisdi pemerintah. Dengan demikian jumlah penduduk miskin dapat dikurangi secara signifikan setiap tahunnya.

G. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Tahun 2019 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 57.742 orang atau 8,12%. Pada Tahun 2020 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Tegal mencapai 70.246 orang atau 9,82%.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat pada Triwulan pertama tahun 2020. Peningkatan terjadi pada karakteristik: pengangguran karena covid-19, Bukan Angkatan Kerja karena covid-19, Sementara tidak bekerja karena covid-19, dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19. Jenis lapangan usaha yang paling terdampak covid-19 diantaranya industri pengolahan, konstruksi dan administrasi pemerintahan. Sementara jenis lapangan usaha yang mengalami peningkatan tenaga kerja adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan; penyediaan akomodasi dan makanan minuman; serta perdagangan besar dan eceran. Sebagai perbandingan dengan kinerja penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Tengah, dapat dicermati dalam gambar berikut:

12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2015 2017 2018 2019 2020 -Jawa Tengah 4,99 4,57 4,47 4,44 6,48 Tegal 9,52 7,33 8,24 8,12 9,82 Nasional 6,18 5,50 5,30 5,23 7,07

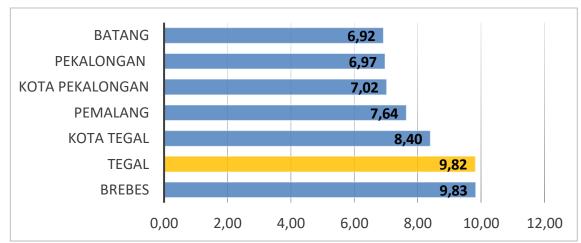
Gambar 2. 22. TPT Kabupaten Tegal dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 - 2020

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Angka pengangguran pada tahun 2016 dan 2015 menunjukkan angka yang tetap, yaitu 9,52%. Hal ini disebabkan oleh kondisi makro ekonomi tahun 2016 dan 2015 di Kabupaten Tegal *relative* tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Angka TPT di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 masih menunjukkan angka yang relatif tinggi, yaitu 8,12% bahkan meningkat menjadi 9,82% tahun 2020. Di luar

kondisi covid-19, tingginya angka pengangguran di Kabupaten Tegal terjadi karena karakteristik pengangguran di Kabupaten Tegal relatif berpendidikan menengah (SMK) dan tinggi (PT). Pencari kerja di Kabupaten Tegal cenderung memilih pekerjaan yang disukai dan memilih menunda memperoleh pekerjaan ketimbang bekerja namun bukan pada pekerjaan yang diinginkan atau lebih suka menganggur.

Kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal pada Tahun 2020 menjadi salah satu fokus utama bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengambilan kebijakan pada 5 (lima) tahun ke depan. Data kinerja TPT Tahun 2020 disandingkan dengan Kabupaten/Kota se-eks Karesidenan Pekalongan dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2. 23. TPT Kabupaten /Kota se Eks Karisidenan Pekalongan

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 9,82% merupakan TPT yang cukuptinggi dibandingkan dengan 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan, sedangkan TPT paling rendah adalah di Kabupaten Batang (6,92%). Jika dibandingkan dengan data kinerja TPT di seluruh Provinsi Jawa Tengah, maka wilayah eks Karesidenan Pekalongan secara umum termasuk kategori tinggi TPT nya, hanya Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang yang relatif rendah. Berbagai upaya kebijakan akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada 5 (lima) tahun ke depan, antara lain dengan Program Kewirusahaan Pemuda dan pendirian Sentra Pelayanan Publik untuk mempermudah dan meningkatkan kinerja pelayanan perijinan.

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Angka Indeks Pembangunan Manusia merupakan ukuran agregat dari dimensi dasar pembangunan manusia dengan melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka diindikasikan pembangunan manusia semakin baik. IPM Kabupaten Tegal selalu meningkat seiring waktu. Jika dilihat secara lebih detail, semua indikator penyusun IPM juga mengalami peningkatan. Sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini maka komponen Indeks Pembangunan Manusia menggunakan metode baru. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Keunggulan IPM metode baru adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif). Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, bisa didapatkan gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi. PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. IPM Kabupaten Tegal menurut metode baru tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

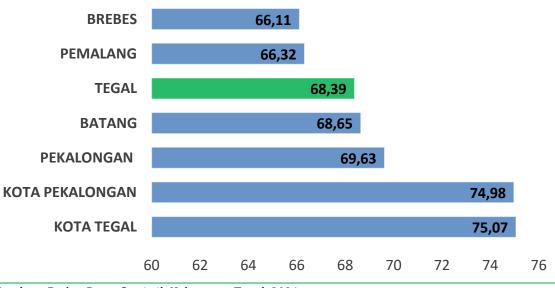
Tabel 2. 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2016 - 2020

Indikator		Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020	
IPM:	65,84	66,44	67,33	68,24	68,39	
Angka Harapan Hidup (tahun)	71,02	71,14	71,28	71,40	71,60	
Harapan Lama Sekolah (EYS)	12,01	12,06	12,34	12,58	12,67	
Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	6,54	6,55	6,70	6,86	6,98	
Pengeluaran (Ribu Rupiah/ orang/tahun)	8.709	9.136	9.433	9.798	9.612	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khusunya di Eks Karisidenan Pekalongan, pada Tahun 2020 IPM Kabupaten Tegal sebesar 68,39 % menduduki peringkat ketiga terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. IPM paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (66,11) sedangkan IPM yang paling tinggi adalah Kota Tegal (75,07).

Gambar 2. 24. IPM Kabupaten/Kota se Eks Karisidenan Pekalongan Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Namun apabila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah, meskipun secara level IPM Tegal masih dibawah Jawa Tengah, akan tetapi pemerintah Kabupaten Tegal mampu meningkatkan pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding Jawa Tengah.

Jawa Tengah ■Tegal 1,34 1,35 1,23 1,01 0,91 0,85 0,86 0,77 0,7 0.68 0.22 2016 2017 2018 2019 2020 Rata-rata

Gambar 2. 25. Pertumbungan IPM Kabupaten Tegal dengan Provinsi Jawa Tengah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

I. Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH Kabupaten Tegal cukup tinggi. Pada tahun 2020 angkanya menunjukkan 71,60 tahun. Angka ini merupakan peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71,40 tahun pada tahun 2019 atau 71,28 tahun pada tahun 2018. Tingginya AHH ini membutuhkan kebijakan penanganan lansia yang komprehensif. Semakin banyak penduduk yang memenuhi AHH mengindikasikan jumlah lansia yang semakin banyak. Lansia yang tidak produktif akan menjadi beban dependensi rasio bagi penduduk usia.

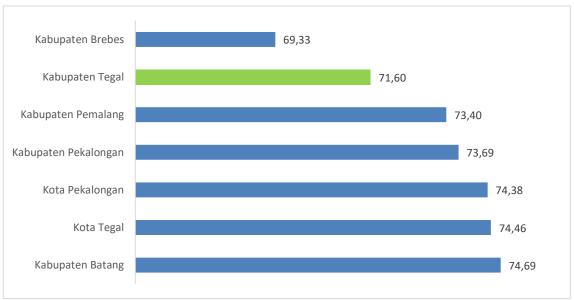
74,37 74,23 74,18 74,08 74,02 71,60 71,40 71,28 71,14 71,02 71,34 71,20 71,06 70,90 2016 2017 2018 2019 2020 ■ Jawa Tengah 74,02 74,08 74,18 74,23 74,37 ■ Tegal 71,02 71,14 71,28 71,40 71,60 Nasional 70,90 71,06 71,20 71,34 71,47

Gambar 2. 26. Angka Harapan Hidup Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khusunya di Eks Karisidenan Pekalongan, AHH Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 71,60 tahun menduduki peringkat kedua terendah dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Angka Harapan Hidup (AHH) paling rendah adalah di Kabupaten Brebes (69,33 tahuun) sedangkan Angka Harapan Hidup (AHH) yang paling tinggi adalah Kabupaten Batang (74,69 tahun).

Gambar 2. 27. Perbandingan Angka Harapan Hidup di Eks Karisidenan Pekalongan



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

J. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah merupakan perhitungan seseorang berusia di atas 7 tahun dimungkinkan akan mengenyam pendidikan sepanjang hidupnya. Dari data yang ada, HLS Kabupaten Tegal menunjukkan angka yang semakin meningkat setiap tahun. Bila tahun 2018 angkanya 12,34 tahun, tahun 2019 telah menjadi 12,58 tahun dan tahun 2020 sebesar 12,67 tahun.

12,70 12,68 12,63 12,57 12,45 12,67 12,58 12,34 12,06 12,01 12,72 12,85 12,91 12,95 **12,98** 2016 2017 2018 2019 2020 Jawa Tengah 12,45 12,57 12,63 12,68 12,70 ■ Tegal 12,01 12,06 12,34 12,58 12,67 Nasional 12,72 12,85 12,91 12,95 12,98

Gambar 2. 28. Angka Harapan Lama Sekolah Tahun 2016 - 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Mencermati angka yang ada, progres pembangunan pendidikan di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan. Setiap tahun grafik peningkatan kinerjanya cukup tinggi, sehingga perlu dipertahankan di tahun-tahun yang akan datang.

Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota tetangga khusunya di Eks Karisidenan Pekalongan, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Tegal Tahun 2020 adalah 12,67 tahun menduduki peringkat ketiga tertinggi dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota Se Eks Karesidenan Pekalongan. Harapan Lama Sekolah (HLS) paling rendah adalah di Kabupaten Pemalang (11,95 tahun) sedangkan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang paling tinggi adalah Kota Tegal (13,05 tahun).

KABUPATEN PEMALANG 11,95 KABUPATEN BATANG KABUPATEN BREBES 12,04 KABUPATEN PEKALONGAN 12,41 KABUPATEN TEGAL 12,67 KOTA PEKALONGAN KOTA TEGAL 13,05 11,4 11,6 12,2 12,4 12,6 12,8 13 13,2

Gambar 2. 29. Perbandingan Angka HLS di Eks Karisidenan Pekalongan

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

K. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Tegal menunjukkan tren meningkat setiap tahun. Data tahun 2018 menunjukkan angka 6,70 tahun, meningkat menjadi 6,86 tahun pada tahun 2019. tahun 2020 angkanya menjadi 6,98 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati pada gambar berikut:



Gambar 2. 30. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2016 -2020

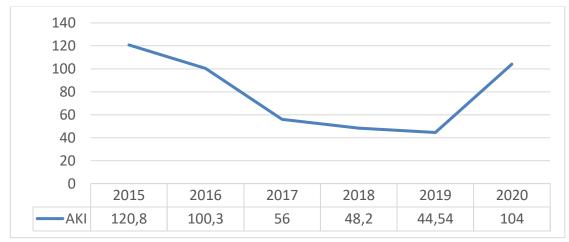
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Rata-Rata Lama Sekolah merupakan rata-rata setiap orang berusia 25 tahun ke atas di Kabupaten Tegal yang mengenyam pendidikan formal dan non formal. Dari data tahun 2017, diketahui bahwa setiap orang di Kabupaten Tegal rata-rata telah berpendidikan SMP kelas 7. Kondisi ini perlu ditingkatkan di masa-masa yang akan datang, agar rata-rata penduduk Kabupaten Tegal telah mengenyam pendidikan setingkat SMA.

L. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu di Kabupaten Tegal menunjukkan tren menurun dalam 5 tahun terakhir.

Angka kematian ibu dari setiap 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 sampai tahun 2020 mengalami penurunan. Penurunan angka kematian ibu disebabkan oleh keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan, utamanya pelayanan kepada ibu hamil dan persalinan ibu.



Gambar 2. 31. Angka Kematian Ibu (AKI) Tahun 2015 -2020

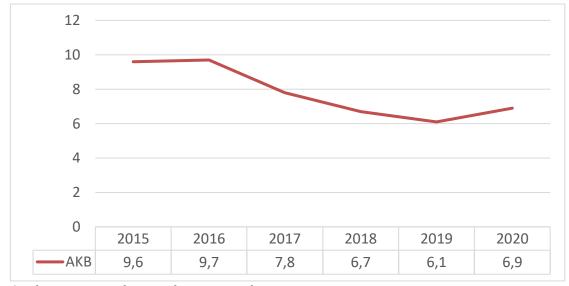
Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Upaya yang sudah dilakukan menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran sebagai sarana untuk mendekatkan ibu hamil risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan, mengadakan pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal, Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi, Pelatihan PONED, Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti call center penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), data ibu hamil terintegrasti dalam sistem informasi kesehatan ibu dan anak (SIKIA), puskesmas mampu persalinan, konseling Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, pemberian Makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, pemberian TTD (Tablet Tambah Darah), Penggadaan alat keseahatan, obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, Pembinaan calon pengantin oleh Puskesmas, Kelas Bumil, kerja sama lintas sektor tokoh keluarga (toga) dan tokoh masyarakat (tomas), sekolah, Pearangkat Daerah lain), pelaksanaan program gubernur Jawa Tengah 5NG (Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng).

M. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapatdikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usiasatu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan. Perkembangan angka kematian bayi di Kabupaten Tegal dari tahun 2015 sampai dengan 2020 fluktuatif namun cenderung menurun setiap tahunnya.

Angka kematian bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun 2015 ke tahun 2016 angka kematian bayi meningkat, namun pada tahun 2017 dan tahun 2019 mengalami penurunan. Tahun 2020 Angka Kematian Bayi Kabupaten Tegal mengalami peningkatan pada angka 6,9. Dengan kondisi yang relatif berfluktuatif, meskipun cenderung mengalami penurunan, tentu hal ini menjadi keprihatinan dan perlu upaya keras untuk terus menurunkan kembali angka kematian bayi di Kabupaten Tegal.



Gambar 2. 32. Angka Kematian Bayi (AKB) Tahun 2015 -2020

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Upaya yang sudah dilakukan yaitu mengadakan pelatihan Konseling Menyusui, Pelatihan Manajemen Asfiksia dan Berat Bayi Lahir rendah (BBLR), Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK, puskesmas mampu persalinan, Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu (seperti *call center* penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal), mengadakan rumah tunggu kelahiran, Konseling IMD dan KB Pasca Persalinan, Penyediaan Buku KIA, konseling ASI Ekslusif, pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja, Penggadaan alkes ,obat puskesmas mampu persalinan dan PONED, kerja sama lintas sektor (toga, toma, sekolah, OPD lain), Pelatihan Kader Motivator ASI.

Dengan upaya yang dilakukan mulai dari *screening* oleh bidan dokter dan dokter spesialis serta pemantauan ibu hamil risti melalui program Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) di mana semua ibu hamil risiko tinggi (risti) dipantau. Selain itu dengan klarifikasi dan Audit Maternal Perinatal (AMP) bila ada kematian menjadi pembelajaran dlm penanganan ibu hamil risti.

N. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKB dan Akaba tahun 2015-2016 naik disebabkan karena Kasus BBLR dan asfiksia di Kabupaten Tegal masih cukup banyak. BBLR dan asfiksia menjadi penyumbang kematian terbanyak. Hal ini disebabkan karena riwayat kehamilan ibu yang mengidap Kurang energi Kronis (KEK) atau proses persalinan tidak normal. Perlu intervensi terhadap ibu hamil KEK dengan pemberian PMT ibu hamil, untuk petugas perlu update skill penanganan BBLR dan asfiksia. AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Angka kematian balita di Kabupaten Tegal sejak Tahun 2015 sampai 2020 menunjukkan tren fluktuatif.

10,5 11 8,4 7,1 6,9 7,7
2015 2016 2017 2018 2019 2020

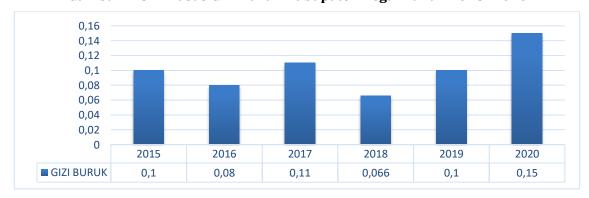
Gambar 2. 33. Angka Kematian Balita (AKABA) Tahun 2015 -2020

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Data menunjukan angka kematian balita usia 5 tahun per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2015 kemudian pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

O. Gizi Buruk dan Stunting

Balita yang mengalami gizi buruk sejak Tahun 2015 hingga tahun 2020 bersifat fluktuatif. Cakupan balita gizi buruk menurun dari tahun 2015 ke tahun 2016. Kemudian naik pada tahun 2017, turun lagi pada tahun 2018, dan naik lagi pada tahun 2019 dan 2020 . Untuk lebih jelasnya dapat dicermati gambar berikut.



Gambar 2. 34. Kasus Gizi Buruk Kabupaten Tegal Tahun 2015 -2020

Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kasus balita gizi buruk umumnya terjadi karena tidak ada makanan (faktor kemiskinan), dan ada makanan tetapi tidak diasupkan (faktor perilaku dan pola asuh). Dari kasus balita gizi buruk di Kabupaten Tegal, sebagian besar karena faktor kemiskinan, sedangkan penyebab lainnya karena perilaku dan pola asuh anak yang salah. Penyebab kedua ini biasanya terjadi karena pengetahuan orang tua tentang pemberian makanan pada bayi dan balita dengan menu gizi seimbang yang masih

kurang. Kemudian kurangnya pengawasan orang tua dalam hal pola asuh/tumbuh kembang balita, karena mempercayakan pengasuhan anak pada asisten rumah tangga atau orang terdekat lain. Hal ini menyebabkan munculnya masalah kurang gizi pada balita.

Cakupan balita stunting di kabupaten tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2020 cukup fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh mobilitas sasaran (balita) yang cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil melakukan pengukuran antropometri dengan benar, dan belum optimalnya peran lintas sektor dalam penanggulangan balita stunting.

Tabel 2. 13 Kasus Stunting Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta	6.98	7.63	5.39	5.9	9.74	8,9

Sumber: Hasil operasi timbang tahun 2015 – 2018, ePPGBM tahun 2019 - 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Dari data hasil Operasi Timbang pada tahun 2016, angka stunting mengalami kenaikan dibanding angka tahun 2015. Hal ini disebabkan oleh penanganan stunting yang belum menjadi isu strategis nasional berpengaruh terhadap pelaporan dan penanganan kejadian stunting di masyarakat. Pada tahun 2017 kasus stunting sudah mengalami penurunan, namun pada tahun 2018 grafik kasus stunting meningkat lagi disebabkan antara lain karena mobilitas sasaran (Balita) cukup tinggi, belum memadainya alat antropometri di posyandu, belum semua kader terampil dalam melakukan pengukuran antropometri dengan benar dan belum optimalnya dukungan lintas sector dalam percepatan penurunan stunting.

Mulai tahun 2019, hasil Operasi Timbang dientry ke aplikasi *e-PPGBM* (elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) dimana angka stuntingnya mengalami peningkatan. Peningkatan angka stunting lebih disebabkan karena proses identifikasi/ penemuan kasus stunting dan masalah gizi lain yang semakin baik, sehingga rencana intervensi lebih tepat sasaran.

P. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender.

Tabel 2. 14 Indeks Pembangunan Gender (IPG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pembangunan Gender	86,76	86,76	86,95	86,74	86,79

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.

Selama tahun 2020 IPG Kabupaten Tegal tercatat sebesar 86,79 naik 0,05 poin dibanding IPG tahun 2019. Peningkatan IPG ini menunjukkan indikasi keberhasilan dalam pembangunan gender. Namun demikian hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Kabupaten Tegal masih terlihat jelas cenderung menguntungkan kepada penduduk laki-laki. Fenomena ini tercermin dari indikator komposit yang digunakan untuk menilai kesenjangan gender, yaitu IPG menunjukkan angka yang lebih rendah dibanding IPM.

Q. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

IDG merupakan indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi berpolitik direpresentasikan dengan keterwakilan perempuan dalam parlemen; partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan direpresentasikan sebagai perempuan sebagai tenaga profesional, teknisi, Kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta penguasaan sumber daya ekonomi yaitu sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Secara umum peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di Kabupaten Tegal yang diukur melalui Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) memperlihatkan fluktuasi kenaikan dari tahun 2017 ke tahun 2019. Perkembangan IDG Kabupaten Tegal tahun 2015-2019 dapat dilihat dalam Tabel di bawah ini. Angka tahun 2020 sampai saat ini belum dirilis dan akan dirilis paling cepat bulan Juli tahun 2021.

Tabel 2. 15 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 2016 - 2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Pemberdayaan Gender	Tidak	51,15	68,90	69,25	Belum
	rilis				rilis
	data				data

Sumber : Dinas P3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Angka IDG tersebut menunjukkan masih cukup rendahnya peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Data yang dirilis BPS dari tahun 2017-2019. Data tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan. Data tahun 2020 belum dirilis dan akan dirilis bulan juli tahun 2021.

R. Pemuda dan Olahraga

Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda. Selanjutnya banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Jumlah Organisasi Pemuda sejak Tahun 2016 – 2020 sebanyak 33 organisasi, sementara jumlah Gelanggang / Balai Remaja sebanyak 273 buah.

Salah satu upaya pemberdayaan pemuda melalui penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis. penumbuhan wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis dilakukan sejak tahun 2019 dengan skema kompetisi. Pada tahun 2019 jumlah pendaftar wirausaha muda pemula berbasis kinerja bisnis sebanyak 401 orang dan tahun 2020 sebanyak 398 orang. Dari jumlah itu diseleksi

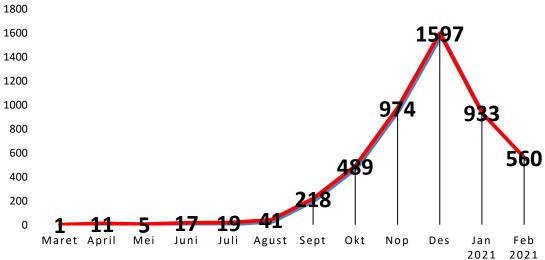
sebanyak 100 orang untuk mendapatakn fasilitasi pelatihan dan pendampingan penyusunan rencana bisnis. Dari 100 orang yang menyusun rencana bisnis dipilih 50 orang untuk melakukan presentasi rencana bisnis. Dari 50 orang yang melakukan presentasi rencana bisnis ditetapkan 28 orang mendapatkan insentif masing-masing Rp.15 juta untuk pengembangan usaha.

2.2.16. Pandemi Covid-19

Pandemi covid-19 di Indonesia dimulai ketika awal maret 2020. Tepatnya pada 2 Maret 2020, pemerintah melaporkan 2 orang yang terkonfirmasi covid-19. Pemerintah menetapkan covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat melalui Keppres Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian disusul Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 yang menetapkan bahwa wabah covid-19 sebagai bencana nasional.

Kabupaten Tegal juga tidak lepas dari pandemi covid-19. Sampai bulan Februari tahun 2021 tercatat sebanyak 4.865 orang terkofirmasi covid-19. Situasi covid-19 terkini di Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 2. 35 Trend Bulanan Perkembangan Covid-19 di Kabupaten Tegal Bulan Maret 2020 – Februari 2021



Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Tegal (https://covid19.tegalkab.go.id/)

Dengan melihat trend kasus covid-19 diatas, maka Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Percepatan Penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal yaitu dengan upaya penyembuhan pasien covid-19 dengan tetap melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Tegal saat ini telah melakukan langkah preventif yang terukur, jelas dan objektif seperti penerapan PHBS (Perilaku hidup bersih dan sehat) dengan selalu cuci tangan & penyediaan tempat cuci tangan / hand sanitizer, kewajiban penggunaan masker, penyemprotan desinfektan, tetap di rumah dan larangan bepergian, social distancing, physical distancing dll.

Secara umum pencegahan penularan covid-19 adalah *phisical and social distancing* (pembatasan fisik dan sosial). Dampak ikutan dari kebijakan phisical and social distancing adalah berkurangnya aktivitas masyarakat. Pengurangan aktivitas masyarakat ini berkorelasi dengan perlambatan ekonomi yang sedang terjadi.

Akibatnya masyarakat miskin semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dasar (subsisten/pangan). Masyarakat rentan miskin juga dihadapkan pada situasi berkurang atau hilangnya pendapatan sehingga daya beli menurun. Sehubungan dengan hal tersebut dibuthkan kebijakan jaring pengaman sosial (*social safety net*) kepada warga miskin dan warga rentan miskin berupa bantuan pangan.

Dalam situasi covid-19 ini, jumlah penduduk yang terdampak yang kemudian miskin atau rentan miskin dimungkinkan bertambah. Kelompok ini tergabung sebagai kelompok penduduk di luar DTKS atau penduduk miskin terdaftar DTKS yang belum mendapat fasilitasi program.

Dalam hal perekonomian masyarakat di Kabupaten Tegal, berbagai sektor perekonomian baik formal maupun informal, dari skala besar hingga kecil melaporkan penurunan pendapatan hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Banyak pelaku usaha mengalami gangguan rantai pasok baik di level domestik maupun internasional (ekspor/impor), serta penurunan drastis permintaan akan barang-barang non-esensial (durable), yang selanjutnya bisa mengganggu neraca keuangan perusahaan bahkan bisa berujung kebangkrutan. Hal tersebut memaksa banyak perusahaan merumahkan bahkan mem-PHK karyawannya. Pada sektor (perdagangan) informal, pelaku usaha mikro, pedagang eceran, serta pelaku usaha transportasi mengalami dampak yang cukup berat dari berkurangnya omset usaha hingga yang paling ekstrem kehilangan mata pencaharian. Pelaku usaha transportasi mulai dari tukang ojek online, ojek pangkalan, kusir andong, sopir angkot, tukang becak yang sebagian besar beroperasi di Kecamatan Slawi dan Adiwerna dengan jumlah tidak kurang dari 2.765 orang dilaporkan pendapatannya menurun hingga 26,02%. Bahkan ada risiko kenaikan harga kebutuhan pokok karena distribusinya terganggu. Selain itu sektor-sektor di Kabupaten Tegal yang juga diperkirakan terpukul dengan kondisi ini diantaranya industri pariwisata (perhotelan, agen perjalanan, bisnis hiburan, dan usaha kuliner), industri manufaktur khususnya yang padat karya dan bergantung pada ekspor-impor, dan sektor konstruksi.

2.2. ASPEK PELAYANAN UMUM

Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu: fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan.

2.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar

Pendidikan

1) Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

Tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan diharapkan dapat meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tegal. Adapun data tingkat partisipasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan kesetaraan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sebagai Tabel berikut ini.

Tabel 2.16 Tingkat Partisipasi PAUD dan Pendidikan Kesetaraan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	APM PAUD	59,64	25,34	54,66	25,76	69.54
2.	Tingkat Partisipasi PAUD	N/a	N/a	N/a	N/a	79.86
3.	Tingkat Kelulusan PAUD	100	100	100	100	100
4.	Tingkat Partisipasi Pendidikan	N/a	N/a	N/a	N/a	97.25
	Kesetaraan					
5.	Tingkat Kelulusan:					
	~ Paket A	99,99	100	99,99	100	100
	~ Paket B	99,98	99,97	99,96	99,96	99.77
	~ Paket C	99,98	N/a	N/a	N/a	99.76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat APM PAUD mengalami kenaikan hingga tahun 2020. Tingkat partisipasi PAUD tahun sebelumnya mempunyai kriteria yang berbeda dengan tahun 2020 yaitu di tahun sebelumnya rentang usia partisipasi PAUD adalah 3-6 tahun sedangkan tahun 2020 adalah 5-6 tahun. Tingkat kelulusan PAUD realtif stabil yaitu 100% dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi pendidikan kesetaraan baru di hitung mulai tahun 2020 yaitu sebesar 97,25%. Tingkat kelulusan Paket A, B dan C dari tahun ke tahun relatif stabil.

2) Pembinaan Sekolah Dasar

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Dasar (SD) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.17 Tingkat Partisipasi SD dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SD/MI	92,36	101,01	98,27	96.49	102.83
2	APK SD/MI	105.90	111.52	105.67	104.40	109.66
3	Tingkat Partisipasi SD	N/a	93.04	93.03	87.47	107.03
4	Angka Putus Sekolah SD	0,12	0,03	0,04	0,06	0.48
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SD	99,99	100	99,99	100	77.12
6	Sarana Prasarana SD baik	78,50	70,68	70,78	135,59	99.76

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar SD/MI yang fluktuatif dari tahun ke tahun akan tetapi menunjukkan semakin tingginya APK dan APM SD/MI. Tingkat partisipasi SD juga fluktuatif tetapi menunjukkan hasil yang semakin baik tingkat partisipasinya. Angka putus sekolah SD dari tahun 2016 - 2019 mengalami penurunan akan tetapi di tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini terjadi karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam hal kemampuan ekonomi yang berpengaruh signifikan terhadap angka putus sekolah SD. Rata-rata nilai kelulusan SD cenderung stabil di tahun 2016 - 2019 namun terjadi penurunan di tahun 2020. Penurunan rata-rata nilai kelulusan SD terjadi sama halnya dengan angka putus sekolah karena di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang berpengaruh pada semua aspek kehidupan terutama dalam bidang ekonomi. Sarana prasarana SD Baik dari tahun ke tahun sudah semakin baik hal ini berarti ketersediaan sarana dan prasaran yang mendukung proses belajar mengajar di tingkat SD. Pengukuran Sarpras di tahun

2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

3) Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Pada kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, capaian kinerja dari program pembinaan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat terlihat dari beberapa uraian indikator. Adapun data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18 Tingkat Partisipasi SMP dan Kelulusan Tahun 2016-2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	APM SMP/MTs	97,80	96,23	83.60	95.69	89.25
2	APK SMP/MTs	117,28	111,51	94,71	119.78	132.78
3	Tingkat Partisipasi SMP	N/a	91.18	77.37	78.29	105.99
4	Angka Putus Sekolah SMP	0,06	0,03	0,10	0,13	0.86
5	Rata-rata Nilai Kelulusan SMP	99,98	99,97	99,96	99,96	78.46
6	Sarana Prasarana SMP baik	77,50	89,33	89,33	73,92	99.22

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs cenderung fluktuatif, akan tetapi di tahun 2020 terjadi penurunan. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Tingkat partisipasi SMP juga semakin baik. Angka putus sekolah dari tahun 2016-2019 semakin baik hal ini ditandai dengan angka putus sekolah yang mengalami penurunan, akan tetapi di tahun 2020 terjadi kenaikan angka putus sekolah. Hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada presentase anak putus sekolah. Rata-rata nilai kelulusan SMP sama halnya dengan angka putus sekolah di tahun 2016-2019 semakin baik akan tetapi di tahun 2020 mengalami penurunan hal ini juga terjadi karena adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan sehingga ekonomi masyarakat menjadi lemah yang kemudian berpengaruh pada rata-rata nilai kelulusan SMP. Sarana prasarana SMP baik dari tahun ke tahun juga fluktuatif akan tetapi cenderung meningkat. Pengukuran Sarpras di tahun 2020 berbeda dengan tahuntahun sebelumnya dimana di tahun sebelumnya dihitung dari presentase ruang kelas dan presentase perpustakaan sedangkan di tahun 2020 dihitung dari presentase ruang kelas dan MCK.

4) Pengembangan Kurikulum

Tabel 2.19 Persentase Muatan Lokal Tahun 2016 - 2020

No	Uraian Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase muatan lokal dalam KBM	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan Tabel di atas maka presentase muatan lokal dalam KBM cenderung stabil sejak tahun 2016-2020. Pada tahun 2020 di jenjang SD terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 36 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP terdapat muatan lokal Bahasa Daerah dengan alokasi 2 jam pelajaran dalam 1 minggu sedangkan jumlah jam pelajaran selain muatan lokal ada 38 jam pelajaran sehingga totalnya menjadi 40 jam pelajaran.

Penanaman jiwa kewirausahaan pada siswa dapat membentuk karakter wirausaha. Sehingga setiap siswa mempunyai pola pikir wirausaha sejak dini dimana dari pola pikir wirausaha tersebut siswa dapat memunculkan ide-ide kreatifnya. Secara jangka panjang ke depan jika bisa menjadi wirausaha maka akan memberikan banyak peluang kerja bagi masyarakat. Penanaman jiwa kewirausahaan dalam bentuk pembuatan soal-soal/materi yang menunjukkan adanya jiwa wirausaha.

5) Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pembinaan atau pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang pendidikan (sekolah). Tujuan dari kegiatan pembinaan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuannya, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya dan keterampilan dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Suatu program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan biasanya diselenggarakan atas asumsi adanya berbagai kekurangan dilihat dan tuntutan organisasi, atau karena adanya kehendak dan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang di kalangan pendidik dan tenaga kependidikan itu sendiri. Beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan ini yaitu:

- 1. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan baik untuk tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggara pendidikan.
- 2. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rangka peningkatan kemampuan professional dan atau teknis untuk pelaksanaan tugas sehari-hari sesuai dengan posisinya masing-masing.
- 3. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kontribusi setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah; dan menyediakan bentuk- bentuk penghargaan, kesejahteraan dan insentif sebagai imbalannya guna menjamin terpenuhinya secara optimal kebutuhan sosial ekonomis maupun kebutuhan sosial-psikologi.
- 4. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan dirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan/posisi, baik karena kebutuhan-kebutuhan yang berorientasi terhadap lowongan jabatan/posisi di masa yang kan datang.
- 5. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sebenarnya dirancang untuk memenuhi tuntutan pertumbuhan dalam jabatan, pengembangan profesi, pemecahan masalah, kegiatan-kegiatan remedial, pemeliharaan motivasi kerja dan ketahanan organisasi pendidikan. Menyangkut pembinaan dan jenjang karir RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 | BAB II 46

tenaga kependidikan disesuaikan dengan kategori masing-masing jenis tenaga kependidikan itu sendiri. Meskipun demikian, dapat saja berjalan karir seseorang menempuh puncak karirnya.

Output program pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan salah satunya adalah terpenuhinya rasio antara guru dan jumlah murid. Adapun perhitungan rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Adapun perkembangan jumlah guru dan murid serta rasio ketersediaan guru dengan siswa berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tegal tahun 2016 sd 2020 dengan catatan jumlah guru disini adalah guru PNS yang dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.20 Jumlah Guru dan Murid berdasarkan Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD				·	
1.1.	Jumlah Guru	3.070	2.885	2.641	3.783	3.395
1.2.	Jumlah Murid	127.430	126.809	126.072	131.269	159.481
1.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:41,51	1:43,95	1:47,74	1:34,70	1:46,98
2	SMP	•		•		
2.1.	Jumlah Guru	1.253	1.276	1.228	1.235	1.447
2.2.	Jumlah Murid	36.712	31.715	35.590	46.303	79.764
2.3.	Perbandingan Jumlah Guru terhadap Jumlah Murid	1:29,30	1:24,86	1:28,98	1:37,49	1:55,12

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat digambarkan bahwa perbandingan antara guru dengan jumlah murid semakin membaik, untuk tingkat SD pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1 : 41,51 (jumlah guru 3.070 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 127.430 murid) sampai dengan tahun 2020 cenderung menurun mencapai 1: 46,98 (jumlah guru 3.395 sedangkan jumlah murid 159.481) sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SD adalah 1 : 29. Dengan kata lain bahwa ketersedian guru jenjang pendidikan SD di Kabupaten Tegal masih jauh di bawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Adapun untuk tingkan SMP pada tahun 2016 perbandingan jumlah guru dan murid sebesar 1: 29,30 (jumlah guru 1.253 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 36.712 murid) menurun tajam pada tahun 2020 menjadi 1: 55,12 (jumlah guru 1.447 orang berbanding dengan jumlah murid sebanyak 79.764 murid, sedangkan rasio ideal guru dan murid untuk jenjang pendidikan SMP adalah 1: 24. Dengan kata lain bahwa ketersedian guru jenjang pendidikan SMP di Kabupaten Tegal sangat jauh dibawah ideal. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan jumlah guru diantaranya banyaknya guru yang memasuki masa purna tugas (pensiun) dan kematian sedangkan pengadaan guru baru (CPNS) jumlahnya terbatas.

Rasio guru terhadap murid perkelas rata-rata adalah jumlah guru per kelas per 1.000 jumlah murid. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar perkelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru perkelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran. Kondisi ketersediaan guru/murid di Kabupaten Tegal perjenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2016-2020 dengan catatan menghitung jumlah guru PNS, sebagaimana di bawah ini.

Tabel 2.21 Rasio Guru per Kelas dan Rasio Guru per Mapel Tahun 2016 -2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020				
1	SD/MI									
	Rasioguru/Kelas	1:0,2	1:0,25	1:0,3	1:0,8	1:1,29				
2.	SMP/MTs									
	Rasioguru/Mapel	1:1:29	1:1:31	1:1:32	1:1:28	1:1:25,73				

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Dari isian tabel tersebut diatas bahwa untuk Rasio Guru Per Kelas, Rasio Guru per mata pelajaran. Rasio guru per kelas jenjang SD di tahun 2020 adalah 1 banding 1,29 ini berarti 1 guru memegang 1 kelas. Hal ini berarti sudah memenuhi kriteria ideal 1 guru 1 kelas. Rasio guru per mapel jenjang SMP adalah 1 banding 25,73 jam pelajaran. Hal ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2020 walapun masih belum ideal yaitu idealnya 1 guru 24 jam pelajaran.

6) Pengendalian Perizinan

Setiap satuan pendidikan sebelum menyelenggarakan pendidikan harus mempunyai izin penyelenggaraan pendidikan. Berdasarkan tabel di bawah ini dapat dilihat bahwa sekolah yang bernaung pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal dari tahun 2016-2020 sudah mempunyai izin operasi.

Tabel 2.22 Perizinan Sekolah Tahun 2016-2020

No.	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	PAUD	100	100	100	100	100
2	SD	100	100	100	100	100
3	SMP	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

7) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Menumbuhkan rasa kecintaan terhadap budaya-budaya di Indonesia terutama budaya yang ada di jawa pada siswa merupakan salah satu langkah untuk dapat memunculkan rasa nasionalisme yang tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu adanya pengembangan Bahasa dan Sastra. Berikut ini adalah Tabel Penggunaan Bahasa Daerah yang digunakan di sekolah:

Tabel 2.23 Penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020
1	SD	5.26	5.26	5.26	5.26	5.26
2	SMP	5.26	5.26	5.26	5.26	5.00

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data pada tabel tersebut maka bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2016-2020 penggunaan Bahasa Daerah di Sekolah cenderung stabil artinya program penggunaan Bahasa Daerah masih terus berjalan. Pada jendang SD dalam 1 minggu terdapat 36 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran Muatan Lokal Bahasa Daerah sehingga totalnya ada 38 jam pelajaran. Pada jenjang SMP dalam 1 minggu ada 38 jam pelajaran ditambah dengan 2 jam pelajaran muatan lokal Bahasa Daerah.

Kesehatan

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Berikut capaian kinerja pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dari tahun 2015 – 2020:

Tabel 2. 24 Capaian Kinerja Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	0,065%	0,062%	0,069%	0,077%	0,087%	0,092%
2.	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	0%	14,3%	57,1%	71,4%	66,7%	88,9%
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	_	-	92%	100%	100%	93,3%
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	-	-	96,3%	96%	100%	98,2%
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	-	-	100%	100%	100%	99%
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	-	-	95,3%	100%	93,1%	73,7%
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	98,3%	99%	97,8%	38,9%
8.	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	0,58%	10,07%	21,3%	15,4%
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	-	-	22,4%	35,79%	49%	33,6%

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
10.	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	23,8%	46,3%	29,9%	10,1%
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	24,1%	32,9%	100%	74,5%
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	-	-	100%	100%	64,9%	57,3%
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	-	-	100%	70%	86,3%	57,1%
14.	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	-	-	94,2%	97%	99,3%	90,5%
15.	Cakupan balita stunting	6,98%	7.63%	5.39%	5.9%	9.74%	12,5%
16.	Persentase Fasyankes tingkat pertama terakreditasi	6,25%	33%	35%	41%	41%	42%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Beberapa indikator pada program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat merupakan indicator Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM-BK). Dinas Kesehatan bersama Pemerintah Kabupaten Tegal terus berupaya mempertahankan dan meningkatkan capaian SPM-BK antara lain dengan meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia kesehatan, mengoptimalkan anggaran yang ada, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan telah menambah jumlah puskesmas mampu persalinan. Puskesmas mampu persalinan memberi pelayanan ibu melahirkan selama 24 jam. Puskesmas PONED dan mampu persalinan dapat memberikan pelayanan kesehatan ibu melahirkan yang terstandar, mengingat masih banyak ibu melahirkan di dukun bayi yang belum memenuhi standar pelayanan ibu melahirkan.

1) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kualitas sumber daya manusia kesehatan terus ditingkatkan, diantaranya dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi dan perijinan yang sesuai dengan standar. Indikator – indikator pada program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 25 Capaian Kinerja Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2015 – 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan perijinan praktik tenaga kesehatan	89,97	100	100	100	100	100
2.	Cakupan puskesmas yang mempunyai 9 tenaga kesehatan strategis	-	ı	-	52	52	82,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

Kabupaten Tegal terus berupaya untuk meningkatkan kuantitas maupun kualitas SDMK sesuai dengan standar. Pemerataan distribusi SDMK di fasilitas pelayanan kesehatan juga terus diupayakan.

2) Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Capain kinerja pada Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman antara lain:

Tabel 2. 26 Capaian Kinerja Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan produk industri rumah tangga (PIRT) pangan yang tersertifikasi	100	100	100	100	100	100
2	Cakupan pemenuhan persyaratan perijinan sarana pelayanan kefarmasian	100	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

3) Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Indikator – indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 2. 27 Capaian Indikator Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Tahun 2015 - 2020

No	Uraian	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	84,6	81,2	80	81	81	95,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, 2021

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD dr Soeselo)

RSUD Dokter Soeselo Kabupaten Tegal telah melakukan pelayanan dan pengelolaan penunjang medis dan non medis sesuai dengan indikator yang ada. Ada beberapa indikator yang sudah tercapai akan tetapi masih ada juga beberapa indikator yang perlu di tingkatkan. Berikut capaian kinerja pelayanan penunjang di RSUD dr. Soeselo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 2. 28 Capaian Kinerja Pelayanan Penunjang RSUD dr. Soeselo Tahun 2015 - 2020

No	No Indikator	Standar	Hasil Perhitungan						
NO			2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Α	Mutu Pelayanan								
1	Emergency Respon Time	≤ 5 menit terlayani setelah pasien datang	≤3 menit	≤3 menit	≤3 menit	2 menit	2.33 menit	4.5 menit	
2	Angka Kematian IGD	≤ dua per seribu (pindah kepelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0,005	0,015	0,2	0,5	0,095	0,38	

					Hasil Per	hitungan		
No	Indikator	Standar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	NDR (Angka	≤ 0.24 %	3,14%	2,67%	2,80%	2,95%	3,12%	3,09
	Kematian Netto)		7,2	_,,,,,,	_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	_,	,==.:	,,,,,
4	Jumlah Pasien		146	133	196	257	252	146
	Rawat Inap yang		Pasien	Pasien	Pasien	Pasien	Pasien	Pasien
	Dirujuk							
5	Post Operative	≤1%	< 1 %	< 1 %	0	0	0	0
	Death Rate							
6	Angka Infeksi	< 1.5 %	-	-	-	-	-	-
	Nosokomial							
7	Kecepatan	≤ 30 menit	32	44.5	39.98	36.4	41.44	42.80
	Pelayanan Resep		menit	menit	menit	menit	menit	menit
	Obat Jadi							
8	Waktu tunggu	≤ 2 hari	< 2	< 2	1.4 hari	1 hari	1.4 hari	1.5 hari
	operasi elektif		hari	hari				
В	Kepedulian Kepada I	Masyarakat	T	1	1	1	1	1
1	Pembinaan Kepada							
	Puskesmas							
2	PKRS		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Rasio Tempat Tidur		0,56	0,51	0,54	0,58	0,59	0,59
	Kelas III							
4	Pemanfaatan TT	75-85 %	79,45%	80,25%	107,11%	90,96%	107,96%	80,58%
<u> </u>	(BOR) Kelas III							
5	Proporsi pelayanan	-	67.000	22.620	20.456	24 042	24.000	25.007
	pasien tidak		67.820	33.628	28.456	21.012	21.990	25.997
	mampu di rawat jalan							
С	Kepuasan Pelanggan							
1	Prosentase		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Komplain		7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00
2	Lama waktu tunggu	≤ 60 menit	≤ 63	75	133	152	111.71	-
	di poliklinik		menit	menit	menit	menit	menit	
3	Kemudahan		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Pelayanan							
D	Kepedulian Terhada	p Lingkungan						
1	Hasil uji AMDAL		Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : RSUD dr Soeselo Kabupaten Tegal, 2021

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan (RSUD Suradadi)

Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukanuntuk meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit yang dilaksanakan sesuai standar. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data pelayanan RS mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi peningkatan pelayanan yang dilaksanakan sesuai Standar.

Tabel 2. 29 Capaian Kinerja Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 - 2020

	7 111 .		un 2013		2045	2040	2040	2020
No	Indikator	Standar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
a. 1	Mutu Pelayana	a n ≤5 menit	NA	NA	NA	NA	3	2
1	Emergency respon time	terlayani setelah	NA	NA	INA	NA	3	Z
	respon time	pasien datang (0						
		>30 menit),1=16-						
		30 menit, 2=8-15						
		menit, 3= <8						
		menit)						
2	Angka	≤ 2% (pindah ke	NA	NA	NA	NA	3	3
	Kematian	pelayanan rawat						
	UGD	inap setelah 8						
		jam) 0=>10% 1=8-10% 2=5-7%						
		3=<5%)						
3	NDR (Angka	≤ 0,24 % (jumlah	NA	NA	NA	NA	3	3
	Kematian	kematian pasien	1111	1111	1111	1111	J	J
	Netto)	≥48 jam setelah						
	,	dirawat / jumlah						
		psien yang						
		dirawat x 1000						
		%) 0=>65%						
		1=41-65 2=25-40 3=<25%						
4	Prosentasi	jumlah pasien	NA	NA	NA	NA	3	2
T	pasien rawat	rawat inap yang	IVA	IVA	IVA	IVA	3	2
	inap yg	dirujuk / jumlah						
	dirujuk	pasien rawat inap						
	arr ajarr	x 100% 0=>10%						
		1=8-10% 2=5-7%						
	_	3=<5%						•
5	Post	≤ 1% (jumlah	NA	NA	NA	NA	3	3
	operative	operasi pasien						
	death rate	meninggal /						
		jumlah pasien						
		dioperasi x 100%) 0=>10%						
		1=6-10% 2=2-						
		7% 3=<2%						
6	Angka Infeksi	< 1.5 % (jumlah	NA	NA	NA	NA	3	2
	Nosokomial	psaien dirawat	1111	11/1	1111	11/1	3	_
		yang terinfeksi						
		nosokomial /						
		jumlah pasien						
		dirawat x 100						
		0=>15% 1=10-						
		15% 2=2-9%						
		3=<2%						
7	Kecepatan	≤ 30 menit (rata-	NA	NA	NA	NA	2	2
	pelayanan	rata pelayanan						
	resep obat	resep obat jadi						
	jadi	dalam menit)						
		0=<60 menit						
		1=31-60 menit						
		2=8-30 menit						
		3=<8 menit						

No	Indikator	Standar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
8	Waktu	≤ 2 hari (rata	NA	NA	NA	NA	3	3
	tunggu	rata waktu						
	operasi	tunggu sebelum						
	elektif	operasi dalam						
		hari) 0=>5 hari						
		1=3-5 hari 2=2-3 hari 3=< 24 jam						
В	Kepedulian Ke	epada Masyarakat						
1	Pembinaan	0 tidak ada	NA	NA	NA	NA	0.5	0.5
	Kepada	program, 0,251						
	Puskesmas	ada tidak						
		dilaksanakan, 0,5						
		ada dilaksanakan						
		sebagian, 1,00						
		ada dilaksanakan						
2	PKRS	semua 0 tidak ada	NA	NA	NA	NA	0.5	0.5
-		program, 0,251	1,111	''''	''''	1,11		0.5
		ada tidak						
		dilaksanakan, 0,5						
		ada dilaksanakan						
		sebagian, 1,00						
		ada dilaksanakan						
3	Rasio tempat	semua 0 ≤10%, 0,25	NA	NA	NA	NA	1	1
3	tidur kelas 3	=10-20, 0,5 =21-	IVA	IVA	IVA	IVA	1	1
	traur Keras s	30,1= > 30%						
4	Pemanfaatan	60-80% (Depkes,	NA	NA	NA	NA	1	1
	TT (BOR(2005) 0=>40%						
	kelas) 3	0,25=40-59%						
		0,5=60-58% 1=<85%						
5	Proporsi	0 ≤10%, 0,25	NA	NA	NA	NA	0.5	0.5
	pelayanan	=10-20, 0,5 =21-						
	pasien tidak	30,1= > 30%						
	mampu (Pbi/							
	total pasien							
	rajal dan							
С	ranap) Kepuasan Pela	l anggan	<u> </u>					
1	Prosentase	0 tidak ada	NA	NA	NA	NA	0.5	0.5
	komplain	program						
		penanganan						
		komplain, 0,251						
		ada tidak						
		dilaksanakan, 0,5 ada dilaksanakan						
		sebagian, 1,00						
		ada dilaksanakan						
		semua						
2	Lama Waktu	≤ 60 menit (0	NA	NA	NA	NA	1.5	2,0
	Tunggu di	>120 menit, 0,75						
	poliklinik	61-120 menit,						
		1,5 30-60 menit						
3	kemudahan	2,00 < 30 menit) 0 = tidak ada	NI A	NI A	NI A	NI A	1	1.0
) 	pelayanan	petunjuk, 1 = ada	NA	NA	NA	NA	1	1,0
	perayanan	petunjuk, 1 – ada petunjuk tidak						
	ı	potanjan dadn	l .	1	l .	1	l	l

No	Indikator	Standar	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		lengkap, 2 =						
		tidak ada						
		petunjuk						
D	Kepedulian te	rhadap lingkungan	1					
1	kebersihan	0 tidak ada	NA	NA	NA	NA	1.5	1.5
	lingkungan	program, 0,75						
		ada program dan						
		sop, 1,5 sop						
		dilaksanakan						
		sebagian, 2 sop						
		dilaksanakan						
		semua						
2	hasil uji	0 tidak ada	NA	NA	NA	NA	0	0
	AMDAL	Amdal, 0,75						
		tidak dad						
		tindaklanjut						
		hasil amdal 1,5						
		ada tindaklanjut						
		belum selesai						
		2,00 ada						
		tindaklanjut						
		sampai selesai						
	AL SCORE MUTU			0	0	26,00	25,00	0
DAN	MANFAAT BAG	I MASYARAKAT						

Sumber: RSUD Suradadi Kabupaten Tegal, 2021

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Tegal berdasarkan kewenangannya meliputi :

2) Infrastruktur Bangunan Sumberdaya Air (SDA)

Infrastruktur sumberdaya air berpedoman pada pola pengelolaan sumber daya air, meliputi: wilayah sungai, jaringan irigasi, pengembangan jaringan air baku untuk air bersih, pengembangan sistem pengendalian banjir. Pengembangan wilayah sungai yang merupakan WS strategis nasional adalah WS Pemali Comal terdiri atas Pengelolaan sumber daya air sungai, Pengembangan waduk; dan Pengembangan embung. Terkait dengan pengembangan waduk dan embung, Di Kabupaten Tegal terdapat Waduk Cacaban yang mempunyai kapasitas yang saat ini mempunyai kapasitas 49,02 juta m³ dan dapat mengaliri lahan sawah seluas 17.481 Ha. Sedangkan jumlah embung atau waduk lapang di Kabupaten Tegal sebagaiman tersaji pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 30 Jumlah dan Luas Embung

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
1	Adiwerna	6	39.315
2	Dukuhturi	2	9.778
3	Dukuhwaru	10	52.209
4	Kedungbanteng	1	15.535
5	Kramat	17	88.872
6	Lebaksiu	28	134.637
7	Pangkah	9	34.609
8	Slawi	10	47.298

No	Kecamatan	Jumlah	Luas (m2)
9	Talang	3	18.557
10	Tarub	17	83.538
11	Suradadi	5	21.600
12	Warureja	3	5.800
	Total	111	551.748

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Jaringan irigasi di Kabupaten Tegal terdiri dari jaringan teknis (primer, sekunder, tersier) dan jaringan non teknis. Kedua jaringan ini hampir tersebar merata di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Tegal. Kondisi saluran-saluran irigasi ini perlu perawatan karena sebagian dari saluran-saluran ini, terutama saluran teknis mengalami kerusakan pada fisik bangunannya. Selain itu perlu juga adanya peningkatan terhadap saluran non teknis dan ssemi teknis lainnya agar berfungsi lebih optimal untuk mengairi seluruh persawahan areal persawahan yang ada di Kabupaten Tegal.

Lahan sawah di Kabupaten Tegal sekitar 40.133 Ha. Untuk komoditas padi pada Tahun 2017 luas tanam mencapai 61.995 Ha dan luas panen mencapai 65.660 Ha, sedangkan untuk produksinya mencapai 373.524 Ton, dengan produktivitas rata-rata 5,69 Ton/Ha. Dilihat dari distribusi per kecamatan, kecamatan Warureja menjadi penyumbang lahan tanam padi tersebar di Kabupaten Tegal yaitu sekitar 7.102 Ha.

Berdasarkan jenis pengairan di Kabupaten Tegal, sebagian besar sawah tersebut merupakan sawah irigasi teknis yaitu sekitar 32.600 Ha. Berdasarkan kewenangan irigasi, Daerah irigasi (DI) untuk lahan pertanian di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 3 (tiga) kewenangan DI yaitu:

Tabel 2. 31 Panjang Irigasi Kabupaten Tegal

Kewenangan	Jumlah DI	Panjang Saluran (m)	Luas Daerah Irigasi (Ha)
Kabupaten	208	276,02	9.281
Provinsi	11	84.597	6.956
Pusat	3	240.686	24.083
Total	222	325.559	40.320

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Gambaran kinerja pada aspek pembangunan infrastruktur sumberdaya air berupa jaringan irigasi di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa kondisi sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 32 Kondisi Jaringan Irigasi Kabupaten Tahun 2016-2020

	Kondisi			Pan	jang Jai	ringan Ir	igasi Pe	er Tahur	1		
No	Jaringan	2016		2017		2018		2019		2020	
	Irigasi	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
1.	Baik	146	50,05	155	53,1	164,5	56,39	160,58	58,17	162,47	58,86
2.	Sedang	49	16,8	52	17,8	67,2	22,97	44,82	16,24	44,83	16,15
3.	Rusak Ringan	23,74	8,138	21,69	7,44	44,85	15,37	59,00	21,37	59,00	20,93
4.	Rusak Berat	72,98	25,02	63,03	21,6	15,43	5,26	11,62	4,21	11,20	4,06
	Total	291,72	100	291,72	100	291,7	100	276,02	100	276,02	100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan Kewenangannya, Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan Kabupaten Tegal sebanyak 208 DI dengan luas 9.281 hektare. Kebutuhan air Daerah irigasi Kabuaten tersebut dipenuhi melalui jaringan irigasi. Panjang Saluran irigasi saat ini mencapai 276,02 km, dengan kondisi jaringan irigasi yang mantap sepanjang 207,30 km (75,01%). Sedangkan yang mengalami kerusakan ringan dan rusak berat (tidak mantap) sepanjang 70,02 km (24,99%). Sedangkan kondisi cakupan daerah irigasi kewenangan kabupaten tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 33 Kondisi Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Tahun 2016-2020

Kondisi DI	Kondisi Daerah Irigasi Per Tahun							
Koliuisi Di	2016	2017	2018	2019	2020			
Luas Daerah Irigasi (Ha)	15.497	15.497	15.497	9.281,00	9.281,00			
Luas Daerah Irigasi Baik (Ha)	10.360	10.987	12.298	5.302,49	5.374,93			
% luas DI Baik	66,85	70,90	79,36	58,17	58,86			

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal, 2021

Peningkatan kondisi daerah irigasi kabupaten, dikarena alokasi anggaran yang stabil untuk perbaikan infrastruktur irigasi baik saluran maupun bangunan bending. Selain itu secara lokasi sebagaian besar Daerah Irigasi Kabupaten berada di daerah atas yaitu Kecamatan Bojong, Jatinegara, Margasari dan Bumijawa, serta bangunan Irigasinya letaknya jauh dari permukiman penduduk.

3) Infrastruktur Air Minum

Infrastruktur sistem jaringan bersih di Kabupaten Tegal dibagi menjadi jaringan perpipaan dan non perpipaan. Jaringan air minum perpipaan untuk wilayah perkotaan sampai pada akses layanan rumah tangga dilayani oleh oleh PDAM. Sedangkan untuk perpipaan wilayah perdesaan difasilitasi melalui program Pamsimas. Untuk jaringan non perpipaan masyarakat di Kabupaten Tegal dipenuhi dari layanan sumur dan mata air. Data layanan air minum sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 34 Data Layanan Air Minum Tahun 2016-2020

Unaion		Capaian	Layanan Air	Minum		
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
Jumlah Penduduk Total (jiwa)	1,425,998	1,428,884	1,431,375	1,433,464	1,435,147	
Jumlah Penduduk wilayah Teknis PDAM (jiwa)	664,694	664,694	659,655	669,141	768,153	
Jumlah Penduduk Perdesaaan Teknis PAMSIMAS (jiwa)	40,454	638,111	745,005	878,629	980,694	
Target Capaian PDAM dr Total Penduduk (%)	46.65	21.53	23.18	24.72	22.92	
Target Capaian Pamsimas dr Total Penduduk (%)	28.39	22.92	19.89	17.86	17.68	
Layanan PDAM (SR)	36,363	40,619	42,742	45,648	48,150	
Layanan PDAM (Jiwa)	121,981	143,121	152,927	165,442	176,097	
Layanan Pamsimas (Jiwa)	N/A	146,272	148,149	156,898	173,339	

Unaion	Capaian Layanan Air Minum								
Uraian	2016	2017	2018	2019	2020				
Non Perpipaan (Sumur dan Mata Air)	N/A	N/A	503,878	503,878	527,336				
Capaian Air Minum PDAM (%)	8.55	10.02	10.68	11.54	12.27				
Capaian Air Minum Pamsimas (%)	N/A	10.24	10.35	10.95	12.08				
Capaian Akses Air Minum Keseluruhan (%)	N/A	N/A	56.24%	57.64%	61.09%				

Sumber: Hasil Analisa Berbagai Sumber, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa secara teknis jangkauan jaringan air minum perpipaan PDAM seharusnya dapat mencapai 46,5% wilayah Kabupaten Tegal. Capaian layanan PDAM meningkat dalam kurun waktu 5 tahun dari 8,55% menjadi 12,27%. Untuk Layanan Pamsimas saat ini baru dapat melayani wilayah di Kabupaten Tegal sebesar 12.08%. Secara keseluruhan terdapat peningkatan layanan akses air minum selama 5 tahun terakhir dengan capaian pada tahun 2020 adalah sebebsar 61,09%.

4) Infrastruktur Sanitasi

Infrastruktur sanitasi di Kabupaten Tegal fokus pada prasarana sanitasi permukiman yaitu pada akses pada jamban sehat.

Tabel 2. 35 Rumah Berjamban Tahun 2015 - 2020

No	Kecamatan	Jumlah Rumah		Akses	(%)		KK yg b berjamba	
		Tangga	2015	2018	2019	2020	Unit	%
1	Margasari	37.624	65	98,8	N/A	100	521	1,75
2	Bumijawa	32.722	71,9	98,2	N/A	100	62	0,24
3	Bojong	24.710	96,3	98	N/A	100	2008	11,01
4	Balapulang	32.705	85,4	97,3	N/A	100	623	3,41
5	Pagerbarang	21.727	66,8	96,7	N/A	100	1482	6,05
6	Lebaksiu	32.846	42,9	95,5	N/A	100	1816	5,96
7	Jatinegara	20.897	70,3	93,7	N/A	100	2653	10,01
8	Kedungbanteng	15.989	45,3	92,7	N/A	100	1004	2,90
9	Pangkah	37.554	51,5	87,1	N/A	100	1122	6,13
10	Slawi	26.082	61,5	87	N/A	100	2483	11,44
11	Adiwerna	44.273	56,2	86,8	N/A	100	1024	6,07
12	Talang	34.264	54,6	85,8	N/A	100	2387	11,10
13	Dukuhturi	33.234	33,8	83,6	N/A	100	3166	8,64
14	Tarub	28.781	33,2	82,8	N/A	100	1652	12,20
15	Kramat	38.150	49,7	81,5	N/A	100	1292	3,57
16	Suradadi	30.677	48,2	81,5	N/A	100	2513	8,65
17	Warureja	22.760	42,2	79	N/A	100	986	2,85
18	Dukuhwaru	23.165	46,8	73,4	N/A	100	1350	5,45
	Total	538.160	55,8	88,7		100	28.144	5,23

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Tabel 2.36 IPAL Domestik Skala Komunal Kabupaten Tegal

No	Kecamatan	Kapasitas (m3)	Jumlah KK Tersambung
1	Pangkah	230,16	130
2	Jatinegara	107,25	60
3	Bojong	290,92	188
4	Lebaksiu	106,20	64
5	Balapulang	217,22	132
6	Adiwerna	109,97	62
7	Dukuhwaru	240,75	136
8	Tarub	188,14	125
	Total	1490,61	897

Sumber: Program Sanimas, 2021

Dari data Tabel 2.40 Rumah Berjamban Tahun 2015 – 2020 diketahui bahwa Kabupaten Tegal telah melakukan percepatan penanganan sanitasi selama 5 tahun (2015-2020). Hal tersebut dapat dilihat dari telah tercapainya 100% akses sanitasi namun masih menyisakan 5,23% KK yang masih belum memilki akses jamban yang layak.

5) Bangunan Gedung Negara

Bangunan gedung negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara/daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD, atau perolehan lainnya yang sah. Rumah negara dan pagar bangunan gedung negara/rumah negara termasuk dalam kategori bangunan gedung negara. Data bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2. 37 Data Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Tegal Tahun 2020

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	228
2	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen	3
3	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	133
4	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	35
5	Bangunan Gedung Perpustakaan Permanen	2
6	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	947
7	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	130
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	42
9	Bangunan Gedung Instalasi Permanen	22
10	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	42
11	Bangunan Tempat Ibadah Lain-lain (dst)	1
12	Bangunan Gedung Instalasi lain-lain	19
13	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	10
14	Bangunan Gedung Terminal Lain-lain (dst)	1
15	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	6
16	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain (dst)	1
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	29
18	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	1
19	Bangunan Gedung Tempat OR Lain-lain (dst)	1

No.	Jenis Bangunan	Jumlah Bangunan
20	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	31
21	Bangunan Tempat Pendidikan Lain-lain (dst)	16
22	Bangunan Stasiun Permanen	1
23	Bangunan Tempat Parkir	109
24	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-lain (dst)	1
25	Bangunan Pengujian Kelaikan Permanen	1
26	Bangunan Klinik/Puskesmas	210
27	Bangunan Rumah Sakit Umum	53
28	Bangunan Rumah Sakit Lain-lain dst	4
29	Bangunan Rumah Sakit Hewan	3
30	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	26
31	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1
32	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1
33	Bangunan Gudang Untuk Bengkel Lain-lain	2
34	Bangunan Gudang Lain-lain (dst)	27
35	Bangunan Olah Raga Terbuka Permanen	6
36	Bangunan Untuk Kandang	8
37	Bangunan Menara Telekomunikasi Lain-lain (dst)	1
38	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	6
39	Bangunan Gedung Musium Permanen	1
40	Hotel Permanen	2
41	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah	6
42	Candi	1
43	Gedung Garasi/Pool Darurat	2
44	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	6
45	Gedung Garasi/Pool Permanen	45
46	Gedung Garasi/Pool Semi Permanen	5
47	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	61
48	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Semi Permanen	1
49	Gedung Pos Jaga Permanen	44
50	Gedung Pos Jaga Semi Permanen	1
51	Gedung Olah Raga Tetutup Permanen	7
52	Gedung Pemotong Hewan Permanen	13
53	Bangunan Bengkel/Hanggar Permanen	6
54	Gedung Menara Peninjau Permanen	3
55	Rumah Negara Gol I Lain-lain (dst)	2
56	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1
57	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	2
58	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2
59	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	93
60	Rumah Negara Golongan III Tipe D Permanen	2
61	Rumah Negara Golongan III Lain-lain	1
62	Flat/rumah Lain-lain (dst)	7
63	Flat/Rumah Susun Permanen	3
64	Asrama Permanen	1
65	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Darurat	1
66	Pagar Permanen	204
	Total Bangunan Gedung Negara	2.677

Sumber : Hasil Analisa Kartu Inventaris Barang (KIB) C Gedung dan Bangunan, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung pendidikan permanen merupakan jenis bangunan gedung negara yang paling dominan di Kabupaten Tegal dengan persentase sebesar 35.38%. Dari total 947 bangunan gedung pendidikan permanen, 632 bangunan diantaranya merupakan bangunan sekolah dasar negeri. Data bangunan sekolah dasar negeri di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada tabel berikut ini.

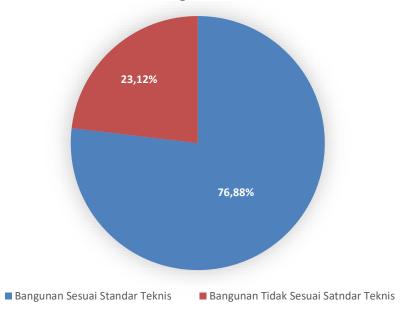
Tabel 2. 38 Data Bangunan Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Tegal Tahun 2020

NO	N W	I while CD	Jumlah	Jumlah dan Kondisi Bangunan SD			
NO.	Nama Kecamatan	Jumlah SD	Bangunan Ruang Kelas	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Dukuhwaru	28	202	85	73	44	
2	Adiwerna	50	359	175	116	68	
3	Tarub	38	273	103	88	82	
4	Pangkah	52	330	122	156	52	
5	Margasari	32	224	83	91	50	
6	Balapulang	35	232	77	91	64	
7	Slawi	37	249	71	140	38	
8	Bojong	31	204	77	77	50	
9	Bumijawa	50	327	137	127	63	
10	Suradadi	30	253	106	88	59	
11	Dukuhturi	27	186	77	83	26	
12	Lebaksiu	37	262	99	91	72	
13	Kedungbanteng	17	110	41	26	43	
14	Kramat	39	280	108	135	37	
15	Pagerbarang	32	217	56	63	98	
16	Talang	36	269	90	103	76	
17	Warureja	28	210	87	73	50	
18	Jatinegara	33	216	91	72	53	
	Jumlah	632	4.403	1.685	1.693	1.025	

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Tahun 2019

Permasalahan utama dalam pengelolaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal adalah masih banyaknya bangunan gedung negara yang tidak sesuai dengan standar teknis. Bangunan yang sesuai standar teknis diartikan sebagai bangunan yang memenuhi standar keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan serta hanya mempunyai tingkat kerusakan bangunan antara 0% s.d 25%. Data bangunan gedung yang sesuai dengan standar teknis di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik dibawah ini:

Gambar 2. 36 Data Bangunan Gedung Negara Sesuai Standar Teknis di Kab. Tegal Tahun 2020



Sumber: Hasil Analisa berbagai Sumber, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis adalah sebesar 76,88% atau sebanyak 2.058 bangunan gedung negara, sedangkan bangunan gedung negara yang tidak sesuai standar teknis adalah sebesar 23,12% atau sebanyak 619 bangunan gedung negara. Peningkatan rasio bangunan gedung negara yang sesuai standar teknis dapat dilakukan dengan perawatan dan pemeliharaan bangunan gedung negara di Kabupaten Tegal dengan memprioritaskan bangunan-bangunan dengan tingkat kerusakan berat sampai dengan sedang.

6) Izin Mendirikan Bangunan

Berdasarkan PermenPUPR No 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PermenPUPR No 5 Tahun 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan, Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Tegal diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) kecuali IMB rumah tinggal sederhana dengan luas bangunan maksimal 100 m² oleh Kecamatan. Data penerbitan IMB di Kabupaten Tegal dapat dilihat dalam grafik di bawah ini :

4.000 3.461 3.500 3.000 2.546 2.334 2.500 2.145 2.046 1.823 1.853 1.823 2.000 1.611 1.553 1.440 1.380 1.342 1.500 1.000 500 Ω 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Gambar 2. 37 Data Data Penerbitan IMB di Kabupaten Tegal Tahun 2020

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa tren penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) cenderung tidak stabil. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2011 s.d 2020) penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terbanyak dalam waktu satu tahun anggaran terjadi pada tahun 2011 yaitu sebanyak 2.546. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, rata-rata penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam waktu satu tahun anggaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah 1.869.

7) Infrastruktur Jalan

Secara kewilayahan Kabupaten Tegal mempunyai pusat – pusat kegiatan yang tersebar secara sporadis dan terkoneksi dengan sistem jaringan prasarana jalan dan jembatan dimana berdasar SK Bupati Tegal Nomor 050/583/2014 tentang Penetapan Jalan Kabupaten Tegal, panjang jalan Kabupaten adalah 847,27 km, sedangkan Jalan Nasional yang berada di Wilayah Kabupaten Tegal sepanjang 68,29 km, Jalan Provinsi sepanjang 54,63 km, serta jalan desa di Kabupaten Tegal sepanjang 691,28 km.

Kabupaten Tegal secara kewilayahan regional Bregasmalang meliputi di bagian Utara terlintasi oleh Jalan Arteri Primer (Jalan Pantura), dan bagian tengah jalan arteri sekunder (ruas Tegal – Cilacap) yang merupakan jalan nasional sepanjang 68,29 kilometer. Di Bagian Tengah juga terlintasi oleh Jalan Kolektor Primer yang merupakan jalan provinsi (Ruas Randudongkal – Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru – Jatibarang) yang menghubungkan antara pusat pertumbuhan di wilayah Randudongkal (Kabupaten Pemalang), Jatinegara – Slawi – Dukuhwaru (Kabupaten Tegal), dan Jatibarang – Ketanggungan – Losari (Kabupaten Brebes).

Tabel 2. 41 Capaian Kinerja Pembangunan Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

	Kondisi Jalan		Panjang Jalan Per Tahun												
No		2016		2017		2018		2019		2020					
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%				
1.	Baik	374,11	44,15	377,94	44,6	528,9	62,42	576,24	68,01	582,69	68,77				
2.	Sedang	117,37	13,85	170,34	20,1	118,7	14,00	105,73	12,48	104,56	12,34				
3.	Rusak Ringan	150,93	17,81	139,51	16,5	82,98	9,79	70,94	8,37	69,22	8,17				

	Kondisi Jalan		Panjang Jalan Per Tahun												
No		2016		2017		2018		2019		2020					
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%				
4.	Rusak Berat	204,86	24,18	159,48	18,8	116,8	13,78	94,355	11,14	90,81	10,72				
	Total	847,27	100	847,27	100	847,3	100	847,27	100	847,27	100				
Mantap										687,25	81,11				
	Tidak Mantap 160,02														

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas Secara umum, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir kondisi jalan Kabupaten yang baik meningkat persentasenya. Hal ini merupakan hasil pembangunan yang didanai APBD Kabupaten Tegal. Saat ini kondisi jalan rusak berat masih mencapai 90,81 km atau sekitar10,72%. Kondisi jalan rusak berat di Kabupaten Tegal berada pada jalan jalan kecil yang bukan jalan stategis dimana sebagian besar berfungsi sebagai jalan usaha pertanian. Sedangankan jalan rusak berat dan berfungsi sebagai jalan strategis akan menjadi prioritas dan Pekerjaan Rumah yang harus diselesaikan secara tuntas di waktu yang akan datang.

Untuk menjamin konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal, Indikator infrastruktur jalan seharusnya bukan lagi baik, sedang, rusak ringan, maupun rusak berat, Namun seharusnya indikator pembangunan infrastruk jalan mantap dan tidak mantap. Jalan Mantap dapat diartikan dengan jalan yang ada secara fisik harus dalam kondisi baik, secara dimensi dan konstruksinya serta kelengkapan jalannya harus sesuai dengan fungsinya.

Kemantapan jalan secara dimensi dapat dilihat dari lebar minimal jalan sesuai standar, yaitu sama dengan dan lebih dari 4 (empat) meter, dimana kondisi jalan kabupaten secara umum baru mencapai 62,89% atau sekitar 532,89 km yang memiliki lebar sesuai standar, sedangkan sisanya sekitar 314,38 km memiliki dimensi lebar jalan kurang dari 4 (empat) meter, sehingga salah satu target kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal adalah meningkatkan dimensi jalan sesuai standar, dan sampai dengan tahun 2020 kondisi Jalan mantap (Kondisi baik dan sedang) adalah 81,11% atau sekitar 687,25 km.

Berdasarkan Hirarki dan kewenangan, drainase yang menjadi kewenangan kabupaten adalah drainase sekunder yaitu yang sejajar dengan jalan kabupaten. Kebutuhan drainase jalan di Kabupaten Tegal adalah sekitar 490,15 km, sampai dengan akhir tahun 2020 telah terbangun sekitar 286,35 km atau 58,42%. Dari data capaian penyediaan jaringan drainase di Kabupaten Tegal terdapat peningkatan panjang drainase dari tahun ke tahun sebagaimana tersaji pada tabel dibawah.

Tabel 2. 42 Panjang Drainase Jalan Kabupaten Tahun 2016-2020

		Panjang Drainase Jalan Per Tahun							
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
		Km	Km	Km	Km	Km			
a	Jalan Kabupaten	847,27	847,27	847,27	847,3	847,27			
b	Jalan yg harus berdrainase	477,46	477,46	477,46	490,2	490,15			
С	Jalan yg tidak harus berdrainase	147,83	137,02	115,40	79,17	70,77			
d	Jalan yg berdrainase	221,98	232,79	254,41	278	286,35			
	Persentase jalan berdrainase (d/b)	46,49	48,76	53,28	56,71	58,42			

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

8) Infrastruktur Jembatan

Data infrastruktur jembatan di Kabupaten Tegal pada tahun 2016 berjumlah 436 unit, sedangkan pada akhir Tahun 2020 berjumlah 460 unit. Hal ini selama kurung waktu 5 tahun terkahir terdapat pembangunan jembatan baru dan updating data jembatan.

Tabel 2. 43 Jumlah Jembatan Kabupaten Tahun 2016-2020

	Kondisi		Jumlah Jembatan Per Tahun										
No		2016		2017		2018		2019		2020			
	Jalan	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%		
1.	Baik	266	61,01	282	64,7	298	67,12	301	67,79	316	68,7		
2.	Sedang	50	11,47	69	15,8	93	20,95	91	20,5	89	19,35		
3.	Rusak Ringan	52	11,93	57	13,1	30	6,76	30	6,76	33	7,17		
4.	Rusak Berat	68	15,6	28	6,42	23	5,18	22	4,95	22	4,78		
	Total	436	100	436	100	444	100	444	100	460	100		

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, kondisi jembatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir semakin baik dimana jembatan yang baik sebanyak 316 unit (68,7%), sedangan yang masih dalam kondisi sedang, rusak ringan dan rusak berat adalah 144 unit (31,3%) dari jumlah keselurahan jembatan di Kabupaten Tegal, yaitu sebanyak 160 unit jembatan dengan panjang keselurahan mencapai 5.553,27 meter. Sebagaimana infrastrutur Jalan, infrastruktur jembatan haruslah mengikuti infrastruktur jalan, dimana kedepan Kondisi Jembatan harus dalam kondisi mantap yaitu mantap dalam arti sesuai dengan fungsi jalan yaitu dimensi (panjang dan lebar) harus sesuai dengan fungsinya, dan kemantapan jembatan di Kab. Tegal pada tahun 2020 telah mencapai 88,05%.

9) Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengawali pelaksanaan Urusan Penyelenggaraan Jasa konstruksi dengan mendasari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.

Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Tegal mengamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk menyelenggarakan Urusan tersebut namun demikian belum dapat memberikan anggaran guna pelaksanaan program Jasa Konstruksi, dikarenakan program tersebut tidak/belum terakomodir dalam RPJMD 2019-2024 dan Renstra DPU Kab. Tegal 2019-2024, yang kemudian disusun Renstra Terbatas DPU Kab. Tegal 2019-2024 guna menyusun indikator dan sasaran Program Jasa Konstruksi pada tahun-tahun selanjutnya.

Terkait pelaksanaan Penyelenggaran Urusan Jasa Konstruksi pada Bidang Jasa Konstruksi, Laboratorium, Monitoring, dan Evaluasi Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tegal di tahun 2020, baru sebatas layanan pemberian rekomendasi kepada para pemohon perpanjangan Ijin Usaha Jasa Konstruksi dari para penyelenggara Jasa Konstruksi di Kabupaten Tegal. Sampai dengan akhir tahun 2020 DPU Kab. Tegal telah menerima permohonan penerbitan rekomendasi dari 124 Badan Usaha

dan telah diterbitkan rekomendasi sebanyak 123 buah rekomendasi, 1 (satu) Badan Usaha tidak dapat diberikan rekomendasi dikarenakan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang dimiliki tidak dapat diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Sedangkan pada akhir tahun 2019 DPU Kab. Tegal mendasari Permen PUPR Nomor 08/PRT/M/2019 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan Usaha Jasa Konstruksi Nasional telah memberikan layanan tersebut kepada 5 (lima) Badan usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, bahwa Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota meerujuk pada Pasal 9 ayat (1) yang disebutkan bahwa "Kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada sub-urusan Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi: a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi; b. Sistem Informasi Konstruksi penvelenggaraan Iasa cakupan kabupaten/kota; c. penerbitan izin usaha nasional Kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi. Pada pasal (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah kabupatenlkota dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

10) Penataan Ruang

Penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang yang baik dan terpadu. Indikator Penataan Ruang pada fokus fasilitasi wilayah/infrastruktur antara lain dilihat dari ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang (RTR). Untuk melihat berapa niai ketaatan (persentase) antara realisasi pemanfaatan ruang terhadap dokumen RTR.

a. Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, Beberapa dokumen RTR yang harus dan yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tegal sampai dengan saat ini tergambar sebagaimana tabel di bawah ini:

Target Kondisi sesuai UU 2016 2017 2018 2019 **Dokumen RTR** 2020 Sampai No 26/2017 2020 RTR Wilayah (RTRW) 1 RTR Kawasan Strategis 2 Kab (KSK) 9 KSK Ekonomi 0 0 0 0 0 0 KSK Sosial Budaya 4 0 0 0 0 0 0 Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Dok RDTR 18 4 5 5 0 0 18 Perda RDTR 18 0 0 0 0 0 0 Rencana Tata Bangunan 0 0 0 0 0 3 10 dan Lingkungan

Tabel 2. 44 Jumlah Dokumen RTR Kabupaten Tahun 2016-2020

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Hanya 1 (satu) dokumen RTR yang sudah mendapatkan legalisasi hukum yaitu Perda 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RRTR) baru dalam tahap penyusunan dokumen namun belum ada yang diperdakan, karena mengacu proses legalisasi Perda Revisi RTRW.

b. Pemanfaatan Ruang

Terbitnya Perda Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tegal Tahun 2012 – 2032 bertujuan sebagai pedoman pemanfaatan ruang di Kabupaten Tegal agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berdayaguna serasi selaras seimbang dan berkelanjutan, serta mampu mensejahterakan masyarakat. Sehingga walaupun dalam skala makro RTRW ini dijadikan sebagai pedoman pemanfaatan dan pengendalian ruang. Khusus di Pemerintah Kabupaten indikator yang digunakan adalah pemanfaatan ruang dalam pengajuan permohonan Informasi Tata Ruang, agar tingkat ketaatan pembangunan terhadap rencana tata ruang dapat tetap terkendali.

Tabel 2. 45 Pemanfaatan Ruang Kabupaten Tahun 2014-2020

Uraian	s/d 2019	2020
Total Pengajuan Permohonan ITR	n/a	1114
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan	n/a	862
Pengajuan ITR yang Diperbolehkan Separuhnya	n/a	57
Pengajuan ITR yang Tidak Diperbolehkan	n/a	195
Persentase Ketaatan	n/a	79,93%

Sumber : Dokumen Penijauan Kembali (Dinas Perkimtaru), 2021

Data di atas menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 75% tingkat ketaatan tata ruang, di mana kondisi eksisting lahan tersebut merupakan lahan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan oleh masyarakat yang telah sesuai dengan rencana tata ruang. Sedangkan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana pola ruang Perda RTRW ditunjukkan dengan jumlah pengajuan ITR yang tidak diperbolehkan sebesar 17,5%, sedangkan pengajuan ITR yang diperbolehkan separuh adalah pengajuan ITR dengan bidang tanah yang jatuh pada dua Zonasi Tata Ruang yang berbeda, dan persentase pembolehan pembangunan diberikan mengikuti luas bidang tanah yang sesuai dengan rencana peruntukan pembangunan yang ditentukan oleh masyarakat.

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

11) Kawasan Kumuh

Luas dan sebaran lokasi kumuh di Kabupaten Tegal telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Nomor 484 Tahun 2015 yang telah direvisi dengan Keputusan Bupati Nomor 239 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Kumuh di Kabupaten Tegal, berbagai upaya telah dilakukan dalam upaya pengurangan lahan kumuh tersebut, luas dan sebaran pengurangan Kawasan kumuh di Kabupaten Tegal tergambar sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 46 Pengurangan Kawasan Kumuh Tahun 2016-2020

				Kon	disi Samp	ai 2020	
No	Kecamatan	Luas sesuai SK 239/2016	2017	2018	2019	2020	Kondisi Sampai 2020
1	Adiwerna	166,5	166,5	166,5	97,74	120,55	45,95
2	Dukuhturi	53,2	53,2	53,2	1,32	14,87	38,33
3	Jatinegara	18,4	18,4	18,4	0	0,19	18,21
4	Kedungbanteng	30,4	30,4	30,4	0	-27,96	58,36
5	Kramat	18,5	18,5	18,5	6,72	6,54	11,96
6	Lebaskiu	68,9	68,9	68,9	0	21,17	47,73
7	Slawi	28,5	28,5	28,5	4,2	16,11	12,39
8	Suradadi	48,6	48,6	48,6	0	-4,53	53,13
9	Talang	32,5	32,5	32,5	2,2	23,79	8,71
10	Tarub	9,88	9,88	9,88	0	0,92	8,96
11	Warureja	12,4	12,4	12,4	0	1,36	11,04
	Total	487,78	487,78	487,78	112,18	173,01	314,77

Sumber : Hasil Olah Data, 2021

Pada tahun 2020 terdapat penambahan luas permukiman kumuh pada Kecamatan Kedungbanteng (27,96 Ha) dan Kecamatan Suradadi (4,53 Ha) dikarenakan adanya perubahan perhitungan luas permukiman yang berlaku (Peraturan Menteri PUPR Nomor 14 Tahun 2018). Namun secara keseluruhan dari luas kawasan kumuh 487,78 Ha telah terjadi penurunan luas kawasan kumuh seluas 173,01 Ha (35%). Hal tersebut dilakukan melalui kolaboratif anggaran dari pusat, provinsi, kabupaten dan desa, sehingga sampai dengan akhir Tahun 2020 luas kumuh di kabupaten Tegal menjadi 314,77 Ha.

12) Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana

Kerusakan tempat tinggal merupakan salah satu dampak dari adanya bencana alam. Untuk tetap menjaga kualitas hidup masyarakat korban bencana maka pemerintah berupaya untuk menyediakan atau melakukan perbaikan rumah bagi para korban bencana. Data penyediaan dan rehab rumah bagi korban bencana yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 47 Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Rencana Unit Rumah Korban Bencana yang akan ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
Unit Rumah Korban Bencana yang ditangani pada Tahun n	N/A	27	N/A	5	11
% Capaian Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana	N/A	100%	N/A	100%	100%

Sumber : Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Sumber dana bantuan untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana pada tahun 2017 dan 2019 berdasaran data pada tabel diatas merupakan dari *corporate social responsibility (CSR)* dari Bank Jateng, sedangkan pada tahun 2020 bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

13) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Kabupaten tercatat sebesar 42.675 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- a. Prioritas Utama adalah Kelompok Rumah Tangga yang mempunyai tingkat keparahan (7 Indikator) tidak layak sebanyak : 1.331 KRT
- b. Prioritas 1,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT
- c. Prioritas 2,10 persen KRT termiskin yang mempunyai tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 4.268 KRT

Tabel 2. 48 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Tahun 2016-2020 Jumlah DTI II Vamulatif satian Tahun (VDT)

Uraian	Jun	Jumian RTLH Komulatif setiap Tahun (KRT)								
Uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020					
Data RTLH 40% desil terendah	42.675	42.675	42.675	42.675	42.675					
Komulatif Realisasi RTLH	437	845	2.323	4.585	5.575					
% Capaian RTLH	1,02	1,98	5,44	10,74	13,06					

Sumber: Olah data SIMAS, 2021

Untuk prioritas utama RTLH di Kabupaten telah ditangani secara tuntas pada Tahun 2015, sedangkan 2016 – 2020 sasaran RTLH adalah KRT yang berada pada prioritas I yaitu 10 persen kelompok termisikin dari PBDT. Besaran Anggaran alokasi RTLH Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sebesar Rp. 20 Juta per KRT. Angka ini lebih tinggi dari alokasi Pemerintah Pusat sebesar Rp. 17,5 Juta dan Pemerintah Provinsi sebesar Rp. 10 Juta.

14) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum

Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum merpakan kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial budaya dan ekonomi.

Setiap unit rumah menjadi layak huni dengan tercukupinya akses terhadap jaringan PSU berupa jaringan jalan, jaringan listrik, Ruang Terbuka Hijau/Non Hijau,

serta akses terhadap jaringan air minum dan sanitasi. Dari jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal yang berjumlah 387.253 unit, capaian ketersediaan PSU tergambar sebagaimana tabel berikut: Tabel 2. 49 Capaian Akses PSU Tahun 2016 - 2020

	Capaian Akses PSU									
Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%
Jumlah unit rumah di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	387.253	-	387.253	-
Jumlah rumah tangga/KK di Kabupaten Tegal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	499.489	-	534.004	-

					Capai	ian Aks	ses PSU			
Uraian	2016		2017		2018		2019		2020	
		%		%		%		%		%
Jumlah rumah yang difasilitasi air minum (unit)	N/A	N/A	N/A	N/A	194. 068	50,1 1	198.032	51,13	213.228	55,06
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses sanitasi (KK)	N/A	N/A	N/A	N/A	347. 335	77,8 3	423.229	83,7	379.818	84
Jumlah rumah tangga yang terfasilitasi akses listrik (KK)	N/A	N/A	335. 635	N/A	355. 124	N/A	367.421	94,87	367.421	94,87
Capaian Akses PSU Keseluruhan (%)	-	N/A	-	N/A	-	N/A	-	76,56	-	77,97

Sumber: Dinas Perkimtaru Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut, dapat disimpulkan tidak meratanya ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal. Maka dari itu diperlukan suatu upaya mencapai ketersediaan PSU di Kabupaten Tegal, salah satunya dengan melakukan perencanaan pengembangan PSU yang berkualitas.

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

1) Penegakan Perundang-undangan Daerah

Penegakan Perundang-undangan Daerah dilaksanakan agar jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal akan semakin menurun. Kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu dengan penyuluhan, pembinaan dan pengawasan yang terus menerus dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, kesadaran, kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati guna terpeliharanya ketentraman, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua sektor terkait. Berikut disajikan data Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal selama kurun waktu tahun 2016-2020 seperti tabel dibawah ini:

Tabel 2. 50 Pelanggaran Peraturan Daerah yang ditindak Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penegakan Perda					
	a. Jumlah Pelanggaran Perda	293	503	108	110	129
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan Perda	192	371	82	96	107
	c. Penyelesaian Penegakan Perda	65,53	73,76	76	87,2	83
2.	Penegakan K3					
	a. Jumlah Pelanggaran K3	597	1.756	1673	1.623	1669
	b. Jumlah Penyelesaian Penegakan K3	180	1.688	1603	1.587	1604
	c. Penyelesaian Penegakan K3 (%)	88,23	96,13	96	97,7	96

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Untuk penyelesaian Penegakan Perda tahun 2016 dibandingkan sampai dengan tahun 2019 mengalami kenaikan, sedangkan untuk tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 mengalami penurunan, sehingga perlu ada penanganan yang lebih intensif dan perlu

kerjasama yang baik agar penanganan pelanggaran Perda semakin meningkat,, serta perlunya dukungan tenaga PPNS dan anggaran untuk penegakan Perda secara pro yustisi. Perda yang ditegakkan di tahun 2020 antara lain Perda Nomor 7 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum, Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang Retribusi Daerah, Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung, dan Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal Tahun 2012-2032. Penegakan Trantibum dari tahun 2016 sampai tahun 2020 mengalami kenaikan yang signifikan.

2) Ketentraman dan Ketertiban Umum

Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah untuk meningkatkan patroli siaga ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat. Sebagai salah satu upaya menjaga ketentraman dan ketertiban umum Satpol PP melakukan kegiatan patroli siaga diseluruh wilayah Kabupaten Tegal yang menjadi sasaran patroli yaitu tempat keramaian, hiburan malam dan PKL yang berjualan disepanjang bahu jalan, sesuai SPM patroli dilaksanakan tiga kali dalam sehari namun baru dilaksanakan dua kali dalam sehari. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerjasama dengan lembaga dan instansi yang terkait. Berikut disajikan data Cakupan Patroli Siaga Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Tegal mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun patroli siaga mengalami peningkatan pada tahun 2016 hanya 41 % sedangan tahun 2020 sebesar 72%

Tabel 2. 51 Cakupan Patroli Siaga dan Pelaporan Pengaduan yang Tertangani terkait Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah patroli siaga per tahun	1.095	1.095	1.095	1.095	1.095
2.	Target patroli siaga per tahun (3 kali sehari)	444	630	767	730	730
3.	Patroli siaga ketertibanumum dan ketentraman masyarakat	41	58	70	67	67
4.	Persentase Laporan Pengaduan Gangguan Trantibum yang tertangani	65%	76%	81%	84%	82%

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Patroli siaga ketentraman dan ketertiban umum dari tahun 2016 sampai tahun 2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, sedangkan untuk tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga untuk periode yang akan datang agar bisa meningkat.

3) Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran antara lain untuk meningkatkan rasio Linmas per RT dan penanganan kebakaran di Kabupaten Tegal. Pada tahun 2020 rasio tersebut mencapai 1:1,06. Hal ini berarti bahwa untuk setiap RT di Kabupaten Tegal tersedia jumlah Linmas sebanyak 1 orang lebih. Rasio ini lebih besar bila dibandingkan dengan yang ada dalam Permendagri nomor: 69 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal yang mentargetkan cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat 1 orang setiap RT. Rasio Linmas Terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 576 orang sedangkan jumlah Linmas sebanyak 7.295 orang. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio jumlah Linmas terlatih di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1:12. Jumlah

penanganan kebakaran diwilayah Kabupaten Tegal pada tahun 2016 mencapai 42 kebakaran, kebakaran yang tertangani 100%. Pada tahun 2020 terjadi kebakaran sebanyak 56 kejadian kebakaran jumlah ini lebih sedikit dibandingkan tahun 2019 yaitu 193 kejadian kebakaran. Hal ini menunjukan adanya penurunan kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Tegal. Penanganan bencana kebakaran akan bertambah baik apabila Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) terpenuhi yaitu ada 9 WMK, maka perlu penambahan mobil pemadam kebakaran (1 pos WMK 1 mobil Damkar), mobil yang dimiliki sekarang berjumlah 5 unit sehingga masih kurang 4 unit mobil Damkar. Juga perlu ada penambahan SDM pemadam kebakaran (1 pos WMK membutuhkan 18 orang). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel 2. 52 Rasio Jumlah Linmas per RT Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah RT	6.860	6.875	6.889	6.889	6.889
3.	Rasio jumlah Linmas per RT	1:1,05	1:1,05	1:1,06	1:1,06	1:1,06

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas per RT dari tahun ke tahun cenderung tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas per RT mengalami kenaikan.

Tabel 2. 53 Rasio Jumlah Linmas Terlatih Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Linmas	7.206	7.206	7.234	7.295	7.295
2.	Jumlah Terlatih	180	240	320	480	576
3.	Rasio jumlah Linmas	1:40	1:30	1:22	1:15	1:12

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Rasio jumlah Linmas terlatih dari tahun ke tahun mengalami peningkatan walaupun belum semua melaksanakan pelatihan, sehingga untuk tahun mendatang perlu kerja keras agar rasio jumlah Linmas terlatih mengalami kenaikan.

Tabel 2. 54 Kasus Kebakaran Tertangani Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah Kasus Kebakaran						
No.	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah kebakaran	78	99	153	193	56		
2.	Jumlah kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate 15 Menit)	42	56	88	169	44		
3.	Persentase Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (Response Time Rate 15 Menit)	54%	57%	58%	88%	79%		

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tegal, 2021

Kasus kebakaran tertangani dalam tingkat waktu tanggap (*Response Time Rate*) selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, ini merupakan usaha yang harus ditingkatkan agar untuk tahun-tahun mendatang semua jenis kebakaran bisa ditangani secara maksimal, sehingga resiko kebakaran bisa ditekan sekecil mungkin.

4) Kondisi Keamanan Ketentraman Ketertiban Masyarakat

Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal dengan indikator jumlah laporan bulanan analisis situasi dan kondisi daerah (ipoleksosbudhankam) tercapai 100% (sangat tinggi) dari Tahun 2015-2019. Laporan tersebut tersusun rutin setiap bulannya dan memuat kejadian-kejadian yang dianggap penting seputar Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan.

Tabel 2. 55 Kondisi Keamanan dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Trantibum						
NO.	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah LSM Aktif	75	75	79	79	80		
2.	Persentase Laporan Ipoleksosbudhankam lengkap	100	100	100	100	100		
3.	Persentase Dialog Umat Beragama Dialogis	100	100	100	100	100		
4.	Media Komunikasi Umat Beragama Aktif	1	1	1	1	2		
5.	Persentase Siskamling terintegrasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)	100	100	100	100	100		

Sumber: Badan Kesbangpol Kabupaten Tegal, 2021

Dengan naiknya jumlah LSM yang mendaftar di Kesbangpolinmas setiap tahun menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat untuk mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah meningkatkan. Kinerja merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, berorientasi pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu tertentu.

Pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Indikator pertama yaitu jumlah dialog umat beragama tercapai 100% (sangat tinggi) yaitu 1 kali dialog yang terdiri dari dialog rutin intern anggota Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dan dialog antara pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal dengan Masyarakat Kabupaten Tegal. Dialog Kerukunan Umat Beragama membahas berbagai permasalahan seputar potensi-potensi konflik dan kejadian konflik antar umat beragama di kalangan masyarakat Kabupaten Tegal guna menemukan solusi untuk mencegah dan menanggulangi konflik yang akan dan telah terjadi. Indikator kedua yaitu Jumlah media publikasi kerukunan umat beragama yang untuk saat ini hanya 1 jenis yaitu berupa brosur/pamphlet yang berisi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 / Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dengan dua indikator utamanya. Pertama jumlah dialog wawasan kebangsaan tercapai 100% yakni terselenggaranya Talkshow, Seminar dan Diskusi Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kalangan Masyarakat sebanyak 1 kali. Kecamatan dipilih sebagai sasaran pelaksanaan diskusi tersebut dengan argument bahwa telah ditangkapnya salah satu warga setempat sebagai pelaku aksi teror dan tahun 2017 telah

dipulangkan eks warga Gafatar yang sebagian berasal dari Desa Pekiringan Kecamatan Talang. Indikator kedua yaitu jumlah kerjasama kerukunan umat beragama tercapai 100% yaitu dengan telah dibentuknya sebuah Organisasi Non Pemerintah yang menangani kerjasama antar umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Tegal.

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan indikator yaitu cakupan siskamling dengan jumlah desa telah tercapai 100%. Cakupan siskamling yang dimaksud yaitu siskamling yang telah terintegrasi dengan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat sesuai Permendagri No. 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Di Kabupaten Tegal Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat telah terbentuk hingga ke tingkat Desa.

Pendidikan politik masyarakat dengan indikator pertama yaitu Ormas yang terdata dalam Sistem Database Ormas tercapai 100% yaitu terdapat sampai saat ini di tahun 218 terdapat 92 buah organisasi masyarakat yang beroperasi di wilayah Kabupaten Tegal yang telah mendaftar dan telah lolos verifikasi sehingga terdaftar dalam system database ormas Kabupaten Tegal.

5) Penanganan Tanggap Darurat Bencana

Penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Untuk tahun 2015 dan 2016 nya mengalamai kenaikan, tahun 2017 mengalami penurunan, tahun 2018 mengalami kenaikan, tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga perlu usaha peningkatan usaha agar penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik bisa mengalami peningkatan.

Tabel 2. 56 Jumlah Penanganan Bencana Tahun 2015-2019

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	72	54	65	54	60
Jumlah kejadian bencana	76	60	70	63	73
Kegiatan penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	94,74	90,00	92,86	85,71	82,19

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

6) Prosedur Tanggap Darurat Bencana

Dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun untuk dua tahun 2017 dan 2018 cenderung tetap, untuk tahun 2019 mengalami kenaikan dan untuk tahun 2020 tetap.

Tabel 2. 57 Persentase Peraturan Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun	-	2	2	3	3
Jumlah dokumen peraturan, pedoman dan prosedur, perencanaan, kajian penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana yang harus disusun	10	10	10	10	10

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
dokumen peraturan, pedoman dan prosedur,	-	20,00	20,00	30,00	30,00
perencanaan, kajian penanganan kedaruratan,					
peralatan dan logistik bencana yang dapat disusun					

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

7) Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana

Masyarakat siap siaga bencana dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi kadang naik juga kadang turun misalnya untuk dua tahun pertama mengalami kenaikan, dan tahun berikutnya mengalami penurunan, begitu juga untuk tahun beriutnya mengalami kenaikan dan pada tahun terakhir mengalami kenaikan, untuk itu perlu usaha-usaha yang keras agar masyarakat yang siap siaga bencana mengalami kenaikan dari tahun ketahun.

Tabel 2. 58 Persentase Penanganan Bencana

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah masyarakat yang dibina	130	340	490	425	300
dalam pencegahan dan					
kesiapsiagaan bencana					
Jumlah masyarakat yang	10.475	35.807	36.240	22.648	25.448
bertempat tinggal di wilayah					
pembinaan					
masyarakat siap siaga bencana	1,24	0,95	1,35	1,88	1,17

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Tegal, 2021

Kabupaten Tegal merupakan daerah rawan bencana. Jenis bencana yang berpotensi terjadi di Kabupaten Tegal antara lain kekeringan di kecamatan-kecamatan Warureja, Suradadi, Kramat dan Kedungbanteng. Banjir di Kecamatan Adiwerna, Dukuhturi, Warureja, Suradadi, Kramat. Tanah longsor di Kecamatan Tarub, Pangkah, Bumijawa, Bojong dan Jatinegara. Berikut disajikan data kebencanaan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 59 Kondisi Kebencanaaan Tahun 2016-2020

Indikator	Kebencanaan						
muikator	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah Desa Tangguh Bencana	0	2	2	2	2		
Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana (Milyard)	4,1	4,5	6,5	5,7	6,8		
Dokumen strategi pengurangan risiko bencana tingkat kabupaten	1	1	1	1	1		
Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0,21	0.15	0.2	0.3	0.4		

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, Tahun 2021

Desa tangguh bencana saat ini masih belum menyeluruh di desa-desa kawasan rawan bencana. Desa tangguh bencana masih merupakan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Untuk tahun yang akan datang diharapkan desa tangguh bencana dapat meningkat dengan memanfaatkan penganggaran melalui APBDesa.

Sosial

1) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial adalah upaya untuk meningkatkan refungsionalisasi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu anak, usia lanjut, disabilitas dan tuna sosial. Hasil dari upaya penanganan tersebut dapat dilihat dalam data Pelayanan dan Rehabilitasi PPKS mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 berikut.

Tabel 2. 60 Layanan PPKS Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Rehabilitasi Sosial PPKS	1.875	1.925	1.925	1950	1975
2.	Jumlah PPKS yang seharusnya direhabilitasi Sosial	1.982	2.000	2.000	2025	2050
3.	Cakupan Rehabilitasi Sosial PMKS	94,60	96,25	96,25	96,29	96,34

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

2) Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) baik perseorangan, lembaga, kelompok, keluarga dan masyarakat agar memiliki daya guna untuk berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Hasil Pemberdayaan Sosial dapat dilihat dalam Tabel 2.55 mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan dapat meningkatkan kapasitas PSKS.

Tabel 2. 61 Data Layanan PSKS Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pemberdayaan Perorangan,	2.025	2.025	1.925	1.875	1.763
	Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan					
	dan Sumber Dana Sosial.					
2.	Jumlah Perorangan, Keluarga,	2.050	2.050	2.145	2.145	2.100
	Kelembagaan, Kepahlawanan dan					
	Sumber Dana Sosial yang seharusnya					
	diberdayakan					
3.	Cakupan Pemberdayaan Sosial	98,78	98,78	89,74	87,41	85,71

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Jumlah Perorangan, Keluarga, Kelembagaan dan Sumber Dana Sosial yang diberdayakan semakin berkurang, hal ini menunjukan bahwa Pemberdayaan Sosial terhadap PSKS belum optimal dikarenakan:

- 1) Penguatan Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum Simultan dengan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
- 2) Belum semua LKSA melaksanakan Standar Nasional Pelayanan Anak (SNPA);
- 3) Belum semua LKS melaksanakan Standar Pelayanan Sosial yang telah ditetapkan/Terakreditasi;
- 4) Ijin Pengumpulan dan Penggunaan Sumber Pendanaan yang berasal dari masyarakat belum sepenuhnya dilaksanakan secara prosedural.

3) Perlindungan dan Jaminan Sosial

Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah pelayanan yang ditujukan kepada masyarakat Fakir miskin, beresiko sosial, rentan sosial dan anak terlantar, adapun upaya yang telah dilakukan dalam pemberian perlindungan dan jaminan sosial serta Pendataan Fakir Miskin tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 62 Layanan Perlindungan Sosial

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pelayanan Perlindungan	63.450	63.825	63.824	74.292	141.368
	dan Jaminan Sosial Kelompok					
	Beresiko Sosial					
2.	Jumlah Penanganan Kelompok	63.725	63.845	63.850	72.898	169.739
	Beresiko Sosial yang seharusnya					
	mendapat pelayanan					
	perlindungan dan Jaminan					
	Sosial					
3.	Cakupan Perlindungan dan	99,57	99,97	99,96	101,91	83,28
	Jaminan Sosial					

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 63 Data Penanganan Fakir Miskin Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Pendataan Sosial	623.456	688.943	697.893	723.590	701.931
	dan Penangganan Fakir					
	Miskin					
2.	Jumlah Pendataan Sosial	698.425	714.497	722.124	741.879	776.209
	dan Penangganan Fakir					
	Miskin yang seharusnya					
	ditangani					
3.	Cakupan Penanganan	89,26	96,42	96,64	97,50	90,43
	Fakir Miskin					

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

Sasaran program perlindungan dan jaminan sosial semakin meningkat, sehingga akses cakupan layanan sosial harus semakin ditingkatkan mengingat belum semua masyarakat yang layak dan kategori pra sejahtera mendapatkan Program Perlindungan dan jaminan sosial secara komprehensip, dengan melalui pendataan fakir miskin secara berkala.

4) Penanganan Bencana

Bencana merupakan peristiwa alam yang tidak bisa diprediksi kapan dan dimana akan terjadi, yang berdampak besar terhadap masyarakat baik materiil maupun korban jiwa serta menimbulkan trauma kepada masyarakat korban bencana sehingga perlu adanya penanganan yang tepat dan cepat. berdasarkan Data tiga tahun terakhir Mulai Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dapat kita lihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 64 Data Korban Bencana Kabupaten Tegal

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Korban Bencana yang ditangani	-		540	915	506
2.	Jumlah Korban Bencana yang seharusnya ditangani	-	-	540	915	506
3.	Cakupan Penanganan Korban Bencana	-	-	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Taman Makam pahlawan PURA KUSUMA merupakan lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional , anggota militer dan Pejabat Tinggi di wilayah Kabupaten Tegal.

Taman Makam Pahlawan PURA KUSUMA juga dijadikan sebagai tempat Ziarah ataupun kegiatan oleh masyarakat dan anak generasi muda untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan, sehingga akan muncul semangat patriotisme di kalangan generasi muda, untuk itu perlu adanya pengelolaan dan pemeliharaan secara terus menerus untuk menjaga sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan supaya tetap berfungsi dengan baik.

6) Penanganan Warga Migran Korban Kekerasan

Warga Migran adalah Warga negara Indonesia yang sedang atau akan melaksanakan suatu pekerjaan di luar Wilayah Indonesia dengan mendapatkan upah, namun karena sesuatu hal kadang mereka menjadi korban tindak kekerasan di negara lain , mulai dari kekerasan fisik maupun mental sehingga pemerintah berkewajiban untuk melindungi para migran dari korban kekerasan.

Tabel 2.65 Data Warga Migran Korban Kekerasan

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang ditangani	20	•	9	-	11
2.	Jumlah Warga Migran Korban Kekerasan yang seharusnya ditangani	20	-	9	-	11
3.	Cakupan Penanganan Warga Migran Korban kekerasan	100	-	100	-	100

Sumber: Dinas Sosial Kab. Tegal, 2021

Kasus kekerasan terhadap warga migran yang berasal dari wilayah kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 Tahun cukup menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, Meski kasusnya tidak terlalu banyak namun hal ini terjadi hampir setiap tahun , sehingga Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Dinas Sosial perlu memfasilitasi pemulangan warga migran hingga ke tempat asalnya serta melakukan pendampingan kepada warga migran yang mengalami trauma akibat kekerasan.

3.3.1. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

Tenaga Kerja

1) Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja yaitu rasio antara jumlah produk domestik regional bruto dengan total penduduk yang bekerja. Semakin tinggi nilai tingkat produktivitas semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan.

Tabel 2.66 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja terhadap PDRB

No	Uraian	Tahun						
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Nilai PDRB Kabupaten	5,92	5,38	5,51	5,58	-1,46		
2	Total Penduduk yang bekerja	569,566	645,162	630,593	645,698	644,978		
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	96,21	119,92	114,45	115,72	-441,76		

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

2) Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Kabupaten Tegal pada kurun waktu 2016 sampai dengan 2020 sangat bervariasi pada Tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun pada kurun waktu Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan, hal ini karena meningkatnya ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja. Secara rinci persentase pencari kerja yang ditempatkan dapat dilihat Tabel di bawah ini.

Tabel 2.67 Data Pencari dan Penempatan Tenaga Kerja di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

Tahun	Jumlah	rakar						
	Pencaker	AKL	AKAD	AKAN	BKK	Job Fair		
2016	11,788	129	91	493	-	-	713	
2017	16,077	124	231	653	3,537	10	4,555	
2018	15,464	942	1,589	1,866	3,116	870	8,383	
2019	10,432	1,179	932	669	-	-	2,780	
2020	15,189	1,097	1,020	193	-	-	2,310	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

3) Hubungan Industrial

Hubungan Industrial pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dilakukan antara pengusaha dengan pekerja, namun adakalanya dalam pelaksanaannya sering terjadinya perselisihan, beebrapa indikator dalam pelakasanaan Hubungan Industrial antara lain:

a. Tingkat Peraturan Perusahaan yang Disahkan

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki peraturan perusahaan dengan total perusahaan waji lapor.

Tabel 2.68 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

_	ı
468	382
	468

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

b. Tingkat Perjanjian Kerja Bersama

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama dengan total perusahaan waji lapor.

Tabel 2.69 Perusahaan Wajib Lapor Memiliki Perjanjian Kerja Bersama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib Lapor	433	667	-	-	-
2	Perusahaan Wajib lapor memiliki Perjanjian Kerja Bersama	6	6	4	4	5

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

c. Tingkat LKS Bipartit

Merupakan rasio antara jumlah perusahaan wajib lapor yang memiliki LKS Bipartit dengan total perusahaan waji lapor.

Tabel 2.70 LKS Bipatrit di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib	433	667	_	-	_
	Lapor					
2	Perusahaan Wajib lapor	13	14	15	21	24
	memiliki LKS Bipartit					

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

d. Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial

Merupakan rasio antara jumlah perselisihan Hubungan Industrial dengan total perusahaan waji lapor.

Tabel 2.71 Tingkat Perselisihan Hubungan Industrial di Kabupaten Tegal Tahun 2016 -2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan Wajib	433	667	_	_	_
	Lapor					
2	Jumlah Perselisihan	6	8	14	16	27
	Hubungan Industrial					

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Pemberdayaan Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan, anak dan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Dalam rangka memberdayakan perempuan menuju kesetaraan gender, diperlukan akses seluas-luasnya terhadap perempuan untuk berperan aktif di semua bidang kehidupan. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai capaian kinerja pemberdayaan perempuan 2016-2020. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Pemberdayaan Perempuan Tahun 2015 -2020

No.	Uraian	Ki	nerja Pe	emberda	yaan Pe	rempua	ın
NO.	Ulalali	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Keadilan dan Keseteraan Gender/APE	350	350	400	700	700	940
	(Anugerah Parahita Ekapraya)	330	330	400	700	700	940
2.	Jumlah Pekerja Perempuan sebagai PNS (Jiwa)	5.721	5.388	5.926	5.341	4862	4859
3.	Jumlah Perempuan sebagai Anggota DPRD (Jiwa)	10	10	10	10	12	12
4.	Persentase Keterwakilan Perempuan di Legislatif (%)	20	20	20	20	24	24

Sumber : DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Untuk mengetahui peran aktif perempuan salah satunya dapat diukur dari partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah maupun swasta. Capaian kinerja APE telah menunjukkan kinerja yang baik, Kabupaten Tegal berada pada posisi APE Madya. Kondisi ini perlu dipertahankan untuk menggambarkan kinerja pemberdayaan perempuan yang lebih baik lagi.

Perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menduduki posisi manajer cukup mendapat tempat dalam struktur birokrasi di Kabupaten Tegal. Kondisi kinerja selalu meningkat dari tahun ke tahun, sebagaimana dapat dicermati dalam gambar berikut.

Tabel 2. 73 Perempuan ASN sebagai Manajer Tahun 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Perempuan pada jabatan eselon I,II,III, dan IV	25.22	26.13	26.75	27.95	28.69	28,83

Sumber: Evaluasi RAD SDGs. 2021

Keberadaan perempuan ASN menduduki posisi manajer dimungkinkan karena kapasitas ASN perempuan tidak kalah bersaing dengan ASN laki-laki dari segi kapasitas, kompetensi dan kepemimpinan. Sehingga penempatan jabatan ASN perempuan dapat diterapkan, meningkat setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, pembangunan yang dilaksanakan harus berpijak pada perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Sebagai bentuk upaya implementasi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan di daerah ditunjukkan dengan anggaran responsif gender (ARG). Berikut ini Anggaran Responsif Gender (ARG) di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 74 Anggaran Responsif Gender (ARG) Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Ma	Uraian	Persentase ARG							
No.		2016	2017	2018	2019	2020			
1.	Jumlah ARG pada belanja			36.547.	248.727.	491.396.			
	operasi APBD	,	,	450.000	027.000	436.000			
2.	Belanja operasi APBD	1.546.321.	1.611.513.	1.704.320.	1.776.181.	1.830.927.			
		787.664	759.083	211.333	411.040	981.000			
3.	Persentase ARG terhadap	NA	NA	2,14	14,00	26,84			
	belanja Operasi APBD								

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

2) Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi Negara hadir dalam melindungi segenap warga Negara termasuk perempuan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran didalam kehidupan rumah tangga.

Tabel 2. 75 Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Kasus KDRT							
NO.	Uraiaii	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Perempuan yang mengalami kekerasan	61	59	90	42	54	40		
2.	Jumlah Penduduk Perempuan	708.750	718.873	721.004	722.920	753.718	774.913		
3	Rasio kekerasan terhadap	8,61	8,21	12.48	5,81	7,16	5,16		
Э.	Perempuan	0,01	0,21	12,40	3,01	7,10	3,10		

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Peningkatan Kualitas Keluarga

Keluarga yang sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, maupun yang memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, memiliki hubungan yang serasi dan selaras, seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungan. Pengasuhan memegang peran yang sangat penting dalam sebuah keluarga dan akan menentukan baik buruknya karakter seorang anak kelak. Kegagalan keluarga dalam melaksanakan tanggung jawab pengasuhan disertai lemahnya program pemerintah dalam membantu/ memberdayakan keluarga tersebut untuk mengasuh dan melindungi anak, dikhawatirkan akan menyebabkan anak berada dalam kondisi rentan dan beresiko mengalami kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya. Oleh karena itu, Kemen PPPA telah menyiapkan program unggulan PUSPAGA untuk mengatasi masalah tersebut.

Program peningkatan kualitas keluarga merupakan program yang baru dilaksanakan mulai tahun 2020 di Kabupaten Tegal berupa pelayanan konseling kepada keluarga, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.76 Pencapaian Peningkatan Kualitas Keluarga Tahun 2015-2020

No	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga						
No.		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah keluarga yang mendapat pelayanan konseling	-	-	-	-	-	203	

No	Uraian	Pelayanan Kualitas Keluarga							
No.		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
2.	Jumlah keluarga	ı	428.261	-	517.914	534.392	538.160		
3.	Persentase pelayanan peningkatan kualitas keluarga	NA	NA	NA	NA	NA	0,04		

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

4) Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Tujuan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak adalah untuk meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data informasi gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program/kegiatan pembangunan yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam menyusun program/kegiatan yang responsive gender dan peduli hak anak. Berikut pencapaian pengelolaan sistem data gender dan anak di Kabupaten Tegal Tahun 2015 -2020

Tabel 2.78 Pencapaian Pengelolaan Data Gender dan Anak Tahun 2015-2020

No.	Uraian	Per	ngelolaan	Sistem D	ata Gend	er dan Aı	nak
NO.	Ulaian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah lembaga/ instansi yang menyediakan atau memberikan data gender dan anak	15	15	15	15	15	15
2.	Jumlah lembaga/ instansi	48	48	48	48	48	48
3.	Persentase penyediaan dan pengelolaan data gender dan anak	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25	31,25

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

5) Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pembentukan Desa Layak Anak (Delana) dan Forum Anak tingkat Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dicermati Tabel berikut.

Tabel 2. 79 Capaian Sasaran Program Perlindungan Anak Tahun 2015-2020

No	Urajan			Tahu	n (%)		
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Capaian Pemenuhan Hak Anak	250	300	400	500	550	570
2.	Persentase Desa Layak Anak (Delana) yang dibentuk.	3,48	4,18	5,22	6,62	20,6	20,6
3.	Persentase Forum Anak tingkat Desa yang dibentuk.	1,33	1,33	1,39	1,39	4,9	4,88
4.	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang ditangani.	0	2	5	5	5,1	9
5.	Jumlah Tenaga Terlatih Konvensi Hak Anak (KHA).	0	50	100	100	120	75
6.	Persentase Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) yang terbentuk. Kecamatan	0	0	2	2	27,8	28

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Capaian pemenuhan hak anak menunjukkan kinerja yang belum optimal. Capaian pemenuhan hak anak Kabupaten Tegal masih menunjukkan posisi KLA Pratama. Hal ini disebabkan koordinasi lintas sektor belum optimal dalam memenuhi ketentuan persyaratan KLA. KLA merupakan indikator yang menggambarkan kinerja pelayanan di bidang perlindungan anak.

6) Perlindungan Khusus Anak

Keberadaan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) cukup efektif untuk menindaklanjuti pengaduan kekerasan dalam rumah tangga. Angka KDRT perlu dipertahankan untuk ditekan. Meski demikian KDRT yang ada masih fenomena gunung es, yaitu kecenderungan korban KDRT untuk melapor dimungkinkan masih rendah karena merasa malu atau takut melapor. Penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak dikoordinasikan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (P2TPA). Berikut disajikan data penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Tabel 2. 80 Persentase Kekerasan terhadap Anak Kabupaten Tegal 2015-2020

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Anak yang mengalami	31	65	78	19	46	36
kekerasan						
Jumlah Anak seluruhnya	497.552	493.169	488.628	483.936	479.168	474.291
Persentase kekerasan	0,0062	0,0132	0,0160	0,0039	0,0096	0,0076
terhadap anak						

Sumber: Evaluasi RAD SDGs, 2021

Kesadaran masyarakat untuk melaporkan penangangan terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang baik. Pada tahun 2016 jumlah laporan cukup tinggi, dan pada tahun-tahun selanjutnya jumlah laporan menurun. Dari semua laporan yang ada, telah ditindaklanjuti 100%, baik berupa penanganan medis, mediasi hingga upaya jalur hukum.

C. Pangan

1) Ketersediaan Pangan Utama

Pangan merupakan suatu kebutuhan dasar utama bagi manusia untuk dapat mempertahankan hidup, oleh karena itu kecukupan pangan bagi setiap orang pada setiap waktu merupakan hak azazi yang harus dipenuhi. Ketersediaan pangan suatu wilayah didasarkan pada ketersediaan pangan utama, jumlah konsumsi pangan dan jumlah penduduk. Tabel berikut memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 81 Ketersediaan Pangan Utama di Kabupaten Tegal Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Ketersediaan Pangan	214.863	221.533	221.928	222.421	223.568
	Utama(ton)					
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.424.890	1.429.386	1.433.515	1.440.698	1.596.996
3.	Jumlah Komsumsi Pangan Utama(ton)	133.156	133.155	134.588	135.987	136.481
4.	Ketersediaan Pangan Utama (ton)	161,36	166,37	164,89	163,56	163,80
	terhadap Jumlah Komsumsi Pangan					
	Utama					

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Ketersediaan pangan di Kab. Tegal terus meningkat, dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 Jumlah ketersediaan pangan utama 223.568 ton dan jumlah penduduk 1.596.996 Jiwa, secara otomatis konsumsi pangan utama meningkat menjadi 136.481 dengan ketersediaan pangan utama mencapai 163.80 persen.

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan pangan dihitung dengan mempertimbangkan dari 1) sisi permintaan (demand) dengan memperhatikan laju pertumbuhan penduduk, indeks konsumsi beras penduduk pertahun dan 2) sisi ketersediaan (supply) dengan mempertimbangkan produksi padi, produksi beras dan tingkat produktifitas lahan sawah dalam pemenuhan kebutuhan beras.

Kebutuhan total beras di tahun 2031 sebesar 187.820,44 ton sedangkan ketersediaan padi di tahun 2031 sebesar 1.440.981,12 ton dan ketersediaan beras di tahun 2013 sebesar 936.637, 65 ton. Dari hasil perhitungan perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan pangan di Kabupaten Tegal, dapat diketahui bahwa Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) masyarakat. Sedangkan untuk posisi daya dukung lahan sawah sampai akhir tahun perencanaan mempunyai nilai $\alpha > 1$, berarti wilayah tersebut mampu swasembada pangan dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal.

2) Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal

Pangan merupakan unsur yang sangat penting dalam peningkatan produktvitas serta perbaikan kualitas penduduk. Distribusi dan akses pangan memiliki peranan yang sangat strategis karena mempengaruhi kebutuhan masyarakat. Distribusi pangan diharapkan dapat terlaksana secara efektif, efisen dan merata sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan. Tabel berikut mejelaskan tentang Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Tabel 2. 82 Distribusi dan Akses Pangan, Penganekaragaman dan Distribusi Pangan, Penanganan Kerawanan Pangan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Distribusi dan Akses Pangan					
	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan		49,95	77,68	104,22	105,23
	akses pangan di daerah					
	Stabilitas harga dan pasokan pangan	87,07	85,14	98,67	91,64	93,52
2.	Penganekaragaman dan Keamanan Pangan					
	Skor pola pangan harapan	83,8	83,6	72,1	78,6	80,4,
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	80	73,58	•	-	-
3.	Penanganan kerawanan pangan					
	Penanganan daerah rawan pangan	7	16	9	15	11

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Indikator dari jenis pelayanan Distribusi dan Akses Pangan adalah Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah, serta indikator stabilitas harga dan pasokan pangan. Target komoditas yang wajib dipantau untuk diketahui informasi pasokan, harga dan akses adalah gabah/beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir dan cabe merah.

Indikator dari jenis pelayanan Penganekaragaman dan Keamanan Pangan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) dan indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan.

Indikator dari Penanganan Kerawanan Pangan pada Tahun 2018 sebanyak 15 Desa, sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi 11. Dukungan untuk pencapaian jenis pelayanan ini antara lain dengan pembuatan peta ketahanan dan kerentanan pangan tingkat Kabupaten Tegal.

3) Regulasi Ketanahan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan Peraturan pemerintah (PP) nomor 3 tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Gubernur dan Bupati/Walikota, dimana bahwa gubernur dan bupati/walikota mempunyai kewajiban melaporkan kepada pemerintah dan DPRD tentang pembangunan ketahanan pangan; dan sesuai dengan PP Nomor 38 tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa ketahanan pangan menjadi urusan wajib pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peraturan perundang-undangan terkait dengan ketahanan pangan yang dapat dipedomani pemerintah Kabupaten/Kota telah tersedia, diantaranya yaitu: UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan; PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan; PP 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

D. Pertanahan

Urusan pertanahan berdasarkan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahahan Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Terkait dengan urusan pertanahan maka pemerintah kabupaten Tegal hanya fokus pada koordinasi dalam hal pelaksanaan kegiatan pertanahan serta menfasilitasi proses pengurusan sertifikasi tanah – tanah yang merupakan aset pemerintah kabupaten.

Tabel 2. 83 Sertifikat Tanah Pemerintah Darah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Bidang tanah Keseluruhan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	Jumlah Bidang tanah yang telah					
	bersertifikat					
	a. Swadaya	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	b. Pendaftaran Tanah Sistematik	3.250	5.000	25.00	45.000	45.000
	Lengkap (PTSL)			0		
3	Jumlah Bidang Tanah Milik	1.593	1.593	1.593	1.593	1.593
	Kabupaten					
	a. Bersertifkat	N/A	N/A	N/A	816	1.302
	b. Belum Berseritikat	N/A	N/A	N/A	677	677

Sumber : BPN dan Dinas Perkimtaru Kab. Tegal, 2021

Tabel di atas menunjukan bahwa Pemerintah Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir hanya mampu menyelesaikan hak atas tanah milik Pemda dengan jumlah 816 bidang atau sekitar 52,22 % dari jumlah total bidang tanah yang dimiiki Pememerintah Daerah.

E. Lingkungan Hidup

1) Tata Lingkungan

Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Tegal sudah mengacu pada wawasan Lingkungan Hidup dan Berkelanjutan. Hal ini sudah ditunjukkan mulai tahun 2018 dalam berbagai kegiatan seperti penyusunan KLHS pada Perda RTRW 1 paket, penyusunan RDTR Kecamatan 1 Paket dan penyusunan KLHS RPMJD Kabupaten Tegal tahun 2019-2024. Inventarisasi dan Identifikasi Kerusakan Lingkungan (Kerusakan Biomassa) telah dilakukan sejak Tahun 2017 dan 2018 untuk 2 lokasi, sedangkan Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran limbah B3 tahun 2018 untuk 1 lokasi. Adapun terkait Kajian Dampak Lingkungan untuk selama 5 tahun terakhir tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84 Kajian Dampak Lingkungan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Usaha/kegiatan Wajib Izin Lingkungan	64	70	55	72	57
	(Amdal/UKL-UPL)					
2.	SPPL (usaha kecil/mikro)	107	140	151	364	506

Sumber: DLH Kabupaten Tegal, 2021

Kondisi tersebut diatas diharapkan dapat mendukung peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Tegal dari semula sebesar 63,78 (kurang) menjadi bernilai cukup (66,00 s/d 74,00) serta seluruh rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan perizinannya harus layak sesuai dengan lingkungan hidup.

2) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup adalah untuk mengendalikan kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi meningkatnya jumlah pemantauan lingkungan, meningkatkatnya jumlah kampung iklim yang terbentuk, penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), meningkatnya jumlah usaha dan/kegiatan yang memiliki IPLC, dan menurunnya tingkat kerusakan lingkungan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras semua pihak yang terkait.

Tabel 2. 85 Cakupan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah pemantauan lingkungan	65	54	55	68	0
2	Jumlah Rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair	4	9	3	4	8
3	Jumlah Pembinaan usaha	15	20	20	50	0
4	Jumlah Wilayah yang terkena Kerusakan Lingkungan	6	8	10	4	9

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Perhitungan dari keenam jenis kajian dihasilkan rata-rata Pengendalian Kualitas dan kuantitas pengelolaan Lingkungan Hidup, melalui metode skoring yang berbeda ataupun skoring tunggal.

3) Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan

Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam perlindungan dan pengelolan lingkungan hidup melalui peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup selalu terawasi, dapat dicegah dan/atau dihentikan pelanggaran perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik, dan dapat tertangani melalui pengaduan masyarakat terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Beberapa raihan kinerja dalam bidang peningkatan kapasitas dan penataan hukum lingkungan, termasuk di tingkat provinsi juara lomba kelurahan bersih hijau 1 kelurahan tahun 2017, juara Proklim 1 Kelurahan tahun 2016, Penerima Penghargaan Kalpataru 1 orang di tahun 2013 dan 2 orang di tahun 2015, Penerima Penghargaan Pelestari Sumber Daya Genetik 1 orang di Tahun 2015. Terkait penerapan sangsi administrasi di tahun 2015 sebanyak 21 buah, Tahun 2016 sebanyak 6 buah, Tahun 2017 sebanyak 18 buah terbanyak, dan Tahun 2018 mulai menurun menjadi 4 buah. Perusahaan yang mengikuti PROPERNAS sebanyak 2 di tahun 2013, 8 perusahaan di Tahun 2014, 11 Perusahaan di Tahun 2017 dan 2 perusahaan di tahun 2018. Properda diikuti sebanyak 5 perusahaan di Tahun 2015, 7 perusahaan di Tahun 2016, 10 Perusahaan di tahun 2017 dan 3 Perusahaan di tahun 2018. Penanganan dan / atau penyelesaian pengaduan masyarakat sebanyak 3 ditahun 2017, 9 di tahun 2017 dan 7 di tahun 2018.

Tabel 2. 86 Data Cakupan Peningkatan Kapasitas dan Penaatan Hukum Lingkungan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Sekolah Adiwiyata					
	- Tingkat Nasional				2	-
	- Tingkat Provinsi	5	7	2	4	-
	- Tingkat Kabupaten	22	24	2	9	-
	Denominator : Sekolah potensi	44	60	10	59	-
	minat adiwiyata (dikali %)					
2.	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan Denominator : Total Perusahaan (dikali %)	30,3% (63 dri 208)	47,2 % (110 dri 233)	50,38 % (1310 dri 233)	61,25 (147 dari 240)	26,31 (15 dari 57)
3.	Jumlah Penerapan Sanksi	6	18	4	1	7
	Administrasi					
	Denominator : Hasil mapping					
	sanksi administrasi (dikali %)					

Sumber : DLH Kab. Tegal, 2021

4) Pengelolaan Sampah Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Tegal dilaksanakan melalui penambahan armada dan sarana prasarana persampahan. Volume sampah yang terangkut per hari di Kabupaten Tegal diharapkan akan terjadi peningkatan yang signifikan. Hasil dari pengelolaan sampah adalah meningkatnya volume sampah yang terangkut per hari sebagaimana tersaji data pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.87 Volume Sampah Yang Terangkut Per Hari Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah volume sampah yang	289,89	347,00	512,37	566	578
	terangkut (m³)					
2	Jumlah volume sampah yang	458,00	496,00	640,46	573,41	583,79
	dihasilkan (m³)					
3	Sampah terangkut	63,29	70,00	80.00	98,00	99,00

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Dalam penanganan sampah menngunakan pendekatan berbasis *3R yaitu Reduce* (mengurangi), *Reuse* (mengunakan kemballi) dan *Recycle* (mendaur ulang) telah dibentuk Bank Sampah melalui komunitas sebanyak 120 unit di tahun 2018 ini. Dengan jumlah tersebut di harapkan dapat meningkat di tahun 2024, sehingga program pengurangan sampah plastik di harapkan dapat secara maksimal di terapkan. Berikut adalah data pembentukan Bank Sampah sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.88 Bank Sampah Tahun 2016 - 2020

No.	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1	Bonk Compah (unit)	86	86	120	130	140
1.	Bank Sampah (unit)	unit	unit	unit	unit	unit
2.	Potensi Bank Sampah yg dibentuk	100	100	129	135	140
	(unit)	unit	unit	unit	unit	unit
3.	Bank Sampah yg dibentuk (%)	86	86	93	96	100

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Berikut adalah gambaran rasio tempat pembuangan sampah terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Tegal, sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.89 Rasio Tempat Pembuangan Sampah Sementara terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2016-2020

No.	Uraian			Kondisi TPS	S		
NO.	Uralali	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah TPSS (unit)	72	113	118	124	129	
2.	Jumlah Daya Tampung TPS (ton)	141,92	222,75	240,66	206,43	242,50	
3.	Jumlah Penduduk (jiwa)	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.566.587	1.599.432	
4.	Rasio Daya Tampung TPS per 1.000 penduduk	0.099	0,155	0,082	0,155	0,151	

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

Sebelum sampah diangkut / dibuang ke TPSA, terlebih dahulu sampah dikumpulkan dibeberapa lokasi TPSS yang sudah ditentukan. Jumlah TPSS di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 129 buah (berlokasi di pasar dan pabrik). Daya tampung setiap TPSS tersebut sebesar 242,50 ton. Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 (satu) TPA yaitu TPA Penujah dengan menggunakan sistem controlled landfill sehingga perlu ditingkatkan ke sistem sanitary landfill, mendasari hal tersebut maka, perlu dilaksanakan revitalisasi TPA Penujah dan Perencanaan Pembuatan TPA baru untuk meningkatkan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 90 Kondisi Tempat Pemrosesan Sampah Tahun 2016-2020

No	Urajan	Kondisi TPA						
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Volume Sampah (m³)	104.359	124.708	137.883	146,604	148,425		
2.	Jumlah TPA (unit)	1	1	1	1	1		
3.	Luas TPA (m2)	41.691	41.691	41.691	41.691	41,691		

Sumber: DLH Kab. Tegal, 2021

F. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Pendaftaran Penduduk adalah layanan pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas berupa Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), Kartu Identitas Anak (KIA) atau surat keterangan kependudukan.

Seiring dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan, angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA juga semakin bertambah. Hal ini berdampak pada meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dokumen kependudukan. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan akan menunjang penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan yang berkualitas. Cakupan kepemilikan KTP el, KK dan KIA mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 91 Kepemilikan KTP el, KK dan KIA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas						
No.		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Kepemilikan KTP el	84,21	73,42	84,13	97,08	99,68		
2.	Kartu Keluarga (KK)	78,52	83,75	88,68	90,86	91,67		
3.	Kepemilikan KIA	-	7.415	-	9,68	21,80		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dalam tabel di atas diketahui bahwa angka kepemilikan KK, KTP-el dan KIA secara signifikan meningkat. Namun peningkatan hasil pelayanan pendaftaran penduduk belum merata ke seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Terutama bagi penduduk pada wilayah-wilayah tertentu yang jauh dari tempat pelayanan atau faktor lain seperti orang dengan kebutuhan khusus, difable dan lain-lain. Oleh karena itu agar pelayanan pendaftaran penduduk tetap sampai kepada masyarakat yang membutuhkan, diperlukan kerja sama dari perangkat daerah terkait untuk menuntaskan target kepemilikan identitas penduduk bagi masyarakat Kabupaten Tegal.

Untuk pelayanan penerbitan KIA di Kabupaten Tegal, dimulai pada tahun 2017. Tahun 2018 pencetakan KIA dihentikan sementara, karena terkendala sarana dan prasarana. Kebutuhan kelengkapan dan peralatan KIA mulai terpenuhi secara bertahap pada tahun 2019, sehingga penerbitan KIA dapat dilanjutkan kembali.

2) Pelayanan Catatan Sipil

Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan pencatatan peristiwa penting yang dialami penduduk dalam register pencatatan sipil kemudian diterbitkan akta-akta Catatan Sipil. Peristiwa Penting antara lain kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraian (bagi non muslim), termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan dan ganti nama merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Namun penggunaan akta-akta catatan sipil sering terabaikan karena penggunaannya terbatas, kurang terlibat dalam jaringan dan pelayanan, baik sosial maupun ekonomi. Sehingga perlu upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta-akta pencatatan sipil penting.

Angka kepemilikan akta kelahiran dan kematian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 92 Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik, KK, KIA Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Cakupan Kepemilikan Identitas						
NO.	Uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kelahiran	48,21	63,29	63,3	64,11	93,10		
2.	Persentase Penduduk memiliki Akta Kematian	N/A	N/A	N/A	N/A	68,54		

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa capaian angka kepemilikan akta kelahiran cukup tinggi pada akhir tahun 2020. Hal ini sejalan dengan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam memberikan pemahaman kepada masyakarat dengan melibatkan para stake holder, melakukan sosialisasi secara berkesinambungan, melakukan kerja sama dengan perangkat daerah pendukung, pengembangan aplikasi SIAK melalui inovasi pelayanan on line dan inovasi layanan dengan sistem paket seperti LOAK (Lahir Oli Akta Kelahiran/Akta Kematian dan KK).

Upaya yang sama akan dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna meningkatkan capaian kepemilikan akta kematian. Selama ini kendala utama dalam merumuskan capaian kepemilikan akta kematian adalah tidak tersedianya bilangan pembagi yaitu jumlah penduduk meninggal secara akurat. Data kematian selama ini diperoleh dari Laporan Kematian yang dikirim beberapa Kecamatan atau Desa/Kelurahan tetapi belum memuat informasi data penduduk meninggal secara lengkap.

Menyikapi hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melakukan pengembangan aplikasi SIREP (Sistem Registrasi Penduduk) dengan memberdayakan Petugas Registrator Desa/Kelurahan. Peristiwa kematian di desa/kelurahan dapat dilaporkan melalui aplikasi. Penggunaan aplikasi cukup efektif karena dalam tahun 2020 bisa dirumuskan capaian angka kepemilikan akta kematian dengan bilangan pembagi data kematian yang telah masuk dalam aplikasi SIREP. Data jumlah penduduk yang meninggal bisa terus bertambah, mengingat belum semua data kematian tercatat dalam aplikasi.

3) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dan Pemanfaatan Data yang meliputi sistem informasi administrasi kependudukan, pengolahan dan penyajian data kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama dan inovasi pelayanan, memiliki peran penting dalam mengelola informasi Administrasi Kependudukan. dengan menggunakan aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan).

Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan pada seluruh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. SIAK digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan pendafataran penduduk dan pencatatan sipil. Agar pelayanan dapat berlangsung setiap waktu, SIAK perlu didukung oleh sarana dan prasarana pendu yang memadai. Sarana dan prasarana pendukung SIAK dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2. 93 Sarana dan Prasarana Pendukung SIAK di Dinas Dukcapil dan Rumah Paten Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Urajan	Kondisi Layanan SIAK						
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Aplikasi pokok SIAK (unit)	3	3	3	3	7		
2.	Aplikasi pendukung SIAK (unit)	2	2	3	4	4		
3.	Jaringan SIAK (unit)	22	22	22	22	26		
4.	Perangkat Keras SIAK (user)	26	29	33	34	72		
5.	SDM IT SIAK (org)	2	2	3	4	4		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa telah tersedia aplikasi pokok pelayanan administrasi kependudukan yaitu SIAK (Data Penduduk), BCard (Aplikasi Pencetakan KTP el) dan Benroll (Aplikasi Perekaman KTPel) dan aplikasi pendukung berupa Suplemen SMS Gateway, Website, Jaringan SIAK untuk setiap bidang dan 18 Rumah Paten. Aplikasi diatas hanya dapat digunakan dengan dukungan peralatan lain berupa personal komputer, printer, printer KTPel, jaringan kabel, server, kelengkapan internet dan lain-lain. Mengingat intensitas penggunaan peralatan yang sangat tinggi, maka sangat rawan terjadi kerusakan. Sehingga dibutuhkan anggaran yang cukup untuk pemeliharaan peralatan dan perlengkapan IT.

Hasil dari pengelolaan informasi kependudukan dapat dimanfaatkan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan data kependudukan bagi lembaga pemanfaat data yaitu OPD dan instansi lainnya (pemerintah dan swasta). Inovasi pada semua jenis produk layanan Adminduk diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengurusan/pelayanan Adminduk bagi Petugas selaku pengelola layanan dan Masyarakat selaku penerima layanan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan sinergitas semua bidang pada Disdukcapil dan OPD yang terkait.

Pemanfaatan data telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal mulai tahun 2017 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses Serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pemanfaatan data dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 94 Data Lembaga Pemanfaat Data, Jumlah Perjanjian Kerja Sama Dan Jumlah Inovasi Pelayanan Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	Layanan Pemanfaatan Data						
NU	UKAIAN	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah lembaga pemanfaat data	-	70	32	87	89		
2.	Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS)	-	3	7	13	14		
3.	Jumlah Inovasi Pelayanan	-	2	3	3	4		

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan yang dapat disajikan tahun 2017 karena bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan baru terbentuk pada Januari 2017. Data rincian penduduk dapat diberikan dalam bentuk hak akses data yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Selama ini lembaga terbanyak pemanfaat data adalah Desa.

Dalam perkembangannya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan. Dengan terbitnya ketentuan yang baru ini, maka perjanjian kerja sama dan pemanfaatan data yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.

G. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

1) Administrasi Pemerintahan Desa

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka terjadi perubahan yang mendasar terhadap tata kelola Pemerintahan Desa seperti Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Pengelolaan Aset Desa serta Adminstrasi Pemerintahan Desa lainnya. Pada tahun 2015, Desa hanya memperoleh Dana ADD (Alokasi Dana Desa) antara Rp. 81.000.000 – 115.000.000. Salah satu faktor penting dalam Undang-Undang Desa adalah adanya Dana Transfer besar untuk pembangunan di desa yang bersumber dari APBN dan APBD. Adapun alokasi Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pembangunan di Desa sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 95 Alokasi Transfer Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 - 2020

No.	URAIAN		Alokasi DD dan ADD (x Rp 1.000)					
NO. UKAIAN		2016	016 2017 2018		2019	2020		
1.	DD – APBN	183.211.736	234.026.299	282.703.163	340.458.369	358.311.953		
2.	ADD – APBD	120.409.105	120.521.520	118.087.607	122.510.452	125.000		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dana Transfer tersebut diatas tersalur 100% dari RKUD ke RKD, namun demikian penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yaitu RKPDes dan APBDes sebagai syarat penyaluran dana transfer yang telah ditentukan batas waktu penyusunannya, yaitu RKPDes paling lambat disusun Akhir Oktober tahun berjalan dan APBDes ditetapkan paling lambat 31 Desember tahun Berjalan dalam pelaksanaannya belum mematuhi ketentuan batas waktu. Adapun data Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, sebagai berikut:

Tabel 2. 96 Dokumen Perencanaan Tingkat Desa Tahun 2016 - 2020

NO	LIDALAN	Jumlah Desa yg memiliki Dok Perencanaan							
NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020			
1.	RKPDes;								
	1. Desember s/d Januari	75	100	125	150	281			
	2. Pebruari s/d Maret	206	181	156	131	0			
2.	APBDes								
	1. Januari s/d Pebruari	75	100	125	150	278			
	2. Maret s/d April	206	181	156	131	3			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Ketidaktepatan waktu dalam penyusunan RKPdes dan APBdes disamping karena adanya peraturan yang baru juga karena kapasitas SDM di Pemerintah Desa yang masih minim dalam memahami sistem pemerintahan desa sesuai dengan peraturan per undang-undangan yang baru, tiga bulan sejak berakhirnya tahun anggaran, Kepala Desa membuat Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa / LPPD akhir tahun anggaran. Disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Berikut adalah Data penyampaian LPPD.

Tabel 2. 97 Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Tingkat Desa Tahun 2016 - 2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun LPPD						
NO	UKAIAN	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Laporan Penyelengaraan Pemerintah Desa/LPPD 1) Januari –Maret	90	115	120	127	276		
	2) > Maret	191	166	161	154	5		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, Tahun 2020

Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa masih belum sesuai ketentuan. Pemerintah Desa masih dalam tahap awal inventarisir aset desa, belum dalam bentuk neraca aset desa. Dikarenakan Permendagri nomor 47 Tahun 2016 tentang Adminstrasi Pemerintahan Desa di Ketentuan Bagian Kedua Adminstrasi Umum Pasal 5 Ayat 2 huruf c. Masalah Buku Inventaris dan Kekayaan Desa belum dilaksanakan dan baru dilakasanakan tahun 2017.

Tabel 2. 98 Data Pengelolaan Asset Desa Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	Jumlah Desa yang Menyusun Data Aset Desa						
NO		2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Neraca Aset	0	5	10	15	20		
2	KIB/KIR	0	25	50	65	75		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa ditandai jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya bertambah/meningkat. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan koordinasi semua stake holder yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa. Mulai Tahun 2015 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut telah dilaksanakan berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa. Sebagai ilustrasi berikut tersaji data hasil kegiatan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun terjadi perubahan/ peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa.

Tabel 2. 99 Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Tahun 2015-2020

No	Urajan	Kondidi Kapasitas Aparatur Desa							
No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
A.	Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya (%)	10,34	15,75	38,17	50,15	55,19	56,25		
1.	Aparatur Pemerintahan Desa yang memiliki kompetensi (%)	9,48	15,42	22,53	32,74	33,15	34,00		
1.1	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang dilatih	400	650	950	1380	1.680	1.780		
1.2	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa	4215	4215	4215	4215	4.232	2.439		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Aparatur Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya dalam kurun waktu 5 tahun semakin bertambah/meningkat. Dari kondisi awal pada tahun 2015 sebesar 10,34 % semakin meningkat hingga pada tahun 2020 sebesar 56,25 %.

Untuk mencapai kondisi tersebut telah dilakukan kerja keras semua stake holder yang terkait dengan Apartur Pemerintahan Desa mulai Tahun 2015 dalam menunjang peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Desa tersebut dengan telah dilaksanakannya berbagai upaya baik koordinasi, pembinaan, bintek, penyuluhan, pelatihan-pelatihan maupun fasilitasi pengadaan perangkat desa dan fasilitasi pemilihan kepala desa sebagaimana tersaji dalam tabel diatas.

Tabel 2. 100 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pemlihan Kepala Desa Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2.	Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib (%)	0	0	100	100	60,57	0
2.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades dengan tertib	0	0	48	115	117	0
2.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pilkades	281	281	48	115	281	0

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemilihan Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ini dilaksanakan serentak bergelombang, dengan dibagi pelaksanaannya menjadi 3 (tiga) gelombang berdasarkan masa bhakti/jabatan

kepala desa pada setiap desa. Pelaksanaan gelombang I dilaksanakan pada tahun 2017 sebanyak 48 desa, gelombang II pada tahun 2018 sebanyak 115 desa dan gelombang III tahun 2019 sebanyak 117 desa, sehingga total 281 desa telah terpilih kepala desa baru.

Tabel 2. 101 Jumlah Desa Yang Melaksanakan Pengadaan Perangkat Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
3	Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib (%)	0	0	100	100	95	96
3.1	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan perangkat Desa dengan tertib	0	0	281	23	17	20
3.2	Jumlah Desa yang melaksanakan pengadaan	281	281	281	23	281	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pengadaan Perangkat Desa di Kabupaten Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Pada tahun 2017 sebanyak 281 desa melaksanakan pengadaan perangkat desa guna menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru tentang SOTK Desa, tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebanyak 23 desa dan 17 desa, sedangkan tahun 2020 sebanyak 20 desa yang dilaksanakan dalam rangka pengisian jabatan perangkat desa yang lowong karena purna tugas atau berhenti menjadi perangkat desa.

Pelaksanaan Pengadaan Perangkat Desa ini dilaksanakan berdasarkan usulan permintaan dari desa bersangkutan dengan menyesuaikan pada kebutuhan dan jumlah penduduk yang disesuaikan dengan SOTK Desa.

Tabel 2. 102 Jumlah Desa Yang Menyusun Peraturan Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
4	Desa tertib penyusunan Perdes (%)	5,69	8,54	9,60	11,03	11,07	11,15
4.1	Jumlah Desa yang menyusun Perdes sesuai Peraturan	16	24	27	31	33	35
4.2	Jumlah Desa yang melaksanakan penyusunan Perdes	281	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyusun peraturan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyusun peraturan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2.103 Jumlah Desa Yang Menyediakan Data Perkembangan Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
5	Desa tertib menyediakan data perkembangan Desa (%)	32,02	48,04	60,49	80,07	90,15	98,93
5.1	Jumlah Desa yang menyajikan data perkembangan Desa dengan benar	90	135	170	225	253	278
5.2	Jumlah Desa yang dievaluasi data perkembangan Desanya	281	281	281	281	281	281

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Desa yang menyediakan data perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana di seluruh desa. Mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 desa yang menyediakan data perkembangan desa sesuai dengan peraturan menunjukkan trend yang semakin baik.

Tabel 2. 104 Jumlah Perkembangan Desa Tahun 2015 - 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
6	Peningkatan Desa kurang berkembang menjadi berkembang (%)	14,89	22,50	19,35	28,00	100	81,25
6.1	Jumlah Desa kurang berkembang meningkat menjadi Desa berkembang	7	9	6	7	25	26
6.2	Jumlah Desa kurang berkembang	47	40	31	25	0	32

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa perkembangan desa dalam kurun waktu 5 tahun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun untuk tahun 2020 perkembangan desa kurang menggembarakan, hal ini dikarenakan pembangunan di desa lebih difokuskan pada penanganan dampak pandemi covid-19.

Tabel 2. 105 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi ke Desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa Tahun 2015 – 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Monitoring dan evaluasi pemilihan kepala desa (desa)	-	-	48	115	117	-
2.	Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang menejemen Pemerintahan Desa (org)	400	650	950	1380	1.680	1
3.	Monitoring dan Evaluasi pengadaan perangkat Desa	0	0	281	23	17	20

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas dapat dilihat bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi ke desa dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Tegal dalam kurun waktu 5 tahun telah terlaksana dengan baik.

Sasaran yang hendak dicapai melalui pengembangan desa adalah perkembangan BUMDes dan pengembangan desa di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui koordinasi keras Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Tegal, bersama dengan Dinas/Instansi terkait serta Pemerintah Desa dan masyarakat pedesaan.

Kondisi data jumlah Bumdes. jumlah kawasan pedesaan, jumlah kerjasama desa mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah. Data tersebut menjadi landasan untuk mencapai sasaran program selama kurun waktu 5 tahun yang akan datang.

Tabel 2. 106 Kondisi BUM Desa Tahun 2015-2020

No	Urajan	Kondisi BUM Desa							
NO	Ulalali	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	BUMDES tumbuh dan berkembang (%)	0	33	40	12	30	60,12		
	Jumlah BUMDES	0	15	25	35	65	168		
1.	Status Bumdes Dasar	0	15	15	20	47	67		
2.	Status Bumdes Tumbuh	0	5	10	15	15	69		

ſ	No	Uraian	Kondisi BUM Desa							
	NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
ſ	3.	Status Bumdes Berkembang	0	0	0	0	0	32		
Ī	4.	Status Bumdes Maju	0	0	0	0	0	0		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Pada akhir tahun 2020, jumlah BUMDesa yang telah berdiri di Kabupaten Tegal sebanyak 168 BUMDesa, meningkat secara signifikan sejak tahun 2015. Berdasarkan statusnya terdiri dari BUMDesa dasar sebanyat 67, BUMDesa tumbuh sebanyak 69 dan BUMDesa berkembang sebanyak 32.

2) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Kemasyarakatan Desa adalah pemberdayaan masyarakat yang ditandai Lembaga Kemasyaraktan Aktif dan LEM Yang Berdaya. Untuk mencapai kondisi dilakukan melalui pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Ekonomi Masyarakat. Hasil dari pembinaan tersebut dapat dilihat dalam data pengelolaan asset dan kelompok desa binaan mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 107 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2015-2020

No	Uraian	Jur	nlah Lem	baga Kei	masyaral	katan (ur	nit)
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Lembaga Ekonomi Masyarakat						
	Jml UED-SP	35	36	39	41	41	41
	Jml Kelp UP2K-PKK	710	635	397	397	738	287
	Jml CPPD	4	4	5	5	5	5
	Jml Pasar Desa	3	3	3	3	24	24
	Jml Pokmas TTG	5	5	5	33	46	46
	Jml KUB	8	8	8	8	8	8
2.	Lembaga Kemasyarakatan						
	Jml KPMD	281	281	281	281	281	281
	Jml Posyandu	1315	1405	1064	1248	1518	1381
	Jml kelompok PKK RW	1684	1397	1990	1990	1360	1329
	Jml kelompok PKK RT	6160	6537	9546	9546	6337	6296

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari Data tersebut dapat diketahui Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat yang ada mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 menunjukkan trend yang semakin baik, namun di tahun 2020 terjadi penurunan sebaga dampak covid-19.

Tabel 2. 108 Jumlah Kelompok Desa Binaan PKK Tahun 2015-2020

No.	Uraian	J	umlah K	elompok	Desa Bir	naan PKK	T
NO.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	a. Jumlah Kelompok PKK RW	1684	1397	1990	1990	1.360	1329
	b. Jumlah Kelompok PKK RW Aktif	1684	1397	1990	1990	1.360	1329
	c. PKK Aktif	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah Kelompok Binaan PKK	33	33	33	33	33	33
3.	Jumlah Desa binaan dengan jumlah Desa	11,49	11,49	11,49	11,49	11,49	11,74

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data di atas menggambarkan semakin besar rata-rata jumlah kelompok binaan PKK sekaligus dapat menggambarkan keaktifan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan daerah melalui PKK, juga menunjukkan besarnya pelayanan penunjang yang dapat diciptakan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayakan masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui PKK, dengan Jumlah Desa binaan PKK setiap tahun sebanyak 33 Desa. Kelompok binaan PKK ini terdiri dari: Posyandu, BKB UP2K-PKK, Pos PAUD, Posbunda Lansia dan Kebun Percontohan PKK. tiap tahun 11,74 % dari jumlah Desa di Kabupaten Tegal.

3) Penataan Desa

Dengan mendasari Permendagri No. 1 Tahun 2017 tentang Penataan desa, maka perlu melaksanakan kegiatan Perdes Tata Ruang Desa, Perdes Kewenangan Desa dan Infrastruktur Desa, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah.

Tabel 2. 109 Jumlah Perdes Tata Ruang Tahun 2015-2020

No	Urajan	Jumlah Perdes Tata Ruang							
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Perdes Tata Ruang	0	0	0	0	0	0		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, tidak terdapat Perdes Tata Rang, dikarenakan Dispermasdes baru melaksanakan Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2. 110 Jumlah Perdes Kewenangan Desa Tahun 2015-2020

No	Unaion	Jumlah Perdes Kewenangan Desa							
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2018 2019			
1.	Perdes Kewenangan Desa	281	281	281	281	281	281		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas, menunjukan semua desa sudah mempunyai Perdes Kewenangan Desa. Dari tabel diatas menunjukan Perdes Keweanangan Desa sudah ada sejak 2015 s/d 2020.

Tabel 2. 111 Jumlah Infrastruktur Desa Tahun 2015-2020

	No	Unaian		Juml	ah Infras	truktur l	Desa	
No	NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1.	TMMD & Karya Bhakti	7	7	7	8	8	9

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas menunjukan peningkatan kegiatan infrastruktur desa, dikarenakan dari tahun 2018 kegiatan TMMD yang semula 2 desa menjadi 3 desa, sedangkan Karya Bhakti untuk Perkotaan 2 desa dan Karya Bhakti Perdesaan 2 desa. Pada Tahun 2020 ada penambahan kegiatan Karya Bhakti sehingga untuk Karya Bhakti Perkotaan menjadi 3 desa dan Karya Bhakti Perdesaan menjadi 3 desa.

4) Peningkatan Kerja Sama

Dengan mendasari Permendagri No. 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa. Dispermasdes melaksanakan kegiatan tersebut sesuai amanat Permendagri No. 96 Tahun 2017 dengan hasil tabel sebagai berikut:

Tabel 2.112 Jumlah Desa Tertinggal Tahun 2015-2020

No	Harian	Jumlah Desa Tertinggal						
No	Uraian	2015	2016 2017 2018	2019	2020			
1.	Desa Tertinggal	0	0	0	0	41	31	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

Dari data tersebut diatas menunjukan peningkatan kegiatan kerjasama desa, dengan penurunan desa tertinggal. Jumlah desa tertinggal didapat dari Indeks Desa Membangun (IDM) dari tahun 2019 dan 2020, yang menunjukan penurunan jumlah desa tertinggal, dari 41 desa di tahun 2019 menjadi 31 desa di tahun 2020.

H. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Pengendalian Penduduk

Pengendalian Penduduk adalah untuk mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Indonesia umumnya dan Kabupaten Tegal pada khususnya agar dapat terkendali sesuai yang direncanakan yaitu terjadinya *Zero Growth*. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian kelahiran pada pasangan usia subur. Data Laju Pertumbuhan Penduduk mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel di bawah.Dari data tersebut selama kurun waktu 5 tahun diharapkan akan terjadi penurunan LPP Kabupaten Tegal sebesar 0,01 tiap tahunnya sehingga target LPP Tahun 2024 sebesar 0,219 bisa tercapai.

Tabel 2. 6 Laju Pertumbuhan Tahun 2016-2020

No	Umaiam	Laju Pertumbuhan Penduduk						
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Penduduk	1.429.386	1.433.515	1.437.225	1.440.698	1.579.432		
2.	LPP	0,32	0,289	0.260	0,241	0,120		
	Penurunan LPP	0,02	0,031	0.029	0,019	0,121		

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan *Total Fertility Rate* (TFR) Kabupaten Tegal dalam dekade 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020 sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 113 Total Fertility Rate (TFR) Tahun 2016-2020

No	Tahun	TFR
1	2016	2.28
2	2017	2.42
3	2018	2.47
4	2019	2,24
5	2020	2,28

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan pada tabel di atas tercatat bahwa TFR Kabupaten Tegal fluktuatif. Kenaikan TFR perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius karena dapat berdampak terhadap peningkatan laju pertumbuhan penduduk. Secara umum penyebab naiknya TFR adalah bertambahnya pasangan usia subur (PUS) sehingga perlu adanya perhatian yang lebih terhadap mereka untuk mengendalikan tingkat kehamilan dan kelahiran.

2) Keluarga Berencana

Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Tegal cukup menggembirakan dengan TFR sebesar 2,35. Hal ini terlihat bahwa Kabupaten Tegal

mampu mempertahankan rata-rata jumlah anak perkeluarga sebanyak 2-3 anak. Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini sudah memandang bahwa kualitas anak lebih penting dari pada kuantitasnya. Berkaitan dengan itu dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 205.527 peserta dari 302.589 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2016. Adapun persentase pemakaian alat kontrasepsi (CPR) selama kurun waktu tahun 2015-2019 masing-masing dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 114 Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi Tahun 2015-2019

N. a	Umaiam	Peresentase Pemakaian Alat Kontrasepsi						
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah Peserta KB (Jumlah Akseptor KB)	210.584	206.398	203.349	205,527	186.867		
2.	Jumlah PUS	293.088	294.221	297.296	302,589	275.891		
3.	Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (CPR)	71.85	70.15	68.40	67,92	67,73		

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2019 sebanyak 205.527 peserta dari 302.589 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrsepsi pada tahun 2019 mencapai 67,92%, sedangkan pada tahun 2017 – 2019 terus mengalami penurunan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah peserta KB di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 186.867 peserta dari 275.891 pasangan usia subur. Jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Persentase pemakaian alat kontrsepsi pada tahun 2020 mencapai 67,73.

Kepesertaan KB Aktif mulai tahun 2016 – 2020 terus mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh makin tingginya angka drop out KB serta angka unmeet need. Unmet need KB merupakan kebutuhan PUS untuk ber KB tetapi kebutuhan tersebut (tidak ingin anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilan berikutnya) tidak terpenuhi dan tidak memakai alat kontrasepsi. Berikut ditampilkan persentase unmeet need KB di Kabupaten Tegal tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 115 Persentase Unmeet Need KB Tahun 2016-2020

No.	Unaian	Persentase Unmeet need						
NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah PUS Untmetneed	39.200	41.109	42.283	46.832	42.365		
2.	Jumlah PUS	293.088	294.221	298.663	302.801	275.891		
3.	Prosentase PUS Unmetneed	13,37	13,97	14,16	15,47	15,36		

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

3) Keluarga Sejahtera

Untuk Pelaksanaan dan memantapkan Ketahanan Keluarga diperlukan peranan dari berbagai aspek didalamnya melalui program Tribina yakni Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja dan Bina Keluarga Lansia. Melalui kegiatan ini setiap kelompok Tribina akan memperoleh sekaligus dapat memantapkan setiap program dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera.

Tribina merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua dan anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang anak baik secara fisik, motorik, kecerdasan, emosional, sosial ekonomi dengan sebaik-baiknya kepada balita dan anak remaja disamping itu tribina juga berguna untuk meningkatkan kesejahteraan lansia melalui kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan masa lanjut usia (Lansia) yang produktif, mandiri dan bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan masyarakat.

Tabel 2. 116 Rata-rata Cakupan Ketahanan Keluarga Tahun 2015-2020

Tahun	Uraian	ВКВ	BKR	BKL	Total
2015	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	62776	64745	64964	192485
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17814	12804	15184	45802
	Rata-rata	28,38	19,78	23,37	23,80
2016	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	59117	65247	50742	175106
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17162	11193	11947	40302
	Rata-rata	29,03	17,15	23,54	23,02
2017	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	54881	73287	52146	180314
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16211	9912	12022	38145
	Rata-rata	29,54	13,52	23,05	21,15
2018	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	53096	71068	49307	173471
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	16217	9137	10810	36164
	Rata-rata	30,54	12,86	21,92	20,85
2019	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58087	66051	52890	177028
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17935	9597	11286	38818
	Rata-rata	30,88	14,53	21,34	21,93
2020	Jumlah keluarga yang menjadi sasaran kelompok kegiatan	58843	67322	58347	184512
	Jumlah keluarga yang menjadi Anggota Kelompok Kegiatan	17365	10844	11616	39825
	Rata-rata	29,51	16,11	19,91	21,58

Sumber: DP3AP2KB Kabupaten Tegal, 2021

I. Perhubungan

a) Infrastruktur Lalu Lintas

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang konektifitas antar wilayah di Kabupaten Tegal terutama menuju pusat – pusat perdagangan, pusat pemerintahan, dan lokasi wisata. Selain itu menunjang konektifitas, keberadaan Infrastruktur perhubungan mempunyai peran penting dalam menjamin keselamatan jalan. Indikator yang mudah dibaca dari keselamatan jalan adalah adanya penurunan angka kecelakaan di jalan. Berikut ini gambaran angka kecelakaan di Kabupaten Tegal selama 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 117 Angka Kecelakaan Tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah Kejadian		Korban		Penurunan	
Tanun	juillali Kejaulali	MD	LB	LR	r enui unan	
2015	575	162	0	679	7,85	
2016	631	172	1	723	-9,74	
2017	487	156	0	512	22,82	
2018	476	152	0	509	2,26	
2019	619	170	0	629	-30,04	
2020	500	134	0	506	19,22	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan:

MD : Meninggal Dunia

LB: Luka Berat LR: Luka Ringan

Tabel di atas menggambarkan 5 tahun terakhir terjadi penurunan angka kecelakaan dari 619 kejadian menjadi 500 Kejadian atau penurunan sekitar 19,22%. Harapannya angka kecelakaan ini terus menurun dari tahun ke tahun. Untuk menurunkan angka kecelekaan lalu linta, maka diperlukan upaya – upaya terkait dengan sektor perhubungan.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas terjadi karena:

- 1. Faktor manusia atau pengendara/ pengemudi kendaraan. Penyebabnya ujtama karena kondisi fisik yang kurang fit, mengantuk, kondisi mental yang tidak stabil, melaju cepat, kurangnya keterampilan dan pengetahuan dalam mengemudi, pengaruh buruk obatobatan atau alkohol serta pengalihan perhatian.
- 2. Kendaraan yang digunakan bisa menjadi penyebab kecelakaan, bisa karena sistem rem, kemudi, mesin yang tidak berfungi, dimodifikasi tidak sesuai dengan aturan keselamatan dan lain sebagainya. Ada banyak komponen yang terdapat pada kendaraan dan semuanya berpotensi mengalami kerusakan. Apalagi jika umur mobil sudah cukup tua, ada banyak komponen yang sudah tidak berfungsi lagi dengan baik.
- 3. Faktor jalan diantaranya seperti: kondisi permukaan jalan yang tidak memenuhi syarat (berlubang, benjolan), fasilitas untuk pejalan kaki yang tidak memadai, layout jalan yang tidak sesuai, pencahayaan yang tidak memadai.
- 4. Karena lingkungan atau cuaca. Cuaca yang buruk, seperti hujan atau berkabut seringkali menjadi penyebab kecelakaan kendaraan.

1) Kelengkapan Jalan /Rambu Lalu Lintas

Infrastruktur Lalu Lintas adalah memberikan pelayanan lalu lintas pada masyarakat melalui pemasangan rambu – rambu lalu lintas sesuai Standar. Fungsi dari Rambu perlengkapan jalan adalah bagian dari perlengkapan jalan yang memuat lambang, angka, atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, perintah, larangan, dan petunjuk untuk bagi pengguna jalan.

Tabel 2. 118 Kelengkapan Rambu Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Kebutuhan Rambu	19.802	19.802	19.802	19.802	19.802		
2	Rambu Terpasang	N/A	N/A	N/A	3.449	4.342		
	Persentasi Rambu (%)	N/A	N/A	N/A	17,42	21,93		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Melengkapi data ketersediaan/tingkat pemenuhan fasilitas keselamatan jalan, setidaknya meliputi : *guardrail*, LPJU, RPPJ, APILL, *warninglight*, marka selain rambu lalu lintas.

Tabel 2. 119 Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai dengan tahun						
NO	Uraian	2016	2017	2019	2020			
1	Guardrail	N/A	N/A	N/A	N/A	38		
2	Marka	N/A	N/A	N/A	N/A	741		
3.	Rambu Lalu Lintas	N/A	N/A	N/A	N/A	114		
4.	Penerangan Jalan Umum	N/A	N/A	N/A	7.765	524		

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Lampu Penerangan Jalan Umum adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan dimalam hari sehingga pejalan kaki, pesepeda dan pengendara kendaraan bermotor dapat melihat dengan lebih jelas jalan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan dari para pengguna jalan. Lampu Penerangan Jalan Umum di samping digunakan sebagai penerang jalan, lampu ini juga berfungsi untuk keamanan lingkungan atau mencegah kriminalitas dan juga memberikan kenyamanan dan keindahan lingkungan jalan. Sampai dengan Tahun 2019 jumlah LPJU sudah mencapai 86,28% dari jumlah kebutuhan LPJU di Kabupaten Tegal.

2) Lokasi Parkir

Aktifitas yang terjadi pada pusat – pusat kegiatan seperti pusat perdagangan jasa, pusat perbelanjaan, pusat perkantoran, fasilitas pendidikan dan kesehatan, seringkali berdampak pada munculnya titik – titik kemacetan akibat kantong – kantong parkir yang belum teratur dan dikelola dengan baik. Dinas Perhubungan telah melakukan pengelolaan parkir di beberapa ruas jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan, gambaran sebaran. Gambaran pengelolaan lokasi parkir di Kabupaten Tegal sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 120 Titik Lokasi Parkir Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No	Urajan	Jumlah sampai dengan tahun						
NO	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Lokasi yang berpotensi untuk pengelolaan Parkir	300	300	300	300	300	300	
2	Jumlah Lokasi Parkir yg telah dikelola	133	144	157	171	203	269	
	Persentasi lokasi parkir (%)	44,3	48,0	52,3	57,0	67,0	89,67	

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal, 2021

Data di atas menunjukan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun lokasi parkir yang terkelola di Kabupaten baru mencapai 67%. Sisanya masih dikelola secara swadaya oleh masyarakat dan masih berpotensi pada munculnya titik kemacetan dan rawan pencurian kendaraan bermotor.

3) Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin)

Analisis dampak lalu lintas, untuk selanjutnya disebut Andalalin adalah Studi / Kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau Perencanaan pengaturan Lalu Lintas. Hal ini dikaitkan bahwa setiap perubahan guna lahan akan mengakibatkan perubahan di dalam sistem transportasi nya. Misalnya pusat kegiatan, fasilitas pelayanan umum, industri, permukiman dan infrastruktur akan memengaruhi lalu lintas yang ada di sekitar kegiatan baru tersebut.

Tabel 2. 121 Analisa Dampak Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Urajan	Jumlah per tahun						
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah Usaha Besar yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi	12	12	12	12	12		
2	Jumlah andalin yang disetujui	N/A	N/A	7	9	5		
	Persentase jumlah Andalalin (%)	N/A	N/A	58,3	75	41,67		

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2021

Kebijakan implementasi Andalalin diterapkan sejah Tahun 2015 sebagai amanat Permen Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 dan Nomor 11 Tahun 2017. Tabel di atas menunjukan bahwa saat ini Andalalin masih berupa pelayanan permohonan andalalin dari pemrakasa atau pengelola tertentu yang berpotensi pada perubahan sistem transportasi.

b) Infrastruktur Angkutan

1) Infrastruktur Terminal, Shelter dan Halte

Layanan Angkutan Darat di Kabupaten Tegal dilayani oleh 5 Terminal yang terdiri atas 3 terminal penumpang dan 2 terminal barang. 3 terminal penumpang dengan pola pelayanan tipe c yaitu terminal dukuhsalam slawi, terminal trayeman dan terminal adiwerna. 2 terminal barang yaitu terminal/rest area klonengan dan maribaya. Sedangkan jumlah fasilitas tempat pemberhentian angkutan umum (halte) yang telah terpasang sebanyak 30 unit.

Tabel 2. 122 Terminal dan Halte Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai tahun						
NU	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Halte	10	16	25	30	30		
2	Terminal/Shelter	5	5	5	5	3		
3.	Rest Area/shelter	3	3	3	3	3		
	Persentasi Terminal/Shelter (%)	21,7	30,4	30,4	29,4	32,3		

Sumber : Dinas Perhubangan Kabupaten Tegal, 2020

2) Trayek Angkutan Lalu Lintas

Seluruh angkutan umum penumpang yang ada di Kabupaten Tegal wajib memiliki izin trayek. Sejak tahun 2019 jumlah angkutan turun sebanyak 972 unit (angkutan penumpang) dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya karena banyak yang tidak aktif. Kepemilikan izin trayek dimaksudkan untuk penataan, pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek illegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Izin trayek yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebanyak 384.

Tabel 2. 123 Jumlah Trayek Lalu Lintas Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai tahun						
NO	Oraian	2016	2017	2019	2020			
1	Jumlah Angkutan Umum	981	972	972	972	904		
2	Jumlah Ijin Trayek	394	516	640	650	384		
	Razio Ijin Trayek	0,4	0,53	0,66	0,66	0,42		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2021

Penyebab penurunan dan stagnansi juga perlu diuraikan lebih rinci tidak hanya karena banyak yang tidak aktif tapi dicari lagi penyebab kenapa banyak yang tidak aktif. Apakah karena mendapatkan kendaraan bermotor secara kredit sekarang sangat mudah atau karena mungkin kehadiran angkutan on-line atau terdapat faktor penyebab lain. Akar masalah ini yang harus dapat diselesaikan melalui program upaya untuk meningkatkan penggunaan angkutan umum.

Penyebab turunnya bisnis angkutan umum ini karena dua hal. Pertama, trayek atau rute angkutan tersebut sudah tidak lagi mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat, Kedua yaitu ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan termasuk pengemudi dan fisik kendaraan yang sangat tinggi. Selain itu, banyak bermunculan alternatif angkutan jenis lain yang menawarkan pelayanan yang lebih baik sehingga angkutan umum yang ada mulai ditinggal penumpangnya, hal ini dikarenakan kondisi fisik kendaraan, seperti umur kendaraan, sudah tidak layak jalan. serta tidak ada kemampuan pengusaha untuk melakukan peremajaan. Dan ketiga, karena semakin masifnya pertumbuhan dan ekspansi bisnis transportasi berbasis aplikasi seperti taksi online dan ojek online. Hal ini dinilai membuat bisnis angkutan umum konvensional di Kabupaten Tegal semakin tergerus karena tak mampu bersaing.

3) Kelayakan Kendaraan

Seluruh angkutan umum di Kabupaten baik yang akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai jumlah kendaraan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 124 Jumlah Angkutan yg melakukan Uji KIR Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah sampai tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Jumlah Angkutan Penumpang dan Barang	8.832	8.899	9.166	9,857	9,857	
2	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1.909	1.968	2.027	1.920	1.920	

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2021

c) Infrastruktur Keselamatan Jalan

1) Perlintasan Sebidang

Apabila ditinjau dari sistem jaringan kereta api, Kabupaten terlintasi oleh 3 jalur rel kereta api yaitu 1) Jalur jakarta – Tegal- Semarang – Surabaya di bagian utara yang melewati Kecamatan Kramat, Surdadi dan Warureja, 2) Jalur Tegal – Purwokerta di bagian tengah yang melewati Kecamatan Dukuhturi, Talang, Adiwerna, Slawi, Lebaksiu, Balapulang dan Margasari, serta 3) Jalur Jakarta – Cirebon – Purwakerta di bagian barat yang hanya melintasi Desa Kalisalak Kecamatan Margasari. Keberadaan jalur kereta api banyak yang *crossing* dengan jalan kabupaten, sehingga perlu difasilitasi pengamanan perlitasan sebidang.

Tabel 2. 125 Jumlah Perlintasan sebidang Tahun 2015-2020

No	Uraian	Jumlah sampai tahun							
		2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah Perlintasan Sebidang	53	53	53	53	53	53		
2	Jumlah Gardu Pengaman	7	12	14	17	18	27		
	Persentasi Gardu Pengaman (%)	13,21	22,64	26,42	32,08	33,96	50,95		

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tegal, 2021

Dari jumlah 53 perlintasan sebidang yang ada di Kabupaten Tegal, Sampai dengan saat ini baru dibangun gardu pengaman mencapai 18 unit atau sekitar 32,96%.

J. Komunikasi dan Informatika

1) Diseminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diharapkan Pemerintah mendorong terbentuknya Lembaga Komunikasi Masyarakat/Kelompok Informasi Masyarakat (LKM/KIM) untuk penyebarluasan informasi tentang pembangunan yang telah dilaksanakan pemerintah kepada seluruh masyarakat dan menyerap aspirasi dari masyarakat dan disampaikan balik kepada pemerintah, dimana LKM/KIM adalah sebagai media penghubung yang terkoordinasi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan Program Diseminasi Informasi, Komunikasi Dan Kemitraan Media diharapkan LKM/KIM dapat terbentuk di 287 desa di seluruh Kabupaten Tegal.

Selain itu sesuai dengan undang-undang tersebut diatas, Pemerintah wajib mewujudkan badan publik terbuka artinya badan publik yang dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan serta hasil kegiatan dalam pembangunan dapat diakses oleh publik dan masyarakat sejauh informasi tersebut adalah bukan informasi yang dikecualikan dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Permohonan informasi administrasi penyelenggaraan pemerintahan oleh publik dan masyarakat dapat dilakukan melalui Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Tabel 2. 126 Data Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Jumlah Badan Publik Yang TerbukaTahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Kualifikasi tingkat KIP Badan Publik	0	0	41,60	68,55	70,45		
2	Jumlah Desa yang telah terbentuk LKM/KIM	6	6	6	10	10		
3	Pengembangan KIM	6	8	10	33	36		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2016 sampai 2020 telah melakukan klarifikasi tingkat KIP Badan Publik dan telah terbentuk LKM/KIM di 30 Desa dalam 5 Kecamatan (Slawi, Lebaksiu, Pangkah, Dukuhwaru dan Adiwerna). Adapun persentase pengembangan KIM pada tahun 2020 mengalami peningkatan 36% dibanding tahun 2019 sebesar 33%.

2) Teknologi Informasi dan Persandian

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) maka Pemerintah diharapkan meningkatkan Indeks SPBE. Indeks SPBE merupakan pengukuran tingkat maturitas sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan pada domain tata kelola SPBE, kebijakan internal dan layanan SPBE. Domain kebijakan internal terdiri atas 2 aspek yaitu tata kelola dan layanan. Domain tata kelola SPBE terdiri atas 3 aspek yaitu kelembagaan, strategi dan perencanaan dan teknologi informasi dan komunikasi. Domain Layanan SPBE terdiri atas 2 aspek yaitu administrasi pemerintahan dan layanan publik. Tujuan pengukuran indeks SPBE adalah (1) mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah. (2) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE. (3) menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi SPBE pada instansi pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu Indeks KAMI merupakan *tools* untuk menganalisa dan mengevaluasi tingkat kesiapan (kelengkapan dan kematangan) keamanan informasi di sebuah organisasi sesuai dengan kreteria pada SNI ISO/IEC 27001 yaitu (1) tata kelola (2) pengelolaan resiko (3) kerangka kerja (4) pengelolaan aset (5) aspek teknologi.

Tabel 2. 127 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	Jumlah per tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	1,9	1,8	2,82	2, 2	
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	147	-	-	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018 dan mengalami kenaikan.

3) Sumber Daya TIK

Tujuan pengembangan Sumber Daya TIK adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja dalam mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan, dengan cara memperbaiki pengetahuan, keterampilan, maupun sikap terhadap tugastugasnya di bidang TIK. Dalam pengembangan sumber daya TIK pada Pemerintah Kabupaten Tegal untuk mendukung e-Government/Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan berdasar Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan TIK bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga, serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang TIK yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya.

Dalam tahap selanjutnya, implementasi SPBE/e-Government akan berkembang menjadi Smart City yang membutuhkan sumber daya TIK yang dapat memahami dan menjalankannya Program Smart City, dimana Pemerintah Kabupaten Tegal juga sudah memiliki sebanyak 20 PNS fungsional Pranata Komputer. Berkaitan dengan bimbingan teknis TIK, berikut data jumlah ASN yang telah mengikuti bimtek di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 128 Jumlah Aparatur Pemerintah Yang Mengikuti Bimtek TIK Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Jumlah per tahun					
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bimtek internet sehat bagi masyarakat	0	0	100	100	100	
2	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah	0	0	0	100	100	
3	Bimtek TIK untuk aparatur pemerintah desa	0	0	100	100	100	
4	Bimtek TIK untuk Pranata Komputer Penilaian Angka Kredit	0	0	20	40	50	
5	Bimtek TIK untuk Kompetensi Pengelola Smart City	0	0	0	0	0	

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari data diatas terlihat bahwa dari Tahun 2016 sampai dengan 2020 bimbingan teknis berkaitan dengan pengembangan sumber daya TIK telah dilaksanakan pada Tahun 2018 untuk masyarakat,aparatur pemerintah desa dan pranata komputer di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Tegal berjumlah 20 orang pranata komputer dimana bimtek berkaitan dengan penilaian angka kredit.

Layanan Pengadaan Secara Elekronik (LPSE) adalah sebuah unit layanan pengadaan yang memiliki kontribusi penting dalam penyelenggaraan proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal secara efisien dan efektif dan dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (KKN). Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pememerintah dilakukan secara elektronik menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukung lainnya yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP/JP).

Untuk peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pelaku pengadaan sangat dibutuhkan bimtek *e-procurement* secara berkala dan kontinyu dan peningkatan standarisasi LPSE Kabupaten Tegal kepada standar yang telah ditetapkan oleh LKPP hingga ke standar ideal 17. Poin tabel berikut menggambarkan Penyelenggaraan LPSE dari Tahun 2016 hingga Tahun 2020.

Tabel 2. 129 Jumlah Bimtek Pelaku Pengadaan dan Tingkat Standarisasi LPSE Tahun 2016-2020

No	Unaian	Jumlah per tahun					
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Bimtek <i>e-Procurement</i> Bagi Pelaku Pengadaan	0	118	238	340	350	
2	Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)	0	7	10	12	12	

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Bimtek *e-Procurement* Bagi Pelaku Pengadaan yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2017. Pada Bimtek Tahun 2019 Pelaku Pengadaan berjumlah 340 orang berasal dari OPD dan Bagian (60), Kelompok Kerja (30) dan Penyedia (40). Pada Tahun 2018 berjumlah 238 orang dimana jumlah pelaku di Tahun 2017 ditambah dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah 60 orang dan Pejabat Pengadaan (PP) sejumlah 60 orang, dan terlihat pula bahwa proses Standarisasi LPSE telah dimulai sejak Tahun 2016 ketika LPSE masih unit bagian dari Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Tegal.

K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu badan usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyaknya koperasi yang aktif, maka diharapkan semakin berdayanya ekonomi berbasis kerakyatan, menurunnya kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020 Jumlah koperasi di Kabupaten Tegal mengalami penurunan dari 629 unit menjadi 439 unit, Namun dari tingkat keaktifan mengalami kenaikan dari 34,34% menjadi 58,31% di Tahun 2020. Perkembangan Jumlah dan tingkat keaktifan koperasi di Kabupaten Tegal dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 2. 130 Koperasi Aktif Tahun 2016-2020

No	Uraian		Jum	lah per tal	nun	
	Uraidii	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah koperasi aktif	146	152	252	256	256
2.	Jumlah koperasi tidak aktif	497	292	183	183	183

No	Unaian		Jum	lah per tal	nun	
	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
3.	Jumlah koperasi	643	444	435	439	439
koperasi Aktif (%)		22,93	34,34	22,71	34,23	58,31

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Tabel 2. 131 Koperasi Sehat Tahun 2016-2020

No	Harian	Jumlah per tahun					
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Jumlah koperasi Sehat	40	50	55	60	63	
2.	Jumlah koperasi Cukup Sehat	497	292	183	183	183	
4.	Jumlah koperasi	643	444	435	439	439	
Коре	erasi Sehat (%)	22,93	34,34	22,71	34,23	58,31	

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

Dilihat dari tingkat koperasi sehat, koperasi di Kabupaten Tegal pada angka 58,31%. Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi.

2) Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung yang dimiliki daerah dalam meningkatkan ekonomi daerah melalui UKM.

Dalam kurun waktu Tahun 2016 – 2020, jumlah UKM di Kabupaten Tegal mengalami kenaikan yang sangat tinggi yaitu dari 33.520 unit menjadi 172.761 unit. Sedangkan jumlah UKM yang mempunyai legalitas mengalami keningkatan yaitu dari 3.941 unit menjadi 7.368 unit. Perkembangan Jumlah dan UKM yang mempunyai legalitas di Kabupaten Tegal dapat dilhat pada tabel berikut:

Tabel 2. 132 Jumlah UKM Non BPR/LKM Tahun 2016 - 2020

No	Uraian		Jum	ılah per tal	ıun	7.368		
NU	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah seluruh UKM	33.520	33.530	142.412	166.092	172.761		
2	UKM formal	3.941	4.193	5.060	5.916	7.368		
3	UKM non Formal	29.579	29.337	137.352	160.176	165.393		

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

Kenaikan jumlah UKM harusnya dibarengi dengan upaya pembinaan dan akses kemudahan dalam perijinan dan permodalan ke perbankan, karena jumlah UKM yang besar ini mampu menurunkan angka pengangguran terbuka di Kabupaten Tegal.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR merupakan salah satu lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.

Sedangkan lembaga keuangan mikro (LKM) merupakan lembaga non perbankan baik koperasi maupun non koperasi yang bergerak di simpan pinjam atau didalamnya adalah unit simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan mikro kecil. BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, maka akan semakin mudah bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil dalam mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perkonomiannya. Jumlah BPR pada tahun 2016 berjumlah 13, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan 7,69% yaitu menjadi 12. Untuk jumlah LKM non Koperasi pada tahun 2016 berjumlah 557, mengalami kenaikan sampai dengan tahun 2017, namun tahun 2018 dan 2019 mengalami penurunan yang sangat siginifikan. Jumlah BPR dan LKM di Kabupaten Tegal dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 133 Jumlah BPR/LKM Non Koperasi Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah BPR	13	11	11	11	11
2	Jumlah LKM Non Koperasi	572	618	207	6	6

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Tegal, 2021

L. Penanaman Modal

1) Program Penanaman Modal

Penanaman Modal dilakukan untuk mendorong meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Tegal. Untuk mencapai kondisi tersebut dengan menarik para investor lokal maupun Luar Negeri untuk menanamkan modalnya di kabupaten Tegal. Nilai investasi PMA dan PMDN mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 134 Nilai Investasi PMDN/PMA Tahun 2016 - 2020

		PMDN	PMA			
Tahun	Jml Proyek	Nilai Investasi	Jml Proyek	Nilai Investasi		
2016	5.628	656.376.500.000	5	1.107.984.000.000		
2017	5.266	566.881.900.000	4	1.243.150.000.000		
2018	7.257	1.073.862.531.863	3	480.800.000.000		
2019	7.072	1.418.065.799.693	8	820.334.969.198		
2020	11.457	9.073.688.922.252	5	291.626.969.198		

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi jumlah investor PMDN pada tahun 2015 – 2016 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 5.266 investor. Pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sebanyak 7.257 investor dengan nilai investasi mencapai 1.073.862.531.863, sedangkan tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 11.457 dengan nilai investasi sebesar 9.073.688.922.252. Dengan Peningkatan jumlah investasi PMDN mengindikasikan bahwa Kabupaten Tegal memiliki prospek dan daya tarik bagi investor yang harus semakin ditingkatkan.

2) Indek Kepuasan Masyarakat Perizinan

Pelayanan perizinan yang optimal dapat meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap palayanan perizinan di Kabupaten Tegal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan para pelaku usaha untuk mengurus perizinan. Indeks Kepuasan Masyarakat terkait perizinan dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 135 Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks kepuasan	72,38	73,87	75,32	77,61	78,08
	Masyarakat perijinan					

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Dengan melihat Tabel di atas pada tahun 2016 – 2020 selalu terjadi peningkatan kepuasan masyarakat dalam pengurusan izin, hal ini menunjukan bahwa masyarakat sudah memperoleh pelayanan perizinan yang cukup baik.

3) Pengendalian PMPTSP

Kepatuhan Perusahaan untuk mengurus perizinan sesuai ketentuan sangat diperlukan untuk menjaga iklim investasi di Kabupaten Tegal. Pengendalian PMPTSP diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para investor yang dilaksanakan melaui Tim Pengendali Perangkat Daerah yang terkait. Kondisi kepatuhan perusahaan yang berizin mulai tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 136 Kepatuhan Perusahaan Berizin Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Perusahaan berizin	5.270	5.475	755	771
2	Jumlah Perusahaan	11.714	11.714	1678	1682
3	Persen Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin	45	46,73	45	61,28

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Perusahaan Berizin pada tahun 2017 sebanyak 5.270 meningkat pada tahun 2018 menjadi 5.475 dengan Kepatuhan Perusahaan yang sudah berizin meningkat 1,73% dari 45% pada tahun 2017 menjadi 46,73% tahun 2018, pada tahun 2019 menjadi 45% dan pada tahun 2020 menjadi 61,28%.

M. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kepemudaan dan olahraga salah satunya dapat dilihat dari jumlah organisasi pemuda dan jumlah organisasi olahraga. Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberdayakan pemuda.

Tabel 2. 137 Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2020

No	Urajan	Kondisi Per Tahun						
No	Uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Persentase Organisasi Pemuda aktif	31 %	31 %	50 %	50 %	64,71		
	(%)					%		
2.	Jumlah atlet berprestasi tingkat	3	5	6	12	61		
	provinsi							
3.	Persentase Wirausaha pemuda (%)	Blm ada	Blm ada	Blm ada	0,036 %	0,073 %		
	i ci sciitase vvii ausalia pelliuua (70)	program	program	program				

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Banyaknya jumlah atlet berprestasi menggambarkan pembinaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah daerah dalam bidang olahraga. Selanjutnya dalam rangka menyongsong bonus demografi, meningkatkan ekonomi lokal dan pembangunan manusia maka akan dilaksanakan program penumbuhan wirausaha pemuda untuk meningkatkan persentase wirausaha pemuda. Selanjutnya, banyaknya jumlah organisasi olahraga menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan daerah khususnya dalam menciptakan pelayanan penunjang di bidang olahraga. Kegiatan olahraga yang rutin diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Tegal yaitu POPDA, PORDA, Kejuaraan cabang sepak bola, bulu tangkis, tenis lapangan, tenis meja, catur, renang, bola volley.

Tabel 2. 138 Organisasi Pemuda dan Klub Olahraga Kabupaten Tegal

No	Uraian	Kondisi Per Tahun				
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Organisasi Pemuda	33	33	33	33	51
2.	Jumlah Organisasi/Klub Olahraga	56	24	24	24	27
3.	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	11	11	11	5	3
4.	Jumlah Kegiatan Olahraga	9	9	9	9	6

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

N. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date* dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisa pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Kabupaten Tegal telah mengembangkan program Satu Data Kabupaten Tegal melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi Single Data System dan Open Data yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak Tahun 2014 sampai dengan 2020 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala kabupaten melalui penerbitan buku Selayang Pandang Kabupaten Tegal, Nilai Tukar Petani, Analisis Sistuasi Pembangunan Manusia Kabupaten Tegal, PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tegal dan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Tegal.

Pembangunan membutuhkan kekuatan, dan tanpa kekuatan pembangunan akan runtuh. Salah satu kekuatan agar pembangunan yang akan dilaksanakan kuat adalah tersedianya data statistik yang berkualitas. Dukungan ketersediaan data statistik yang berkualitas menjadi fondasi utama dalam melakukan asesmen dan perumusan kebijakan pembangunan, alat kontrol terhadap implementasi perencanaan, termasuk kebijakan yang bersifat evaluasi terhadap hasil kerja akhir. Apa yang menjadi sumber kekuatan tersebut, semuanya tidak terlepas dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa perencanaan pembangunan daerah memerlukan data berkualitas. Data Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Tegal sejak Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 sebagaimana Tabel dibawah ini.

Tabel 2. 139 Jumlah Ketersediaan Data Sheet Dan Laju Penggunaan Statistik Sektoral Pemerintah Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Data Sektoral Statistik yg	0	0	0	550	550
	Terintegrasi dgn SDS					
2	Laju Akses Data Statistik Sektoral	0	0	0	5	5
	Oleh Masyarakat dan Stakeholders					
	(%)					

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari Tabel diatas terlihat bahwa Dinas Kominfo Kabupaten Tegal dari Tahun 2015 sampai 2019, data baru dapat terwujud pada Tahun 2019 karena dalam melaksanakan pengumpulan, mengolah, menyusun, dan menganalisis serta mempublikasikan statistik sektoral baru mulai pelaksanaan pada akhir Tahun 2018 dimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tegal baru terbentuk pada Tahun 2017 sehingga laju akses data juga belum termanfaatkan.

O. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 140 Indeks SPBE dan Indeks Keamanan Informasi Tahun 2016-2020

No	Urajan	Kondisi Per Tahun						
NO	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020		
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	NA	1,9	1,8	2,82	2, 2		
2	Indeks Keamanan Informasi	NA	NA	147	-	-		

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel dapat dilihat bahwa penilaian SPBE Kabupaten Tegal baru dilaksanakan tahun 2017 dan penilaian Indeks Keamanan Informasi mulai dilaksanakan tahun 2018.

P. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Kebudayaan adalah seluruh sistem yang kompleks dimana di dalamnya terkandung sebuah pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian, adat istiadat disertai juga kemampuan-kemampuan lainnya yang dipunyai oleh seseorang sebagai bagian dari anggota masyarakat. Proses pengembangan budaya adalah suatu upaya meningkatkan atau mempertahankan kebiasaan yang ada pada masyarakat dalam kajian pengembangan masyarakat yang menggambarkan bagaimana budaya dan masyarakat itu berubah dari waktu ke waktu yang banyak ditunjukkan sebagai pengaruh global. Adapun kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dapat berupa gerak suara atau wujud. Kesenian ini mempunyai suatu penekanan yaitu adanya unsur estetika yang dipentingkan dalam setiap produk kebudayaan. Namun kesenian dapat dengan mudah mengalami perubahanperubahan karena adanya tuntutan kebutuhan dari masing-masing individu dalam masyarakat yang mempunyai orientasi tertentu terhadap seni itu sendiri. Sehingga pengembangan budaya masyarakat juga harus mengembangkan kesenian yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri.

Tabel 2. 141 Kondisi Budaya Tahun 2016-2020

No	Uraian		Ко	ndisi Per T	Tahun	
NO	Uraiaii	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan	24	39	45	50	61,11
		Pelaku seni	Pelaku seni	Pelaku seni	Pelaku seni	
	2. Persentase Seni danKesenian yang dibina	: 600	: 625	: 775	: 1060	
2.		Sanggar	Sanggar	Sanggar	Sanggar	57,50
	dankeseman yang dibina	Seni :	Seni :	Seni:	Seni : 459	
		327	331	360		
3.	Persentase Sejarah yang terdokumentasi	N/A	N/A	N/A	N/A	76.47
4	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	N/A	N/A	N/A	N/A	45.83
5	Persentase Museum yang dikelola	N/A	N/A	N/A	N/A	65

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Kurun waktu 2016-2020 pembangunan kebudayaan di Kabupaten Tegal menunjukkan perkembangan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Program pengembangan kebudayaan yang dihitung melalui proporsi kebudayaan dan tradisi yang dikembangkan terhadap tradisi yang ada mengalami peningkatan dari tahun ke tahun ini berarti menadakan semakin baiknya pengembangan kebudayaan. Program pengembangan kesenian tradisonal juga mengalami kenaikan yang dihitung dari proporsi seni dan kesenian yang dibina terhadap seni dan kesenian yang ada. Persentase sejarah yang terdokumentasi, cagar budaya yang dilestarikan baru dihitung di tahun 2020 dengan angka persentase sebesar 76,47% untuk sejarah yang terdokumentasi dan 45,83% untuk cagar budaya yang dilestarikan. Nilai cagar budaya masih rendaha dikarenakan di tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 sehingga anggaran untuk cagar budaya di refocusing untuk

penanganan covid-19. Persentase museum yang dikelola yaitu 65%. Adapun museum yang baru dibangun yaitu museum semedo dimana pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Q. Perpustakaan

Perpustakaan merupakan tempat belajar masyarakat selain pada dunia pendidikan dan sebagai wadah di mana terdapat bahan pustaka yang disusun menurut sistem tertentu dan bertujuan juga untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Dalam hal ini untuk memujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal mempunyai sasaran untuk mengembangkan dan meningkatkan penumbuhan perpustakaan serta minat baca masyarakat. Adapun hasil Indikator Perpustakaan selama Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 142 Indikator Perpustakaan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun						
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Peningkatan pemustaka	31.926	24.667	31.243	35.909	20.898		
2.	Peningkatan koleksi judul	3.692	4.786	6.038	6.289	2.401		
3.	Peningkatan perpustakaan	0	0	0	0	20		
	berbasis TIK							

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah perpustakaan menggambarkan kapasitas yang dimiliki oleh daerah dalam memberikan pelayanan bahan pustaka kepada masyarakat pengguna perpustakaan. Perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas peningkatan mutu kehidupan masyarakat dan pelayanan pendidikan. Capaian kinerja pada tahun 2016-2020 selengkapnya sebagaimana Tabel berikut.

Tabel 2. 143 Jumlah Perpustakaan Tahun 2016 - 2020

No	Uraian		Kondis	i Per Tal	hun	
NO	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perpustakaan Daerah	1	1	1	1	1
	(milik Pemda)					
2.	Jumlah mobil perpustakaan	3	3	3	3	3
	keliling					
3.	Jumlah Perpustakaan	34	36	56	64	63
	Desa/Kelurahan					
4.	Jumlah Perpustakaan Tempat	8	16	19	21	21
	Ibadah					
5.	Jumlah Perpustakaan OPD	16	43	43	26	26
6.	Jumlah Perpustakaan Ekstensi	15	16	16	31	26
	Total Perpustakaan (1+2+3+4)	77	115	138	146	140

Sumber : Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Perkembangan perpustakaan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 tidak mengalami perubahan yaitu Kabupaten Tegal memiliki 1 perpustakaan daerah milik Pemda dan perpustakaan yang dikelola oleh desa/kelurahan 63 unit, perpustakaan tempat ibadah 21 unit, perpustakaan ekstensi 26 unit dan perpustakaan OPD 26 unit. Secara total jumlah perpustakaandi tahun 2019 ada 140 unit.

Indikator efektifitas penyediaan pelayanan perpustakaan di daerah dapat dilihat dari banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan. Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan dapat menggambarkan tingginya budaya baca di daerah, dan tingginya ketersediaan buku yang dapat dijadikan sebagai bahan referensi bacaan oleh pengunjung. Data jumlah pengunjung Perpustakaan Pemda Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 144 Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pemda Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian		Kondisi Per Tahun						
NO.	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020			
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan milik	26.646	15.777	14.319	21.780	16.741			
	Pemerintah Daerah (pemda)								
2.	Jumlah pengunjung perpustakaan keliling	5.280	8.890	16.924	14.129	4.157			
3.	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Pemda	42.186	43.586	47.331	50.631	88.864			

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah pengunjung di perpustakaan milik Pemda Kabupaten Tegal pada tahun 2016 sebanyak 42.186 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 16.741 orang, sedangkan pengunjung perpustakaan keliling mengalami peningkatan yakni pada tahun 2016 sebanyak 5.280 orang, pada tahun 2020 sebanyak 4.157 orang. Koleksi buku diperpustakaan Pemda juga terus mengalami peningkatan dari 42.186 buku di tahun 2016 hingga 88.864 buku di tahun 2020.

R. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efesien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi.

1) Audit Kearsipan

Audit kearsipan merupakan penilaian tata kelola kearsipan yang dilaksanakan oleh LKD dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 48 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa yang ada di Kabupaten Tegal. Baik atau tidaknya hasil audit dapat dilihat dari nilai LAKE (Laporan Audit Kinerja Eksternal) LKD, Desa dan Ormas, dan nilai LAKI (Laporan Audit Kinerja Internal) Organisasi Perangkat Daerah dan BUMD yang ada di Kabupaten Tegal. Beriku data Penilaian LAKE dan LAKI di Kabupaten Tegal:

Tabel 2. 145 Penilaian LAKE dan LAKI Kearsipan Tahun 2016-2020

No.	Urajan		Koı	ndisi Per Ta	ahun	
NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Peningkatan Nilai LAKE LKD	Blm	27	33	52	73
	_	dilakukan				
		penilaian				
2.	Peningkatan jumlah OPD dengan	Blm	Blm	Blm	Blm	Blm
	Nilai LAKI Cukup	dilakukan	dilakukan	dilakukan	dilakukan	dilakukan
	r F	penilaian	penilaian	penilaian	penilaian	penilaian
3.	Peningkatan jumlah Desa dan	Blm	Blm	Blm	Blm	Blm
	Ormas dengan Nilai LAKE Cukup	dilakukan	dilakukan	dilakukan	dilakukan	dilakukan
	G i i i i	penilaian	penilaian	penilaian	penilaian	penilaian

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kab. Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal belum melaksanakan audit kearsipan terhadap 48 OPD, 4 BUMD, 2 Ormas dan 281 Desa.

2) Pengelolaan Arsip

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/ kejadian/ kronologis pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, oleh karenanya memerlukan pengelolaan kearsipan yang baik. Organisasi Perangkat Daerah dan Desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik tersaji dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 146 Kondisi Pengelolaan Arsip Tahun 2016 - 2020

No.	Urajan		Kond	lisi Per T	ahun	
NO.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah OPD yang telah mengelola	54	48	48	48	48
	kearsipan dengan baik.					
2.	Persentase jumlah OPD yang telah	100	100	100	100	100
	mengelola kearsipan dengan baik.					
3.	Jumlah Desa yang telah mengelola	49	63	77	113	113
	kearsipan dengan baik.					
4.	Persentase jumlah Desa yang telah	17,44	22,41	27,40	40,21	40,21
	mengelola kearsipan dengan baik.					
5.	Jumlah OPD yang telah digitalisasi	5	13	48	48	48
	kearsipan dengan baik.					
6.	Persentase jumlah OPD yang	9,26	27,08	100	100	100
	telah digitalisasi kearsipan					
	dengan baik.					

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Tegal, 2021

Mendasarkan Tabel di atas menunjukan bahwa dari tahun 2016-2020 seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengelola arsip dengan baik hal ini meningkat bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2015 diman jumlah Organisasi Perangkat Daerah yang telah mengolah arsip dengan baik sebanyak 7,4%. Persentase jumlah desa yang telah mengelola kearsipan dengan baik dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 juga terus mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2015 sebanyak 10,32% menjadi 40,21% pada tahun 2019. Sama halnya dengan jumlah OPD yang telah digitalisasi kerasipan dengan baik dari tahun 2015-2019 juga terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2019 mencapai 100 Persen.

3.3.2. Fokus Layanan Pilihan

a) Kelautan dan Perikanan

1) Produksi Perikanan

Produksi perikanan mencakup produksi perikanan tangkap dan produksi perikanan budidaya serta produksi pengolahan hasil perikanan. Secara rinci produksi perikanan tangkap, produksi perikanan budidaya, produksi pengolahan hasil perikanan dan persentase perairan umum daratan (PUD) yang bebas dari destructive fishing dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 2.147 Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Perikanan Tangkap							
	Produksi kg)	796.631	1.315.879	1.441.201	1.343.621	1.664.974	1.964.378	
	Nilai (Rp 000)	7.447.623	9.436.612	10.603.486	11.343.111	12.887.350	13.608.184	
2.	Perikanan Budida	ya						
	Produksi(kg)	2.059.158	1.874.041	1.933.115	2.047.818	2.511.329	2.730.262	
	Nilai (Rp	36.926.775	40.937.539	75.021.353	86.814.081	127.440.566	145.642.227	
	000)							

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 sebesar 1.964.378 kg. Jumlah ini cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2015-2019), hanya saja di tahun 2018 mengalami penurunan jumlah produksi dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh cuaca ekstrem berupa gelombang laut yang tinggi dan angin kencang diawal dan akhir tahun, yang menyebabkan nelayan tidak bisa melaut dan melakukan aktivitas penangkapan ikan serta menjadi musim paceklik bagi nelayan.

Jumlah produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 sebesar 2.730.262 Kg. Jumlah ini juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2016-2019), hanya saja ada penurunan produksi antara tahun 2015 ke tahun 2016, disebabkan adanya efek cekaman panas yang panjang, sehingga banyak kolam pembudidayaan yang tidak berproduksi maksimal, terutama kolam lele dan nila.

Tabel 2.148 Produksi dan Nilai Produksi Pengolahan Hasil Perikanan Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pengolahan						
	hasil						
	perikanan						
	Produksi	5.668.973	3.603.151	3.125.680	3.409.674	4.514.145	5.478.639
	(kg)						
	Nilai	191.120.735	86.007.100	74.337.204	129.470.577	171.409.044	131.189.142
	(Rp.000)						

Sumber : Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Pada tahun 2020 produksi pengolahan hasil perikanan mencapai 5.478.639 Kg. Jumlah produksi ini cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2017-2019). Terjadi penurunan pada tahun 2015 – 2016, disebabkan kekurangan pasokan ikan untuk bahan baku pindang, sehingga mempengaruhi produksi serta nilainya. Sementara di tahun 2020 nilai produksi pengolahan menurun, selain disebabkan daya beli masyarakat turun, juga karena jenis ikan yang diolah kebanyakan jenis ikan yang berharga lebih murah misalnya saja ikan salem, serta adanya tambahan produksi dari olahan ikan segar dan olahan ikan lainnya yang secara jumlah produksi menjadi bertambah namun dengan nilai lebih kecil.

Kegiatan detructive fishing menjadi permasalahan yang muncul di perairan umum daratan (PUD) Kabupaten Tegal yang menyebabkan kerusakan ekosistem dan berimplikasi pada produksi perikanan tangkap di perairan umum daratan (PUD). Sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Tegal dalam penanganan detructive fishing yaitu melalui kegiatan penebaran benih ikan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD).

Tabel 2.149 Perairan Umum Daratan (PUD) Yang Bebas Dari Kegiatan Destructive Fishing di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perairan Umum Daratan (PUD)	-	-	3,70	7,41	11,11	11,11
	di Kabupaten Tegal						

Sumber: Dinas Kelautan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Tegal, 2021

Kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan umum daratan (PUD) mulai dilaksanakan sejak tahun 2017, sehingga realisasi di tahun 2015-2016 tidak ada. Pada tahun 2015 – 2016, kegiatan pengawasan sumberdaya perikanan dilaksanakan di perairan laut Kabupaten Tegal, berfokus pada illegal, unregulated dan unreported fishing (IUU Fishing).

2) Produksi Daging, Telur, Susu

Produksi daging di Kabupaten Tegal mencakup produksi daging ternak ruminansia besar (Sapi, Kerbau), ternak ruminansia kecil (Kambing, Domba), Unggas dan aneka ternak lainnya. Produksi telur meliputi telur ayam, bebek, puyuh dan unggas lainnya, sedangkan produksi susu meliputi produksi susu sapi dan susu kambing. Secara rinci data produksi daging, produksi telur, produski susu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.150 Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kabupaten Tegal Tahun 2015- 2020

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Daging						
	Produksi (kg)	6.809.218	9.675.621	9.784.502	10.057.415	10.167.793	11.284.734
2.	Telur						
	Produksi (kg)	10.861.860	10.203.264	10.249.993	10.258.158	10.261.185	10.760.493
3.	Susu						
	Produksi (kg)	633.323	713.192	713.428	713.890	686.651	604.664

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah produksi daging di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mencapai 11.284.734 Kg. Produksi daging ini cenderung meningkat dibanding tahun sebelumnya (2015-2019). Pada tahun 2020 produksi telur mencapai 10.760.493 Kg. Jumlah produksi telur telur ini juga cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2015-2019).

Produksi susu pada tahun 2020 mencapai 604.664 Kg. Jumlah ini mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (2018, 2019), hal ini disebabkan karena populasi sapi perah sebagai penghasil susu semakin menurun, sehingga berpengaruh terhadap produksi susu secara total, sedangkan produksi susu kambing yang diharapkan mem-backup penurunan produksi susu sapi, produksinya belum cukup optimal.

3) Pengendalian kesehatan ternak dan produk hasil ternak yang ASUH

Tabel 2.151 Persentase ternak terkendali status kesehatannya dan pengawasan produk hasil ternak yang ASUH Kabupaten Tegal Tahun 2015- 2020

No.	Urajan	Realisasi						
NO.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Ternak terkendali status kesehatannya (%)	11,73	11,73	15,57	21,11	16,61	31,37	
2	Pengawasan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH (jenis)	2	2	2	2	2	2	

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Dalam rangka pengendalian kesehatan ternak, dilaksanakan pengobatan ternak kepada peternak rakyat di Kab. Tegal. Setiap tahun persentase status kesehatan ternak yang terkendali di Kabupaten Tegal semakin meningkat. Sedangkan pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), maka dilakukan pemeriksaan peredaran produk hasil ternak yang Aman Sehat Utuh dan Halal/ASUH dengan 2 jenis indikator yaitu menjamin produk daging lebih terjamin kualitasnya, melalui pemotongan hewan dilaksanakan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Pemeriksaan sampel air susu baik susu kambing maupun susu sapi ditujukan agar terjamin kualitas air susu yang ASUH dan juga dalam rangka mencegah terjadinya praktek pemalsuan air susu, misal dengan di tambah air tajin atau santan. Pengawasan Kesmavet ini dilakukan dalam rangka menjamin ketersediaan produk hasil ternak yang ASUH (Aman Sehat Utuh dan Halal).

Jumlah ternak yang dipotong di RPH baik ternak besar (Sapi, kerbau) maupun ternak kecil (Domba, Kambing) pada tahun 2015 – 2020 dapat di lihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.152 Jumlah Ternak Yang Dipotong Di RPH (Rumah Potong Hewan)
Di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Jenis Ternak	Jumlah Pemotongan (ekor)						
NO.	jenis Ternak	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sapi	4161	3701	3113	3983	4113	1653	
2	Kerbau	-	97	81	107	88	26	
3	Kambing	1671	1844	894	1630	1514	377	
4	Domba	3102	2577	1505	2195	2427	668	
	Jumlah Total	8934	8219	5593	7915	8142	2724	

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

Data jumlah sampel air susu yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Tegal dari tahun 2015-2020 secara rinci ada pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.153 Jumlah Pemeriksaan Sampel Air Susu di Kabupaten Tegal Tahun 2015-2020

No.	Ionia Ain Cuau	Jumla	Jumlah Sampel Air Susu Yang Diperiksa (Liter)						
NO.	Jenis Air Susu	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
1	Sapi	14	14	18	14	14	10		
2	Kambing	30	30	35	33	33	25		
	Jumlah Total	44	44	53	47	47	35		

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan Peternakan Kabupaten Tegal, 2021

b) Pariwisata

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan daerah pada urusan bidang pariwisata mencakup: (1). Destinasi Pariwisata, dengan kewenangan: pengelolaan daya tarik wisata kabupaten/kota. pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/ kota, dan penetapan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota; (2). pemasaran pariwisata, dengan kewenangan: pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri tentang daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota; (3). pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dengan kewenangan: penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten/kota; dan (4). pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi

kreatif, dengan kewenangan: pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar. Perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Tegal Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 154 Jumlah Kunjungan Wisata Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun						
NO.	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Jumlah obyek wisata (obyek)	37	37	37	37	60		
2.	Jumlah kunjungan wisata (orang)	905.829	1.053.957	950.771	1.189.877	466.668		
	a. Wisatawan Manca Negara	1.721	1.470	3.805	3.247	137		
	b. Wisatawan Nusantara	904.108	1.052.487	946.966	1.186.630	466.531		
3.	Rata-rata kunjungan per obyek wisata (orang)	301.943	351.319	315.655	297.469	155.556		

Sumber : Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Jumlah Daerah Tujuan Wisata (DTW) yang ada di Kabupaten Tegal sejak tahun 2016-2020 sebanyak 37 DTW. Jumlah kunjungan ke-3 Daerah Tujuan Wisata (DTW) milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tersebut sebanyak 466.668 orang pada tahun 2020 yang terdiri dari wisatawan nusantara 466.531 dan wisatawan mancanegara sebesar 137 orang, hal ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya akibat dampak covid-19.

PAD sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD unggulan di Kabupaten Tegal. Berikut data 5 tahun terakhir PAD sektor pariwisata di Kabupaten Tegal.

Tabel 2. 155 PAD Sektor Pariwisata Tahun 2016-2020

No	Tahun	PAD Pariwisata terhadap PAD
1	2016	40,57
2	2017	41,23
3	2018	26,63
4	2019	30,73
5	2020	30,73

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal, 2021

Capaian tahun 2018 sedikit menurun dibanding capaian tahun 2017. Hal ini disebabkan karena jumlah kunjungan wisatawan di obyek wisata yang dikelola pemerintah menurun. Destinasi obyek wisata yang dikelola masyarakat berkembang sehingga menjadi alternatif daerah kunjungan wisata bagi masyarakat di samping obyek wisata yang dikelola Pemerintah Daerah.

c) Pertanian

1) Kelembagaan SDM Penyuluh Pertanian

Penyuluh pertanian berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyuluhan pertanian pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Tugas pokok penyuluh pertanian adalah menyuluh, selanjutnya dalam menyuluh dapat dibagi menjadi menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan penyuluhan. Secara lengkap komposisi jumlah penyuluh di Kabupaten Tegal sebagaimana Tabel berikut ini.

Tabel 2. 156 Jumlah Penyuluh Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun						
NO.	Ulalali	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Penyuluh PNS :							
	a. Pertanian	88	88	108	108	108		
	b. Perikanan	6	-	-	-	-		
	c. Kehutanan	15	-	-	-	-		
2.	Penyuluh THL – TBPP	81	77	49	49	49		
		81	81	81	81	81		
3.	Penyuluh Swadaya :							
	a. Pertanian	132	-	-				
	b. Perikanan	11	-	-				
	c. Kehutanan	30	-	-				
	Jumlah	363						

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Berdasarkan peraturan perundangan baru yang berlaku maka pada tahun 2017 penyuluh pertanian menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jumlah penyuluh PNS di Kabupaten Tegal dari tahun ke tahun mengalami penurunan jumlah, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 93 orang penyuluh, maka di Tahun 2016 menjadi 88 orang penyuluh. Demikian pula Penyuluh Kehutanan dari PNS, dimana pada Tahun 2011 sebanyak 20 orang penyuluh menjadi 15 orang penyuluh pada Tahun 2016. Adapun penyuluh pertanian relatif tetap.

2) Produktivitas Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan

Perkembangan sektor pertanian dipengaruhi oleh produktivitas dari masing-masing komoditi. Beberapa faktor yang mempengaruhi produktivitas antara lain luas tanam,luas panen serta hasil produksi. Pada tabel berikut menjelaskan tentang produktivitas komoditi pertanian, tanaman hias dan perkebunan di Kabupaten Tegal Tahun 2016 – 2020.

Tabel 2. 157 Produktivitas Komoditi Padi, Palawija, Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias dan Perkebunan Rakyat Tahun 2016–2020

No	Urajan		Ko	ondisi Per T	ahun	
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Padi					
	Luas Tanam (ha)	64.819	76.761	64.297	61.149,9	56.050
	Luas Panen (ha)	62.628	65.499	65.660	64.037	57.620
	Produksi (ton)	382.161	394.023	373.525	377.924	360.431
	Produktivitas (ton/ha)	6,10	6,02	5,69	5,90	6,25
2.	Jagung					
	Luas Tanam (ha)	0/S	12.799	10.028	16.348,9	21.238
	Luas Panen (ha)	16.141	15.699	7.982	16.465	17.506
	Produksi (ton)	121.994	118.288	45.069	124.200	117.236
	Produktivitas (ton/ha)	7,55	7,53	5,65	7.54	6,69
3.	Kedelai					
	Luas Tanam (ha)	92	68	151	419,7	119
	Luas Panen (ha)	90	60	104	308	75
	Produksi (ton)	166	108	154	173	81
	Produktivitas (ton/ha)	1,86	1,81	1,48	5,62	1,07

RKPD Kabupaten Tegal Tahun 2022 | BAB II - 124

		Kondisi Per Tahun					
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	
4.	Ketela Pohon						
	Luas Tanam (ha)	387	292	286	201	299	
	Luas Panen (ha)	501	287	259	222	238	
	Produksi (ton)	9.122	6.710	5.928	1.623	4.377	
	Produktivitas (ton/ha)	18,22	23,35	22,89	73,11	18,37	
5.	Ketela Rambat						
	Luas Tanam (ha)	83	50	38	79,8	88	
	Luas Panen (ha)	95	55	35	72	82	
	Produksi (ton)	933	637	346	1.066	663	
	Produktivitas (ton/ha)	10,51	11,56	9,89	14,80	8,03	
6.	Kacang Tanah						
	Luas Tanam (ha)	199	126	66	130,6	168	
	Luas Panen (ha)	197	135	75	117	106	
	Produksi (ton)	494	363	90	147	141	
	Produktivitas (ton/ha)	2,51	2,69	1.20	1,25	1,3	
7.	Kacang Hijau						
	Luas Tanam (ha)	55	11	9	36,8	7	
	Luas Panen (ha)	58	14	0	32,9	3	
	Produksi (ton)	60	16	0	48	3	
	Produktivitas (ton/ha)	1,04	1,20	0	1,47	1,2	
	Sayuran dan Buah						
	Semusim						
1.	Bawang Merah						
	Luas Tanam (ha)	1.783	1.926	2.414	1.901	1.666	
	Luas Panen (ha)	2.091	1.884	2.323	1.901	1.741	
	Produksi (ton)	212.204	19.828	248.276	161.966	168.797	
	Produktivitas (ton/ha)	10.15	10,52	106,86	85,20	72,27	
2.	Cabe						
	Luas Tanam (ha)	303	327	360	495	592	
	Luas Panen (ha)	353	328	397	418	628	
	Produksi (ton)	3.130	3.581	38.705	25.185	41.827	
	Produktivitas (ton/ha)	8,87	10,92	97,49	74,08	79,39	
3.	Kentang						
	Luas Tanam (ha)	418	459	409	400	1.950	
	Luas Panen (ha)	348	548	406	338	413	
	Produksi (ton)	3.761	11.866	87.160	80.205	96.540	
	Produktivitas (ton/ha)	10,81	21,65	214,68	74,08	79,39	
4.	Kubis						
	Luas Tanam (ha)	1.179	1.162	1.090	975	1.950	
	Luas Panen (ha)	1.276	1.202	1.108	948	761	
	Produksi (ton)	21.313	26.190	195.015	169.360	99.982	
	Produktivitas (ton/ha)	16,70	18,82	177,81	132,43	131,38	
5.	Semangka		-				
	Luas Tanam (ha)	109	123	72	42	135	
	Luas Panen (ha)	109	123	72	42	113	
	Produksi (ton)	1.389	1.689	7.185	5.562	19.358	
	Produktivitas (ton/ha)	12,74	13,73	99,79	132,43	171.31	
	Tanaman Hias						
1.	Melati						
	Luas Tanam (ha)	1	-	10.000	0	2.000	
	Luas Panen (ha)	337	341	3.419.250	2.095.440	2.182.390	
	Produksi (ton)	5.807	4.796	5.263.728	2.585.981	3.142.270	

NI -	II-raia-		Ke	ondisi Per T	ahun	
No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
	Produktivitas (ton/ha)	17,23	14,07	1,54	1,23	3,04
	Perkebunan Rakyat					
1.	Kelapa Dalam					
	Luas Tanam (ha)	4.186	3.665	3.370,66	3.180,76	2.905
	Luas Panen (ha)	2.283	2.123	2.027,40	1.903,4	1.638
	Produksi (ton)	2.155	1.887	1.807,94	1.814	1.296
	Produktivitas (ton/ha)	0,94	0,89	891,75	0,953	0,791
2.	Cengkeh					
	Luas Tanam (ha)	1.282	1.325	1.323,48	1.821.32	1.851,42
	Luas Panen (ha)	768	765	764,17	768,40	742,2
	Produksi (ton)	85	140	140,31	110	63,64
	Produktivitas (ton/ha)	0,11	0.18	183,61	0,143	0,085
3.	Teh					
	Luas Tanam (ha)	163	163	164,73	165,73	170,93
	Luas Panen (ha)	121	129	128,43	135,35	135,30
	Produksi (ton)	35	35	35,06	56,39	33,49
	Produktivitas (ton/ha)	0,29	0,27	273,02	0,41	0,247
4.	Tebu					
	Luas Tanam (ha)	3.548	3.265	2.687,30	1.809,857	1.856,029
	Luas Panen (ha)	3.548	3.265	2.669,18	1.804,857	1.856
	Produksi (ton)	15.872	14.299	30.912,06	7.104,132	7.066
	Produktivitas (ton/ha)	4,47	4,38	11,58	3.925	3.807

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Tegal, 2021

Produktivitas tanaman pangan seperti padi, palawija sayuran dan buahbuahan relatif stagnan bahkan beberapa cenderung berfluktuatif seperti tanaman padi dari tahun 2010–2014 pergerakannya tidak stabil. Ditahun 2012 produktivitas mencapai 5,94 ton/ha dan mengalami penurunan di tahun 2013 sebanyak 5.76 ton/ha. Sedangkan untuk produktivitas tanaman hias melati pada tahun 2013 mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2011-2012. Pada tahun 2014 produktivitas tanaman hias mencapai 25,16 ton/ha sedangkan pada tahun 2011, 2012 masing-masing mencapai 3,50 ton/ha, 3,07 ton/ha.

Perhitungan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas.

Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Untuk memudahkan perhitungan dapat digunakan contoh tabel berikut ini dalam menghitung total nilai produksi ($\{\sum (Pi \times Hi)\}$).

Tabel 2. 158 Perhitungan Nilai Produksi Total Kabupaten Tegal

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
1	Bahan Makanan			
	Padi	373.524	409.900	153.107.487.600
2	Sayuran			-
	Kangkung	3.026	7.500	22.695.000
	Sawi/Cesim	35.020	14.000	490.280.000

No	Komoditas	Produksi (Pi) Kuantum 2012	Harga /Satuan (Hi)	Nilai Produksi/satuan dalam Rupiah (Pi x Hi)
	Bawang Merah	248.239	16.069	3.988.952.491
3	Buah-Buahan			
	Pisang	96.629	20.000	1.932.580.000
	Mangga	31.024	25.000	775.600.000
	Jambu Biji	9.153	25.000	228.825.000
	Jambu Air	3.905	50.000	195.250.000
	Pepaya	10.242	10.000	102.420.000
	Nangka	18.263	45.000	821.835.000
	Belimbing	2.243	40.000	89.720.000
4	Peternakan			
	Sapi Potong (ekor=250kg)	1.315.845	101.750	133.887.228.750
	Kerbau (ekor=250kg)	26.593	110.000	2.925.230.000
	Domba/Kambing (ekor=20kg)	930.958	65.000	60.512.270.000
	Kambing (ekor=20kg)	493.740	100.000	49.374.000.000
	Ayam Kampung (ekor=2kg)	6.500.169	57.357	372.830.193.333
	Ayam Buras (16 telur=1kg)	237.802	50.000	11.890.100.000
	Itik (ekor=1,5kg)	162.154	70.000	11.350.780.000
	Lainnya (puyuh, kelinci, angsa)	117.241	30.000	3.517.230.000
	Burung Dara	2.289	30.000	68.670.000
	Telur Ayam Kampung	7.144.390	2.000	14.288.780.000
	Telur Itik	912.840	2.000	1.825.680.000
	Telur Puyuh	43.642	500	21.821.000
	Susu	713.428	4.000	2.853.712.000
	Jumlah Total			827.101.340.174

Sumber : Data KLHS RPJMD Kabupaten Tegal, 2021

Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2017 sebesar 104.908,85 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk yang dilihat dari dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan lahan di Kabupaten Tegal di tahun 2017 adalah sebesar 215.027, 25 Ha dan di tahun 2031 diproyeksikan sebesar 225.583,05 Ha.

Berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan, dapat ditentukan status daya dukung lahan di Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapatkan bahwa:

- Untuk Tahun 2017 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L, (215.027,25 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.
- Untuk Tahun 2031 maka S_L (104.908,85 Ha) < D_L, (225.583,05 Ha), hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan defisit. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan belum dapat memenuhi kebutuhan.

3) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian Kabupaten Tegal memiliki peluang besar untuk dapat lebih berkembang dari kondisi eksisting saat ini,hal ini dapat dilihat darikontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal. Pada tahun 2018 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRBKabupaten Tegal berdasarkan harga berlaku mencapai 13,29 %. Selain merupakan kontributor ketiga terbesar dalam perekonomian wilayah, angka di atas menunjukkan bahwa inflasi di sektor pertanian relatif lebih rendah daripada inflasi pada sektor lainnya. Sayangnya, kontribusi sektor pertanian menunjukkan tren yang semakin menurun. Hal ini perlu mendapat perhatian karena banyaknya masyarakat yang bekerja pada sektor ini. Sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 159 Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Tahun 2016-2020

No	Harian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)							
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020			
1	Jumlah Kontribusi Sektor Pertanian:								
	- ADH Berlaku	4.097.190,91	4.191.180,91	4.435,640,80	4.495,443,15	4.675,153,15			
	- ADH Konstan	2.935.344,86	2.657.779,26	3.001.385,12	3.011.429,74	3.077.109,74			
2.	Jumlah PDRB:								
	- ADH Berlaku	28.025,642,98	30.278,512,28	32.769,834,10	35.231,694,10	35.318,844,10			
	- ADH Konstan	21.182.927,23	22.322.107,23	23.552.548,37	24.866.738,37	24.502.628,37			
3.	Kontribusi Sektor Pertanian thd PDRB								
	- ADH Berlaku	14,84	12,50	13,29	12,76	13,24			
	- ADH Konstan	13,78	13,25	12,87	12,11	12,56			

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

d) Perdagangan

1) Ekspor Bersih Perdagangan

Nilai ekspor bersih perdagangan di Tegal dari tahun 2015 sampai tahun 2017 meningkat tetapi tahun 2018 mengalami penurunan. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 160 Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Ribuan)					
NO.	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Nilai Ekspor	209.619.490.505	228.638.224.198	169.760.204.000	205.000.000.000	144.000.000.000	
2.	Nilai Impor	16.312.612.489	54.801.884.058	0	0	0	
3.	Nilai Ekspor						
	Bersih (Nilai						
	Ekspor -	193.306.878.015	173.836.380.139	199.306.877.015	102.000.000.000	144.000.000.000	
	Nilai						
	Impor)						

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kab. Tegal, 2021

2) Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB

Sektor perdagangan (perdagangan, hotel dan restoran) merupakan penyumbang PDRB terbesar kedua. Pada tahun 2019 kontribusi sektor perdagangan terhadap capaian PDRB Kabupaten Tegal berdasarkan mencapai 15,47% dan atas dasar harga konstan adalah sebesar 17,37%. Perbedaan kontribusi ini menunjukkan bahwa sektor ini relatif mengalami inflasi yang cukup tinggi. Ditopang dengan lokasi Kabupaten Tegal yang strategis, perkembangan kota kecamatan yang cukup pesat, dan kontribusi sektor pertanian dan industri pengolahan yang signifikan, maka pada dasarnya sektor perdagangan dapat berkembang tanpa adanya campur tangan pemerintah secara masif. Tugas Pemerintah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sektor ini adalah menerapkan regulasi yang menjamin keadilan dalam berusaha, serta menyediakan infrastruktur pendukung sektor perdagangan yang dapat diakses oleh semua orang. Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2. 161 Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor) terhadap PDRB Tahun 2016 - 2020

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun (Dalam Jutaan Rupiah)								
NU.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020				
1.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor):									
	- ADH Berlaku	2.101.862,50	4.725.986,05	4.942.943,53	5.449.555,30	5.274.290,34				
	- ADH Konstan	1.648.467,47	3.872.572,30	3.954.562,55	4.307.730,96	4.126.594,65				
2.	Jumlah PDRB :	Jumlah PDRB :								
	- ADH Berlaku	27.727.792,98	30.044.412,28	33.079.234,10	35.231.687,56	35.318.843,56				
	- ADH Konstan	21.265.717,23	21.265.717,23	23.552.548,37	24.806.727,91	24.502.623,91				
3.	Kontribusi Sektor Perdagangan (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor)thd PDRB									
	- ADH berlaku	15,63	15,42	15,73	15,47	14,93				
	- ADH Konstan	17,35	17,16	17,31	17,37	16,84				

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

e) Perindustrian

1) Perencanaan dan Pembangunan Industri

Perencanaan dan Pembangunan Industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang meliputi beberapa aspek dalam menciptakan struktur ekonomi yang kukuh sebagai penggerak ekonomi daerah yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Berikut beberapa aspek pembangunan industri antara lain:

c. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan wilayah yang ditujukan untuk berkembangnya kegiatan industri harus ditunjang dengan akses infrastruktur industri dan penunjang yang disediakan pemerintah, infrastruktur tersebut meliputi jaringan energi dan listrik,

sumber daya air dan pasokan bahan baku, sanitasi dan transportasi. Adapun infrastruktur penunjang meliputi perumahan, pendidikan, kesehatan dan tempat pembuangan sampah. Rencana pengembangan perwilayah industri telah dimasukan pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana tertuang didalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tegal.

Tabel 2.162 Kawasan Peruntukan Industri di Kabupaten Tegal

No	Jenis Kawasan Peruntukan Industri	Lokasi Kecamatan
1	Industri Besar dan Menengah	
	KPI Margasari	Margasari
	KPI Pantura	Kramat, Suradadi dan Warureja
2	Industri Kecil danIndustriRumahTangga	Kramat, Adiwerna, Talang, Pangkah, Pagerbarang, Suradadi, Balapulang, Dukuhturi, Margasari dan Warureja

Sumber : BPS Kabupaten Tegal, 2021

d. Pembangunan Sumber Daya Industri

UPTD laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian dalam rangka peningkatan daya saing daerah melakukan pelayanan kepada masyarakat diantarannya adalah peningkatan qualitas (quality) mutu produk industri melalui pengujian dan pemesinan serta pelaksanaan sertifikasi pesonil dimana UPTD Laboratorium Perindustrian sebagai lembaga penilai kesesuaian sejak tahun 2008 sudah teregestrasi / terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (ISO/IEC 17025;2017) LP-396 - IDN dan sejak Tahun 2017 terakreditasi/teregrestasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Logam dan Mesin Indonesia (LSP-LMI) sebagai TUK Mandiri SP3 (Tempat Uji Kompetensi Personil) terverifikasi ulang nomor 002/SK-LSP-LMI/TUK-LM/X/2020 tanggal 9 oktober 2020 dengan skema Operasi mesin dan proses, Menggambar merencana dan mendisain, Fabrikasi, Quality.

Tabel. 163 Pelayanan Peningkatan Qualitas Mutu Produk Masyarakat/Industri di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

Kategori (Pelanggan)	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
Kab.Tegal	141	263	336	365	300
Luar Kab.Tegal	47	51	136	150	136
Pendidikan	91	97	64	110	100
Total/Tahun	249	411	536	625	536

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

e. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

Pembangunan sumber daya industri meliputi beberapa hal diantaranya sertifikasi produk dan standarisasi IKM dalam upaya meningkatkan daya saing industri daerah. Berikut data sertifikasi produk dan standarisasi IKM :

Tabel 2.164 Sertifikasi Produk IKM di Kabupaten Tegal

NO.	JENIS SERTIFIKASI	JU TE	TAHUN		
		APBD I	APBD II	APBN	
1	UJI NUTRISI	39	2		2019-2020
2	UJI KADALUARSA	7			2018-2019
3	PIRT	82	-	-	2018-2020
4	HALAL	30	11		2018-2020
5	PENDAFTARAN MERK	96	3		2015-2020
6	BKI	-	-	4	2018-2019
7	SNI			2	2018

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel di atas menunjukan bahwa sebagian kegiatan fasilitasi sertifikasi produk IKM dibiayai oleh APBD I kemudian APBD II dan APBN. Kegiatan fasiltasi yang biayai oleh APBN cenderung pada kegiatan yang lebih besar dan membutuhkan proses lebih lama daripada proses sertifikasi yang lainnya. Selain sertifikasi produk IKM juga dilakukan standarisasi IKM sebagaimana yang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.165 Standarisasi IKM di Kabupaten Tegal

NO.	JENIS STANDARISASI	JUMLAH IKM TERFASILITASI			TAHUN
		APBD I	APBD II	APBN	
1	DOKUMEN MUTU	3	3		2018-2019
2	ISO 9001 : 2000			1	2008
3	ISO 9001 : 2008			1	2011
4	ISO 9001 : 2015			6	2017-2019
5	ISO 14001 : 2015		1		2019

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

f. Pengendalian Izin Usaha Industri

Dalam pelaksanaan kegiatan usaha Industri di Kabupaten Tegal perlu dilengkapi dengan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu Izin Usaha Industri, dalam penerbitan IUI perlu adanya pengendalian melalui penerbitan Rekomendasi Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas Perindustian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, berikut data Rekomtek IUI yang telah diterbitkan:

Tabel 2.166 Rekomendasi Teknis Penerbitan IIII

NO.	NAMA PERUSAHAAN	KBLI / JENIS USAHA	TANGGAL TERBIT
1.	CV Dok Abadi	33151 – Reparasi Kapal, Perahu dan Banguna Terapung	18 Juni 2020
2.	PT Citra Bahari Shipyard	30111 – Industri Kapal dan Perahu	19 Maret 2020
3.	PT Gopek Cipta Utama	10763 – Industri Pengolahan The	26 Agustus 2020
4.	PR Harjanti	10771 – Industri Kecap	26 Oktober 2020

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

g. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Tabel 2.167 Perusahaan SIINas dan IUI

NO.	URAIAN	JUMLAH IKM	KETERANGAN		
1.	Perusahaan yang sudah	66	IUI yang dimiliki belum		
	memiliki akun SIINas		Efektif		
2.	Perusahaan yang sudah	10	4 perusahaan telah		
	mengajukan		diterbitkan rekomendasi		
	Permohonan Verifikasi		teknis oleh Dinas		
	Teknis IUI		Perindustian dan Tenaga		
			Kerja Kabupaten Tegal		

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

f) Transmigrasi

Transmigrasi pada dasarnya merupakan pembangunan wilayah dalam rangka peningkatan taraf hidup serta pemanfaatan sumber daya alam dan manusia agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa melalui program terpadu dan lintas sektoral. Dengan kata lain, transmigrasi bertujuan untuk meratakan penyebaran jumlah penduduk/tenaga kerja serta pembukaan dan pengembangan daerah produksi baru dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang dapat menjamin peningkatan taraf hidup transmigran dan masyarakat sekitarnya. Adapun jumlah transmigran yang diberangkatkan selama Tahun 2015-2019 sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 2. 168 Jumlah Transmigran Tahun 2015 - 2019

Tahun	Lokasi	Jum	lah
I alluli	Lokasi	KK	Jiwa
2015	Kab Bangka Barat Bangka Belitung	6	23
2016	Kab Pahuwato Provinsi Gorontalo	3	8
	Kab Gorontalo Provinsi Gorontalo	4	14
2017	Kab Kolaka Timur Sulawesi Tenggara	2	13
	Kab Bukit Aren Provinsi Gorontalo	2	8
2018	Kab Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu	3	15
2019	Tanjung Buka sp.6 Kab. Bulungan	3	16
	Kalimantan Utara		
	JUMLAH	23	97

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Tegal, 2021

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

1) Perencanaan Penganggaran Pogram

Perencanaan pembangunan memiliki peranan yang penting dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan daerah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk kurun waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk kurun waktu 5 tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk kurun waktu 1 tahun.

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, topdown & bottom-up. Perencanaan dan penganggaran program adalah untuk memastikan penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Tegal yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) disusun sesuai tahapan. Adapun pencapaian penyusunan dokumen perencanaan sesuai tahapan mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dan diharapkan 5 tahun kedepan dengan target 100% dapat diwujudkan.

Tabel 2. 169 Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Program Disusun Tepat Waktu Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
NO	Oraian	2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Dokumen Perencanaan	100	100	100	100	100	
	disusun sesuai tahapan (%)						

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Berdasarkan data diatas maka penyusunandokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Tegal telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik tahapan maupun waktunya. Hal ini perlu dipertahankan dan secara kualitas masih diperlukan adanya peningkatan di masa mendatang.

2) Perencanaan Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial

Perencanaan pemerintahan dan kesejahteraan sosial adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perencanaan perangkat daerah yaitu Renja OPD Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui koordinasi stakeholder rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dalam setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan. Pencapaian keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial dengan dokumen perangkat daerah rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial sesuai tahapan dalam tahun 2016 sampai dengan 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 170 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Keselarasan Dokumen Perencanaan Pemkesos dengan dokumen perencanaan OPD rumpun Pemkesos (%)	95	96	96	97	97	

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial dengan dokumen perencanaan OPD rumpun pemerintahan dan kesejahteraan sosial belum mencapai 100% dikarenakan masih adanya kegiatan inisiatif dari OPD yang muncul setelah penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai akibat adanya dinamika dalam pembangunan pemerintahan dan kesejahteraan sosial.

3) Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur

Perencanaan yang baik dan selaras antara dokumen perencanaan daerah yaitu RKPD dan dokumen perencanaan perangkat daerahyaitu Renja OPD di bidang perekonomian dan infrastruktur dapat mengahsilkan kondisi perekonomian dan infrastruktur daerah yang baik sesuai dengan harapan masyarakat. Perencanaan Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur adalah untuk menghasilkan keselarasan dokumen RKPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan Renja OPD pada rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur. Dengan keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan hasil pembangunan ekonomi dan kondisi infrastruktur di kabupaten Tegal. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perangkat daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur sesuai tahapan dapat dilihat dalam tabel dibawah.

Tabel 2. 171 Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Perekonomian dan Pengembangan Infrastruktur Tahun 2016-2020

No	Uraian		Kondisi Per Tahun					
NO			2017	2018	2019	2020		
1.	Keselarasan Dokumen Perencanaan	94	94	95	96	96		
	Ekbangtur dengan dokumen perencanaan							
	OPD rumpun Ekbangtur (%)							

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Keselarasan dokumen perencanaan daerah rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur dengan dokumen perencanaan OPD rumpun perekonomian dan pengembangan infrastruktur belum dapat mencapai 100% dikarenakan terdapat perbedaan dalam penerapan detail teknis kegiatan khususnya yang menyangkut konstruksi bangunan.

4) Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan adalah untuk mengendalikan kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan dan mengevaluasicapaian indikator pembangunan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Untuk mencapai kondisi tersebut dilakukan melalui pengendalian operasional kegiatan, monitoring dan evaluasi kegiatan serta evaluasi kinerja pembangunan. Hasil pencapaian kesesuaian rencana dan realisasi kegiatan serta capaian indikator pembangunan sesuai target dapat digambarkan sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 172 Tingkat Kesesuaian Rencana dan Realisasi Kegiatan Tahun 2016-2020

NI.	Haratan	Kondisi Per Tahun						
No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	Rata – Rata Deviasi Capaian	20,88	17,21	13.75	15,05	3,80		
	Kinerja Fisik (%)							
2.	Rata – Rata Deviasi Capaian	34,80	28,59	22,73	21,86	11,63		
	Kinerja Keuangan (%)							
3.	Rata – Rata Deviasi (%)	27,84	22,90	18,24	18,46	7,72		
4	Tingkat Kesesuaian Rencana dan	72,16	77,1	81,76	81,54	92,28		
	Realisasi Kegiatan (%)							

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat kesesuaian rencana dan Realisasi Kegiatan dicerminkan dengan adanya rata-rata deviasi kegiatan yang dicapai. Semakin kecil deviasi antara rencana dan realisasi kegiatan semakin baik kinerja kegiatan pembangunan. Berdasarkan Tabel diatas, tingkat kesesuaian antara rencana dan realiasi kegiatan dalam 5 tahun terakhir semakin membaik. Tahun 2020 rata - rata deviasi kegiatan mencapai 7,72% dan merupakan yang terbaik selama lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan realisasi kegiatan tahun 2020 mencapai 92,28 %.

Tabel 2. 173 Tingkat Capaian Indikator Pembangunan Sesuai Target
Tahun 2016-2020

No	Indikatar Dambangunan		Kond	isi Per Ta	ahun	
NO	Indikator Pembangunan	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Indikator sasaran tercapai	123	132	159	178	161
	Jumlah Indikator sasaran	200	200	200	200	200
	Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)	61,50	66,00	79,50	89,00	83,85
2.	Jumlah Indikator Program Tinggi/Sangat Tinggi	323	335	357	402	444
	Jumlah Indikator Program	518	518	518	518	518
	Tingkat CapaianTinggi/Sangat Tinggi (%)	62,36	64,67	68,92	77,61	85,71
3.	Jumlah IKD tercapai	153	177	196	253	219
	Jumlah IKD	315	307	307	307	307
	Tingkat Capaian Indikator Tercapai (%)	48,57	57,65	63,84	82,41	71,33
4.	Tingkat Capaian Indikator Sesuai	57,48	62,78	70,75	83,01	80,30
	Target (%)					

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Tingkat capaian indikator pembangunan sesuai target dapat dijadikan ukuran kinerja pembangunan yangdicerminkan dengan rata-rata indikator pembangunan yang tercapai baik indikator sasaran, indikator program maupun indikator kinerja daerah. Dengan tingkat ketercapaian > 80% menunjukan kinerja yang cukup baik dan harus dapat dipertahankan serta ditingkatkan di masa mendatang.

B. Keuangan dan Aset Daerah

1) Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Dalam Pengelolaan Keuangan daerah terdapat fungsi Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan yang antara lain mempunyai tugas mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, berikut data capaian 5 tahun terakhir tekait indikator capaian Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan.

Tabel 2. 174 Indikator Capaian Kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Tahun 2016 – 2020

No	Indikator	Realisasi Capaian					
NO	muikator	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Penerbitan SP2D tepat waktu (%)	93	95	95	100	100	
2	Persentase ketersediaan Dana kasda terhadap kebutuhan anggaran kas per bulan (%)	100	100	100	100	100	
3	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP (%)	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja program Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan dalam tahun 2019 dapat dipertahankan dari tahun sebelumnya. Namun untuk ketepatan penerbitan Sp2D secara tepat waktu belum bisa mencapai 100%. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya persyaratkan administrasi. Untuk itu perlu adanya koordinasi antar semua pihak agar persyaratan administrasi dalam penerbitan SP2D dapat dipenuhi.

Pemerintah Kabupaten Tegal telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Tegal yang semakin baik, kondisi tersebut merupakan pencapaian dari Indikator sasaran RPJMD tahun 2016-2020, berikut data capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 175 Capaian Kinerja Keuangan Daerah atas Audit LKDP BPK Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian						
muikator	2016	2017	2018	2019	2020		
Opini WTP atas Audit LKPD BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP		

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal telah berhasil mempertahankan WTP sejak Tahun 2016 atau sudah 3 kali berturut-turut memperoleh opini WTP. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga akan menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah Daerah Kabupaten Tegal, BPK masih menemukan beberapa permasalahan namun dampak permasalahan tersebut tidak material dalam mempengaruhi kewajaran atas penyajian laporan keuangan. Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan pengelolaan pendapatan, persediaan dan aset tetap, dan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan.

2) Penyusunan Anggaran Daerah

APBD harus disusun mengikuti ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006, dimana APBD harus disusun tepat waktu. Berikut capaian kinerja Program Penyusunan Anggaran Daerah 5 tahun Tahun 2015 - 2019.

Tabel 2. 176 Capaian Indikator Program Penyusunan Anggaran Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator		Rea	alisasi Capa	iian	
muikatoi	2016	2017	2018	2019	2020
APBD tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
APBD-P tepat waktu (%)	100	100	100	100	100
b. SKPD yg Mengumpulkan	15	20	25	30	35
RKA SKPD tepat waktu sesuai					
SE Bupati Tentang Pedoman					
Penyusunan RKA (%)					
c. RKA SKPD yg sesuai dengan	60	65	70	75	80
SE Bupati Tentang Pedoman					
Penyusunan RKA (%)					

Sumber : BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Tegal telah berhasil menetapkan APBD tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Upaya ini bertujuan untuk mempercepat kegiatan pembangunan dan menghindari sanksi dari pemerintah pusat. Keterlambatan penetapan perda APBD akan berakibat akan ada sanksi, baik itu administrasi, maupun sanksi lainnya yang lebih tegas. Salah satu sanksinya, kepala daerah dan anggota DPRD bisa tidak digaji selama enam bulan.

3) Pengelolaan Barang Milik / Aset Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai Perda No 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan BMD terdiri dari 11 Jenis/bentuk Pengelolaan yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, dari 11 tersebut maka dirata-rata menjadi indikator Pengelolaan BMD yang baik dan benar, berikut capaian 5 tahun terakhir.

Tabel 2. 177 Indikator kinerja Program Pengelolaan Barang Milik/Aset Daerah Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian							
murkator	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah OPD yang telah mengelola BMD yang baik dan benar	22	24	24	26	30			
Jumlah seluruh OPD	56	48	48	48	48			
Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	40	50	60	55	62,5			

Sumber: BPKAD Kabupaten Tegal, 2021

Dalam 5 tahun terakhir, OPD yang telah mengelola barang milik daerah (BMD) dengan baik dan benar selalu meningkat dan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 62,5%. Perubahan paradigma baru pengelolaan barang milik /aset daerah negara telah memunculkan optimisme baru, best practices dalam penataan dan pengelolaan aset yang lebih tertib, akuntabel, dan transparan ke depannya. Pengelolaan aset daerah yang professional dan modern dengan mengedepankan *good* governance di satu sisi diharapkan akan mampu meningkatkan kepercayaan pengelolaan aset daerah.

4) Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu pendapatan dalam APBD yang perlu ditingkatkan pencapaian target oleh perangkat daerah pengampu. Berikut data kinerja pencapaian PAD selama 6 tahun terakhir.

Tabel 2. 178 Capaian Kinerja Realisasi PAD Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian								
inuikator	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Iumlah PAD	304.140.	316.051.	375.631.	372.282.	436.003.	437.354.			
,-	220.135	189.734	165.351	676.055	392.413	766.316			
Iumlah APBD	2.097.234.	2.161.161.	2.450.766.	2.524.365.	2.755.677.	2.608.651.			
,-	873.983	059.588	552.130	919.815	484.152	547.250			
Rasio PAD	14,5%	14,6%	15,1%	14,7%	15,8%	16,7%			

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Sistem pengelolaan data dan penetapan pajak daerah belum optimal ditandai persentase potensi pajak yang ditetapkan masih kurang disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak didalam membayar pajaknya. Untuk itu diperlukan *updating* data pajak secara menyeluruh dan komprehensif.

Tabel 2. 179 Capaian Kinerja PAD Kabupaten Tegal Tahun 2015 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian								
illulkator	2015	2016	2017	2018	2019	2020			
Realisasi PAD	304.140.	316.051.	375.631.	372.282.	436.003.	437.354.			
	220.135	189.734	165.351	676.055	392.413	766.316			
Target PAD	280.411.	312.688.	370.096.	418.830.	499.974.	408.838.			
TargetTrib	781.000	892.000	012.000	489.000	699.000	286.000			
Deviasi PAD	108%	101%	101%	88,9%	96,9%	106,98%			

Sumber: Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

5) Pengelolaan Pajak Daerah

Pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan daerah yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kemandirian daerah. Hasil dari upaya pengelolaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 180 Capaian Kinerja Hasil Pajak Daerah yang tertagih Tahun 2015 - 2020

Indikator	Realisasa Capaian							
illulkator	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
Jumlah pajak daerah	64.737.	69.810.	96.425.	107.035.	112.808.	125.226.		
Jaman pajan daeran	082.699	605.561	287.892	473.258	450.157	436.076		
Jumlah PAD	304.140.	316.051.	375.531.	372.282.	436.003.	437.354.		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	220.135	189.734	165.351	676.055	392.413	786.316		
Rasio Pajak	21 %	22 %	26 %	29 %	28 %	29 %		
Rasio i ajak								

Sumber : Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Penerimaan pajak daerah belum maksimal. Faktornya adalah Kurangnya kesadaran warga masyarakat atas pembayaran pajak, dan sosialisasi, penyuluhan dan ke Wajib Pajak; Spot-spot pelayanan dan sarana pembayaran pajak melalui perbankan dan pihak swasta/PPOB masih kurang; dan Sarana prasarana yang dimiliki belum memadai, seperti mobil pelayanan pajak yang bersifat mobile online, ruang pelayanan pajak yang terkoneksi dengan perbankan.

Pendataan terhadap potensi pajak belum dapat dilakukan secara maksimal, antara lain pendataan obyek baru, pendataan dan penilaian ulang obyek yang sudah ada.

6) Pengelolaan Piutang Pajak

Piutang Pajak adalah : piutang yang muncul karena pendapatan pajak yang telah diatur dalam UU perpajakan belum dilunasi hingga periode laporan keuangan

Pengelolaan piutang pajak masih sangat terbatas, hal ini disebabkan data pajak bermasalah seperti obyek pajak tidak ditemukan, double nomor obyek pajak, obyek pajak dalam sengketa, obyek pajak berubah fungsi dan kepemilikan, masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Tabel 2. 181 Hasil Pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih Tahun 2017 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian					
illulkator	2017	2018	2019	2020		
Jumlah piutang tertagih non PBB dan BPHTB	38.110.360	56.712.923	4.542.294.640	-		
Jumlah piutang non PBB dan BPHTB	86.641.925	109.807.788	4.592.638.505	4.010.011.558		
Rasio Piutang pajak	43,98 %	51,65 %	98,90 %	-		

Sumber: Bappenda Kabupaten Tegal, 2021

Keterangan : Bappenda (BP2D) berdiri tahun 2017 jumlah Piutang tahun 2017 adalah akumulasi tahun 2015-2016

Tabel 2. 182 Capaian Kinerja Hasil Pajak PBB yang tertagih Tahun 2016 - 2020

Indikator	Realisasi Capaian							
illulkator	2016	2017	2018	2019	2020			
Jumlah piutang tertagih PBB	1.607.038.261	1.880.095.681	2.069.387.830	1.444.135.173				
Jumlah piutang PBB	4.178.906.369	6.212.145.007	6.828.477.052	7.791.584.519	9.442.475.891			
Rasio Piutang pajak	38,5 %	30,3 %	30,3 %	18,5 %				

Sumber: Bappenda Kabupaten Tegal tahun 2021

C. Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

1) Kepegawaian Daerah

Dengan Program Kepegawaian Daerah diharapkan persentase ASN mendapatkan hukuman disiplin akan menurun secara signifikan, persentase jabatan struktural terisi sesuai dengan kompetensinya, persentase jabatan fungsional (non guru dan kesehatan) terisi sesuai dengan kompetensinya, rasio pegawai dengan pendidikan perguruan tinggi dan menengah tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio pegawai fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan, persentase PNS yang mengikuti diklat teknis 20 jam/tahun, dan persentase PNS mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan bertambah secara signifikan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras BKD Kabupaten Tegal selaku perangkat daerah yang bertugas dalam bidang kepegawaian. Sebagai ilustrasi tersaji data kepegawaian mulai tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah, dari data tersebut selama kurun waktu sampai dengan tahun 2024 diharapkan akan bertambah.

Tabel 2. 183 Kepegawaian Daerah

No	Uraian	Jumlah per Tahun						
NO	Ulalali	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase ASN yang mendapatkan hukuman disiplin	0.22	0.32	0.20	0.54	0.15	0.12	
2	Persentase jabatan struktural yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	93.72	92.89	91.11	84.62	77.30	87.97	

No	Uraian	Jumlah per Tahun						
No		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
3	Persentase jabatan fungsional yang diisi sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi	49.57	43.10	42.77	40.46	38.50	35.76	
4	Rasio pegawai (PNS) (berpendidikan perguruan tinggi	58,87	0.64	0.68	0.73	1.03	1.10	
5	Rasio pegawai (PNS) fungsional tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	8.84	9.07	9.99	8.13	8.61	9.87	
6.	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan	93.55	93.68	94.29	92.00	93.36	93.50	

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa bahwa persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin jumlahnya relatif kecil, namun dengan masih terbatasnya jumlah PNS dibandingkan dengan jumlah kebutuhan, diharapkan PNS yang sudah ada dapat bekerja secara maksimal dan memiliki tingkat disiplin tinggi yang diwujudkan dengan tidak adanya PNS yang mendapatkan hukuman disiplin baik tingkat ringan, sedang maupun tingkat berat.

Persentase jabatan struktural terisi dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan cukup signifikan, hal ini karena pada periode tersebut terkendala adanya larangan mutasi dan promosi sehubungan dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Hal lainnya adalah penyederhanaan birokrasi yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden K.H Ma'ruf Amin, ditargetkan selesai pada akhir Desember 2020 sehingga pemerintah daerah tidak melaksanakan pengisian jabatan structural yang kosong.

Minat PNS untuk menduduki Jabatan Fungsional non guru/kesehatan mulai tahun 2015-2018 jumlahnya semakin bertambah, tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan. Adanya moratorium melalui Surat Menpan & RB Nomor: B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015 merupakan kendala utama dalam pengisian jabatan fungsional mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.

Rasio pegawai dengan tingkat pendidikan perguruan tinggi meliputi diploma, sarjana dan pasca sarjana dibandingkan dengan pegawai dengan tingkat pendidikan menengah dan pendidikan dasar dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Seperti diketahui bahwa formasi pengadaan CPNS tahun 2018 dan tahun 2019 adalah diperuntukkan untuk tenaga kesehatan, tenaga pendidikan dan tenaga teknis lainnya sehingga dipersyaratkan pendidikan sarjana dan diploma.

Pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan dibandingkan dengan jumlah pegawai selain guru dan tenaga kesehatan rasionya masih sangat rendah walaupun setiap tahunnya mengalami penambahan. Hal ini selain masih rendahnya minat PNS untuk menduduki jabatan fungsional juga karena formasi kebutuhan jabatan fungsional belum dilakukan penyesuaian sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah dan zero growth dalam hal penambahan pegawai yang disesuaikan dengan jumlah PNS pensiun.

Jabatan fungsional non guru dan tenaga kesehatan yang memiliki sertifikat kompetensi jumlahnya relative tinggi mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. Untuk menduduki jabatan fungsional terdapat persyaratan-persyaratan antara lain lulus uji kompetensi jabatan fungsional, mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jabatan fungsional serta memiliki pendidikan yang linear sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sampai dengan tahun 2020 terdapat 93.50 persen pejabat fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi.

2) Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dengan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia diharapkan persentase PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun, dan PNS yang mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan akan meningkat secara signifikan. Adanya kewajiban PNS untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 jam dalam setahun diharapkan akan memberikan motivasi kepada PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten Tegal untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan secara klasikal maupun nonklasikal. persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan 20 jam dalam setahun dan pegawai yang telah mengikuti seminar/workshop minimal dalam 2 tahun terakhir selama kurun waktu 5 tahun terakhir tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2. 184 Data Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Uraian	Jumlah per Tahun						
NU	Ulaidii	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase PNS yang	-	-	-	19.75	58.80	47.49	
	mengikuti diklat 20 jam dalam							
	setahun							
2	Persentase PNS mengikuti	-	-	-	16.50	29.10	33.40	
	seminar/workshop/sejenis							
	sesuai dengan tupoksi jabatan							

Sumber: BKD Kabupaten Tegal, 2021

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa persentase PNS mengikuti pendidikan dan pelatihan secara umum mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penambahan secara signifikan. Dimensi kompetensi berupa pendidikan dan pelatihan memiliki bobot yang cukup besar dalam indeks profesionalitas ASN. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki strategi peningkatan kompetensi salah satunya adalah bahwa seluruh pejabat struktural pada perangkat daerah diharapkan dapat memberikan pendidikan dan pelatihan melalui metode *coaching* dan *mentoring* kepada pegawainya. Selain itu pelatihan melalui bimbingan teknis, workshop dan sejenisnya melalui *daring* merupakan salah satu alternatif lain.

D. Penelitian dan Pengembangan

Fungsi penelitian dan pengembangan terintegrasi dengan fungsi perencanaan pembangunan. Hal tersebut dimaksudkan agar hasil-hasil dari penelitian dan pengembangan dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan. Berdasarkan upaya yang telah berjalan maka hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah dari tahun 2016 sampai dengan 2020 semakin meningkat sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2. 185 Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 – 2020

Indikaton	Realisasa Capaian					
Indikator	2017	2018	2019	2019	2020	
Hasil kelitbangan yang termanfaatkan dalam	91,18	92,21	93,76	94,42	58,64	
perencanaan pembangunan daerah						

Sumber : Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021

Pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal dimasa mendatang. Sistem pendataan dan pelaporan kelitbangan yang belum terintegrasi dalam satu lembaga dimanamasing-masing lembaga/instansi yang melakukan fungsi kelitbangan belum sepenuhnya melakukan koordinasi dan sinergi menjadi salah satu kendala yang perlu dibenahi. Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, maka pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

E. Pengawasan

1) Pengawasan oleh Inspektorat

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya yang dilaksanakan melalui program-program sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan indikator program Persentase penyelesaian TLHP BPK, Itprov, dan Itkab. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, percepatan menuju tata kelola yang baik, pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik yang prima termasuk di dalamnya penanganan pengaduan masyarakat yang dilakukan secara reguler. Kegiatan-kegiatan dalam program ini menghasilkan analisis dan

rekomendasi terhadap perbaikan kinerja pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah maupun Aparatus Sipil Negara (ASN). Penyelesaian tindak lanjut atas hasil pemeriksaan/pengawasan dapat menunjukkan bahwa perbaikan-perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan telah dilakukan. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang menunjukkan sejauhmana rekomendasi terhadap perbaikan akuntabilitas kinerja dan keuangan telah dilakukan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh pihak yang terkait, baik Inspektorat selaku APIP maupun perangkat daerah selaku pelaksana rekomendasi atas temuan LHP. Sebagai ilustrasi tersaji data tingkat penyelesaian tindak lanjut LHP baik dari pemeriksa eksternal Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun pengawas internal (APIP) mulai tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 seperti tabel dibawah.

Tabel 2. 186 Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Tahun 2016-2020

No.	Urajan	Kondisi Per Tahun (%)					
NO.	Ulalali		2017	2018	2019	2020	
1	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan BPK	67,90	83,97	90,08	90,38	91,67	
2	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Provinsi	27,66	68,46	68,35	100	59,26	
3	Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Inspektorat Kabupaten	47,27	71,17	63,99	35,65	8,94	

Sumber : Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Data tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun, penyelesaian tindak lanjut atas LHP BPK mengalami peningkatan, namun penyelesaian atas tindak lanjut temuan APIP yaitu justru mengalami penurunan. Hal ini disebabkan perangkat daerah belum optimal dalam menindaklanjuti rekomendasi dan temuan pada LHP Inspektorat Provinsi dan Kabupaten tahun 2018 tidak segera ditindaklanjuti dalam kurun waktu 60 hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan untuk penyelesaian temuan hasil Pemeriksaan Khusus menunjukkan bahwa seluruh rekomendasi telah ditindaklanjuti.

b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi dengan indikator program Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan peniliaan Indikator, Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah, dan Persentase PD menyajikan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Publik (SAP). Masing masing indikator tersebut menjadi tolok ukur kinerja Inspektur Pembantu yang sudah disesuaikan dengan struktur kelembagaan yaitu Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Pengawasan Reformasi Birokrasi, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah.

Indikator Pendampingan dan Asistensi dengan indikator Persentase Perangkat Daerah berpredikat WBK/WBBM berdasarkan peniliaan Indikator dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Reformasi Birokrasi untuk mengakselerasi reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Program ini bertujuan untuk menghasilkan instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan kerja keras dari seluruh instansi terkait yang terkait. Sebagai ilustrasi tersaji data unit kerja yang telah ditetapkan menuju WBK/WBBM sebagai berikut sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 seperti tahel dibawah ini.

Tabel 2. 187. Unit Kerja Ditetapkan Menuju WBK/WBBM

No.	Uraian	Kondisi Per Tahun						
		2016	2017	2018	2019	2020		
1	Jumlah unit kerja	2	2	6	6	8		
2	Persentase	4,16	4,16	12,48	12,48	16,67		

Sumber: Inspektorat Kabupaten Tegal, 2021

Tabel tersebut menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 tahun terakhir, pembangunan zona integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih perlu ditingkatkan.

Indikator Persentase Pemenuhan IKU Perangkat Daerah dilakukan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan dalam rangka pengawalan pencapaian tujuan organisasi, baik pada level perangkat daerah maupun pemerintah daerah. Program ini merupakan implementasi dari pengawasan intern berbasis risiko yang mengamanatkan hasil pengawasan intern harus dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah peningkatan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang menunjukkan perbaikan budaya kinerja menuju penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil. Namun demikian pemahaman tentang IKU perangkat daerah belum sepenuhnya dipahami oleh perangkat daerah sehingga pada pelaksanaannya belum optimal dan data belum di capaian belum didapatkan secara valid.

Indikator Persentase Perangkat Daerah menyajikan laporan keuangan secara akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan melaksanakan asistensi dan pendampingan pada perangkat daerah supaya dapat menyajikan laporan keuangan secara akuntabel, selama ini masih ditemukan perangkat daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara akuntabel, sebagai contoh hampir semua kecamatan belum menyajikan laporan keuangan secara akuntabel, hal ini sangat mempengaruhi penilaian pengelolaan keuangan daerah dengan indikator sasarannya opini BPK.

F. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrastif. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah mempunyai fungsi 1) pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah; 2) pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah; 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah; pelayanan administratif dan

pembinaan aparatur sipil negara padainstansi Daerah; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Gambaran umum mengenai capaian di Sekretariat daerah sebagai berikut:

1) Capaian Kinerja Pemerintah Daerah

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokras, OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B, Nilai SAKIP Kabupaten, Persentase IKM Kecamatan, dan Persentase IKM Kabupaten. Indikatorinidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Berikut digambarkan capaian kinerja pemerintah daerah dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. 189 Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2016-2020

N.	Uraian	Kondisi Per Tahun					
No		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Indeks reformasi birokrasi	44,56	45,01	45,25	63,69	N/A	
2	Persentase OPD rumpun pemerintahan skor LKJIP B + (%)	53,87	54,74	55,41	66,66	72,91	
3	Nilai SAKIP Kabupaten	56,9	57,0	60,01	61,36	N/A	
4	Persentase IKM Kecamatan (%)	69,04	69,22	71.28	77,77	80,41	
5	Persentase IKM Kabupaten (%)	70,8	71,4	71,8	78,37	80,85	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian kinerja pemerintah daerah difokuskan pada indikator Persentase Indeks reformasi birokrasi Tahun 2019 63,69, presentase OPD rumpun pemerintahan sebesar skor LKJIP B +, sebesar 66,66% (Nilai A: 1, BB: 6, B: 25, CC: 7, C: 7, D: 1), Nilai SAKIP Kabupaten sebesar 61,36, Persentase IKM Kecamatan sebesar 77,77 dan Persentase IKM Kabupaten sebesar 78,37. Indikator-inidkator ini menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum yang menjadi tanggungjawab koordinasi Sekretariat Daerah. Peningkatan capaian kinerja pemerintah daerah tersebut memerlukan upaya-upaya tertentu untuk dapat meningkatkannya. Salah satunya mengoptimalkan peran koordinasi, asistensi dan fasilitasi Asisten Sekda yang mengampu semua OPD di Kabupaten Tegal.

2) Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah

Kabupaten Tegal sebagai wilayah yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia wajib melaksanakan atau mengimplementasikan peraturan pemerintah yang ada. Di samping itu, Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama daerah atau kerjasama antara daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan. Berikut digambarkan kondisi implementasi peraturan pemerintah dan kerjasama daerah.

Tabel 2. 190 Koordinasi Implementasi Peraturan-Peraturan Pemerintah Tahun 2016-2020

No	Uraian	Kondisi Per Tahun (%)					
NO		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan	89,9	91,2	92,6	92,8	75	
2.	Persentase kerjasama antar Pemerintah Daerah yang terealisasi		100	100	120	100	

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Capaian presentase peraturan pemerintahan yang diimplementasikan yang semakin baik dari tahun 2016 sebesar 89,9 menurun setiap tahun dan pada tahun 2020 tercapai sebesar 75. Kabupaten Tegal juga memerlukan kerjasama antar pemerintah daerah untuk akselerasi kinerja pembangunan, untuk Tahun 2019 dari target 20 terealisasi sebanyak 24 (120%), kerjasama antar pemerintah daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa koordinasi Setda dalam mengimplementasikan peraturan pemerintah dan kerjasama antar pemerintah daerah relatif telah berlangsung optimal meskipun ke depan perlu dilakukan upaya-upaya koordinasi lebih sinergis agar peraturan pemerintah yang ada semua dapat diimplementasikan dalam bentuk peraturan pelaksanaan di daerah maupun pelaksanaan melalui program dan kegiatan yang ada.

3) Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah

Pembentukan Perda merupakan salah satu tugas dan fungsi Sekretariat Daerah di samping layanan di bidang penyebarluasan informasi kehumasan kepala daerah. Berikut capaian kinerja bidang hukum, pengadaan barang dan jasa serta kehumasan lima tahun terakhir.

Tabel 2. 191 Layanan Bidang Hukum, Pengadaan Barang Jasa dan Kehumasan Kepala Daerah Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi	100	100	100	300	100
3	Persentase OPD lelang selesai	99,5	99,7	99,8	96	74,47
4.	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e- procurement)	100	100	100	100	100
5	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal, 2021

Presentase pembentukan Perda yang terselesaikan sebesar 100% (target 8 Perda), sedangkan penyelesaian permasalahan hukum yang terfasilitasi sebanyak 21 dari 7 target (300%).

Persentase OPD yang melakukan lelang selesai tidak terpenuhi dari 126 total yang ditenderkan ada 5 gagal tender (96%). Namun proses selesai yang ada seringkali tidak di awal waktu hal ini terjadi karena terlambatnya OPD dalam mengumumkan paket pekerjaan pada Sistem Informasi Rencana Umum Pelelangan (SIRUP) di awal tahun.

Kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat telah optimal. Hal ini menggambarkan upaya mendiseminasikan informasi pembangunan kepada masyarakat telah berlangsung sesuai SOP.

G. Sekretariat DPRD

1) Peningkatan Fungsi Legislasi

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi legislasi dimana DPRD memiliki kekuasaan untuk menyusun peraturan daerah. Untuk mengukur kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya menggunakan indikator penganggaran raperda, jumlah prolegda dan jumlah perda yang ditetapkan dalam 1 tahun. Data selama kurun waktu 5 tahun dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2. 192 Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan	49,51	51,11	52,31	100	100
	Prolegda dan APBD					

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Rencana Kerja Tahunan untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD telah ada disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja (Renja) pada setiap alat kelengkapan DPRD Kabupaten Tegal, sehingga kinerja DPRD Kabupaten Tegal belum sepenuhnya terarah dan akuntabel.

Tabel 2. 193 Data Raperda yang Dianggarkan, Prolegda, dan Perda yang di tetapkan dari Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pembahasan Perda yang dianggarkan	7	7	7	8	5
2.	Jumlah Prolegda	10	22	13	15	12
3.	Jumlah Perda ditetapkan	14	13	7	8	17

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

2) Peningkatan Fungsi Pengawasan

Sesuai fungsinya DPRD sebagai lembaga pengawasan politik yang kedudukannya sederajat dengan pemerintah setempat maka melalui program ini diharapkan adanya optimalisasi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk menggambarkan jalannya fungsi pengawasan DPRD maka menggunakan indikator persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam pembangunan yang dalam kurun waktu 5 tahun dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2. 194 Program Peningkatan Fungsi Pengawasan Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase hasil pengawasan diintegrasikan dalam	52,97	53,21	54,22	100	90
	pembangunan					

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Tegal, 2021

Persentase integrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD masih belum sepenuhnya sinkron disebabkan oleh belum adanya Rencana Kerja DPRD pada setiap alat kelengkapan DPRD sehingga ada beberapa program DPRD yang tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada atau tidak cukupnya anggaran.

H. Kecamatan

1) Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Basis pembangunan kecamatan sebagai koordinator, asistensi dan fasilitasi desa adalah model Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dirilis oleh Kementerian PPN/Bappenas. Kecamatan dalam melaksanakan fungsinya mendorong *stakeholders* di kecamatan untuk mewujudkan desa mandiri sebagai indikator keberhasilan pembangunan di level desa yang pada akhirnya menggambarkan pembangunan di seluruh kecamatan pada umumnya. Kondisi kinerja indeks pembangunan desa di wilayah kecamatan dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2. 195 Indeks Desa Membangun Wilayah Kecamatan Tahun 2020

Status Desa Berdasarkan Indeks Desa Membangun 2020									
KECAMATAN	SANGAT TERTINGGAL	TERTINGGAL	BERKEMBANG	MAJU	MANDIRI	JUMLAH			
MARGASARI	0	2	17	2	0	21			
BUMIJAWA	0	10	9	1	0	20			
BOJONG	0	2	10	5	0	17			
BALAPULANG	0	3	14	1	0	18			
PAGERBARANG	0	0	17	1	0	18			
LEBAKSIU	0	0	10	0	0	10			
JATINEGARA	0	5	11	1	0	17			
KEDUNG BANTENG	1	5	4	0	0	10			
PANGKAH	0	0	16	3	0	19			
SLAWI	0	0	12	2	1	15			
DUKUHWARU	0	0	6	6	1	13			
ADIWERNA	0	0	13	0	0	13			
DUKUHTURI	0	1	21	1	0	23			
TALANG	0	0	3	2	0	5			
TARUB	0	0	19	0	0	19			
KRAMAT	0	0	16	4	0	20			
SURADADI	0	0	10	1	0	11			
WARUREJA	0	3	8	1	0	12			

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyrakat dan Desa Kabupaten Tegal, 2021

IPD terdiri dari 5 Dimensi, 12 variabel dan 42 indikator yang hasil akhirnya berupa kategori desa mandiri, berkembang dan tertinggal. 5 Dimensi IPD adalah dimensi pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, aksesibilitas transportasi, pelayanan publik, dan penyelenggaraan pemerintahan. Kami memandang kelima dimensi ini cukup strategis untuk menjadi panduan pembangunan pemerintah desa yang diasistensi dan difasilitasi pemerintah kecamatan. Posisi desa tertinggal Kabupaten Tegal sebanyak 31 desa (11,03%) dibanding 281 desa se-Kab. Tegal.

15) ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat Namun data pendapatan yang akurat sulit diperoleh, sehingga dalam kegiatan Susenas data ini didekati melalui data pengeluaran rumah tangga. Pengeluaran rumah tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar kabupaten/kota khususnya dilihat dari segi ekonomi.

Tahun 2020, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Tegal yaitu sebesar Rp 1.014.808,- yang terdiri dari rata- rata pengeluaran untuk komoditas makanan sebesar Rp 531.480,- dan pengeluaran untuk komoditas non makanan sebesar Rp 483.328,-.

Kebutuhan makanan merupakan kebutuhan utama, sehingga kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan tersebut akan semakin meningkat. Namun kebutuhan ini mempunyai titik jenuh, sehingga pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi pengeluaran akan dialihkan ke kebutuhan lain. Oleh karena itu pengeluaran makanan dan non makanan dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesejahteraan penduduk. Besarnya konsumsi untuk makanan menandakan bahwa sebagian besar penduduk masih mementingkan kebutuhan pokok.

Tabel 2. 196 Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas (rupiah) di Kabupaten Tegal Tahun 2019 dan 2020

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2019	2020
Makanan/Food		
Padi-padian/ <i>Cereals</i>	51416	51 160
Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	3 3 0 9	3 4 0 9
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	18 193	19 902
Daging/Meat	15 975	19622
Telur dan susu/Eggs and milk	21791	25 932
Sayur-sayuran/Vegetables	26773	34 192
Kacang-kacangan/Legumes	13 223	15 968
Buah-buahan/Fruits	23 162	25 603
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	10010	10 982
Bahan minuman/Beverage stuffs	15 546	17 876
Bumbu-bumbuan/Spices	10380	12 735
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	9216	9750
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	193 159	225 984
Rokok/Cigarettes	55 151	58 365
Jumlah makanan/Total food	467 303	531 480

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2019	2020
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	180 596	218 356
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	100 016	127 773
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and	23 669	28 599
headgear		
Komoditas tahan lama/Durable goods	46 965	50 779
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	24 145	34 137
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	25 389	23 684
Jumlah bukan makanan/Total non-food	400 780	483 328
Jumlah/Total	868 083	1 014 808

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

Konsumsi makanan penduduk Kabupaten Tegal mencapai Rp 531.480,- atau 52,78% dari total pengeluaran. Dari total pengeluaran makanan sebesar 9,63% digunakan untuk padi-padian. Pengeluaran makanan terbesar lainnya adalah konsumsi makanan/minuman jadi dan rokok masing-masing sebesar 42,52% dan 10,98% dari total pengeluaran konsumsi makanan, sedangkan pengeluaran konsumsi paling sedikit adalah umbi-umbian sebesar 0,64%. Pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2. 197 Persentase Pengeluaran per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Tegal, 2019 dan 2020

Makanan/Food Padi-padian/Cereals 11,00 9,63 Umbi-umbian/Tubers 0,71 0,64 Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 3,89 3,74 Daging/Meat 3,42 3,69 Telur dan susu/Eggs and milk 4,66 4,88 Sayur-sayuran/Vegetables 5,73 6,43 Kacang-kacangan/Legumes 2,83 3,00 Buhah-bunahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/0il and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services	Kelompok Komoditas/Commodity Group	2019	2020
Umbi-umbian/Tubers 0,71 0,64 Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 3,89 3,74 Daging/Meat 3,42 3,69 Telur dan susu/Eggs and milk 4,66 4,88 Sayur-sayuran/Vegetables 5,73 6,43 Kacang-kacangan/Legumes 2,83 3,00 Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/0il and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Non-food 100 100 Bukan makanan/Non-food 45,06 45,18 Ferumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear	Makanan/Food		
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells 3,89 3,74 Daging/Meat 3,42 3,69 Telur dan susu/Eggs and milk 4,66 4,88 Sayur-sayuran/Vegetables 5,73 6,43 Kacang-kacangan/Legumes 2,83 3,00 Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/Oil and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food 45,06 45,18 Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear 5,91 5,92 Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi	Padi-padian/Cereals	11,00	9,63
Daging/Meat 3,42 3,69 Telur dan susu/Eggs and milk 4,66 4,88 Sayur-sayuran/Vegetables 5,73 6,43 Kacang-kacangan/Legumes 2,83 3,00 Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/0il and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Umbi-umbian/ <i>Tubers</i>	0,71	0,64
Telur dan susu/Eggs and milk	Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	3,89	3,74
Sayur-sayuran/Vegetables 5,73 6,43 Kacang-kacangan/Legumes 2,83 3,00 Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/Oil and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Daging/Meat	3,42	3,69
Kacang-kacangan/Legumes Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/Oil and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas tahan lama/Durable goods Komoditas tahan lama/Durable goods Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Telur dan susu/Eggs and milk	4,66	4,88
Buah-buahan/Fruits 4,96 4,82 Minyak dan kelapa/0il and coconut 2,14 2,07 Bahan minuman/Beverage stuffs 3,33 3,36 Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Sayur-sayuran/ <i>Vegetables</i>	5,73	6,43
Minyak dan kelapa/0il and coconut Bahan minuman/Beverage stuffs Bahan minuman/Beverage stuffs Bumbu-bumbuan/Spices 2,22 2,40 Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food Bukan makanan/Total food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Kacang-kacangan/Legumes	2,83	3,00
Bahan minuman/Beverage stuffs Bumbu-bumbuan/Spices Bumbu-bumbuan/Miscellaneous food items Bumbu-bumbuan/Miscellaneous food items Bumbu-bumbuan/Miscellaneous food items Bumbu-bumbuan/Prepared food and beverages Bumbu-bumbuan/Prepared food and beverages Bumbu-bumbuan/Prepared food and beverages Bumbu-bumbuan/Prepared food and beverages Bumbu-bumbuan/Bumban food Bukan makanan/Non-food Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household Facilities Aneka komoditas rumah tangga/Housing and household Facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and servic	Buah-buahan/Fruits	4,96	4,82
Bumbu-bumbuan/Spices2,222,40Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items1,971,83Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages41,3342,52Rokok/Cigarettes11,8010,98Jumlah makanan/Total food100100Bukan makanan/Non-foodPerumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household45,0645,18facilitiesAneka komoditas dan jasa/Goods and services24,9626,44Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and5,915,92headgearKomoditas tahan lama/Durable goods11,7210,51Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance6,027,06	Minyak dan kelapa/Oil and coconut	2,14	2,07
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items 1,97 1,83 Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas tan tutup kepala/Clothing, footwear, and Fakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and Fayad, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Bahan minuman/Beverage stuffs	3,33	3,36
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages 41,33 42,52 Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Bumbu-bumbuan/Spices	2,22	2,40
Rokok/Cigarettes 11,80 10,98 Jumlah makanan/Total food 100 100 Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household 45,06 45,18 facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1,97	1,83
Jumlah makanan/Total food Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	41,33	42,52
Bukan makanan/Non-food Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance A5,91 B1,72 B1,72 B1,706	Rokok/Cigarettes	11,80	10,98
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 15,91 11,72 10,51	Jumlah makanan/Total food	100	100
facilities Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Aneka komoditas dan jasa/Goods and services Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance facilities 24,96 5,91 5,92 headgear 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	Bukan makanan/Non-food		
Aneka komoditas dan jasa/Goods and services 24,96 26,44 Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and 5,91 5,92 headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06		45,06	45,18
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06	· ·		
headgear Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06		•	
Komoditas tahan lama/Durable goods 11,72 10,51 Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance 6,02 7,06		5,91	5,92
Pajak, pungutan, dan asuransi/ <i>Taxes and insurance</i> 6,02 7,06			
	· · · · · ·	11,72	10,51
Vanarduan maska dan umasana (kanduni / Danti as and assamani as	Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	6,02	7,06
	Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	6,33	4,90
Jumlah bukan makanan/ <i>Total non-food</i> 100 100	Jumlah bukan makanan/Total non-food	100	100
Jumlah/ <i>Total</i> 100 100	Jumlah/Total	100	100

Sumber: BPS Kabupaten Tegal, 2021

b. Sumber Daya Manusia

Tingkat ketergantungan penduduk atau Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong maju atau sedang berkembang. *Dependency ratio* merupakan salah satu indikator demografi yang menunjukan jumlah kelompok usia non produktif (0-15 tahun dan di atas 65 tahun) yang ditanggung oleh kelompok usia produktif (diatas 15-65 tahun). Semakin tinggi persentase dependency ratiomaka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tegal selama kurun waktu 2016-2020 sebagaimana Tabel di bawah.

Tabel 2. 198 Rasio Ketergantungan di Kabupaten Tegal Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penduduk Produktif	945.509	949.810	953.218	956.072	1.113.809
2.	Penduduk Non Produktif	483.877	483.705	484.007	484.626	438.430
3.	Rasio Ketergantungan	51,17	50,92	50,77	50,69	39,36

Sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021

Rasio ketergantungan Kabupaten Tegal dalam 5 tahun terakhir relatif berimbang, proporsi penduduk produktif dan nonproduktif relatif sama. Hal ini mengindikasikan bonus demografi belum terjadi dalam 5 tahun terakhir. Hal ini disebabkan angka kelahiran masih di atas rata-rata 2 kelahiran/per keluarga. Di samping itu jumlah penduduk lansia semakin bertambah yang menyumbang angka penduduk non produkti yang tinggi. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 199 Rasio Penduduk usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja menurut Pendidikan yang ditamatkan 2019-2020

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	2019 JUMLAH (JIWA)	%	2020 JUMLAH (JIWA)	(%)
1	SD/lebih rendah	532.320	50,44	470.540	44,31
2	SMP/sederajat	234.740	22,24	246.786	23,24
3	SMA Umum	108.708	10,30	93.621	8,82
4	SMA Kejuruan	111.044	10,52	196.658	18,52
5	Diploma I/II/III	16.084	1,52	18.183	1,71
6	Universitas	52.514	4,98	36.224	3,41
	JUMLAH	1.055.410	100	1.062.011	100

Sumber: Bappeda dan Litbang Kabupaten Tegal, 2021 (diolah)

^{*} Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Sementara itu penduduk yang tidak/belum sekolah semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menggambarkan bahwa partisipasi sekolah penduduk meningkat setiap tahunnya. Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama selama beberapa tahun terakhir dapat dicermati dalam tabel berikut.

Tabel 2. 200 Rasio Penduduk Usia 15 tahun ke Atas yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2020

NO	LAPANGAN PEKERJAAN	2020 JUMLAH (JIWA)*	%
1	Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan	107.929	17,12
	Perikanan		
2	Pertambangan dan Penggalian	7.490	1,19
3	Industri Pengolahan	149.754	23,75
4	Listrik, Gas dan Air	1.524	0,24
5	Bangunan	47.779	7,58
6	Perdagangan Besar, Eceran, Rumah	184.184	29,21
	Tangga dan Hotel		
7	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	29.785	4,72
8	Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa	13.362	2,12
	Bangunan, Tanaha		
9	Jasa Kemasyarakatan	88.786	14,08
	JUMLAH	630.593	100

Sumber : Bappeda dan Litbang, 2021 (diolah) *Angka sangat sementara, berdasar metode BPS

Angka sektor pertanian menunjukkan penurunan pada tahun-tahun terakhir. Hal ini karena sektor pertanian semakin tidak menarik bagi keluarga petani, utamanya anak muda. Untuk itu diperlukan strategi agar kaum muda tertarik menjadi petani dan menggeluti usaha pertanian.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi Program dan Kegiatan RKPD terdapat dua tabel hal ini dikarenakan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, untuk evaluasi tahun 2020 nomenklatur progran dan kegiatan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024 sementara untuk Evaluasi RKPD Tahun berjalan atau tahun 2021 menggunakan program dan kegiatan sesuai dengan nomenklatur Permendagri 90 Tahun 2019 namun untuk indikatornya masih sama.

Tabel.201 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan Kabupaten Tegal

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
	PENDIDIKAN							
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal	APM PAUD	29,43	25,21	26,77	106,19	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Informal	Angka partisipasi PNFI	39,75	32,95	97,25	295,14	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Pendidikan Dasar	Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,11	0,14	0,0048	196,55	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Pendidikan Dasar	Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,10	0,13	0,0086	193,36	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru:Kelas	1:0.55	1:0.35	1 : 1.29	101,49	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru:Mapel	1:1:27	1:1:31	1:1:25.73	82,93	Tinggi	DIKBUD
	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Sarana dan Prasarana SD baik	98,75	93,65	99,92	106,70	Sangat Tinggi	DIKBUD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Sarana dan Prasarana SMP baik	97,21	89,21	99,05	111,03	Sangat Tinggi	DIKBUD
	KESEHATAN							
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Cakupan Desa UCI	100,00	94,00	94,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	60,00	40,00	15,40	38,50	Sangat Rendah	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	75,00	55,00	10,07	18,31	Sangat Rendah	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	80,00	60,00	74,53	124,22	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	75,00	55,00	85,41	155,29	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis (TBC)	95,00	86,00	57,11	66,41	Sedang	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	99,00	97,00	90,52	93,32	Sangat Tinggi	DINKES

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka penemuan kasus baru kusta	11 per 100.000 pddk	12 per 100.000 pddk	11 Per 100.000 pddk	91,66	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Angka kesakitan DBD	< 39 per 100.000 pddk	< 45 per 100.000 pddk	23,58 per 100.000 pddk	52,40	Rendah	DINKES
	Program Kesehatan Masyarakat	Persentase Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	10,00	2,00	1,39	69,50	Sedang	DINKES
	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan rumah tangga yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	85,00	81,00	95,37	117,74	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan desa/kelurahan siaga aktif mandiri	15,00	11,00	34,49	313,55	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100,00	100,00	111,14	111,14	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Masyarakat	Cakupan penduduk memiliki jaminan kesehatan	100,00	85,00	91,43	107,56	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Fasilitas Kesehatan yang memberikan Pelayanan Kesehatan Dasar, Tradisional dan Rujukan	100,00	100,00	105,4	105,40	Sangat Tinggi	DINKES

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas dan Labkesda yang terakreditasi	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan pelayanan perijinan di bidang kesehatan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase pencapaian standar mutu akreditasi puskesmas	54,00	38,00	38,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Rata-rata jumlah Pengunjung WKJ Kalibakung setiap bulan	300	250	250,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah	100,00	100,00	96,70	96,70	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di puskesmas	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Persentase Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas Sesuai Standar	100,00	68,00	68,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Pelayanan Kesehatan	Cakupan Pelayanan Penyimpanan dan Pendistribusian Obat di	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DINKES

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Gudang Farmasi sesuai standar						
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100,00	96,00	93,27	97,16	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100,00	98,00	98,24	100,24	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100,00	100,00	99,01	99,01	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan kesehatan balita	93,00	90,00	73,71	81,90	Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan remaja mendapat pelayanan konseling	55,00	45,00	72,12	160,27	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pelayanan kesehatan usia lanjut	80,00	75,00	79,48	105,97	Sangat Tinggi	DINKES
	Program Kesehatan Keluarga dan Sumber	Cakupan balita stunting	16,00	20,00	7,80	39,00	Sangat Rendah	DINKES

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Daya Manusia							
	Kesehatan							
	Program Kesehatan	Cakupan puskesmas	100,00	59,00	82,76	140,27	Sangat	DINKES
	Keluarga dan Sumber	yang mempunyai					Tinggi	
	Daya Manusia	tenaga kesehatan						
	Kesehatan	strategis						
	Program Pelayanan	Prosentase Pelayanan	84,00	75,00	77,00	102,67	Sangat	RSUD dr.
	Medis dan Mutu, Etika	Medis sesuai dengan					Tinggi	SOESELO
		standar Perumah						
		sakitan						
	Program Pelayanan	Prosentase mutu dan	84,00	75,00	70,00	93,33	Sangat	RSUD dr.
	Medis dan Mutu, Etika	etika sesuai standar					Tinggi	SOESELO
	Program Pelayanan	Prosentase Pelayanan	84,00	75,00	75,00	100,00	Sangat	RSUD dr.
	Keperawatan dan	keperawatan sesuai					Tinggi	SOESELO
	Asuhan Keperawatan	dengan standar						
		Perumah sakitan						
	Program Pelayanan	Prosentase asuhan	84,00	75,00	75,00	100,00	Sangat	RSUD dr.
	Keperawatan dan	keperawatan sesuai					Tinggi	SOESELO
	Asuhan Keperawatan	dengan standar						
		Perumah sakitan						
	Program Penunjang	Persentase Penunjang	85,00	80,00	96,49	120,61	Sangat	RSUD dr.
		Medis sesuai dengan					Tinggi	SOESELO
		standar Pelayanan						
	Program Penunjang	Persentase penunjang	98,00	90,00	92,01	102,23	Sangat	RSUD dr.
		non medis sesuai					Tinggi	SOESELO
		standar						
	Program Tata Usaha	Persentase pemenuhan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	RSUD dr.
		Urusan Umum dan					Tinggi	SOESELO

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		Kehumasan, Kepegawaian dan Diklat						
	Program Keuangan	Persentase Dokumen Keuangan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. SOESELO
	Program Perencanaan dan Rekam Medis	Persentase Pengelolaan Rekam Medis dan Sistem Informasi	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. SOESELO
	Program Perencanaan dan Rekam Medis	Persentase dokumen Perencanaan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	RSUD dr. SOESELO
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rata-rata Persentase pelayanan medis dan keperawatan sesuai standar perumahsakitan	93,50	88,50	97,30	109,94	Sangat Tinggi	RSUD SURADADI
	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rujukan	Rata-rata Persentase penunjang medis dan non medis sesuai dengan standar pelayanan dan sarana prasarana rumah sakit	91,50	86,00	97,50	113,37	Sangat Tinggi	RSUD SURADADI
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							
	Program Jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	90,02	70,02	68,77	98,21	Sangat Tinggi	DPU

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Jalan	Persentase jalan yang memiliki drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5)	60,00	40,00	58,41	146,03	Sangat Tinggi	DPU
	Program Jembatan	Proporsi jembatan dalam kondisi baik	91,11	75,11	68,69	91,45	Sangat Tinggi	DPU
	Program Sumber Daya Air	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	70,00	60,00	58,86	98,10	Sangat Tinggi	DPU
	Program Tata Ruang dan Petanahan	Persentase Ketaatan terhadap RTRW	90,00	86,00	87,00	101,16	Sangat Tinggi	KIMTARU
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
	Program Tata Perumahan & Permukiman	Cakupan Akses Layanan Air Minum	95,00	88,00	86,23	97,99	Sangat Tinggi	KIMTARU
	Program Tata Perumahan & Permukiman	Cakupan Akses Layanan Sanitasi (jamban)	100,00	90,00	88,70	98,56	Sangat Tinggi	KIMTARU
	Program Tata Perumahan & Permukiman	Persentases Penurunan Luas Kawasan Kumuh	0,00	60,00	32,47	54,12	Rendah	KIMTARU
	Program Tata Perumahan & Permukiman	Persentases Penanganan Rumah Tidk Layak Huni (RTLH)	27,00	15,00	12,00	80,00	Tinggi	KIMTARU

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Tata	Cakupan Lingkungan	55,34	52,34	51,60	98,59	Sangat	KIMTARU
	Perumahan &	yang sehat dan aman					Tinggi	
	Permukiman	dokumen PSU						
	Program Bangunan	Rasio Bangunan Negara	76,48	68,77	66,67	96,95	Sangat	KIMTARU
	Gedung	Yang Sesuai Standar Teknis					Tinggi	
	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM							
	Program Penegakan	Persentase	90,00	80,00	80,00	100,00	Sangat	SATPOL PP
	Perundang-undangan	penyelesaian					Tinggi	
	Daerah	penegakan perda						
	Program Ketentraman	Cakupan Patroli Siaga	82,00	74,00	74,00	100,00	Sangat	SATPOL PP
	dan Ketertiban Umum	Ketertiban Umum dan					Tinggi	
		Ketentraman						
	Dan and Dankin dan and	Masyarakat	1 1 1	1.07	1.06	00.07	C	SATPOL PP
	Program Perlindungan Masyarakat dan	Rasio Linmas per RT	1,11	1,07	1,06	99,07	Sangat	SATPULPP
	Pemadam Kebakaran						Tinggi	
	Program Perlindungan	Rasio Linmas Terlatih	17,00	8,00	7,00	87,50	Tinggi	SATPOL PP
	Masyarakat dan	rasio Emmas Terracin	17,00	0,00	7,00	07,50	1111991	OIIII OLI I
	Pemadam Kebakaran							
	Program Perlindungan	Persentase Kasus	100	66	79,00	119,70	Sangat	SATPOL PP
	Masyarakat dan	Kebakaran Tertangani			•		Tinggi	
	Pemadam Kebakaran							
	Program Kesbangpol	Prosentase Partisipasi	65,00	0,00	0,00	0,00	Sangat	BANGPOL
		Pengguna Hak Pilih					Rendah	
		Pemilu Legislatif						

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Kesbangpol	"Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Presiden	65,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	BANGPOL
	Program Kesbangpol	Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Gubernur	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	BANGPOL
	Program Kesbangpol	"Prosentase Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pemilu Bupati	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	BANGPOL
	Program Kesbangpol	Prosentase Rata-Rata Partisipasi Pengguna Hak Pilih Pilkades	80,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	BANGPOL
	Program Kesbangpol	Jumlah/ Frekuensi Konflik SARA dalam Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	BANGPOL
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase masyarakat siap siaga bencana	15,05	12,20	8,80	72,13	Sedang	BPBD
	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Persentase dokumen pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100.00	44,00	20,00	45,45	Sangat Rendah	BPBD
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana	Persentase penanganan tanggap darurat, bantuan peralatan dan logistik	100.00	90,19	90,00	99,79	Sangat Tinggi	BPBD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Penanganan Kedaruratan, Peralatan dan Logistik Bencana	Persentase dokumen penanganan kedaruratan, peralatan dan logistik bencana	100.00	50,00	50,00	100,00	Sangat Tinggi	BPBD
	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penanganan dan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	58.70	21,74	15,00	69,00	Sedang	BPBD
	Program Peningkatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase dokumen penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100.00	58,33	40,00	68,58	Sedang	BPBD
	SOSIAL							
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Cakupan Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia, Disabilitas dan Tuna Sosial	88,34	84,34	78,49	93,06	Sangat Tinggi	DINSOS
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Cakupan Pemberdayaan Perorangan, Keluarga, Kelembagaan, Kepahlawanan dan Sumber Dana sosial	94,08	90,08	90,08	100,00	Sangat Tinggi	DINSOS

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Cakupan Perlindungan dan Jaminan Sosial	87,46	82,46	79,08	95,91	Sangat Tinggi	DINSOS
	Program Penanganan Fakir Miskin	Persentase Cakupan Penanganan Fakir Miskin	100,00	97,87	145,00	148,16	Sangat Tinggi	DINSOS
	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
	TENAGA KERJA Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	AKAN	708,00	660,00	193,00	29,24	Sangat Rendah	DINAS PERINAKER
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	AKAD	306,00	246,00	1.020,00	414,63	Sangat Tinggi	DINAS PERINAKER
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	AKL	216,00	140,00	1.493,00	1.066,43	Sangat Tinggi	DINAS PERINAKER
	Program Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	Presentase penyelesaian hubungan industrial	70,00	50,00	100,00	200,00	Sangat Tinggi	DINAS PERINAKER
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							
	Program Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keadilan dan Keseteraan Gender/APE (Anugerah Parahita Ekapraya)	77,00	72,00	94,00	130,56	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Perlindungan Anak	Capaian Pemenuhan Hak Anak	75,00	55,00	50,00	90,91	Tinggi	DINAS P3AP2KB
	PANGAN							
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase penguatan cadangan pangan	245,00	210,00	267	127,14	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase ketersediaan informasi harga dan pasokan pangan	52,00	48,00	48	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Persentase Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	85,00	72,00	62	85,42	Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Skore Pola Pangan Harapan (PPH)	83,00	81,00	87	106,79	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan PERTANAHAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan	85,00	72,00	100	138,89	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Pertanahan	Persentase luas lahan besertifikat	66,85	57,37	87,00	152	Sangat Tinggi	KIMTARU
	LINGKUNGAN HIDUP							
	Program Tingkat Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase sampah terangkut ke TPA	90,46	60,35	59,75	99,01	Sangat Tinggi	DLH
	Program Tingkat Pengelolaan Sampah	Persentase Limbah B3 ditangani	90,46	60,35	50,00	82,85	Tinggi	DLH

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)							
	Program Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	indeks kualitas air	80,00	72,00	31,11	43,21	Sangat Rendah	DLH
	Program Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	indeks kualitas udara	81,00	77,50	84,99	109,66	Sangat Tinggi	DLH
	Program Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup	indeks ketutupan lahan	59,21	59,21	55,55	93,82	Sangat Tinggi	DLH
	Program Tata Lingkungan	Persentase pelanggaran tata lingkungan	35,00	55,00	50,00	90,91	Tinggi	DLH
	Program Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup	Peresentase pelanggaran lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	DLH
	KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL							
	Program Pelayanan Catatan Sipil	persentase penduduk ber akta kelahiran	97,00	80,00	93,11	116,39	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
	Program Pelayanan Catatan Sipil	persentase penduduk ber akta kematian	40,00	20,00	68,54	342,70	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber Kartu Keluarga	98,00	90,00	91,67	101,86	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penduduk ber KTP-el	98,00	90,00	99,63	110,70	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase anak memiliki KIA	80,00	40,00	21,18	52,95	Rendah	DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil	80,00	30,00	50,00	166,67	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Prosentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan	80,00	25,00	6,38	25,52	Sangat Rendah	DISDUKCAPIL
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dan Inovasi pelayanan	Prosentase Pelayanan SIAK di Dinas dan di rumah Paten 18 Kecamatan	95,00	85,00	100,00	117,65	Sangat Tinggi	DISDUKCAPIL
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
	Program Penataan Desa	Persentase Lembaga Pemerintahan Desa yang bekerja sesuai fungsinya	82,00	58,00	65,00	112,07	Sangat Tinggi	DINAS PERMASDES
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Tertib Adminitrasi Pemerintahan Desa	100,00	25,00	75,00	300,00	Sangat Tinggi	DINAS PERMASDES

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Desa	Persentase Perkembangan BUMDES Tumbuh dan Berkembang	80,00	25,00	101,00	404,00	Sangat Tinggi	DINAS PERMASDES
	Program Pengembangan Desa	Persentase Pengembangan Desa	100,00	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS PERMASDES
	Program Pengembangan Desa	Persentase Pengembangan Kawasan Perdesaaan	80,00	50,00	1,00	2,00	Sangat Rendah	DINAS PERMASDES
	Program Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan aktif	100,00	25,00	50,00	200,00	Sangat Tinggi	DINAS PERMASDES
	Program Pemberdayaan Desa	Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang berdaya	100,00	25,00	50,00	200,00	Sangat Tinggi	DINAS PERMASDES
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							
	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	0,22	0,26	0,12	46,15	Sangat Rendah	DINAS P3AP2KB
	Program Pengendalian Penduduk dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Ketahanan keluarga	60,00	48,00	63,02	131,29	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB
	Program Keluarga Berencana	Prosentase pemakaian kontrasepsi (CPR)	71,41	69,81	67,73	97,02	Sangat Tinggi	DINAS P3AP2KB

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PERHUBUNGAN							
	Program Lalu Lintas	Persentase Jalan memiliki Perlengkapan Lalu Lintas Jalan	80,00	40,00	10,68	26,70	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Lalu Lintas	Persentase Perijinan Analisi Dampak Lalu Lintas (Andalin)	100,00	20,00	8,57	42,85	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Lalu Lintas	Persentase Pelanggaran Ops Lalu Lintas	20,00	35,00	5,45	95,38	Sangat Tinggi	DISHUB
	Program Lalu Lintas	Persentase Lokasi Titik Parkir	100,00	68,00	13,60	20,00	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Angkutan	Persentase Layanan Angkutan Darat	39,00	31,00	7,75	25,00	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Angkutan	Rasio Ijin Trayek	90,00	76,00	38,02	50,03	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Angkutan	Persentase Kepemilikan Kendaraan Angkutan Umum	90,00	80,00	59,29	74,11	Sedang	DISHUB
	Program Keselamatan Jalan	Persentase perlintasan KA memiliki gardu dan palang pintu	38,00	35,00	52,00	148,57	Sangat Tinggi	DISHUB
	Program Keselamatan Jalan	Persentase Fatalitas Korban Kecelakaan	3,10	4,00	0,05	1,25	Sangat Rendah	DISHUB
	Program Keselamatan Jalan	Persentase LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum)	100,00	56,57	74,51	131,71	Sangat Tinggi	DISHUB

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	KOMUNIKASI DAN INFORMASI							
	Bidang Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media	prosentase pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat desa	100,00	33,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DISKOMINFO
	Bidang Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media	"Kualifikasi tingkat KIP Badan Publk	79,00	45,00	83,96	186,58	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	Bidang Desiminasi Informasi, Komunikasi dan Kemitraan Media	Indeks SPBE	3,55	2,75	2,82	102,55	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH							
	Program Koperasi	Persentase Koperasi aktif	57,00	38,00	58,40	153,68	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP & UKM
	Program UMKM	UMKM yang kompetitif dan mandiri	10,70	5,80	7,16	123,45	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP & UKM
	PENANAMAN MODAL DAERAH							
	Program Pengendalian	Persentase Kepatuhan Perusahaan	73,28	61,28	60,00	97,91	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Penanaman	Nilai Investasi PMA	580.000.000.	500.000.000.	291.626.116.	58,33	Rendah	DINAS PMPTSP
	Modal		000	000	163			
	Program Penanaman Modal	Jumlah Investor PMA	13,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
	Program Penanaman Modal	Nilai Investasi PMDN	950.000.000. 000	850.000.000. 000	9.073.688.92 2.252	1.067,49	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
	Program Penanaman Modal	Jumlah Investor PMDN	8.257,00	7.457,00	4.211,00	56,47	Rendah	DINAS PMPTSP
	Program Perizinan	Indeks kepuasan Masyarakat perijinan	82,00	78,00	82,70	106,03	Sangat Tinggi	DINAS PMPTSP
	PEMUDA DAN							
	OLAHRAGA							
	Program Pemuda dan Olahraga	Persentase Wirausaha Pemuda	1,28	0,30	0,30	100,00	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	Program Pemuda dan Olahraga	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	Program Pemuda dan Olahraga	Jumlah atlet yang berprestasi	90,00	70,00	70,00	100,00	Sangat Tinggi	DISPORAPAR
	STATISTIK	•						
	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Prosentase dokumen data sektoral statistik daerah yang terintegrasi dengan SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data	100,00	20,00	26,68	133,40	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Laju pemanfaatan data dan informasi statistik sektoral oleh	50,00	10,00	66,40	664,00	Sangat Tinggi	DISKOMINFO

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		pengunjung SIM Single Data Statistik (SDS) / Open Data						
	Program statistik dan Pengembangan Sumber Daya TIK	Standarisasi LPSE	17,00	17,00	12,00	70,59	Sedang	DISKOMINFO
	PERSANDIAN							
	Program Teknologi Informatika dan Persandian	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	456,00	272,00	262,00	96,32	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	Program Teknologi Informatika dan Persandian	Indeks SPBE	3,50	2,25	3,11	138,22	Sangat Tinggi	DISKOMINFO
	KEBUDAYAAN							
	Program Kebudayaan	Persentase seni dan kesenian yang dibina	83,56	79,61	79,96	100,44	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Kebudayaan	Persentase Benda Cagar Budaya dan Situs Budaya yang dibangun/direhabilitasi dan dikaji	28,56	22,50	23,78	105,69	Sangat Tinggi	DIKBUD
	Program Kebudayaan	Persentase tradisi yang dikembangkan	60,25	55,00	50,00	90,91	Tinggi	DIKBUD
	PERPUSTAKAAN	U -						
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan pemustaka	100% (62.486 Orang)	20% (37.492 Orang)	13% (24.300 Orang)	64,60	Rendah	DINAS ARPUS

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Persentase peningkatan koleksi judul	100,00	20% (2.500 Judul)	19% (2.451 Judul)	96,72	Sangat Tinggi	DINAS ARPUS
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan KEARSIPAN	Persentase peningkatan perpustakaan berbasis TIK	100,00	20% (40 Perpus)	20%(20 Perpus)	50,00	Sangat Rendah	DINAS ARPUS
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan nilai LAKE LKD	75,00	45,00	73,00	162,22	Sangat Tinggi	DINAS ARPUS
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan jumlah Perangkat daerah dan BUMD bernilai LAKI Cukup	100% (11 unit)	9,62% (5 OPD)	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS ARPUS
	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Peningkatan Pemerintah desa dan Ormas bernilai LAKE Cukup	100 (13 unit)	16,67% (2 Desa)	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS ARPUS
	URUSAN PILIHAN							
	PARIWISATA Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata	Jumlah Kunjungan Wisnu dan wisman	1.552.987	1.152.587	466.668	40,49	Sangat Rendah	DINAS PORAPAR

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pemasaran dan Pengembangan Produk Wisata	Rata-rata lama kunjungan wisata	0,14	0,08	0,08	100,00	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR
	Program Obyek dan Sarana Wisata	Persentase Sarana dan Prasarana Pariwisata dalam Kondisi Baik	77,78	66,87	66,87	100,00	Sangat Tinggi	DINAS PORAPAR
	Program Obyek dan Sarana Wisata	Persentase Usaha pariwisata memiliki Tanda daftar usaha pariwisata (TDUP)	95,00	75,00	53,00	70,67	Sedang	DINAS PORAPAR
	PERTANIAN							
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor tanaman pangan	0,25	0,10	1,71	1.710,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Perkebunan	1,30	1,05	2,28	217,14	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Laju pertumbuhan ekonomi sub sektor Hortikultura	1,40	1,00	1,74	174,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Produksi Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	Luas Lahan Pertanian Padi Organik	5,00	2,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Indek Pertanaman	1,70	1,54	1,54	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase penanganan Organisme Pengganggu Tanaman OPT)	90,00	89,80	99,20	110,47	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rasio Serangan OPT	<3	<3	<3	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Persentase lahan terakomodir pupuk bersubsidi	95,00	91,00	101,00	110,99	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Luas Lahan Sawah Lestari yang dipertahakan	100,00	100,00	100	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Jumlah layanan Perlindungan Tanaman	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP
	Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian	Rasio Unit Usaha Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) per desa	68,00	59,36	54,77	92,27	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian	Persentase Posluhdes	44,60	30,66	30,66	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia	"Persentase petani yang terlatih pertahun	2,50	2,50	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Pertanian melalui Penyuluhan Pertanian							
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Jumlah Pelaku Usaha Industri Pengolahan Pertanian	5	5,00	2,00	40,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Prosentase adopsi teknologi tepat guna	6	6,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Prosentase Penyediaan Bibit Tanaman Pertanian	55	35,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Penyediaan Sistem Informasi Pertanian	1	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	DINAS TAN & KP
	Program Peningkatan Bina Usaha dan Penerapan Teknologi Pertanian	Tingkat Kunjungan Masyarakat di TTP	5.000	5.000,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS TAN & KP
	Program Peternakan	Jumlah produksi daging	10.570.444,0 0	10.157.989,0 0	11.284.734,0 0	111,09	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Peternakan	Jumlah produksi telur	10.781.427,0	10.360.740,0	10.792.025,0	104,16	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Peternakan	Jumlahg produksi susu	769.063,00	724.599,00	604.664,00	83,45	Tinggi	DKPP

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PERDAGANGAN							
	Program Perdagangan	Persentase Pedagang tertib niaga	100,00	20,00	24,96	124,80	Sangat Tinggi	DINAS DAGKOP & UKM
	Program pengelolaan pasar	Jumlah pasar yang merujuk SNI	1,00	1,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS DAGKOP & UKM
	PERINDUSTRIAN							
	Program Peningkatan Layanan Industri Logam, mesin, alat transportasi	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri logam	7,90	7,90	6,66	84,30	Tinggi	DINAS PERINAKER
	Program Peningkatan Layanan Industri Logam, mesin, alat transportasi	Cakupan bina kelompok pengrajin industri logam, mesin, alat transportasi, tekstil, aneka	7,17	4,95	4,66	94,14	Sangat Tinggi	DINAS PERINAKER
	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	Pertumbuhan sub sektor PDRB industri agro, kimia dan hasil gutan	7,40	7,40	6,44	87,03	Tinggi	DINAS PERINAKER
	Program Peningkatan Layanan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan	cakupan bina kelompok pengrajin industri agro, kimia, dan hasil hutan	11,59	7,20	7,19	99,86	Sangat Tinggi	DINAS PERINAKER
	TRANSMIGRASI							
	Program Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	persentase transmigran yang ditempatkan	100,00	100,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	DINAS PERINAKER

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	URUSAN PILIHAN							
	Program Perikanan Tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap	1.630.561,00	1.566.937,00	1.964.378,00	125,36	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Perikanan Tangkap	Nilai produksi perikanan tangkap	15.196.846,0 0	14.603.871,0 0	13.608.184,0 0	93,18	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.152.277,00	2.068.296,00	2.730.262,00	132,01	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Nilai produksi perikanan budidaya	91.247.472,0	87.682.222,0 0	145.642.227, 00	166,10	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Jumlah produksi pengolahan hasil perikanan	4.744.412,00	4.559.286,00	5.478.639,00	120,16	Sangat Tinggi	DKPP
	Program Perikanan Budidaya dan Pengolahan Hasil Perikanan	Nilai produksi pengolahan hasil perikanan	180.152.628, 00	173.123.134, 00	131.189.142, 00	75,78	Sedang	DKPP
	URUSAN PENUNJANG FUNGSI PEMERINTAHAN							
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN							
	Program Bina Umum / Manajemen	Persentase Peningkatan Kinerja	1,00	1,00		0,00	Sangat Rendah	SETDA, BAG. UMUM

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	OPD Lingkup Koordinasi Bagian Pemerintah Desa (BKD dan BPKAD)						
	Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase Rumusan Kebijakan Lingkup Koordinasi Bagian Umum (BKB dan BPKAD) yang Terfasilitasi	1,00	1,00		0,00	Sangat Rendah	SETDA, BAG. UMUM
	Program Bina Umum / Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor dan Rumah Jabatan sesuai Standar dan Administrasi Pelayanan Kepegawaian Tepat Waktu	100,00	100,00	76,00	76,00	Tinggi	SETDA, BAG. UMUM
	Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase OPD Rumpun Keuangan Daerah tercapai LKJIP OPD kategori BB	45,41	37,41	33,33	89,09	Tinggi	SETDA, BAG. PERN. & KEU
	Program Bina Keuangan / Manajemen	Persentase Rumusan Kebijakan Pengelolaan	97,00	93,00	93,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PERN. & KEU

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Keuangan Daerah yang Terselesaikan						
	Program Bina Keuangan / Manajemen Administrasi Pelayanan Keuangan dan Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Keungan dan Perencanaan perangkat Daerah	100,00	100,00	97,00	97,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PERN. & KEU
	Program Bina Pemerintah Desa	Persentase pembentukan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa	100,00	100,00	50,00	50,00	Sangat Rendah	SETDA, BAG. PEMDES
	Program Bina Pemerintah Desa	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan Desa tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	0,04	0,11	Sangat Rendah	SETDA, BAG. PEMDES
	Program Bina Pemerintahan	Persentase kerjasama Daerah yang terealisasi	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PEMERINTAHA N
	Program Bina Pemerintahan	Peresentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	97,00	93,00	93,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PEMERINTAHA N
	Program Bina Pemerintahan	Persentase IKM Kecamatan	77,53	72,53	72,53	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PEMERINTAHA N

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Bina Pemerintahan	Persentase OPD Rumpun Pemerintahan tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	38,00	101,58	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PEMERINTAHA N
	Program Bina Bagian Layanan Pengadaan	Persentase layanan pengadaan barang / jasa yang dilaksanakan secara on-line (e- procurement)	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PENGADAAN BARANG & JASA
	Program Bina Bagian Layanan Pengadaan	Persentase lelang tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PENGADAAN BARANG & JASA
	Program Bina Perekonomian	Persentase OPD Rumpun Perekonomian tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	18,18	48,60	Sangat Rendah	SETDA, BAG. PERKONOMIA N & PEMBANGUNA N
	Program Bina Perekonomian	Persentase peraturan rumpun perekonomian yang diimplementasikan	97,00	93,00	93,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PERKONOMIA N & PEMBANGUNA N
	Program Bina Kesejahteraan Rakyat	Persentase pemenuhan pelayanan sosial keagamaan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. KESRA

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Bina Kesejahteraan Rakyat	Persentase OPD Rumpun Kesra tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	19,00	50,79	Sangat Rendah	SETDA, BAG. KESRA
	Program Bina Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Persentase kebijakan strategis Pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PROTOKOL & KOM. PIMPINAN
	Program Bina Hubungan Masyarakat dan Protokoler	Persentase OPD Rumpun Humas tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	100,00	267,31	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PROTOKOL & KOM. PIMPINAN
	Program Bina Organisasi	Persentase Layanan Publik sesuai dengan SPM	97,00	93,00		0,00	Sangat Rendah	SETDA, BAG. ORGANISASI
	Program Bina Organisasi	Predikat (Nilai) SAKIP Pemerintah Kabupaten Tegal	67,61	59,61	61,36	102,94	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. ORGANISASI
	Program Bina Organisasi	Persentase IKM Kabupaten	77,53	72,53	80,80	111,40	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. ORGANISASI
	Program Bina Organisasi	Persentase OPD Rumpun Organisasi tercapai LKJIP OPD kategori B	45,41	37,41	100,00	267,31	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. ORGANISASI
	Program Bina Hukum	Persentase pembentukan Perda yang terselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. HUKUM

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Bina Hukum	Persentase penyelesaian permasalahan hukum HAM yang terfasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. HUKUM
	Program Bina Pembangunan	Persentase OPD Rumpun Pembangunan tercapai LKJIP OPD kategori BB	45,41	37,41	18,18	48,60	Sangat Rendah	SETDA, BAG. PERKONOMIAN & PEMBANGUNAN
	Program Bina Pembangunan	Persentase Rumusan Kebijakan Rumpun Pembangunan yang difasilitasi	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	SETDA, BAG. PERKONOMIAN & PEMBANGUNAN
	Program Layanan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah dan Anggaran	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pembentukan Perda dan Anggaran DPRD ke dalam penyusunan Prolegda dan APBD	100,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	SETWAN
	Program Layanan Fungsi pengawasan dan kerjasama	Persentase Integrasi Rencana Kerja Tahunan DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan DPRD ke dalam pembangunan	100,00	100,00	90,00	90,00	Tinggi	SETWAN

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Adiwerna	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. ADIWERNA
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Adiwerna	Desa Berkembang	12,00	16,00	16,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. ADIWERNA
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Adiwerna	Desa Mandiri	9,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. ADIWERNA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. BALAPULANG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang	Desa Berkembang	15,00	17,00	16,00	94,12	Sangat Tinggi	KEC. BALAPULANG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Balapulang	Desa Mandiri	5,00	3,00	4,00	133,33	Sangat Tinggi	KEC. BALAPULANG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. BOJONG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	Desa Berkembang	13,00	15,00	15,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. BOJONG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bojong	Desa Mandiri	4,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. BOJONG

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. BUMIJAWA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa	Desa Berkembang	14,00	16,00	16,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. BUMIJAWA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Bumijawa	Desa Mandiri	4,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. BUMIJAWA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. DUKUHTURI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi	Desa Berkembang	12,00	15,00	15,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. DUKUHTURI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhturi	Desa Mandiri	6,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. DUKUHTURI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. DUKUHWARU
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru	Desa Berkembang	4,00	6,00	7,00	116,67	Sangat Tinggi	KEC. DUKUHWARU
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Dukuhwaru	Desa Mandiri	6,00	4,00	3,00	75,00	Sedang	KEC. DUKUHWARU

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. JATINEGARA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara	Desa Berkembang	15,00	16,00	16,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. JATINEGARA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Jatinegara	Desa Mandiri	2,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. JATINEGARA
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. KEDUNGBANT ENG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng	Desa Berkembang	7,00	8,00	8,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. KEDUNGBANT ENG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kedungbanteng	Desa Mandiri	3,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. KEDUNGBANT ENG
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat	Desa Tertinggal	4,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. KRAMAT
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat	Desa Berkembang	4,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. KRAMAT
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Kramat	Desa Mandiri	11,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. KRAMAT

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. LEBAKSIU
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Desa Berkembang	4,00	9,00	12,00	133,33	Sangat Tinggi	KEC. LEBAKSIU
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Lebaksiu	Desa Mandiri	11,00	6,00	3,00	50,00	Sangat Rendah	KEC. LEBAKSIU
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. MARGASARI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari	Desa Berkembang	9,00	11,00	11,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. MARGASARI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Margasari	Desa Mandiri	4,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. MARGASARI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. PAGERBARAN G
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Desa Berkembang	8,00	13,00	13,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. PAGERBARAN G
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pagerbarang	Desa Mandiri	5,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. PAGERBARAN G

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. PANGKAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	Desa Berkembang	12,00	19,00	20,00	105,26	Sangat Tinggi	KEC. PANGKAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Pangkah	Desa Mandiri	11,00	4,00	3,00	75,00	Sedang	KEC. PANGKAH
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. SLAWI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi	Desa Berkembang	0,00	0,00	0,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. SLAWI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Slawi	Desa Mandiri	5,00	5,00	5,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. SLAWI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. SURADADI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi	Desa Berkembang	7,00	7,00	7,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. SURADADI
	Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan Suradadi	Desa Mandiri	4,00	4,00	4,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. SURADADI

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Talang	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. TALANG
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Talang	Desa Berkembang	16,00	17,00	17,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. TALANG
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Talang	Desa Mandiri	3,00	2,00	2,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. TALANG
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Tarub	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. TARUB
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Tarub	Desa Berkembang	14,00	17,00	17,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. TARUB
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Tarub	Desa Mandiri	6,00	3,00	3,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. TARUB
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Warureja	Desa Tertinggal	0,00	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	KEC. WARURAJA
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Warureja	Desa Berkembang	7,00	9,00	9,00	100,00	Sangat Tinggi	KEC. WARURAJA
	Program Peningkatan Layanan Pemerintah Kecamatan Warureja	Desa Mandiri	5,00	3,00	2,00	66,67	Sedang	KEC. WARURAJA

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	PENGAWASAN							
	Program Pengawasan Intern dan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase penyelesaian LHP	95,00	91,00	170,00	186,81	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	Program Manajemen Risiko, Tata Kelola dan Penguatan Pengendalian	Persentase OPD yang tercapai IKUnya	90,00	59,23	30,00	50,65	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
	Program Pembangunan Budaya Integritas	Persentase OPD berpredikat WBK/WBBM	34,00	18,42	4,16	22,58	Sangat Rendah	INSPEKTORAT
	Program Peningkatan Manajemen Mutu Pengawasan	Persentase APIP memiliki Sertifikasi Keahlian	25,58	6,98	6,40	91,69	Sangat Tinggi	INSPEKTORAT
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN							
	Program Perencanaan dan Penganggaran Program	Persentase Dokumen Perencanaan disusun sesuai tahapan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
	Program Perencanaan dan Penganggaran Program	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah Rumpun Ekbangtur dengan dokumen perencanaan OPD Rumpun Ekbangtur	97,00	97,00	97,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Pemerintahan	Persentase Keselarasan	97,00	97,00	97,00	100,00	Sangat	BAPPEDA DAN
	dan Kesejahteraan	Dokumen Perencanaan					Tinggi	LITBANG
	Sosial	Daerah Rumpun						
		Pemkesos dengan						
		dokumen perencanaan						
		OPD Rumpun						
		Pemkesos						
	Program Pengendalian	Tingkat Kesesuaian	90,00	85,00	85,00	100,00	Sangat	BAPPEDA DAN
	dan Evaluasi	rencana dan realisasi					Tinggi	LITBANG
	Perencanaan	pembangunan						
	Pembangunan		0 7 00	0= 00	0	100.00		D 1 D D D 1 D 1 1 1
	Program Pengendalian	Tingkat ketercapaian	85,00	85,00	85,00	100,00	Sangat	BAPPEDA DAN
	dan Evaluasi	indikator					Tinggi	LITBANG
	Perencanaan	pembangunan sesuai						
	Pembangunan	target						
	KEUANGAN	D	100.00	100.00	100.00	100.00		DDVAD
	Program Anggaran	Persentase ketepatan waktu Penyusunan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Program Anggaran	Ketepatan waktu Penyusunan APBD-P	1,00	1,00	1,00	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Program Anggaran	Persentase Kualitas	95,00	70,00	70,00	100,00	Sangat	BPKAD
	110810001100	DPA yang sesuai	70,00	. 0,00	. 5,5 5	200,00	Tinggi	
		ketentuan					88	
	Program	Persentase Penerbitan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	BPKAD
	Perbendahraan	SP2D tepat waktu	,	•	,	<u> </u>	Tinggi	
	Program	Persentase	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat	BPKAD
	Perbendahraan	ketersediaan Dana					Tinggi	

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		kasda terhadap kebutuhan anggaran kas						
	Program Perbendahraan	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	1,00	1,00		0,00	Sangat Rendah	BPKAD
	Program Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Ketepatan waktu Perda Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Program Akuntansi dan Pelaporan	Persentase OPD yang telah menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD yg telah mengelola BMD yang baik dan benar	95,00	60,00	60,00	100,00	Sangat Tinggi	BPKAD
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Operaisonal Pendapatan	Persentase perencanaan, monev dan pelaporan pendapatan	100,00	100,00	75,00	75,00	Sedang	BAPPENDA
	Program Pendataan dan Penetapan (PAJAK PBB DAN BPHTB)	Persentase Hasil penagihan pajak PBB dan BPHTB yang tertagih	100,00	100,00	98,00	98,00	Sangat Tinggi	BAPPENDA

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
	Program Penagihan dan Keberatan (PAJAK NON PBB DAN BPHTB)	Persentase Hasil penagihan pajak non PBB dan BPHTB yang tertagih	100,00	100,00	97,85	97,85	Sangat Tinggi	BAPPENDA
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase jumlah kelitbangan yang termanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BAPPEDA DAN LITBANG
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							
	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	persentase PNS mengikuti pelatihan kepemimpinan dan mendapatkan STTPL	7,17	5,62	2,17	38,61	Sangat Rendah	BKD
	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	persentase pejabat fungsional non pendidikan dan pengawasan yang mengikuti pelatihan fungsional dan mendapatkan Sertifikat/STTPL	4,34	4,34	4,82	111,06	Sangat Tinggi	BKD
	Program Pendidikan dan Pelatihan ASN	persentase CPNS yang mengikuti Pelatihan Dasar/Prajabatan	100,00	100,00	100,00	100,00	Sangat Tinggi	BKD

No	Urusan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Target Kinerja Akhir RPJMD (2024)	Target Kinerja Tahun 2020	Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020	Persentase Capaian Kinerja 2020	Status Kinerja Tahun 2020	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		sesuai dengan peraturan						
	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	peraturan persentase jabatan JPT, Administrator dan Pengawas terisi	96,00	95,50	87,97	92,12	Sangat Tinggi	BKD
	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	persentase jabatan fungsional non guru/non kesehatan terisi	2,77	2,77	2,59	93,50	Sangat Tinggi	BKD
	Program Pembinaan Karir dan Penilaian Kompetensi ASN	persentase JPT dan Administrasi yang diuji kompetensinya	13,68	13,68	6,61	48,32	Sangat Rendah	BKD
	Program mutasi dan Pengelolaan Data ASN	persentase SIM kepegawaian yang terintegrasi	16,67	16,67	16,67	100,00	Sangat Tinggi	BKD
	Program Pembinaan dan Kesejahteraan ASN	persentase PNS yang mendapatkan hukuman disiplin	0,52	0,52	0,12	23,08	Sangat Rendah	BKD

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan atau kesenjangan antara realisasi kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target pembangunan (harapan) yang telah direncanakan. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu untuk menentukan langkah yang tepat dimasa depan. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan atau mempengaruhi pencapaian visi-misi RPJMD.

2.3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mendasarkan berbagai capaian kinerja pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Percepatan Difusi TIK pada seluruh Aspek Pemerintahan

Permasalahan pada prioritas pembangunan percepatan difusi TIK pada seluruh aspek pemerintahan antara lain sebagai berikut:

- 1) Keamanan informasi pemerintah daerah yang masih relatif rendah dan belum sesuai Standard Pemerintahan
- 2) Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai
- 3) Penyebarluasan Informasi publik yang sampai ke masyarakat sangat terbatas
- 4) Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara online
- 5) Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan
- 6) Kurang optimalnya kemandirian desa/kelurahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan
- 7) Tata kelola keuangan dan asset desa kurang optimal
- 8) Layanan dan pengelolaan penyediaan data kependudukan belum optimal
- 9) Layanan pendaftaran penduduk masyarakat kurang optimal
- 10) Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat kurang optimal

b. Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran

Permasalahan pada prioritas Peningkatan partisipasi dan integrasi perencanaan dan penganggaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran
- 2) Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum efektif
- 3) Keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah belum maksimal
- 4) Maturitas UKPBJ belum optimal
- 5) Standarisasi LPSE belum merata

c. Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif

Permasalahan pada prioritas Difusi produk kelitbangan dalam pembangunan yang inovatif antara lain sebagai berikut :

 Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan derah belum optimal

d. Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Permasalahan pada prioritas peningkatan pengawasan, akuntabilitas, dan transparasi pengelolaan keuangan dan aset daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Pengawasan, Akuntabilitas dan Transparasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- 2) Pungutan pajak belum optimal
- 3) Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah
- 4) Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan
- 5) Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu dipertahankan
- 6) tindak lanjut hasil pengawasan ItKab masih rendah
- 7) Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal belum optimal
- 8) Pemenuhan IKU OPD belum optimal

e. Penguatan kapasitas ASN dan Penerapan Merit Sistem

Permasalahan pada prioritas penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem antara lain sebagai berikut:

- 1) Tingkat kedisipilnan ASN masih kurang
- 2) Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya.
- 3) Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun
- 4) Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan

f. Percepatan Pemerataan Infrastruktur Wilayah

Permasalahan pada prioritas Penguatan kapasitas ASN dan penerapan merit sistem antara lain sebagai berikut:

- 1) Cakupan irigasi berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah
- 2) Terbatasnya layanan air minum berkualitas
- 3) Sistem drainase masih terbatas dan kurang berfungsi secara otpimal

g. Penataan ruang kota dan permukiman

Permasalahan pada prioritas penataan ruang kota dan permukiman antara lain sebagai berikut:

- 1) Penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesuai standar
- 2) Kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata
- 3) Rencana Tata Ruang tidak diimplementasikan dengan baik
- 4) Sinkronisasi dan penataan pembangunan desa belum optimal
- 5) Dampak kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal belum optimal
- 6) Kualitas permukiman yang layak khususnya korban bencana tidak merata

- 7) Masih banyak pembangunan dan pengembangan perumahan yang tidak meiliki izin
- 8) Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal
- 9) Penanganan lingkungan permukiman kumuh yang tidak optimal
- 10) Tidak meratanya layanan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

h. Peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi

Permasalahan pada prioritas peningkatan kualitas layanan dan sarana transportasi antara lain sebagai berikut :

- 1) Layanan keselamatan berkendara belum optimal
- 2) Layanan konektivitas transportasi belum optimal
- 3) Daya tampung jalan belum optimal
- 4) Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum efektif
- 5) Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, beracun kurang maksimal
- 6) cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal
- 7) Belum optimalnya cakupan penanganan sampah dimasyarakat, belum semua wilayah kab Tegal terlayani, sementara volume sampah terus meningkat

i. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

Permasalahan pada prioritas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan antara lain sebagai berikut:

1) Pelaku usaha berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan belum dievaluasi secara maksimal

j. Penyiapan dan Pengembangan sektor Perikanan Kreatif

Permasalahan pada prioritas penyiapan dan pengembangan sektor perikanan kreatif antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap.
- 2) Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (Menggunakan racun dan Listrik/setrum) masih marak
- 3) Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.
- 4) Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan.

k. Penyiapan dan Pengembangan Sektor Pertanian kreatif Meliputi Tanaman Pangan Holtikultura, Perkebunan dan Peternakan

Permasalahan pada prioritas penyiapan dan pengembangan sektor pertanian kreatif meliputi tanaman pangan holtikultura, perkebunan, dan peternakan antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum optimalnya produksi pertanian dan peternakan
- 2) Kurangnya antisipasi penanggulangan bencana pertanian
- 3) Pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat belum optimal
- 4) Kualitas kelembagaan kelompok tani belum optimal
- 5) Kapasitas penyuluh pertanian tanaman pangan yang berkualitas belum merata

l. Penguatan dan Diversifikasi Pangan

Permasalahan pada prioritas penguatan dan diversifikasi pangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Penguatan cadangan pangan belum maksimal
- 2) Penyehatan dan pengembangan industri pengolahan dan industri kreatif
- 3) Pengembangan sektor industri yang belum maksimal
- 4) Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin
- 5) Masih rendahnya data/informasi industri yang terverifikasi

m. Penguatan dan Pengembangan Destinasi Wisata

Permasalahan pada prioritas penguatan dan pengembangan destinasi wisata antara lain sebagai berikut:

- 1) Destinasi tujuan wisata kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola
- 2) Belum semua usaha pariwisata yang memiliki ijin usaha

n. Peningkatan efektifitas Pemasaran Wisata

Permasalahan pada prioritas peningkatan efektifitas pemasaran wisata antara lain sebagai berikut:

1) Kurang maksimalnya pemasaran destinasi tujuan wisata yang ada

o. Pengembangan SDM Pariwisata Kreatif

Permasalahan pada prioritas pengembangan SDM pariwisata kreatif antara lain sebagai berikut :

1) Sebagian besar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum tersertifikasi

p. Penguatan Fungsi Pasar Tradisional Era Tatanan Baru

Permasalahan pada prioritas penguatan fungsi pasar tradisional era tatanan baru antara lain sebagai berikut:

1) Rendahnya kualitas /standarisasi pasar serta pengelolaannya.

q. Pengembangan Layanan dan Sistem Perdagangan Digital

Permasalahan pada prioritas pengembangan layanan dan sistem perdagangan digital antara lain sebagai berikut :

- 1) Produktifitas penjualan produk belum optimal
- 2) Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekspor produk lokal
- 3) Masih kurangnya kemitraan perkoperasian

r. Pemulihan dan Pengembangan UMKM

Permasalahan pada prioritas pemulihan dan pengembangan UMKM antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- 2) Peningkatan skala usaha UMKM kurang maksimal

s. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan Dasar Berbasis TIK

Permasalahan pada prioritas peningkatan akses layanan pendidikan dasar berbasis TIK antara lain sebagai berikut:

- 1) Mutu layanan pendidikan masyarakat belum optimal
- 2) Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan belum merata

t. Peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK

Permasalahan pada prioritas peningkatan akses layanan kesehatan dasar berbasis TIK antara lain sebagai berikut:

- 1) Belum maksimalnya pengelolaan fasilitas dan layanan kesehatan, serta pengelolaan limbah medis yang sesuai standar
- 2) Kualitas sumberdaya kesehatan terbatas dan tidak merata
- 3) Kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dimasyarakat belum merata

u. Peningkatan Upaya Promosi dan Pembudayaan Hidup Sehat Era Tatanan Baru

Permasalahan pada prioritas peningkatanupaya promosi dan pembudayaan hidup sehat era tatanan baru antara lain sebagai berikut:

1) Kurang maksimalnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

v. Peningkatan Pelayanan Pengarustamaan Gender

Permasalahan pada prioritas peningkatan pelayanan pengarustamaan gender antara lain sebagai berikut:

- 1) Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal
- 2) Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal
- 3) Pemenuhan hak tumbuh kembang anak kurang optimal

w. Pengendalian Kelahiran dan Peningkatan Kualitas Keluarga Berencana

Permasalahan pada prioritas pengendalian kelahiran dan peningkatan kualitas keluarga berencana antara lain sebagai berikut:

1) Layanan pemenuhan kebutuhan KB belum optimal

x. Peningkatan Minat dan Kapasitas Wirausaha Muda

Permasalahan pada prioritas peningkatan minat dan kapasitas wirausaha muda antara lain sebagai berikut:

- 1) Kesadaran pemuda agar lebih produktif kurang maksimal
- 2) kemandirian wirausaha pemuda belum optimal
- 3) Produktifitas organisasi pemuda belum optimal
- 4) Peningkatan layanan dan pembinaan olah raga masyarakat

y. Peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin

Permasalahan pada prioritas peningkatan layanan sosial masyarakat miskin dan rentan miskin antara lain sebagai berikut :

- 1) PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan belum diberdayakan secara maksimal
- 2) Perluasan perlindungan dan Jaminan sosial serta Pemberdayaan warga miskin dan rentan miskin
- 3) Penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia kurang memadai
- 4) Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin belum maksimal

z. Peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat

Permasalahan pada prioritas peningkatan gotong royong ekonomi masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Penanganan pengangguran tidak tererencana secara sistematis
- 2) Kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang bersaing

aa. Peningkatan Kerjasama Ketenagakerjaan

Permasalahan pada prioritas peningkatan kerjasama ketenagakerjaan antara lain sebagai berikut:

1) Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal

bb.Peningkatan Akselerasi Kemudahan Investasi Khususnya yang Membuka Lapangan Kerja

Permasalahan pada prioritas peningkatan akselerasi kemudahan investasi khususnya yang membuka lapangan kerja antara lain sebagai berikut:

- 1) Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofiklan dengan baik
- 2) Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen
- 3) Kualitas pelayanan modal belum optimal
- 4) Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku

cc. Penguatan Kebhinekaan dan Penciptaan Ruang Dialog dan kerjasama antar Warga dan umat Beragama

Permasalahan pada prioritas penguatan kebhinekaan dan penciptaan ruang dialog dan kerjasama antar warga dan umat beragama antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang
- 2) Gangguan Kantibmas belum terdeteksi secara optimal
- 3) Potensi konflik sara mash terjadi di masyarakat
- 4) Penanganan ngangguan trantibum di masyarakat belum optimal

dd.Peningkatan Upaya Penegakan Peraturan Daerah

Permasalahan pada prioritas peningkatan upaya penegakan peraturan daerah antara lain sebagai berikut:

- 1) Masih banyak kasus pelanggaran perda yang belum tertangani
- 2) Masih rendahnya kualitas penyelesaian penegakan perda

ee. Optimalisasi Penanganan Bencana sesuai Standar

Permasalahan pada prioritas optimalisasi penanganan bencana sesuai standar antara lain sebagai berikut:

- 1) Pelayanan dan respon penanganan kasus kebakaran masih dibawah standard
- 2) Layanan informasi rawan bencana kurang memadai
- 3) cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal
- 4) Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik

ff. Pelestarian dan Promosi Seni dan Cagar Budaya

Permasalahan pada prioritas pelestarian dan promosi seni dan cagar budaya antara lain sebagai berikut:

- 1) Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- 2) Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- 3) Rehabilitasi dan pengelolaan Cagar budaya tidak maksimal

2.3.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pengelompokan permasalahan berdasarkan urusan sebagai berikut:

a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

- 1) Urusan Pendidikan
 - Mutu layanan pendidikan masyarakat belum optimal
 - Kurikulum lokal yang berkualitas belum diimplementasikan
 - Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan belum merata
 - Pengendalian mutu satuan pendidikan swasta belum maksimal
- 2) Urusan Kesehatan
 - Belum maksimalnya pengelolaan fasilitas dan layanan kesehatan, serta pengelolaan limbah medis yang sesuai standar
 - Kualitas sumberdaya kesehatan terbatas dan tidak merata
 - Kualitas dan kuantitas sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman dimasyarakat belum merata
 - Kurang maksimalnya peran serta masyarakat dalam melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Cakupan irigasi berkualitas tidak menjangkau seluruh wilayah
 - Terbatasnya layanan air minum berkualitas
 - Sistem drainase masih terbatas dan kurang berfungsi secara otpimal
 - Penataan bangunan dan fisik perkotaan yang kurang maksimal dan tidak sesai standar
 - Masih banyak penyedia jasa konstruksi yang tidak sesuai standar dan bersertifikat
 - Kualitas jalan dan jembatan yang baik tidak merata
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
 - Rencana Tata Ruang tidak diimplementasikan dengan baik
 - Terdapat masalah pertanahan dalam pelaksanaan pembangunan
 - Pengelolaan taman makam pahlawan kurang makasimal
 - Kualitas permukiman yang layak khususnya korban bencana tidak merata
 - Masih banyak pembangunan dan pengembangan perumahan yang tidak meiliki izin
 - Penanganan rumah tidak layak huni kurang optimal
 - Penanganan lingkungan permukiman kumuh yang tidak optimal
 - Tidak meratanya layanan PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
 - cakupan layanan limbah rumah tangga kurang maksimal
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Masih banyak kasus pelanggaran perda yang belum tertangani
 - Masih rendahnya kualitas penyelesaian penegakan perda
 - Pelayanan dan respon penanganan kasus kebakaran masih dibawah standar

- Layanan informasi rawan bencana kurang memadai
- cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal

6) Urusan Sosial

- PSKS perseorangan keluarga dan kelembagaan belum diberdayakan secara maksimal
- Penanganan dan rehabilitasi sosial disabilitas, anak terlantar dan lanjut usia kurang memadai
- Perlindungan dan Jaminan Sosial khususnya bagi masyarakat miskin belum maksimal
- Masyarakat / gelandangan khususnya korban tindak kekerasan belum tertangani dengan maksimal
- cakupan pelayanan perlindungan sosial korban bencana daerah belum optimal

b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

- 7) Urusan Tenaga Kerja
 - Penanganan pengangguran tidak tererencana secara sistematis
 - Kompetensi tenaga kerja lokal yang kurang bersaing
 - Kurang optimalnya pelayanan dan penyaluran tenaga kerja lokal
 - Hubungan industrial yang kurang harmonis serta terbatasnya tata kelola kerja perusahaan secara layak
 - Penyerapan lapangan kerja melalui program transmigrasi belum dimanfaatkan secara maksimal
- 8) Urusan Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
 - Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal
 - Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
 - Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal
 - Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang terkelola
 - Pemenuhan hak tumbuh kembang anak kurang optimal
 - Masih rendahnya pelayanan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan
- 9) Urusan Pangan
 - Penguatan cadangan pangan belum maksimal
- 10) Urusan Pertanahan
 - Kurang maksimalnya pengelolaan ijin lokasi
- 11) Urusan Lingkungan Hidup
 - Pengelolaan lingkungan hidup belum terencana dengan maksimal
 - Pengendalian dan pengawasan pencemaran lingkungan hidup belum efektif
 - Pengelolaan lahan kehati belum optimal
 - Pengelolaan bahan dan limbah berbahaya, beracun kurang maksimal
 - Belum optimalnya cakupan penanganan sampah dimasyarakat, belum semua wilayah kab Tegal terlayani, sementara volume sampah terus meningkat
 - Pelaku usaha berkomitmen dalam pengelolaan lingkungan belum dievaluasi secara maksimal

- Kapasitas masyarakat dan penyuluh dalam mengelola lingkungan masih belum maksimal
- Masyarakat kurang terstimulasi untuk mengelola lingkungan hidup
- Penanganan pengaduan masyarakat terkait LH belum maksimal
- 12) Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - Layanan dan pengelolaan penyediaan data kependudukan belum optimal
 - Layanan pendaftaran penduduk masyarakat kurang optimal
 - Layanan pencatatan sipil kepada masyarakat kurang optimal
- 13) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - Tata Kelola Keuangan dan Asset Desa Kurang optimal
 - Sinkronisasi dan penataan pembangunan desa belum optimal
 - Dampak kerjasama desa dalam pengentasan desa tertinggal belum optimal
 - Prioritas anggaran pembangunan berbasis gender belum maksimal
 - Masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
 - Kualitas pelayanan konseling hidup keluarga berbasis gender belum optimal
 - Ketersediaan dan kualitas data gender dan anak kurang terkelola
 - Pemenuhan hak tumbuh kembang anak kurang optimal
 - Masih rendahnya pelayanan perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan
 - Masih rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan di desa
- 14) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Layanan pemenuhan kebutuhan KB belum optimal
 - Pengendalian kelahiran penduduk khususnya warga miskin belum optimal
 - Masih rendahnya pembinaan untuk peningkatan keberdayaan keluarga
- 15) Urusan Perhubungan
 - Layanan keselamatan berkendara belum optimal
 - Layanan konektivitas transportasi belum optimal
 - Daya tampung jalan belum optimal
- 16) Urusan Komunikasi dan Informatika
 - Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi untuk pemerintahan yang efektif dan efisien belum memadai
 - Penyebarluasan Informasi publik yang sampai ke masyarakat sangat terbatas
 - Terbatasnya layanan publik yang terintegrasi dan dapat diakses secara online
- 17) Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - Masih terdapat usaha simpan pinjam yang belum berizin
 - Kurang maksimalnya pengawasan KSP/USP
 - Masih ada KSP/USP yang kondisi koperasinya tidak sehat
 - Masih kurangnya kualitas SDM perkoperasian
 - Masih kurangnya kemitraan perkoperasian
 - Masih rendahnya kemitraan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
 - Peningkatan skala usaha UMKM kurang maksimal

18) Urusan Penanaman Modal

- Potensi obyek investasi kurang terpetakan dan terprofiklan dengan baik
- Kurang maksimalnya strategi promosi untuk menarik calon investor berkomitmen
- Kualitas pelayanan modal belum optimal
- Belum semua perusahaan mematuhi ketentuan perizinan yang berlaku
- Data profil peluang investasi belum up to date sehingga kurang termanfaatkan

19) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

- Kesadaran pemuda agar lebih produktif kurang maksimal
- kemandirian wirausaha pemuda belum optimal
- Produktifitas organisasi pemuda belum optimal
- Pengembangan atlit belum maksimal

20) Urusan Statistik

- Ketersediaan dan keseragaman data/informasi yantg dibutuhkan masih rendah dan kurang berkualitas

21) Uruasan Persandian

- Keamanan informasi pemerintah daerah yang masih relatif rendah dan belum sesuai standard pemerintahan

22) Urusan Kebudayaan

- Bahasa dan Sastra lokal kurang diajarkan sejak dini kemasyarakat
- Banyak kebudayaan lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Banyak potensi kesenian lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Banyak potensi sejarah lokal tidak dikelola dan dikembangkan dengan baik
- Rehabilitasi dan pengelolaan Cagar budaya tidak maksimal
- Museum tidak berfungsi sebagaimana mestinya

23) Urusan Perpustakaan

- Tingkat literasi masyarakat Kabupaten Tegal masih tergolong rendah

24) Urusan Kearsipan

- Belum optimalnya pengelolaan Arsip penting daerah khususnya arsip keuangan dan asset

c. Urusan Pemerintahan pilihan

- 25) Urusan Kelautan dan Perikanan
 - Belum optimalnya produksi perikanan tangkap.
 - Praktek penangkapan ikan ilegal di PUD (Menggunkan racun dan Listrik/setrum) masih marak
 - Belum optimalnya produksi perikanan budidaya.
 - Belum optimalnya kemanfaatan pengolahan hasil perikanan.

26) Urusan Pariwisata

- Destinasi tujuan wisata kurang dioptimalkan/dikembangkan/terkelola
- Belum semua usaha pariwisata yang memiliki ijin usaha
- Kurang maksimalnya pemasaran destinasi tujuan wisata yang ada
- Sebagian besar pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif belum tersertifikasi

27) Urusan Pertanian

- Belum optimalnya produksi pertanian dan peternakan
- Kurangnya antisipasi penanggulangan bencana pertanian
- Pengawasan produksi hasil peternakan yang aman dan sehat belum optimal
- Kualitas kelembagaan kelompok tani belum optimal
- Kapasitas penyuluh pertanian tanaman pangan yang berkualitas belum merata

28) Urusan Perdagangan

- Rendahnya kualitas /standarisasi pasar serta pengelolaannya.
- Masih terdapat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang tidak standar
- Pengendalian harga barang kurang maksimal
- Produktifitas penjualan produk belum optimal
- Belum optimalnya tingkat pertumbuhan ekspor produk lokal
- Layanan perizinan usaha perdagangan belum optimal

29) Urusan Perindustrian

- Pengembangan sektor industri yang belum maksimal
- Masih ada usaha industri yang melakukan pelanggaran baik yang sudah berizin maupun belum berizin
- Masih rendahnya data/informasi industri yang terverifikasi

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

- 30) Sekretariat Daerah
 - Kualitas pelayanan publik di setda yang belum optimal
 - Fasilitasi peningkatan pelayanan publik belum optimal
 - Maturitas UKPBI belum optimal
 - Standarisasi LPSE belum merata

31) Sekretariat DPRD

- Renja DPRD tidak terintegrasi dalam pelayanan fungsi Setwan

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

- 32) Unsur Perencanaan
 - Belum maksimalnya kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan sinkronisasi penganggaran
 - Manajemen kinerja dan sistem pengendalian internal OPD belum efektif
 - Keselarasan dokumen perencanaan daerah dan perangkat daerah belum maksimal

33) Unsur Keuangan

- Belum Optimalnya Pengelolaan APBD
- Pungutan pajak belum optimal
- Belum Optimalnya Pengelolaan Barang Milik Daerah

34) Unsur Kepegawaian

- Tingkat kedisipilnan ASN masih kurang
- Jabatan struktural/jabatan fungsional (non guru non kesehatan) belum terisi secara maksimal berdasarkan kompetensinya.

35) Unsur Pendidikan dan Pelatihan

- Masih banyak ASN yang belum mengikuti pelatihan teknis 20 jam/tahun
- Masih banyak ASN yang belum mengikuti seminar/workshop/sejenis sesuai dengan tupoksi jabatan
- 36) Unsur Penelitian dan Pengembangan
 - Pemanfaatan hasil-hasil penelitian dan inovasi yang dapat mendukung secara langsung pelaksanaan berbagai sektor pembangunan derah belum optimal

f. Unsur Pengawasan

- 37) Inspektorat
 - Tindak lanjut hasil pengawasan BPK RI perlu ditingkatkan
 - Tindak lanjut hasil pengawasan itprov perlu dipertahankan
 - tindak lanjut hasil pengawasan ItKab masih rendah
 - Predikat WBK/WBBM berdasarkan penilaian internal belum optimal
 - Pemenuhan IKU OPD belum optimal

g. Unsur Kewilayahan

- 38) Kecamatan
 - Belum optimalnya pelayanan publik kepada masyarakat di Kecamatan
 - Kurang optimalnya kemandirian desa/keluarahan dalam mengelola pembangunan kewilayahan
 - Pembangunan desa belum tertib administrasi
 - Fasilitasi dan koordinasi penguatan kerukunan dan toleransi di masyarakat belum optimal
 - Penanganan gangguan trantibum di masyarakat belum optimal

h. Unsur Pemerintahan Umum (Kesbangpol)

- 39) Kesbangpol
 - Pembinaan masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wasbang masih kurang
 - Kesadaran politik masyarakat kurang optimal
 - Organisasi Masyarakat (ormas) belum terbina dengan baik optimal
 - Gangguan Kamtibmas belum terdeteksi secara optimal
 - Potensi konflik SARA mash terjadi di masyarakat

2.3.3 Isu Strategis Pembangunan Daerah

Mendasarkan berbagai permasalahan pembangunan dan potensi yang dimiliki Kabupaten Tegal, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2022 dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Menekan Laju Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah daerah yang saat ini masih menjadi tantangan yang belum terselesaikan. Kemiskinan juga berkaitan erat dengan pengangguran yang keduanya saat ini menjadi satu entitas yang tidak bisa dipisahkan.

Kemiskinan sendiri merupakan permasalahan dan isu multi dimensi dan krusial yang harus ditangani oleh berbagai kebijakan sektoral yang saling bersinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui melalui tiga strategi yakni, perlindungan sosial

yang komprehensif; penyediaan dan peningkatan akses terhadap layanan dasar; dan penyediaan mata pencarian yang layak serta berkelanjutan.

Melalui sinergitas kebijakan tersebut, dalam lingkup regional jawa tengah tingkat kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2019 yang sebesar 7,64 % berada pada urutan 10 terendah dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tegah, atau satu tingkat dibawah Kota Tegal yang berada pada posisi 9 terendah dengan tingkat kemiskinan sebesar 7,47%. Namun dengan adanya pandemi covid-19 di awal tahun 2020 telah merubah tren kemiskinan di Kabupaten Tegal yang sudah menurun menjadi meningkat secara riil ditahun 2020 menjadi 8,14 dan melingkupi sekitar 117.500 jiwa. Ironisnya, umumnya sebagian besar penduduk yang rentan miskin tersebut bekerja di sektor informal, dimana kelompok ini merupakan kelompok penduduk yang rentan terhadap kemiskinan dan paling terdampak dengan adanya pandemi covid-19. Sedangkan Angka Pengangguran mengalami peningkatan dari 8,45 ditahun 2019 menjadi 9,82 ditahun 2020.

Permasalahan penanggulangan kemiskinan utamanya menyangkut akses kebutuhan dasar, kehidupan ekonomi berkelanjutan, perilaku dan budaya masyarakat, ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi, dan pengelolaan data kemiskinan.

Fenomena pengangguran di Kabupaten Tegal cukup unik dan perlu dikaji lebih mendalam. Idealnya penurunan angka kemiskinan berbanding lurus dengan penurunan angka pengangguran. Namun kenyataannya di Kabupaten Tegal disaat angka kemiskinan mengalami penurunan, angka pengangguran justru meningkat. Hal ini perlu diwaspadai dan mendapat perhatian khusus apalagi disaat kondisi pandemi covid-19 saat ini telah banyak merusak struktur ekonomi wilayah.

Pada masa pandemi ini, banyak sector usaha dari skala besar hingga kecil mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan karena turunnya permintaan pasar yang menyebabkan rendahnya produktivitas usaha (perusahaan). Daya jual produk usaha yang melemah tersebut menjadikan perusahaan kesulitan dalam membayar gaji karyawannya sehingga banyak tenaga kerja asal Kabupaten Tegal yang akhirnya dirumahkan bahkan di-PHK. Dengan melihat kondisi saat ini, isu pengangguran Kabupaten Tegal bisa dikatakan cukup kompleks. Selain fenomena pengangguran penduduk Kabupaten Tegal yang belum diketahui bentuk dan perilakunya, pemerintah Kabupaten Tegal harus bisa meningkatkan produktifitas masyarakat didalam era krisis pandemi covid-19.

Tantangan isu pengangguran dalam era krisis (in crisis) lebih kepada bagaimana masyarakat dengan segala keterbatasan saat ini namun tetap mampu produktif secara ekonomi. Setidaknya dalam era krisis ini transformasi bentuk usaha digital harus menjadi *quideline* khusus. Digitalisasi ekonomi masvarakat mulai skala kecil hingga besar perlu difasiliitasi. Hal ini didasarkan fakta bahwa adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal telah memunculkan ekonomi digital masyarakat disemua lini bahkan penjual sayur eceran telah masuk kedalamnya. Kemunculan ekonomi digital ini mempunyai pengembangan mulai dari hulu-hilirnya. Untuk itu perlu di-manage dan dikembangkan keterkaiatan hulu hilirnya (supply chain management). Digitalisasi semua sektor usaha khususnya pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan harus dikembangkan.

b. Kualitas Sumber Daya Manusia

Tantangan isu Sumber daya manusia meliputi isu pendidikan, kesehatan masyarakat dan ketenagakerjaan kedepan. Isu kualitas Pendidikan masyarakat kedepan akan menjadi lebih berat ketimbang sebelumnya. Pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Tegal pada tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 0,15 poin, dari 68.24 poin pada 2019 menjadi 68,39 poin pada 2020. Namun demikian terjadi penurunan pertumbuhan secara signifikan dari 0,91 menjadi 0,14 pada 2020.

Dalam kondisi Kabupaten Tegal mulai menata pengelolaan Pendidikan yang lebih berkualitas, seketika terganggu akibat wabah covid-19. Sistem belajar mengajar mampunyai keterbatasan dan kendala akibat perubahan pola pembelajaran tatap muka (*luring*) menjadi non-tatap muka (*daring*). Sementara pembelajaran non-tatap muka belum ditemukan bentuk yang efektif mulai dari prosesnya hingga evaluasinya. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan mutu Pendidikan itu sendiri. Oleh karena itu tantangan Pendidikan ke depan (new normal) ialah harus syarat perbaikan ekosistem pendidikan agar tidak lagi bergantung pada sekolah (Pendidikan Era 4.0). Selain sistem, kualitas tenaga pengajar dalam mengimplementasikan Pendidikan Era 4.0 harus ditingkatkan. Tantangan lainnya yang timbul yaitu terkait sarana prasarana yang memadai. Misalnya peserta didik dari keluarga yang kurang mampu tidak memiliki laptop/smartphone tetap bisa mengikuti proses belajar mengajar. Kita juga harus harus memastikan setidaknya internet tersedia secara merata. Maka kebijakan kedepan sudah seharusnya memperhatikan beberapa hal tersebut. Isu kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal masih sangat diwarnai efek pandemi covid-19 di Kabupaten Tegal. Hingga 20 Januari 2021 secara akumulasi sudah terdapat 3.998 orang positif covid-19. Dari 3.998 orang tersebut 149 orang meninggal dunia, 3.433 orang sembuh, 125 orang masih dirawat di rumah sakit, dan sisanya 291 orang menjalani isolasi mandiri. Kondisi ini memberikan pukulan cukup telak terhadap efektifitas penanganan covid-19 di Kabupaten Tegal. Dengan kondisi yang belum bisa dipastikan kapan wabah akan berakhir, kesiapan sektor kesehatan kedepan harus lebih kuat. Kesiapan tenaga kesehatan dari segi jumlah, kualitas, dan protokol keselamatan pelayanan kesehatan harus diutamakan. Sarana prasarana harus mencukupi setidaknya untuk menghadapi puncak kasus yang mungkin masih dapat terus meningkat.

Berbagai permasalahan sektor kesehatan, memunculkan tantangan tersendiri dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Ada beberapa tantangan Kesehatan yang dihadapai masyarakat Kabupaten Tegal antara lain:

- Adanya wabah ini mensyaratkan masyarakat untuk mampu menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai bagian protokol kesehatan rutin di era new normal;
- Pemanfaatan teknologi dalam sektor kesehatan ke depan bisa menjadi suatu kebutuhan. Rasa cemas masyarakat untuk datang secara langsung ke fasilitas kesehatan, membuat pelayanan kesehatan membutuhkan teknologi yang bisa mendukung masyarakat agar dapat berkonsultasi dengan dokter secara virtual. Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menyediakan layanan kesehatan online yang terinterasi dengan berbagai fasilitas layanan kesehatan;

 Belajar dari proses dan kondisi penanganan pandemi covid-19 secara umum, maka sistem kesehatan harus lebih dikuatkan. Kesiapan dan penanganan menghadapi pandemi lainnya harus lebih baik. Mengingat pandemi itu bisa terjadi kapan saja.

Sedangkan isu ketenagakerjaan adalah bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja yang berdaya saing tinggi. Dengan kata lain tantangan ini menitik beratkan pada tingkat penyerapan tenaga kerja kedepan. Hal tersebut didasarkan pada asumsi bahwa tingkat penyerapan lapangan kerja dimasa pasca krisis berpotensi tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK. Dengan keterbatasan sumber daya perusahaan saat krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja dengan jumlah yang lebih sedikit. Hal tersebut memunculkan seleksi yang lebih ketat kedepannya. Perusahaan akan lebih memilih tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (*multi tasking*). Oleh karena itu perubahan *landscape* atau kualifikasi tenaga kerja bisa jadi suatu keniscayaan. Tenaga kerja berpendidikan dan berketerampilan rendah disektor formal akan tersingkir secara otomatis. Setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait ketenagakerjaan pascakrisis antara lain:

- Tingkat penyerapan tenaga kerja dimasa pasca krisis tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang telah di-PHK, atau dengan kata lain supply tenaga kerja jauh melebihi demand tenaga kerja itu sendiri;
- Dengan keterbatasan sumber daya (ekonomi) perusahaan pasca krisis, maka memungkinkan perusahaan hanya akan merekrut tenaga kerja yang memiliki produktifitas yang tinggi dan mampu mengerjakan hal lainnya (multi tasking). Karena itu kualifikasi tenaga kerja akan semakin meningkat;
- Lapangan usaha yang berkembang di era pascapandemi adalah usaha yang berhubungan dengan teknologi dalam artian digitalisasi maupun mesinisasi. Sehingga peran manusia akan mulai berkurang porsinya dalam proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena itu transformasi tenaga kerja diarahkan pada proses *entrepreneurship*.

Dengan melihat tantangan dalam sektor ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tegal harus mampu menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri maupun mampu bersaing dalam seleksi penyerapan lapangan kerja kedepan.

c. Pemulihan Ekonomi Lokal, Industri Kreatif, Pariwisata dan Ketahanan Pangan

Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sektor ekonomi adalah yang paling mendapatkan tekanan dari dampak Pandemi covid-19. Kondisi ini memaksa seluruh pelaku usaha termasuk pelaku usaha di Kabupaten Tegal harus berupaya dengan segala cara agar tetap dapat bertahan. Namun disisi lain rusaknya struktur perekonomian secara luas justru berpotensi bagi semua pelaku usaha bisa mengambil peran pelaku usaha lainnya.

Sektor unggulan Kabupaten Tegal terdiri atas sektor industri pengolahan, pertanian (pertanian, kehutanan dan perikanan) dan perdagangan (perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor). Industri pengolahan, Kabupaten Tegal cukup terkenal dengan industri pengolahan logam dan pengolahan makan/minuman. Dalam kondisi covid-19 saat ini banyak sektor industri pengolahan yang gulung tikar akibat tidak mampu

beradaptasi. Ini bisa menjadi ancaman sekaligus peluang bagi pelaku industri pengolahan di Kabupaten Tegal. Kondisi saat ini memang sebagian besar permintaan produk industri manukfaktur mengalami penurunan yang tajam. Industri manukfaktur harus diarahkan agar bisa melihat peluang produk industri manufaktur apa yang tingkat permintaannya tetap tinggi bahkan meningkat ditengah wabah covid-19 ini. Dengan melihat peluang tersebut maka pelaku usaha lokal perlu dibantu dan difasilitasi agar bisa menghasilkan produk yang lebih terdiversifikasi sesuai permintaan pasar (berorientasi ekspor), khususnya yang ada keterkaitan (*interlinkage*) dengan sektor primer lokal. Industri pengolahan lokal harus mampu menciptakan nilai tambah (*value added creation*) produk-produk sektor primer lokal sekaligus didorong agar bisa berperan masuk ke sektor ekonomi yang ditinggalkan oleh industri ditempat lain, minimal untuk saat ini peran sektor industri lokal yang ada tidak diambil oleh pelaku dari luar.

Di sektor pertanian, transformasi pertanian modern ramah lingkungan bisa menjadi opsi yang tepat. Dalam masa pandemi covid-19, permintaan produk pertanian khususnya pangan naik signifikan baik lingkup nasional bahkan global. Melalui modernisasi pertanian yang fokus pada produk kebutuhan pasar, diharapkan produk pertanian Kabupaten Tegal mampu mengambil bagian dalam pemenuhan permintaan produk pangan.

Transformasi sektor pertanian tidak boleh dianggap hanya sebatas mekanisasi (penerapan teknologi) saja. Namun transformasi pertanian modern juga mempunyai konsep bahwa petani sebagai pelaku utama perlu didorong untuk mampu menguasai hulu hingga hilir. Paradigma mereka harus dilatih agar tidak hanya selesai memproduksi hasil pertanian saja, namun juga bisa memberikan nilai tambah dari produk yang dihasilkan sekaligus memasarkannya. Melalui konsep seperti ini, tenaga kerja baru dapat terserap sekaligus menjadi salah satu solusi pengangguran akibat wabah covid-19 khususnya di wilayah perdesaan Kabupaten Tegal. Untuk itu transformasi pertanian modern di Kabupaten Tegal minimal harus memuat 2 (dua) unsur perubahan utama yaitu penguasaan teknologi dan paradigma hulu-hilir.

Di sektor perdagangan, digitalisasi perdagangan di seluruh skala bisnis harus mulai diaplikasikan. Saat ini transkasi tatap-muka disemua lini perdagangan mulai bergeser ke sistem *online*. Selain dapat meningkatkan manfaatkan ekonomi lainnya khususnya jasa kurir, sistem *online* juga dapat meluaskan pasar tidak hanya skala lokal bahkan menjangkau pasar internasional. Oleh karena itu pelaku usaha perdagangan harus mampu menguasai dan menjalankan mekanisme sistem *online* tersebut.

Disisi lain, era pandemi saat ini dengan segala keterbatasan mobilitas, Industri kreatif mempunyai peluang yang cukup besar, juga disektor-sektor yang lain, baik fotografi, design dan editing. Untuk itu tantangannya ialah upaya menyiapkan masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dari industri kreatif itu sendiri.

Selain ketiga sektor tersebut, potensi lokal yang diprediksi mampu mengangkat perekonomian masyarakat ialah sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata saat ini mempunyai tantangan yang cukup berat. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh dampak covid-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Beberapa tantangan yang cukup strategis dalam pengembangan pariwisata antara lain:

- Kabupaten Tegal memiliki beragam potensi sumber daya alam dan keberagaman budaya yang dapat dijadikan sebagai wahana kepariwisataan. Pengembangan pariwisata yang kekinian tidak lagi hanya mengandalkan indahnya bentang alam, tetapi juga dengan memadukan potensi-potensi sektor lainnya, seperti mengembangan potensi wisata industri, wisata pendidikan, wisata kesehatan, dan wisata kebudayaan serta dikaitkan dengan potensi-potensi lain yang dapat dinilai sebagai sebuah keunikan untuk menjadi daya tarik wisata, baik wisatawan lokal maupun manca negara. Oleh karena itu tantangannya ialah bagaimana membangun pariwisata yang terintegrasi atau terkolaborasi dengan sektor lainnya khususnya terkait pelestarian budaya lokal untuk menjadi atraksi baru.
- Kabupaten Tegal yang berlokasi pada simpul persinggahan mobilitas antar daerah yang ditunjang akses jalan tol trans Jawa dan dengan kondisi topografi yang heterogen, serta memiliki karakteristik budaya lokal yang unik, tentunya memiliki banyak potensi wisata yang layak dikembangkan. Dampak positif bagi pariwisata Kabupaten Tegal dengan terbukanya akses jalan tol ruas pantai utara Jawa, perlu diantisipasi dengan perbaikan infrastruktur menuju lokasi wisata;
- Dalam kondisi pandemi *covid-19* seperti ini, mobilitas masyarakat sangat dibatasi, hal ini berpengaruh pada penurunan jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu meskipun destinasi-obyek wisata bisa dibuka, namun syarat-syarat protokol kesehatan harus dijalankan secara ketat. Untuk itu tantangan agar pelaku usaha pariwisata dapat menerapkan protokol kesehatan sesuai standard menjadi suatu hal yang wajib diwujudkan.
- Untuk mengantisipasi geliat sektor pariwisata yang masih minim, maka pelaku usaha pariwisata perlu difasilitasi agar dapat melakukan diversifikasi usaha lain minimal sampai pandemi berakhir.

Dalam masa pasca krisis covid-19, dimana era digital makin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi ini semua dipaksa untuk memahami digital lebih cepat. Untuk itu perlu kolaborasi antara pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya serta kearifan lokal yang saling mendukung. Penjualan paket wisata online yang didalamnya terdapat banyak menu-menu jasa tambahan yang bisa dipilih calon pengunjung seperti jasa fotografi, jasa tour guide dan lain sebagainya.

Selain dapat dikolaborasikan, budaya dan kearifan lokal juga dapat berfungsi sebagai benteng identitas lokal Kabupaten Tegal. Era globaliasi memungkinkan masuknya budaya luar secara bebas. Masuknya budaya luar tanpa adanya filter yang kuat, maka dapat merusak bahkan mengganti budaya atau kearifan lokal yang ada di Kabupaten Tegal. Untuk itu tantangan budaya kedepan ialah bagaimana menguatkan kearifan local agar dapat berfungsi untuk:

- membentengi dari pengaruh dalam budaya luar yang tidak sesuai dengan adat ketimuran;
- menyerap dan memfilter budaya asing;
- memberikan arah pada pengembangan budaya.

d. Pemerataan infrastruktur dasar dan Penyehatan Lingkungan Hidup

Berbagai aktifitas sosial-ekonomi dapat berjalan lancer jika didukung oleh infrastruktur yang memadai khususnya infrastruktur transportasi, air bersih, persampahan, sanitasi dan energi. Kondisi saat ini, infastruktur jalan yang memadai jumlahnya masih sangat terbatas atau baru mencapai sekitar 68,01 % dari total 958,32 km. Oleh karena itu pemerintah desa dengan segala sumber dayanya harus mampu mengambil peran dalam upaya peningkatan kualitas jalan tersebut sesuai kewenangannya. Selain itu terdapat Kegiatan Strategis Nasional yang berlokasi di Kabupaten Tegal antara lain pembangunan infrastruktur jalan Tol Trans Jawa, program Pengembangan wilayah yang tertuang dalam Perpres 79 Tahun 2019, dan pembangunan jalur ganda kereta api.

Pemenuhan layanan air bersih yang merata masih menjadi tantangan Pemerintah Kabupaten Tegal. Untuk itu kualitas pengelolaannya masih butuh akselerasi. Pengelolaan air bersih saat ini untuk perpipaan terbagi menjadi 2 (dua) pengelolaan SPAM PDAM untuk wilayah perkotaan dan SPAM Pamsimas untuk wilayah perdesaan. Wilayah perkotaan sebagian besar sudah terlayani oleh SPAM PDAM, namun saat ini menghadapi kendala yaitu terbatasnya sumber air baku dimana *iddle capacity* SPAM PDAM tersisa tidak lebih dari 50 Liter/Detik. Sedangkan untuk SPAM PAMSIMAS saat ini baru ada di 120 desa yang tentu saja masih dibutuhkan perluasan jaringan pemenuhan air bersih.

Dalam perspektif infrastruktur yang lebih luas, Kabupaten Tegal mempunyai tantangan yang cukup berat dalam hal penataan kota. Hingga kini, perkembangan perkotaan Kabupaten Tegal cenderung *sporadic* (*leap frog*) dan belum mempunyai bentuk yang jelas. Bisa dikatakan belum memiliki ikon perkotaan layaknya kota-kota yang terdesign dengan jelas. Untuk itu penataan kota menjadi isu yang cukup strategis kedepan, minimal Kabupaten Tegal memiliki icon perkotaan melalui penataan wajah kota slawi.

Untuk mendukung penataan kota yang representatif, pengelolaan sampah dan sanitasi wilayah harus berkualitas. Penanganan sampah meliputi penanganan persampahan rumah tangga baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Pelayanan persampahan di perkotaan hanya mampu melayani untuk kawasan komersial, perkantoran, perumahan, taman dan jalan. Sedangkan di wilayah perdesaan 100% masih dikelola mandiri oleh masyarakat. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan sampah antara lain: manajemen pengelolaan sampah yang belum baik dari hulu ke hilir (waste management), keterbatasan alat angkut, keterbatasan alat pengolahan/pemrosesan sampah pada TPA, serta terbatasnya lahan TPA Penujah. Sedangkan dalam penanganan limbah tinja, permasalahan yang dihadapi saat ini adalah idlle capacity IPLT Penujah sudah mencapai 0%, perlu dilakukan upaya revitalisasi IPLT Penujah. Cakupan lavanan snitasi saat ini untuk *on site system* sebesar 65% dari total penduduk Kabupaten Tegal, vaitu terdiri atas sistem on site individual (tangki septik) mencakup 63,85% dan sistem on site komunal (MCK, MCK++) mencakup 1,15%. Sedangkan cakupan layanan off site system di Kabupaten Tegal saat ini belum ada. Untuk itu sanitasi juga masih menjadi tantangan dalam penataan perkotaan. Sanitasi secara umum juga berkaitan dengan permukiman kumuh. Cakupan pelayanan permukiman kumuh masih sangat rendah. Untuk itu upaya penyediaan lingkungan sehat bagi masyarakat khususnya perkotaan perlu difokuskan pada penyediaan RTLH dan sanitasi sehat terutama jamban.

Dalam hal konsep pengembangan wilayah, berdasarkan tingkat pelayanan dan pusat kegiatan, Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 4 wilayah: 1) Kecamatan Slawi, Adiwerna, dan Kramat yang merupakan wilayah yang mempunyai sarana dan prasarana memadai; 2) Pangkah, Talang, Tarub, Margasari, Dukuhturi, Dukuhwaru, dan Balapulang yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan industri seperti di Kecamatan Pangkah yang terdapat pasar sebanyak 3 buah dan di Kecamatan Talang dengan sentra industrinya; 3) Kecamatan Lebaksiu, Suradadi, Bumijawa, Warureja, Bojong, Jatinegara yang memiliki kegiatan perekonomian yang cukup beragam dan potensi pertanian yang cukup bagus; dan 4) Kecamatan Pagerbarang dan Kedungbanteng dimana perkembangan keduanya masih tergolong lamban. Untuk itu tantangan dalam pengembangan wilayah secara umum adalah bagaimana menyejajarkan perkembangan wilayah di Kecamatan Pagerbarang dan Kedung Banteng agar sejajar dengan kecamatan lainnya. Dalam pelaksanaan pembangunan secara merata, ada kendala yang dirasa cukup menganggu. Hal tersebut berkaitan dengan pembagian kewenangan dalam pengembangan infrastruktur wilayah antara Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Desa. Untuk itu perlu ada sikronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pembangunan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Kesehatan lingkungan hidup menjadi faktor utama yang mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Lingkungan sehat tidak hanya berkaitan erat dengan derajat kesehatan masyarakat namun juga mempengaruhi ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Kondisi saat ini manfaat lingkungan hidup dan manfaat ekonomi cenderung saling *mengeliminasi*. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya maka fungsi lingkungan hidup selalu dikorbankan.

Sebagai wilayah yang dominasi perekonomian berada pada sektor industri pengolahan dan pertanian, potensi ancaman degradasi lingkungan hidup di Kabupaten Tegal sudah mulai nyata. Limbah industri yang *toksic* yang tidak tertangani dapat memperburuk kondisi lingkungan sekitar atau bisa menimbulkan kerusakan pada ekosistem lingkungan yang lain bahkan menimbulkan penyakit pada mahluk hidup yang terpapar.

Selain pencemaran air, isu penurunan kesehatan lingkungan hidup di Kabupaten Tegal juga dipengaruhi oleh pencemaran udara yang cukup *massive*. Aktifitas pencemaran udara yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah turunnya kualitas udara akibat pengolahan batu gamping atau kapur di Desa Karangdawa, Kecamatan Margasari. Aktifitas pembakaran dan debu ukuran mikro dalam pengolahan batu gamping banyak berterbangan di udara yang dapat menyebabkan penyakit ISPA.

Dari beberapa masalah kesehatan lingkungan diatas, jika tidak ditangani dan diantisipasi kedepan, maka skala kerusakan lingkungan dan dampak yang ditimbulkannya akan semakin luas. Oleh karena itu tantangan pembangunan kedepan adalah bagaimana meningkatkan pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan kesehatan lingkungan hidup.

e. Tata Kelola Pemerintahan dan Kualitas Pelayanan Publik, Penguatan Kelitbangan dan Teknlogi Informasi

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu misi pembangunan jangka panjang Kabupaten Tegal. Dengan isu strategis tata kelola pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Tegal bertekad untuk mengembangkan etika birokrasi dan budaya kerja menuju birokrasi yang bersih, yaitu birokrasi yang jauh dari perilaku koruptif, birokrasi yang efisien dan hemat dalam menggunakan sumber daya yang terbatas, birokrasi yang transparan dan birokrasi yang melayani.

Dalam situasi pandemi covid-19 saat ini, pemerintah dihadapkan pada suatu dilema yang cukup menghambat. Di saat prinsip kehati-hatian untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kualitas layanan publik harus tetap dijaga, perubahans sistem kerja ASN diera new normal sangat dinamis. Jika terdapat kasus covid-19 terkonfirmasi di lingkungan kerja ASN, maka dalam seketika sistem kerja berubah dari "work in office" menjadi "work from home". Kondisi ini menuntut *mindset* budaya kerja yang masih menitikberatkan pada hierarki pangkat dan jabatan harus mulai diubah. Dalam keadaan yang normal, dimana seluruh situasi dan kondisi dapat berjalan tanpa hambatan, pelaksanaan program kerja berdasarkan hierarki ini masih dapat diterima, akan tetapi dalam situasi pandemi ini, maka pegawai dari semua eselon wajib berani mengambil inisiatif sebagai konsekuensi berkurangnya intensitas bertemu secara langsung di lapangan atau ruangan kerja di kantor. Setiap pegawai dituntut untuk berpikir sebagai manajer, ikut memikirkan bagaimana sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Alih-alih mempertahankan tingkat kepangkatan atau strata kelembagaan, sebaiknya tata kerja dikembangkan berbasis jejaring atau kerjasama antar instansi dan pejabat. Ada beberapa tantangan terkait pemerintahan di era new normal antara lain:

- Dalam pola pikir yang baru, semua pegawai harus mulai mengembangkan kecakapan berpikir lateral dan keberanian membuat eksperimen dengan tolok ukur resiko dan manfaat yang jelas;
- Mendorong mindset lama ke mindset baru bagi ASN;
- Mendukung kesiapan ASN dalam membangun budaya berteknologi; dan
- Dalam keadaan dimana kondisi moneter dunia saat ini sedang berada dalam ancaman resesi, maka perlu dilakukan sejumlah langkah pengamanan, khususnya terhadap neraca anggaran pemerintah daerah. Secara teknis, hal tersebut dapat berupa pembatasan kegiatan yang berbiaya besar, pengurangan pos-pos yang semula bersifat melibatkan pengumpulan massa, dan sebagainya;
- Mendorong semangat kepemimpinan yang berbudaya.

Secara keseluruhan masih banyak permasalahan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Tegal. Setidaknya terdapat delapan aspek yang perlu dibenahi yaitu aspek manajemen perubahan; aspek peraturan perundangundangan; aspek kelembagaan; aspek ketatalaksanaan; aspek sumber daya aparatur; aspek pengawasan; aspek akuntabilitas kinerja dan aspek pelayanan publik. Dalam hal ketatalaksanaan, *e-goverment* sebagai sarana untuk mendukung kinerja organisasi belumlah diterapkan secara optimal.

Dari fungsi pemerintahan, Pemerintah juga harus menjamin keamanan dan kenyamanan hidup masyarakatnya. Keamanan dan kenyamanan tersebut

terutama berkaitan dengan bencana alam dan sosial. Sebagai daerah yang berada pada jalur rawan bencana, Kabupaten Tegal perlu melakukan upaya-upaya antisipatif dalam kesiapsiagaan bencana (mitigasi) di samping kesiapan penanggulangan kedaruratan bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana. Dalam peta rawan bencana Kabupaten Tegal dapat digambarkan sebagai wilayah rawan bencana banjir di kawasan Pantura (Suradadi, Warureja, Kramat), rawan bencana kekeringan (Suradadi, Warureja, Kedungbanteng), rawan bencana kebakaran lahan (Pagerbarang, Balapulang, Lebaksiu), rawan bencana puting beliung (Kedungbanteng, Tarub), serta rawan bencana tanah bergerak dan tanah longsor (Pangkah, Bojong, Bumijawa). Sebagai bentuk kesiap-siagaan menghadapi bencana, tantangan kebencanaan kedepan ialah bagaimana menciptakan Desa Tangguh Bencana dan penyediaan *early warning system* cuaca dan iklim.

Selain bencana alam, isu bencana sosial juga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kondisi saat ini, baik internasional, nasional, hingga lokal, stabilitas dan keamanan wilayah banyak dirusak melalui penyebaran berita hoax yang dapat memunculkan gesekan di masyarakat. Kondisi masyarakat yang sedang tertekan secara ekonomi semakin mempermudah mereka mempercayai informasi tanpa diperiksa dahulu kebenarannya. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka pelaksanaan pembangunan yang sudah sangat berat akibat pandemi covid-19 ini akan semakin sulit mencapai tujuannya.

Saat tersebut mempunyai dampak yang luas pada kehidupan masyarakat Kabupaten Tegal. Perubahan itu termasuk perubahan budaya, perubahan cara kerja dan perubahan berpemerintahan (era *new normal*). Selain itu, sebagaimana RPJPD tahap IV yang menekankan pada **Akselerasi Proses Inovasi**. Untuk menjawab tantangan tersebut maka maka optimalisasi kelitbangan dan difusi teknologi informasi mempunyai peranan penting.

Aktifitas kelitbangan harus mampu memberikanan nilai tambah inovasi pada tiap aktifitas pembangunan daerah terutama yang berkaitan dengan pencapaian tujuan sasaran pembangunan khususnya berkaitan dengan pemulihan ekonomi lokal. Akselerasi inovasi dan perubahan tersebut dapat diantisipasi melalui serangkaian proses kelitbangan yang relevan yang menghasilkan produk-produk baru, proses baru, dan jasa baru, yang kemudian akhirnya dapat dijadikan strategi utama dalam merespon perubahan dan tantangan yang ada. Oleh karena itu hasil kelitbang bisa memiliki dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Beberapa kebijakan dapat dirumuskan diimplementasikan pemerintah Kabupaten dan oleh Tegal dengan mendasarkan hasil kelitbangan. Selain itu berbagai kebijakan pemerintah jug adapat dievaluasi melalui aktifitas kelitbangan, sehinnga kebijakan-kebijakan yang kurang relevan saat ini bisa digantikan dengan kebijakan yang lebih relevan dan efektif.

Namun tantangan kelitbangan saat ini di Kabupaten ialah kita belum memiliki SDM Kelitbangan yang mumpuni, sementara tantangan kelitbangan kedepan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan kedepan ialah dengan melakukan kerjasama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada.

Perananan teknologi informasi dalam menjawab tantangan revolusi industri 4.0 dan pandemi covid-19 ialah bisa menjadi katalis sekaligus akselerator. Difusi teknologi informasi harus masuk di berbagai aktifitas sosial ekonomi dan pemerintahan. Adanya difusi tersebut menjadi satu prasyarat utama Kabupaten Tegal bisa melaju ke arah *smart city*. Adapun smart city terdiri dari 6 (enam) pilar yaitu *Smart Governance, Smart People, Smart Living, Smart Mobility, Smart Economy, dan Smart Environment*. Namun dengan melihat kondisi saat ini maka tantangan TI untuk menuju *smart city* yang paling relevan ialah untuk pengembangan dan penguatan *Smart Economy* dan *Smart Governance*.